



LAPORAN TAHUNAN

2022

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA

TENTANG LAPORAN TAHUNAN PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA

Penyusunan Laporan Tahunan 2022 PT Pertamina Pedeve Indonesia merupakan aktivitas rutin Perseroan dalam upaya menjalankan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG)

Sangkalan dan Batasan Tanggung jawab

Laporan Tahunan PT Pertamina Pedeve Indonesia atau disebut “Pedeve” atau “Perusahaan” atau “Perseroan” disusun berdasarkan dokumen dan narasumber yang terpercaya dan disajikan dalam bentuk informasi dan data yang bersifat material terhadap pihak yang berkepentingan. Laporan Tahunan ini memuat pernyataan-pernyataan atas kondisi Perusahaan yang bersumber dari kinerja yang dicapai oleh Perusahaan. Selain informasi-informasi historis, Laporan ini juga menyajikan pandangan Perusahaan terhadap apa yang dianggap sebagai pandangan masa depan (*forward looking statement*) yang merupakan proyeksi atau prospek, dalam halmana proyeksi atau prospek yang disampaikan pada akhirnya dapat berbeda dengan kenyataan karena setiap informasi yang disampaikan dapat mengandung unsur risiko ketidakpastian.

Pernyataan-pernyataan dalam Laporan ini merupakan hasil evaluasi atas kondisi sosial, ekonomi maupun politik baik bersifat nasional maupun regional. Dengan adanya risiko ketidakpastian tersebut, Perusahaan tidak menjamin bahwa pandangan masa depan dalam Laporan ini akan tepat dan akurat secara keseluruhannya.

Referensi dan Periode Pelaporan

Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 Perusahaan disusun dengan merujuk kepada Undang- Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kriteria Annual Report Award dan Kriteria Annual Report Pertamina Subsidiary Award. Periode Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 ini meliputi periode 1 Januari 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penyebutan satuan mata uang “Rupiah” atau Rp atau “IDR” merujuk pada mata uang resmi Indonesia, sedangkan “Dollar AS atau US\$” merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Kecuali jika disebutkan lain, semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Penetapan Topik Material

Laporan Tahunan ini memuat informasi mengenai kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perseroan. Informasi lain yang merupakan bagian dari kinerja keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan, sesuai indikator maupun topik dalam pelaporan ini.

Proses penyusunan Laporan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dan melalui tahapan berjenjang. Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan ini terdiri dari keterlibatan pemangku kepentingan, materialitas, kelengkapan dan kejelasan, sedangkan untuk tahapan Penyusunan Laporan ini meliputi: Identifikasi topik-topik terpilih, Prioritas atas topik-topik terpilih, validasi atas topik prioritas dan kajian ulang atas laporan tahun sebelumnya. Adapun topik material dalam laporan ini yaitu: “Bergerak maju dengan sinergi yang optimal”.

Laporan Tahunan ini memuat kata “Pedeve” atau “Perseroan” atau “Perusahaan” yang didefinisikan sebagai PT Pertamina Pedeve Indonesia yang menjalankan bisnis di bidang Perdagangan Pada Umumnya.

DAFTAR ISI

TENTANG LAPORAN TAHUNAN 2022	1		
Sangkalan Dan Batasan Tanggung Jawab	1	Kemampuan Membayar Hutang	65
Referensi Dan Periode Pelaporan	1	Tingkat Kolektibilitas Piutang	66
Penetapan Topik Material	1	Struktur Modal	67
		Investasi Barang Modal Yang Direalisasikan Pada Tahun Buku	68
DAFTAR ISI	2	Prospek Usaha Perseroan	69
		Perbandingan Antara Target/Proyeksi Dengan Realisasi	70
KILAS KINERJA TAHUN 2022	3	Informasi Dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan	73
Ikhtisar Utama	4	Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan	73
Ikhtisar Data Keuangan Penting	5	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan	74
Ikhtisar Data Kinerja Operasional	8	Perubahan Peraturan Akuntansi Yang Diterapkan Perusahaan Pada Tahun Buku Terakhir	75
Ikhtisar Kinerja Kesehatan Perusahaan	10	Teknologi Informasi	76
Informasi Harga Saham	11		
Informasi Obligasi, Sukuk Atau Obligasi Konvertibel	11	TATA KELOLA PERUSAHAAN	77
Ikhtisar Dividen	12	Kebijakan Dan Pedoman GCG	
		Aessment GCG	81
LAPORAN MANAJEMEN	13	Struktur Tata Kelola Perusahaan	83
Laporan Dewan Komisaris	14	Rapat Umum Pemegang Saham	84
Laporan Direksi	19	Dewan Komisaris	86
Telaahan Dewan Komisaris	22	Direksi	95
Pernyataan Pertanggungjawaban Anggota Dewan Komisaris Dan Anggota Direksi	23	Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi	101
Identitas Perusahaan	24	Sekretaris Dewan Komisaris	104
		Komite Audit	105
PROFIL PERUSAHAAN	25	Sekretaris Perseroan	106
Sekilas Pedeve	26	Unit Audit Internal	108
Kegiatan Usaha	28	Akuntan Publik	111
Visi, Misi & Tata Nilai	30	Sistem Manajemen Risiko	112
Struktur Organisasi Perusahaan	31	Sistem Pengendalian Internal	115
Peristiwa Penting	32	Kode Etik Dan Pakta Integritas	116
Profil Dewan Komisaris	33	Whistleblowing System	120
Profil Komite Dibawah Dewan Komisaris	34	Akses Informasi Dan Data Perusahaan	122
Profil Direksi	35	Pengadaan Barang Dan Jasa	122
Pejabat Eksekutif Perusahaan	36	Permasalahan Hukum Dan Lainnya	123
Komposisi Pemegang Saham	39		
Struktur Grup Perusahaan	40	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	
Sumber Daya Manusia	41	(Corporate Social Responsibility/ "CSR")	133
Wilayah Operasi Perusahaan	47	Komitmen Dan Kebijakan Umum	133
Lembaga Dan Profesi Penunjang	48	Anggaran Dan Sumber Pendanaan CSR	133
Nama Dan Alamat Entitas Afiliasi	49	Realisasi CSR	133
Website Perusahaan	54		
		LAPORAN KEUANGAN AUDITED	139
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	55		
Tinjauan Umum	56		
Prospek Perekonomian	57		
Uraian Atas Kinerja Keuangan Perusahaan	59		
Sinergi Pertamina Group	64		



KILAS KINERJA TAHUN 2022

IKHTISAR UTAMA



Going Concern Perusahaan

- Peningkatan kontribusi kepada grup melalui kepesertaan aktif pada Program *Notional Polling*
- Penambahan penyertaan modal pada Anak Perusahaan Pertamina



Financial

Pendapatan

Rp155,82 Miliar

Laba setelah Pajak

Rp141,98 Miliar

Laba per Saham

Rp811.321

EBITDA

Rp146,49 Miliar



HSSE



Jam Kerja Selamat

20.064 jam



Number of Accident

0



Total Recorable Incident Rate (TRIR)

0



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Skala Organisasi

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pegawai Tetap Perseroan	Orang	4	4	5	6	7
2	Pendapatan *	Rp Juta	115.940	160.741	197.669	341.294	155.821
3	Laba Bersih	Rp Juta	78.091	121.243	111.600	295.152	141.981
4	Total Aset	Rp Juta	899.248	871.801	3.796.529	3.198.174	3.919.284
5	Total Kewajiban	Rp Juta	57.840	26.293	617.481	489.061	753.350
6	Total Ekuitas	Rp Juta	841.408	845.508	3.179.048	2.709.113	3.165.934

Tabel Ikhtisar Laba Rugi Komprehensif (Rp Juta)

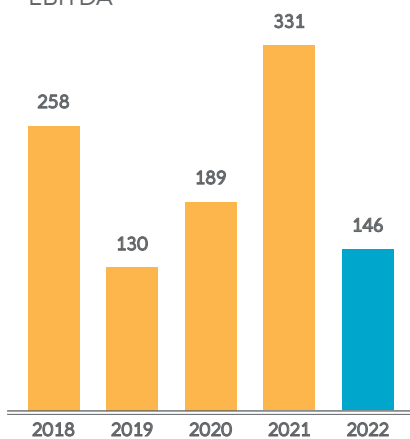
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan *	115.940	160.741	197.669	341.294	155.821
Beban Pokok Pendapatan	-	-	-	-	-
Laba Kotor	115.940	160.741	197.669	341.294	155.821
Beban Operasional	(20.390)	(10.631)	(8.936)	(10.960)	(12.951)
Laba Usaha	95.550	150.110	188.733	330.334	142.870
Pendapatan (Beban) Lain-lain	3.948	(1.641)	4.623	(2.488)	5.253
Beban Penurunan Nilai Piutang	(3.344)	(5.435)	(665)	-	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	96.154	143.034	192.691	327.846	148.123
Beban Pajak Final	(9.010)	(10.287)	(6.471)	(5.195)	(5.661)
Beban Pajak Penghasilan	(9.052)	(11.504)	(74.620)	(27.499)	(481)
Laba Setelah Pajak	78.091	121.243	111.600	295.152	141.981
Laba (Rugi) Komprehensif Lain	-	(6,5)	354.534	(675.807)	609.992
Laba komprehensif	78.091	121.236	466.134	(380.655)	751.973

Tabel Informasi Posisi Keuangan dalam Bentuk Perbandingan (Rp Juta)

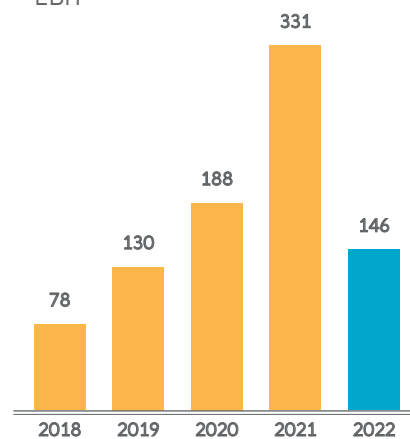
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
ASET					
Aset Lancar Lainnya	734.111	691.983	623.273	844.823	783.549
Penyertaan Saham	121.845	124.816	3.144.604	2.351.989	3.134.209
Aset Tidak Lancar Lainnya	43.292	55.002	28.652	1.362	1.525
Jumlah Aset	899.248	871.801	3.796.529	3.198.174	3.919.284
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek	57.458	25.437	38.404	26.764	118.631
Liabilitas Jangka Panjang	382	856	579.077	462.297	634.719
Jumlah Liabilitas	57.840	26.293	617.481	489.061	753.350
EKUITAS					
Jumlah Ekuitas	841.408	845.508	3.179.048	2.709.113	3.165.934

(Rp Milyar)

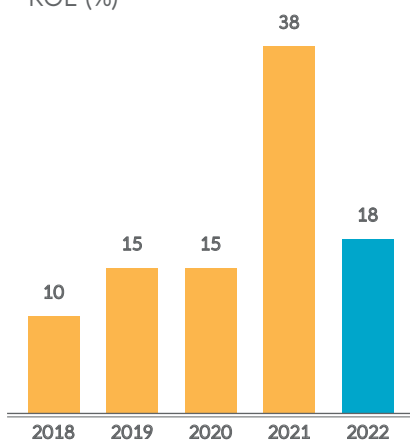
EBITDA



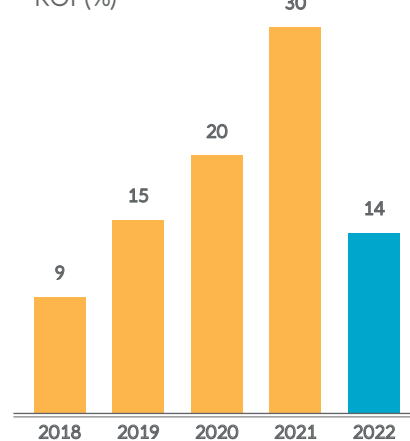
EBIT



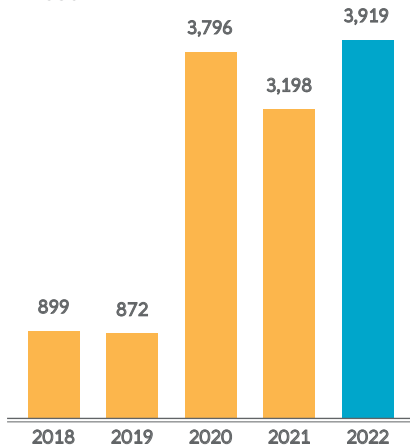
ROE (%)



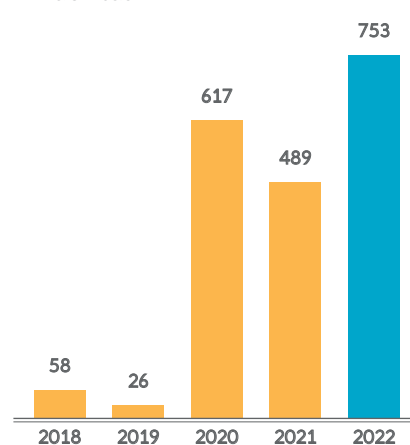
ROI (%)



Aset

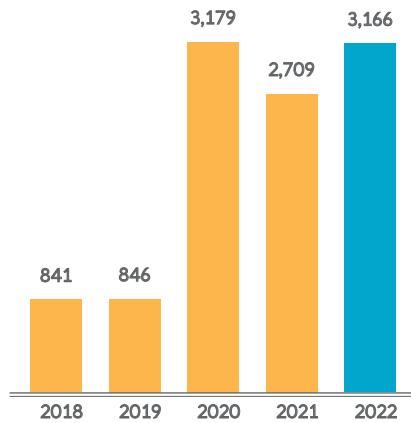


Liabilitas

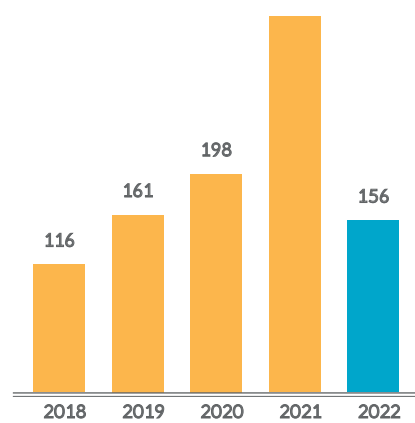


(Rp Milyar)

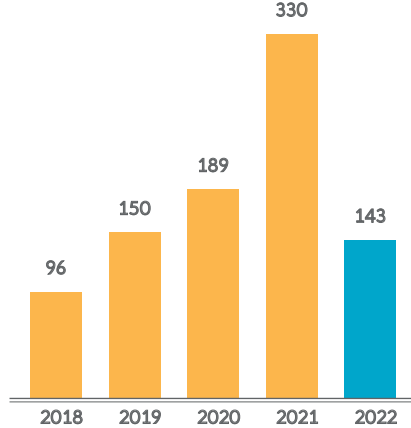
Ekuitas



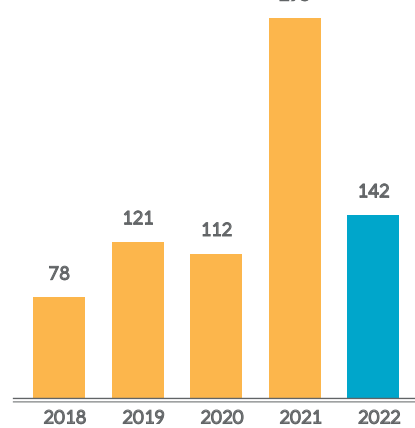
Pendapatan Usaha



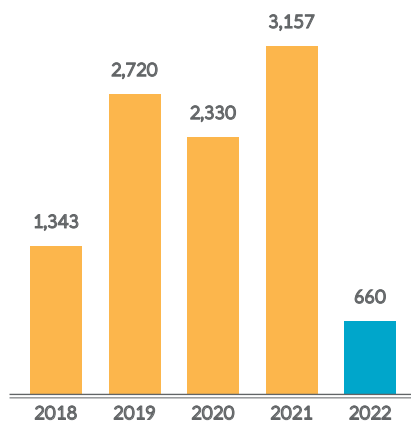
Laba Usaha



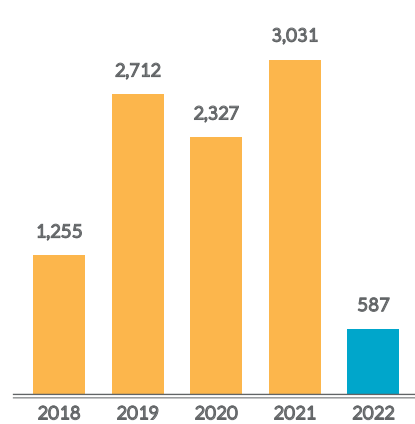
Laba Bersih



Rasio Lancar (%)



Rasio Kas (%)



IKHTISAR DATA KINERJA OPERASIONAL

PENYERTAAN SAHAM

Pada tahun 2022 tidak terdapat investasi untuk penyertaan saham baru.

Pada tahun 2022 terdapat Perubahan % kepemilikan saham di PT Tuban Petrochemical Industries (PT TUPI) sehubungan dengan perubahan anggaran dasar PT TUPI sehingga % kepemilikan saham sebesar 2,01 di tahun 2021 menjadi sebesar 1,51% di tahun 2022.

Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan Kapitalisasi laba Ditahan di PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) berdasarkan RUPS tanggal 30 Juni 2021 perihal Peningkatan Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor, Kapitalisasi Saldo Laba Ditahan dan Konversi Utang Menjadi Saham, serta Pengambilalihan Saham PT Pertamina Geothermal Energy yang salah satu butir keputusannya mengatur adanya penambahan Modal Disetor Perseroan pada PGE yang berasal dari kapitalisasi Laba Ditahan (*Retained Earning*) di PGE dan telah terealisasi di bulan Juli 2021 sebesar USD80.887.117 atau setara Rp1.169.789.000.000.

Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan Kapitalisasi laba Ditahan di PT Pertamina International Shipping (PIS) berdasarkan RUPS tanggal 17 Maret 2022 (yang diberlakukan tanggal 31 Desember 2012) perihal Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar yang salah satu butir keputusannya mengatur adanya penambahan Modal Disetor Perseroan pada PIS yang berasal dari kapitalisasi Laba Ditahan (*Retained Earning*) di PIS dan telah terealisasi di bulan Desember 2021 sebesar USD3.973 atau setara Rp58.000.000.

Pada tahun 2022 dan 2021 Perseroan melakukan valuasi saham untuk keperluan penyajian nilai penyertaan saham per 31 Desember 2022 dan 2021. Nilai wajar saham hasil valuasi saham pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 3.134.209.356.868 atau naik 2021 adalah sebesar Rp 2.351.989.458.643 atau naik sebesar Rp 782.219.898.225 dari tahun 2021. Rincian kepemilikan dan nilai penyertaan saham pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Kepemilikan			
		2021	2022		
		%	Nilai Wajar	%	Nilai Wajar
1	PT Pertamina Hulu Energi	0,0032	12.164.380.247	0,0032	10.184.587.036
2	PT Pertamina Hulu Energi Arun	0,003	1.764	0,003	1.764
3	PT Pertamina EP	0,01	6.196.386.520	0,01	6.219.539.272
4	PT Pertamina EP Cepu	1,00	475.877.915.471	1,00	546.468.573.314
5	PT Pertamina Drilling Service Indonesia	0,04	2.318.688.009	0,04	1.704.073.900
6	PT Pertamina Ep Cepu ADK	1,000	-	1,000	-
7	PT Pertamina Internasional EP	0,000002	1.017.083	0,000002	1.226.114
8	PT Pertamina Algeria EP	0,000007	92.591	0,000007	561.412
9	PT Pertamina Malaysia EP	0,000005	722.009	0,000005	776.498
10	PT Pertamina Irak EP	0,000024	1.131.711	0,000024	1.592.376
11	PT Pertamina Hulu Indonesia	0,07	12.966.666.667	0,07	13.793.192.121
12	PT Pertamina Hulu Attaka	1,00	397.620.169	1,00	437.395.191
13	PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga	1,00	88.500.559.881	1,00	93.340.869.484
14	PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	1,00	28.445.485.263	1,00	38.001.090.636
15	PT Pertamina Hulu West Ganai	1,00	149.291.343	1,00	16.772.424
16	PT Pertamina Hulu Rokan	0,13	47.940.515.735	0,13	58.742.590.180
17	PT Kilang Pertamina International	0,0015	2.210.209.974	0,0015	835.579.775
18	PT Kilang Pertamina Balikpapan	0,10	23.837.169.420	0,10	41.215.800.684
19	PT Tuban Petrochemical Industries	2,01	132.846.270.072	1,51	143.696.317.392

No.	Perusahaan	Kepemilikan			
		2021		2022	
		%	Nilai Wajar	%	Nilai Wajar
20	PT Pertamina Retail	0,0004	8.354.997	0,0004	9.343.766
21	PT Pertamina Lubricant	0,05	3.055.209.607	0,05	17.919.582.681
22	PT Patra Badak Arun Solusi	3,99	6.622.122.945	3,99	6.066.972.785
23	PT Pertamina Power Indonesia	0,0001	17.936.935	0,0001	12.541.347
24	PT Pertamina Geothermal Energi	7,9806	1.393.105.501.386	7,9806	2.031.699.240.000
25	PT Pertamina Gas	0,01	4.064.840.237	0,01	3.211.848.705
26	PT Pertamina International Shipping	0,003	1.405.086.964	0,003	1.080.702.669
27	PT Pertamina Trans Kontinental	0,000904049	31.031.591	0,000904049	32.516.836,86
28	PT Patra Jasa	0,001	56.603.640	0,001	12.575.225
29	PT Mitra Tours & Travel	3,50	3.093.948.898	3,50	2.850.494.307
30	PT Pelita Air Service	0,00314	95.789.098	0,00314	124.159.810
31	PT Pertamina Bina Medika	0,01	1.631.915.855	0,01	1.111.265.864
32	PT Pertamina Training & Consulting	9,00	53.304.628.443	9,00	60.851.835.261
33	PT Pertamina East Natuna	0,10	1.250.000	0,10	1.250.000
34	PT Badak Natural Gas Liquefact	15,00	4.287.927.508	15,00	10.299.014.552
35	PT Trans Javagas Pipeline	10,00	34.352.686.614	10,00	44.265.473.485
JUMLAH			2.351.989.458.643		3.134.209.356.866

TINGKAT KESEHATAN

INDIKATOR	2020		2021		2022	
	RKAP	Audited	RKAP	Audited	RKAP	Audited
KEUANGAN	65,00	65,00	63,00	65,00	58,00	65,00
PERTUMBUHAN	-	6,00	10,00	10,00	0,50	2,00
OPERASIONAL	8,76	8,14	8,76	8,76	8,76	8,76
ADMINISTRASI	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
JUMLAH	83,76	89,14	91,76	93,76	77,26	85,76
KRITERIA	Sehat (AA)	Sehat (AA)	Sehat (AA)	Sehat (AA)	Sehat (A)	Sehat (AA)

INDIKATOR	2017		2018		2019	
	RKAP	Audited	RKAP	Audited	RKAP	Audited
KEUANGAN	32,27	41,56	50,86	57,42	64,00	65,00
PERTUMBUHAN	8,00	6,00	12,00	12,00	4,00	9,50
OPERASIONAL					8,76	8,14
ADMINISTRASI	10,00	9,92	10,00	10,00	10,00	10,00
JUMLAH	50,27	57,48	72,86	79,42	86,76	92,64
KRITERIA	Kurang Sehat (BBB)	Kurang Sehat (BBB)	Sehat (A)	Sehat (A)	Sehat (AA)	Sehat (AA)

KEY PERFORMANCE INDICATOR

Perspektif	Item	Satuan	Bobot	Target	Realisasi	Pencapaian	Bobot
Financial (35%)	1 Laba Bersih	Rp Milyar	20%	107.65	141.98	110.00	22.00
	2 EBITDA	Rp Milyar	7%	145.13	146.49	100.94	7.07
	3 Overhead Cost to EBITDA	%	8%	4.13	3.26	110.00	8.80
Customer Focus (20%)	1 Stakeholder Satisfaction Index	Skala Likert	20%	4.10	4.69	110.00	22.00
Internal Process (25%)	1 Kegiatan Terkait Greenshoe (IPO PGE)	Progress (%)	8%	100	110	110.00	8.80
	2 Service Level Agreement (SLA) RUPS (RUPS Sirkuler)	Hari	6%	2	1	110.00	6.60
	3 Ketepatan Waktu & Akurasi Data Operasi Keuangan	%	6%	100	100	110.00	6.60
	4 Gugatan Kepada PT Yekapepe Intigraha	Progress (%)	5%	100	110	110.00	5.50
Learning & Growth (20%)	1 Aksi Korporasi Sebagai Pemegang Saham	Hari	4%	2	2	100.00	4.00
	2 Realisasi ABI	%	2%	85-100	100	100.00	2.00
	3 Penyusunan SOP	Jumlah	8%	5	7	110.00	8.80
	4 Enhancement System Monitoring Kinerja Keuangan Investee	Tanggal	6%	31 Agt. 2022	31 Agt 2022	100.00	6.00
100%							108.17
Boundary KPI	1 Number of Accident (NoA)	#	0	0	3	0.00	-3.00
	2 Pencapaian Sinergi Grup Pertamina	%	0	2-10	15	115.00	2.00
	3 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal & Eksternal	%	0	100	100	100.00	0.00
							107.17

INFORMASI HARGA SAHAM

PT Pertamina Pedeve Indonesia merupakan Perseroan Terbatas tertutup, dan sampai dengan akhir tahun 2022 tidak melakukan perdagangan saham, dengan demikian Laporan ini tidak menyajikan informasi mengenai jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERTIBEL

Hingga akhir tahun 2022, PT Pertamina Pedeve Indonesia tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi, dengan demikian Laporan ini tidak menyajikan informasi terkait jumlah obligasi, sukuk dan obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi atau sukuk.



IKHTISAR DIVIDEN

Besaran dividen ditentukan dalam RUPS. Berdasarkan keputusan RUPS dalam Akta No 25 tanggal 22 Juli 2022 tentang Penggunaan Laba bersih Tahun Buku 2021, Pemegang Saham memutuskan menetapkan dividen sebesar Rp 295.151.992.000,- (100% dari laba bersih tahun buku 2021).

Berikut adalah perkembangan pembagian dividen kepada Pemegang Saham dalam 5 tahun terakhir:

KETERANGAN	2018	2019	2020	2021	2022
Dasar Hukum	Akta No. 3 tanggal 06 Juni 2018, Notaris Marianne V. Hamdani	Akta No. 53 tanggal 24 Mei 2019, Notaris Marianne V. Hamdani	Akta No. 76 tanggal 22 Juli 2020, Notaris Marianne V. Hamdani	Akta No. 10 tanggal 23 Juli 2021, Notaris Marianne V. Hamdani	Akta No. 25 tanggal 22 Juli 2022 Notaris Marianne V. Hamdani
Laba Bersih	Rp42.824.837.000	Rp78.091.372.000	Rp121.242.930.691	Rp111.600.094.000	Rp295.151.992.000
Dividen Declare	Rp42.824.837.000	Rp117.137.057.000	Rp 84.870.051.535	Rp89.280.075.000	Rp295.151.992.000
Dividen Payout Ratio (dalam %)	100%	150%	70%	80%	100%



LAPORAN MANAJEMEN

LAPORAN DEWAN KOMISARIS



Rahmi Amini
Direktur



Fugnida
Komisaris

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga PT Pertamina Pedeve Indonesia dapat melalui Tahun 2022 dengan baik. Secara Umum tahun 2022 terkait isu pandemi Covid 19 sudah tidak lagi menjadi isu utama, Perseroan fokus pada pengembangan bisnis dalam era *new normal*. Perusahaan melakukan pencapaian yang menggembirakan dengan melebihi target yang dicanangkan dalam RKAP maupun kesepakatan kinerja.



Kondisi Perekonomian Makro

Pemerintah Republik Indonesia ditahun 2022 mencanangkan akselerasi pemulihan ekonomi terutamanya didorong oleh pandemi yang lebih terkendali dan cakupan vaksinasi yang jauh lebih tinggi sehingga mendorong kepercayaan diri masyarakat dan pulihnya aktivitas ekonomi. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif, terukur dan efektif, efektivitas implementasi agenda reformasi struktural, baik implementasi UU Cipta Kerja dan UU perpajakan, upaya menjaga stabilitas harga-harga, utamanya pangan dan energi, dan penciptaan lapangan kerja secara signifikan dan kesiapan bertransformasi digital serta berinovasi untuk masa depan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 dialokasikan sebesar Rp455,62 Trilyun, diarahkan untuk mendorong pemulihan di berbagai sektor dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Selain itu, PEN 2022 dirancang fleksible dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dan disederhanakan menjadi tiga kluster, yaitu Kluster Kesehatan, Kluster Perlindungan Sosial, dan Kluster Penguatan Pemulihan Ekonomi.

Bank Dunia dalam Laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2022 menyebutkan bahwa Perekonomian Indonesia mengalami percepatan sebesar 3,7 persen pada akhir tahun 2021 seiring keluarnya negara ini dari gelombang COVID Delta. Momentum ini dilanjutkan hingga awal tahun 2022 di angka 5 persen (yoy), bergerak maju menuju peningkatan konsumsi dan investasi. Akan tetapi, akibat situasi global yang semakin menantang, Indonesia mulai merasakan tekanan yang disebabkan oleh naiknya harga serta pengetatan keuangan eksternal. Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh di angka 5,1 persen pada tahun 2022 dan menjadi 5,3 persen pada tahun 2023 akibat dilepaskannya permintaan yang tertahan, kepercayaan konsumen yang meningkat, dan nilai tukar perdagangan yang lebih baik. Inflasi diproyeksikan meningkat menjadi 3,6 persen (rata-rata tahunan) seiring peningkatan permintaan dalam negeri dan harga-harga komoditas yang lebih tinggi.

Sebagai bagian dari entitas PT Pertamina (Persero), Perseroan sebagai Anak Perusahaan yang bergerak pada portfolio investasi dan merupakan pemegang saham pendamping di Pertamina grup akan mengalami dampak yang cukup signifikan ketika industry migas mengalami volatilitas yang berdampak pada laba yang dihasilkan serta akan mempengaruhi besaran dividen dari setiap entitas. Sebagaimana dikutip dari siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah

mengusulkan lifting minyak dan gas bumi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022 berkisar antara 1.717.000 hingga 1.829.000 barel setara minyak per hari (BOEPD), terdiri dari lifting minyak 686.000 hingga 726.000 barel per hari dan lifting gas bumi 1.031.000 hingga 1.103.000 BOEPD. Angka ini lebih tinggi dibanding lifting migas tahun 2021 yang dalam APBN ditetapkan sebesar 1.712.000 BOEPD.

Terkait penerimaan negara subsektor migas, terutama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA Migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengumumkan, penerimaan negara dari sektor hulu Migas tahun 2022 tercatat mencapai US\$18,19 miliar atau setara Rp270 triliun. Menurut Deputi Eksploitasi SKK Migas, capaian tersebut melampaui target yang dipasang pada 2022 yaitu sebesar US\$9,95 miliar. Hal ini dikatakan tak lepas dari capaian realisasi lifting minyak sebesar 612,3 MBOPD, dan juga realisasi lifting gas sebesar 5.347 MMSCFD.

Penilaian Atas Kinerja Direksi

Dewan Komisaris Perusahaan berperan aktif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan jalannya operasional Perusahaan. Pengawasan yang dilakukan antara lain dengan menyelenggarakan rapat rutin bulanan sepanjang tahun 2022 baik bertempat di kantor Perusahaan maupun secara daring. Dalam setiap rapat tersebut Dewan Komisaris dapat memonitor perkembangan pengelolaan Perseroan yang dipaparkan dan dijelaskan Direksi Perseroan terkait laporan keuangan bulanan / kinerja operasional dan tidak lanjut hasil keputusan rapat sebelumnya dan membahas hal lain yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan.

Pada akhir tahun buku Tahun 2022 terhadap laporan keuangan Perusahaan telah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik. Dimana hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan (member of TIAG) menyatakan opini bahwa Laporan Keuangan Perseroan "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material". Selain daripada itu, Perseroan telah menunjukkan pencapaian KPI sebesar 107,17% dengan tingkat kesehatan mencapai 85,76 termasuk dalam kategori "Sehat AA". Pencapaian-pencapaian tersebut merupakan wujud pengurusan Perseroan oleh Direksi Perseroan yang berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik namun tetap dengan hasil kinerja yang baik.

Terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Dewan

Komisaris menilai Direksi telah memastikan dipatuhinya aspek-aspek keselamatan kerja dan kesehatan kerja sebagaimana dibuktikan dari pencapaian nihil kejadian *Number of Accident* (NoA) maupun *Total Recordable Incident Rate* (TRIR) oleh Perusahaan. Selain daripada itu, aktivitas bisnis Perusahaan juga memperkecil kemungkinan terjadinya fatality.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah dibentuk satu Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit. Komite Audit berfungsi memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas laporan Direksi, khususnya laporan keuangan, menelaah independensi dan melakukan analisa efektifitas pengawasan internal perusahaan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Dan Pengawasan Dewan Komisaris

Tata Kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perusahaan telah dilakukan melalui sosialisasi dan internalisasi pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Implementasi dari prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan kewajaran telah dilaksanakan dengan baik tercermin dari tidak adanya Laporan *Whistle Blowing System* Perusahaan sepanjang tahun 2022. Dengan penerapana GCG yang baik diharapkan Perusahaan memiliki daya saing yang kuat. Meskipun dengan keterbatasan sumber daya manusia (personil) namun demikian, Dewan Komisaris memandang Direksi Perseroan telah melakukan upaya-upaya yang efektif dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG.

Pandangan Terhadap Prospek Usaha Ke Depan Perseroan

Tahun 2023 merupakan awal periode pemulihan ekonomi global sejak pandemi Covid 19 yang berkelanjutan, sebagaimana press rilis Kementerian Koordinator Perekonomian tertanggal 21 Desember 2022 menyebutkan bahwa terkait dengan perjalanan pemulihan ekonomi global yang menghadapi kondisi tidak mudah. Proyeksi ekonomi global terus dikoreksi ke bawah, sementara disrupsi rantai pasok menyebabkan kenaikan inflasi global tidak dapat dihindari. Bahkan, berbagai lembaga di dunia menaikkan probabilitas krisis ekonomi karena berbagai *downside risks* yang ada.

Pertamina dalam CNBC Economic Outlook 2023 menyatakan sebagai Perusahaan energi nasional mempunyai peran strategis untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan transisi energi. Pertamina berkomitmen menjaga aspek *accessibility, availability, acceptability* dan *sustainability* dalam

menjaga ketahanan energi dan transisi energi.

Sejalan dengan arah pembentukan Perseroan sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV) bisnis Perusahaan masih ditujukan untuk melakukan penyertaan saham di Pertamina grup dalam posisi sebagai pemegang saham pendamping. Untuk tahun 2023 Perseroan tidak dalam situasi melakukan perubahan arah bisnis hal ini tercermin dengan rencana kerja tahunan yang mengarah pada penguatan likuiditas agar dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi Pertamina grup antara lain melalui program *notional pooling* dan penyertaan saham pada entitas bentukan baru di lingkungan Pertamina grup. Skenario awal yang mengarahkan perubahan bisnis Perusahaan untuk masuk pada bisnis Energi Baru dan terbarukan (EBT) sepertinya tidak lagi menjadi prioritas, Perusahaan masih fokus pada support pada kemudahan likuiditas bagi entitas Pertamina grup.

Pandangan atas Kinerja Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki satu organ yang membantu tugas pengawasan yaitu Komite Audit. Komite dimaksud membantu Dewan Komisaris dalam melakukan analisa, evaluasi dan kajian untuk menyiapkan memorandum/surat Dewan Komisaris terkait dengan permintaan persetujuan, dukungan, saran/nasehat serta tanggapan dari Direksi.

Pada tahun 2022 tidak terjadi perubahan susunan anggota Komite Audit, masih dijabat oleh saudara Muhammad Ikhsan yang diangkat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan pada tanggal 1 Februari 2021. Komite Audit telah melakukan monitoring pelaksanaan audit laporan keuangan Perseroan, mengkaji independensi auditor independen, memonitor kinerja audit internal, mengevaluasi sistem pengendalian intern perusahaan dan aktif menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Komisaris. Komite Audit telah berkerja secara efektif dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas-tugas pokok dalam proses pengawasan terhadap pengurusan Perseroan.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2022 terdapat pengangkatan Komisaris Perseroan yang ditetapkan tanggal 5 Januari 2022 yaitu Ibu Gusnida yang merupakan pengganti Bapak Cornelius Simanjuntak mengakhiri masa jabatannya sebagai Komisaris Perseroan pada tanggal 26 November 2021.

Apresiasi

Akhir kata, Dewan Komisaris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemegang Saham, Mitra Kerja dan seluruh Pemangku Kepentingan atas dukungan dan kepercayaan kepada Perseroan selama tahun 2022.

Kami juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Direksi beserta seluruh karyawan Perseroan atas kinerja, semangat, loyalitas dan dedikasinya kepada Perseroan. Semoga di tahun-tahun mendatang semangat, loyalitas dan dedikasi dapat kita jaga dan tingkatkan guna meningkatkan kinerja Perusahaan.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris,

Periode 5 Januari 2022 s/d sekarang



Gusnida

LAPORAN DIREKSI

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, Perseroan dapat melalui tahun 2022 dengan kinerja yang baik. Pada tahun 2022, perkembangan kasus Covid-19 cukup baik dan terkendali. Pemerintah tetap waspada dan mengantisipasi potensi kenaikan kasus karena varian baru. Dalam kondisi tersebut, Perseroan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan hasil yang memuaskan. Kami menyadari bahwa pencapaian kinerja tersebut tidak lepas dari kontribusi terbaik serta dukungan semua pihak.

Kinerja Perseroan

Secara umum, kinerja keuangan Perseroan menunjukkan kinerja yang baik dan melampaui target kinerja keuangan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2022.

Pada tahun 2022, Perseroan berhasil membukukan Laba Bersih sebesar Rp142 miliar atau 131% dari target RKAP 2022 yang ditetapkan sebesar Rp108 miliar. *Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization* (EBITDA) tahun 2022 sebesar Rp146 miliar atau 100,38% dari target RKAP 2022. Sebagian besar sumber Pendapatan berasal dari dividen. Selain dividen, Perseroan memperoleh Pendapatan dari *cash management*, yaitu bagi hasil deposito dan *notional pooling*.

Kebijakan Strategis Perseroan

Pada tahun 2022 kebijakan strategis Perseroan secara garis besar masih ditujukan untuk memberikan kontribusi terbaik dalam menjalankan peran Perseroan sebagai *special purpose vehicle* terkait penyertaan modal di Pertamina Group dan dalam menjalankan tugas Perseroan untuk melakukan *cash management* yang optimal. Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat *corporate action* yang dilakukan PT Pertamina (Persero) maupun grup untuk membentuk entitas bisnis baru yang melibatkan Perseroan sebagai pemegang saham pendamping. Mengenai rencana Perseroan untuk menjadi *corporate venture capital* tidak dilaksanakan sejalan dengan Surat Edaran Menteri BUMN tentang Pedoman Investasi BUMN pada Perusahaan Rintisan (*Startup Company*) melalui Perusahaan Modal Ventura (*Corporate Venture Capital*), yang melarang pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan di lingkungan BUMN termasuk larangan membentuk unit bisnis ventura yang bergerak di bidang usaha rintisan (*startup*).

Cash management tahun 2022 dikelola dengan baik melalui penempatan dana dalam bentuk deposito dan *notional pooling*. *Notional pooling* merupakan bagian dari aktivitas sinergi yang memberikan manfaat bagi Pertamina Group dalam pemenuhan kebutuhan

working capital dan menjaga likuiditas.

Prospek Ke Depan Perseroan

Di tengah terpaan tantangan global dan pertumbuhan ekonomi negara-negara besar yang melambat, Indonesia dan ASEAN menjadi kawasan dengan pertumbuhan tertinggi dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan Indonesia disebut sebagai *the bright spot in the dark* di tengah ketidakpastian global.

Kondisi perekonomian Indonesia dinilai masih kuat menghadapi gejolak ekonomi global yang mengarah pada resesi ekonomi. Potensi untuk bertahan menghadapi risiko terjadinya resesi ekonomi cukup besar karena ditopang oleh pendapatan domestik bruto yang masih positif serta tingkat inflasi yang relatif lebih rendah dibandingkan banyak negara lain. Namun, ancaman akan terjadinya resesi ekonomi global ini perlu diantisipasi agar kinerja perekonomian nasional tetap dan terus membaik. Walaupun kinerja perekonomian nasional saat ini cukup positif, namun jika resesi ekonomi global benar-benar terjadi maka Indonesia sangat mungkin akan terkena dampaknya.

Kinerja perekonomian nasional yang masih cukup positif diharapkan memberikan dampak positif juga terhadap seluruh *investee* Perseroan sehingga *investee* memiliki kinerja yang baik di tahun 2023 dan dapat memberikan dividen yang baik sehingga mendukung pencapaian pendapatan dan laba Perseroan. Pencapaian kinerja *investee* yang baik di tahun 2022 lalu diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh Perseroan pada tahun 2023 melalui pembagian dividen.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Perseroan berkomitmen untuk transparan dan akuntabel dalam pengelolaan Perseroan serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dengan mematuhi tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat menjadi perusahaan nasional terpercaya dengan portofolio investasi yang berdaya guna. Penerapan tata kelola Perseroan berjalan sesuai

dengan ketentuan regulasi dan prinsip tata kelola yang berlaku secara umum. Perseroan sejak lama telah memiliki *values* yang mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG).

Upaya Perseroan dalam menjaga dan meningkatkan GCG, antara lain melakukan *review* dan pembaruan sistem tata kerja serta melakukan pemenuhan *area of improvement* dari penerapan GCG. Perseroan juga menerapkan *core values*, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).

Perseroan akan secara terus menerus melakukan pengembangan dan penyempurnaan terhadap organ dan perangkat-perangkat GCG serta menerapkan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan implementasi GCG pada segenap organisasi.

Komposisi Direksi

Pada tahun 2022 tidak terdapat perubahan Direksi Perseroan.

PERIODE	DIREKTUR
1 Januari 2022 sd 31 Desember 2022	Rahmi Amini

Apresiasi

Pada kesempatan ini, kami atas nama Direksi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terbaik bagi pencapaian kinerja Perseroan sepanjang tahun 2022. Kepada Pemegang Saham, kami mengucapkan terima kasih atas arahan, dukungan, dan kepercayaan yang telah diberikan. Kepada Dewan Komisaris, kami mengucapkan terima kasih atas pengawasan dan nasehat serta dukungan yang telah diberikan kepada kami.

Penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada seluruh jajaran manajemen dan pekerja atas kerja keras dan dedikasi sepanjang tahun 2022. Dukungan dan kontribusi terbaik yang telah diberikan sangat membantu Perseroan dalam menghadapi tantangan

dan mencapai kinerja Perseroan.

Semoga di masa yang akan datang, kinerja Perseroan akan semakin meningkat dan lebih baik lagi dengan dukungan dan kontribusi terbaik dari semua pihak.

DIREKSI

Direktur,

Periode 1 Januari 2022 s/d sekarang

Rahmi Amini

TELAH DEWAN KOMISARIS

Jakarta, 17 Maret 2023

No. : 013/K0000/2023
Perihal : **Telaah Laporan Tahunan Perseroan
Tahun Buku 2022**
Lampiran : 1 berkas



(d/h PT Pertamina Dana Ventura)
Gedung Wisma Tugu Raden Saleh, Lt 4
Jl. Raden Saleh No. 44
Cikini - Menteng
Jakarta Pusat 10330
T. 62 21 391 1857
F. 62 21 391 1859

Kepada Yth.
Direktur
PT Pertamina Pedeve Indonesia
Gedung Wisma Tugu Raden Saleh, Lantai 4
Jl. Raden Saleh No.44
Cikini, Menteng, Jakarta 10330

Dengan hormat,

Menunjuk:

1. Ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Ketentuan Pasal 8 ayat 3 huruf a. Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa "*Direksi menyampaikan: (i) Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS, (ii) laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS*".
3. Ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar PT Pertamina Pedeve Indonesia (Perseroan) yang mengatur bahwa "*Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham*".
4. Surat Direktur Perseroan No. 130/A0000/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Permohonan Telaah Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022.

Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan bahwa Dewan Komisaris telah melakukan telaah atas Laporan Tahunan PT Pertamina Pedeve Indonesia Tahun Buku 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian Direktur Perseroan, kami mengucapkan terima kasih.

DEWAN KOMISARIS
PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA

Komisaris	GUSNIDA	
-----------	---------	--

PT. PERTAMINA PEDEVE INDONESIA

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI



(d/h PT Pertamina Dana Ventura)
Gedung Wisma Tugu Raden Saleh, Lt 4
Jl. Raden Saleh No. 44
Cikini - Menteng
Jakarta Pusat 10330
T. 62 21 391 1857
F. 62 21 391 1859

PERNYATAAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI UNTUK LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN TAHUN 2022

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Terintegrasi PT Pertamina Pedeve Indonesia Tahun 2022 telah mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari Perseroan, dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan pada periode dimana kami menjabat selaku Direksi dan Komisaris Perseroan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 Maret 2023

DEWAN KOMISARIS PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA

Komisaris	Gusnida	
-----------	---------	---

DIREKSI PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA

Direktur	Rahmi Amini	
----------	-------------	---

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA

IDENTITAS PERUSAHAAN



Nama Perusahaan

PT. Pertamina Pedeve Indonesia



KEPEMILIKAN

- PT Pertamina (Persero) 99,93%
- PT Pertamina Patra Niaga 0,07%



TANGGAL PENDIRIAN

26 Januari 1993



DASAR HUKUM PENDIRIAN

- Akta Pendirian No. 9 tanggal 30 Desember 2004 dibuat oleh Ny . Sulami Mustafa, Notaris di Jakarta.
- Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0003443. AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Pertamina Pedeve Indonesia.
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pertamina Pedeve Indonesia Nomor 1 tanggal 03 April 2020, dibuat dihadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120117152389 tertanggal 28 November 2018 dan Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 7 Desember 2018.



MODAL DASAR

Rp 350.000.000.000,- atau 350.000 lembar saham



MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH

Rp 175.000.000.000,- atau 175.000 lembar saham
- PT Pertamina (Persero) Rp 174.875.000.000,- atau 174.875 lembar saham
- PT Pertamina Patra Niaga Rp 125.000.000,- atau 125 lembar saham



KANTOR

Gedung Wisma Tugu Raden Saleh, Lantai 4
Jl. Raden Saleh Raya No.44
Cikini, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon: (021) 3911857
Fax: (021) 3911859
Website: <http://www.pdv.co.id>



PERTAMINA
PEDEVE INDONESIA



PROFIL PERUSAHAAN

SEKILAS PEDEVE

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

PT Pertamina Pedeve Indonesia (d/h PT Pertamina Dana Ventura) merupakan salah satu Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak dibidang perdagangan pada umumnya secara tidak langsung, usaha yang berkaitan dengan energi, usaha di bidang industri dan jasa pada umumnya.

Pada awalnya, aktivitas Perseroan ini menjadi satu dengan aktivitas Dana Pensiun Pertamina di bawah naungan YATAPENA (1975) yang kemudian berubah menjadi YAKTAPENA (1986) dan selanjutnya YDPP (1986). Namun pada tahun 1993 dibentuk Yayasan Tabungan Pegawai Pertamina (YTPP) yang bertugas melakukan pengelolaan program tabungan pegawai, terpisah dari program pensiun pegawai yang dikelola oleh Dana Pensiun Pertamina.

Sejak tanggal 18 Juni 2002, YTPP mendirikan Perseroan Terbatas yang diberi nama PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI). Pendirian PT PSI ini dilatarbelakangi kondisi dimana YTPP tidak dapat memenuhi persyaratan yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang berlaku efektif sejak tanggal 6 Agustus 2002.

Pada RUPS-LB tanggal 14 Oktober 2004 pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah maksud dan tujuan Perseroan sekaligus mengubah nama Perseroan menjadi PT Pertamina Dana Ventura (PDV), yang dinotarilkan dengan akta No. 9 tanggal 30 Desember 2004 dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, Notaris di Jakarta, dan yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan DEPKEHAM PT. PDV No. C-D 3142 HT. 01.04.TH.2005 tanggal 04 Februari 2005. Atas perubahan maksud dan tujuan, Perseroan telah mendapatkan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 339/KMK.05/2005 tanggal 21 Juli 2005.

Pendirian Yayasan Tabungan & Pensiun (YATAPENA) pada tanggal 27 Januari 1975 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pertamina No. 440, tanggal 9 Maret 1974 tentang Program Tabungan Karyawan

1975

YATAPENA berubah menjadi Yayasan Kesejahteraan, Tabungan & Pensiun yang disingkat YAKTAPENA tanggal 15 Mei 1986 YAKTAPENA berubah menjadi 2 (dua) Yayasan yaitu: Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) dan Yayasan Dana Pensiun Pertamina

1986

Tanggal 26 Januari 1993, YDPP berubah menjadi 2 (dua) lembaga yaitu Dana Pensiun Pertamina (DPP) dan Yayasan Tabungan Pekerja Pertamina (YTPP), dikarenakan terbitnya Undang-Undang No. 11/1992 tentang Dana Pensiun yang melarang pengelolaan dana selain yang terkait dana pensiun

1993

Tanggal 18 Juni 2002 YTPP mendirikan Perseroan Terbatas dengan nama PT Pertamina Saving & Investment disingkat "PSI" kemudian YTPP membubarkan diri

2002

2004
Tanggal 30 Desember 2004 nama perusahaan diubah menjadi PT Pertamina Dana Ventura disingkat "PDV"

Pada tanggal 13 Februari 2018 nama Perusahaan diubah dari PT Pertamina Dana Ventura menjadi PT Pertamina Pedeve Indonesia berikut perubahan kegiatan usaha menjadi bergerak di bidang perdagangan pada umumnya secara tidak langsung, usaha yang berkaitan dengan energi, usaha di bidang industri dan di bidang jasa pada umumnya.

2018

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan secara sirkuler pada tanggal 28 Oktober 2016 tentang restrukturisasi Perseroan yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.06 tanggal 03 November 2016 dibuat di hadapan Dilla Daliana, SH., MKn., Notaris di Jakarta, dinyatakan di dalam salah satu butir keputusannya adalah mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan dari perusahaan yang bergerak di bidang modal ventura menjadi perusahaan yang bergerak di bidang: (i) penyertaan modal di Anak Perusahaan (AP)/ afiliasi PT Pertamina (Persero) dan (ii) portofolio investasi. Pada tanggal 14 Maret 2018, Perusahaan menerima surat Keputusan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-20/D.05/2018 tentang pencabutan izin usaha Perusahaan modal ventura PT Pertamina Dana Ventura yang berlaku sejak tanggal 8 Februari 2018.

Perseroan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha

(NIB) Nomor 8120117152389 tertanggal 28 November 2018 dan Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 7 Desember 2018.

Dengan pengubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut menjadi Perusahaan yang bergerak di bidang penyertaan modal di Anak Perusahaan (AP)/ afiliasi PT Pertamina (Persero), nama Perseroan diubah menjadi PT Pertamina Pedeve Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No 5 tanggal 8 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Marianne V. Hamdani, SH., Notaris di Jakarta yang terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pertamina Pedeve Indonesia Nomor 1 tanggal 03 April 2020, dibuat dihadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar dimaksud lebih kepada penyesuaian dengan Klasifikasi Lapangan Usaha di Indonesia.

KEGIATAN USAHA

Untuk menyesuaikan Anggaran Dasar dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), maka Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No 1 tanggal 3 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Marianne V. Hamdani, SH., Pemegang Saham memutuskan menyetujui perubahan kegiatan usaha Perusahaan dan menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan menjadi sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan utama Perseroan adalah menjalankan usaha yang bergerak di bidang perdagangan besar khusus lainnya (466) yang berkaitan dengan energi dan industri baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk menjalankan usaha kerja sama dengan perseroan-perseroan lain.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu), Subgolongan ini mencakup perdagangan besar bahan bakar, grease (minyak semir), minyak pelumas dan minyak. Subgolongan ini mencakup Perdagangan besar arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta; Perdagangan besar minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin; Perdagangan besar LPG, gas butana dan propana; Perdagangan besar minyak semir dan pelumas, produk minyak bumi yang telah dimurnikan (4661);
 - b. Melaksanakan kegiatan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu), Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang

telah dimurnikan (46610).

- c. Melaksanakan kegiatan Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa dan Potongan YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain), Subgolongan ini mencakup Perdagangan besar kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain; Perdagangan besar pupuk dan produk kimia pertanian; Perdagangan besar bahan plastik dalam bentuk dasar; Perdagangan besar karet; Perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain; Perdagangan besar kertas dalam jumlah besar (borongan); Perdagangan besar barang dari kertas dan karton; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain); Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa dan potongan logam dan non-logam bahan untuk daur ulang, termasuk pengumpulan, pengurutan, pemisahan, pelepasan barang yang masih berguna misalnya mobil agar mendapatkan bagian yang masih bisa digunakan, pengepakan dan pengepakan kembali, penyimpanan dan pengiriman, tapi tanpa proses perubahan yang nyata. Apalagi, pembelian dan penjualan barang sisaan masih mempunyai nilai. Subgolongan ini juga mencakup: Pembongkaran mobil, komputer, televisi dan peralatan lainnya untuk mendapatkan dan menjual kembali bagian yang masih dapat dipakai. Sub golongan ini tidak mencakup: Pengumpulan sampah rumah tangga dan sisa industri; Pengelolaan barang sisa, bukan untuk penggunaan lebih lanjut dalam proses industri pabrik, tapi dengan tujuan untuk pembuangan; Pengolahan barang sisa dan potongan serta barang lainnya menjadi barang baku sekunder, hasilnya siap untuk digunakan langsung dalam proses industri pabrik, tapi bukan sebagai barang akhir; pembongkaran mobil, komputer, televisi dan peralatan lainnya untuk daur ulang; pembongkaran mobil melalui proses mekanik;

pembongkaran kapal; perdagangan eceran dari barang-barang bekas.

- d. Melaksanakan kegiatan Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain), Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar sebagaimana tercantum pada huruf c. ayat (2) Pasal ini. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).

Perseroan melakukan Penyertaan Saham Kepada Anak Perusahaan/Afiliasi Pertamina Group, dimana penyertaan tersebut dilakukan sesuai penugasan dari PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham mayoritas Perusahaan. Pada 31 Desember 2022, Perseroan tercatat sebagai Pemegang Saham Pendamping pada 34 Anak Perusahaan/Afiliasi Pertamina Group dan 1 perusahaan lain, dengan perincian sebagai berikut:

1. PT Pertamina EP
2. PT Pertamina EP Cepu
3. PT PEPC Alas Dara & Kemuning
4. PT Pertamina Hulu Energi
5. PT Pertamina Hulu Energi Arun
6. PT Pertamina Hulu Indonesia
7. PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur
8. PT Pertamina Hulu Attaka
9. PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga
10. PT Pertamina Hulu Rokan
11. PT Pertamina International Exploration & Production
12. PT Pertamina Irak Eksplorasi Produksi

13. PT Pertamina Algeria EP
14. PT Pertamina Malaysia EP
15. PT Pertamina East Natuna
16. PT Kilang Pertamina Internasional
17. PT Pertamina Geothermal Energi
18. PT Pertamina Gas
19. PT Pertamina Drilling Service Indonesia
20. PT Pertamina Power Indonesia
21. PT Pertamina Lubricants
22. PT Pertamina Retail
23. PT Patra Jasa
24. PT Pertamina Internasional Shipping
25. PT Pertamina Trans Kontinental
26. PT Pelita Air Service
27. PT Pertamina Bina Medika
28. PT Pertamina Training & Consulting
29. PT Trans Javagas Pipeline
30. PT Patra Badak Arun Solusi
31. PT Mitra Tours & Travel
32. PT Badak NGL
33. PT Kilang Pertamina Balikpapan
34. PT Pertamina Hulu West Ganai
35. PT Tuban Petro Industries

Dalam rangka *cash management* dan terkait dengan dana yang belum dimanfaatkan untuk penyertaan saham pada Anak Perusahaan/Afiliasi Pertamina Group, Perusahaan melakukan penempatan dana berupa deposito berjangka. Penempatan dana dilakukan sesuai dan berdasarkan Pedoman Investasi yang berlaku di Perusahaan. Selain deposito, Perseroan juga mengikuti program *notional pooling* yang diselenggarakan oleh PT Pertamina (Persero) pada bank-bank yang telah bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero).

VISI, MISI, DAN TATA NILAI



VISI

Menjadi perusahaan nasional terpercaya dengan portofolio investasi yang berdaya guna



MOTTO

Pamungkas Mengemban Amanah



MISI

Meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kontribusi yang signifikan terhadap para pemangku kepentingan serta:

- Memiliki kinerja unggul melalui pemilikan portofolio investasi yang optimal
- Melaksanakan kegiatan usaha secara transparan, prudent, dan berlandaskan GCG.



BUDAYA KERJA PERUSAHAAN

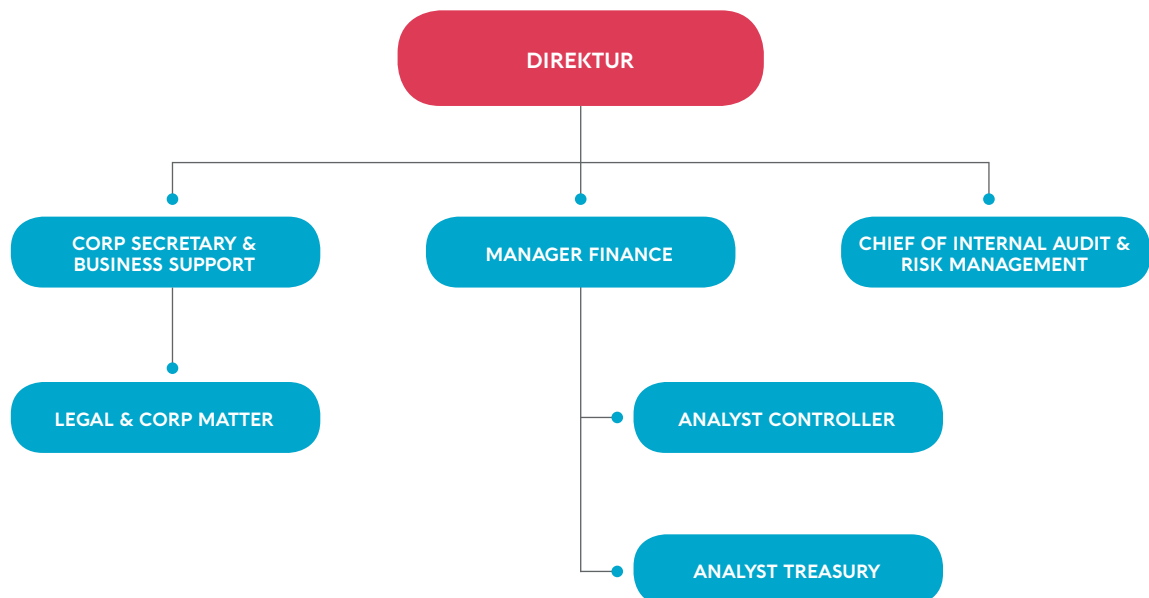
Sebagai bagian dari Pertamina Group, Perseroan senantiasa menyelaraskan tata nilai unggulan dengan tata nilai yang telah ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) yang mengacu pada nilai-nilai utama (core values) BUMN, yaitu **AKHLAK**, yang terdiri dari:

- **AMANAH**
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
- **KOMPETEN**
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- **HARMONIS**
Saling peduli dan menghargai perbedaan
- **LOYAL**
Beredikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara
- **ADAPTIF**
Terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan
- **KOLABORATIF**
Membangun kerjasama yang sinergis

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

Melalui Surat Keputusan Direksi PT Pertamina (Persero) No 10/C00000/2018-S0 tanggal 23 Maret 2018 tentang Struktur Organisasi Dasar PT Pertamina Pedeve Indonesia, Pemegang Saham telah menetapkan Struktur Organisasi Dasar PT Pertamina Pedeve Indonesia yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur yang membawahi Corporate Secretary & Business Support, Manager Finance, Chief of Internal Audit & Risk Management serta Analyst Treasury & Controller.

Sesuai dengan kebutuhan Perseroan akan sumber daya manusia dan guna meningkatkan kinerja operasi Perseroan maka Struktur organisasi Perseroan pada tahun 2020 mengalami perubahan untuk 2 level dibawah Direksi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur PT Pertamina Pedeve Indonesia No Kpts-005/A0000/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Struktur Organisasi Perusahaan, yang mengesahkan Struktur Organisasi, Uraian Jabatan dan Kompetensi Jabatan.



Penyesuaian struktur organisasi tersebut dilengkapi dengan Uraian & Kompetensi Jabatan dari masing-masing organisasi, dimana tugas untuk memastikan penyelenggaraan perusahaan sesuai dengan kaidah – kaidah GCG menjadi Kegiatan Utama dari Fungsi/Jabatan *Corporate Secretary & Business Supports* dan *Chief of Internal Audit & Risk Management*.

PERISTIWA PENTING

5 JANUARI 2022

Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina Pedeve Indonesia tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

26 MARET 2022

Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina Pedeve Indonesia tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022.

27 MARET 2022

Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina Pedeve Indonesia tentang Opsi Penjataan Lebih (*Greenshoe/Overallotment*) untuk Stabilisasi Harga Saham saat Initial *Public Offering* PT Pertamina Geothermal Energy.

20 APRIL 2022

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 sebagaimana telah diaktakan oleh Notaris Marianne Vincentia,SH berdasarkan akta Nomor 10 tanggal 20 April 2021.

01 JULI 2022

Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina Pedeve Indonesia tentang Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021.

14 SEPTEMBER 2022

Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina Pedeve Indonesia tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2022, 2023 dan 2024.

25 OKTOBER 2022

Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina Pedeve Indonesia tentang Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022.

01 DESEMBER 2022

Penandatanganan Shareholders Agreement PT Pertamina International Shipping antara PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Pedeve Indonesia dan Nippon Yusen Kabushiki Kaisha.

PROFIL ANGGOTA DEWAN KOMISARIS



Lahir di Bukittinggi, 16 Agustus 1964
Warga Negara Indonesia
Domisili di Jakarta Timur.



- Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung – 1988
- S2 Magister Manajemen pada Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta - 2006.



Menjabat sebagai Komisaris Pedeve sejak 5 Januari 2022. Jabatan Komisaris yang saat ini dijabat adalah periode pertama berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pertamina Pedeve Indonesia Nomor 13 Tanggal 27 Januari 2022 Notaris Marianne V. Hamdani,SH.

Mengawali karir di PT Pertamina (Persero) sejak 1990 dan menduduki berbagai posisi jabatan strategis antara lain:

1. Manager Retail Development (2008 - 2010)
2. Risk Management Manager (2013 - 2015)
3. Planning & Evaluation Manager (2015 -2018)
4. Manager Strategis Planning (2018)
5. VP Corporate Business Initiative Mgmt (2019)
6. VP Enterprise Risk Management (2019)



Fusnida

Anggota Dewan Komisaris
(Periode 5 Januari 2022 – sekarang)

PROFIL KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS



Lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Mei 1984



- Lulus S1 dari Fakultas Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia tahun 2008
- S2 Magister Manajemen (MM) konsentrasi Manajemen dari Universitas Indonesia tahun 2016
- Meraih gelar Certified Enterprise Risk Management Associate Professional tahun 2013
- *Mertified Enterprise Risk Management Associate Professional* pada tahun 2015 dan gelar *Certified Risk Professional* pada tahun 2016



Memulai karir di PT Pertamina Hulu Energi sejak tahun 2012 dengan jabatan Auditor Area Indo Barat & Energi baru. Berbagai jabatan yang dipercayakan yaitu:

1. Team Leader Audit II (2013-2014)
2. Junior Auditor (2015)
3. Internal Audit Analyst (2016-2017)
4. Lead Auditor (2017)
5. West Area Audit Asst manager (2018-2020)
6. Staff Perbantuan di PT. Pertamina (Persero) (2020 – sekarang),
7. Manager Group Tax IA (2020-sekarang)



Muhammad Ikhwan

Anggota Komite Audit
(Periode 1 Februari 2021 – Sekarang)

PROFIL DIREKSI



Lahir di Bandung, Jawa barat



- Akuntan dari Universitas Padjadjaran – Bandung tahun 1999
- Master of Commerce dari University of Adelaide – Australia tahun 2010.



Karier di Pertamina dimulai pada tanggal 1 Desember 2003. Berbagai jabatan yang pernah diduduki diantaranya:

1. Staf, superintendent dan analyst di Direktorat Keuangan PT Pertamina (Persero) (2004 – 2013)
2. Assistant Manager di Direktorat Keuangan PT Pertamina (Persero) (2013-2019)
3. Manager Management Accounting PT Pertamina Gas (2019 – 2020)
4. Manager Financial Accounting PT Pertamina Gas (2020 – 2021)



Rahmi Adhini

Direktur
(26 Juli 2021 s/d sekarang)

PEJABAT EKSEKUTIF PERUSAHAAN



Lahir di Jakarta, 11 Oktober 1973



S-1 Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung - 1998.



Bergabung dengan Perusahaan sejak November 2004. Berbagai jabatan yang pernah di duduki diantaranya:

1. Ahli Kontrak dan Litigasi (2004 – 2015)
2. Manajer Legal & Compliance (2015 – 2016)
3. Manajer Legal, Compliance & Risk Management (2016 – 2018)
4. Corporate Secretary & Business Support (2018 – Sekarang)



Terdapat beberapa sertifikasi dan keanggotaan Profesi yang diikuti oleh Corporate Secretary & Business Supports Perusahaan diantaranya adalah, sebagai berikut:

1. Sertifikasi Kode Etik Advokat dari Forum Komunikasi Advokat Indonesia
2. Sertifikasi Penasihat Hukum dari Panitia Ujian Calon Penasihat Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta
3. Sertifikasi Profesi Auditor Hukum (Legal Auditor) dari BNSP - LSP Auditor Hukum Indonesia



Ali Syamsul Rohman

Corporate Secretary & Business Supports



Lahir di Bandung 28 Oktober 1985



Lulus S-1 dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung - 2008.



Bergabung dengan Perusahaan sejak Maret 2010. Selama mengabdikan di Perusahaan telah bekerja sebagai:

1. Analis Kontrak (2010 – 2014)
2. Analis Kontrak & Litigasi (2014 – 2015)
3. Analis Kontrak & Compliance (2015 – 2016)
4. Ahli Legal (2016 – 2018)
5. Chief of Internal Audit & Risk Management (2018 – Sekarang)

Anggraini Citta Lestari

Chief Internal Audit & Risk Management



Lahir di Surabaya 20 Mei 1969



Lulus S-1 dari Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya - 1996.



Bergabung dengan Perusahaan sejak Mei 2005. Selama mengabdikan di Perusahaan telah bekerja sebagai:

1. Penata Laporan Keuangan & manajemen (2005 – 2007)
2. Pengawas Utama Akuntansi & Anggaran (2007 – 2015)
3. Manajer Kontroler (2015 – 2018)
4. Manajer Finance (2018 – Sekarang)



Sertifikasi (certified) PSAK dari Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2012

Wasno Hastotodjo
Manajer Finance

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Saham PT Pertamina Pedeve Indonesia dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga. Direktur dan Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki saham langsung dan saham tidak langsung PT Pertamina Pedeve Indonesia.

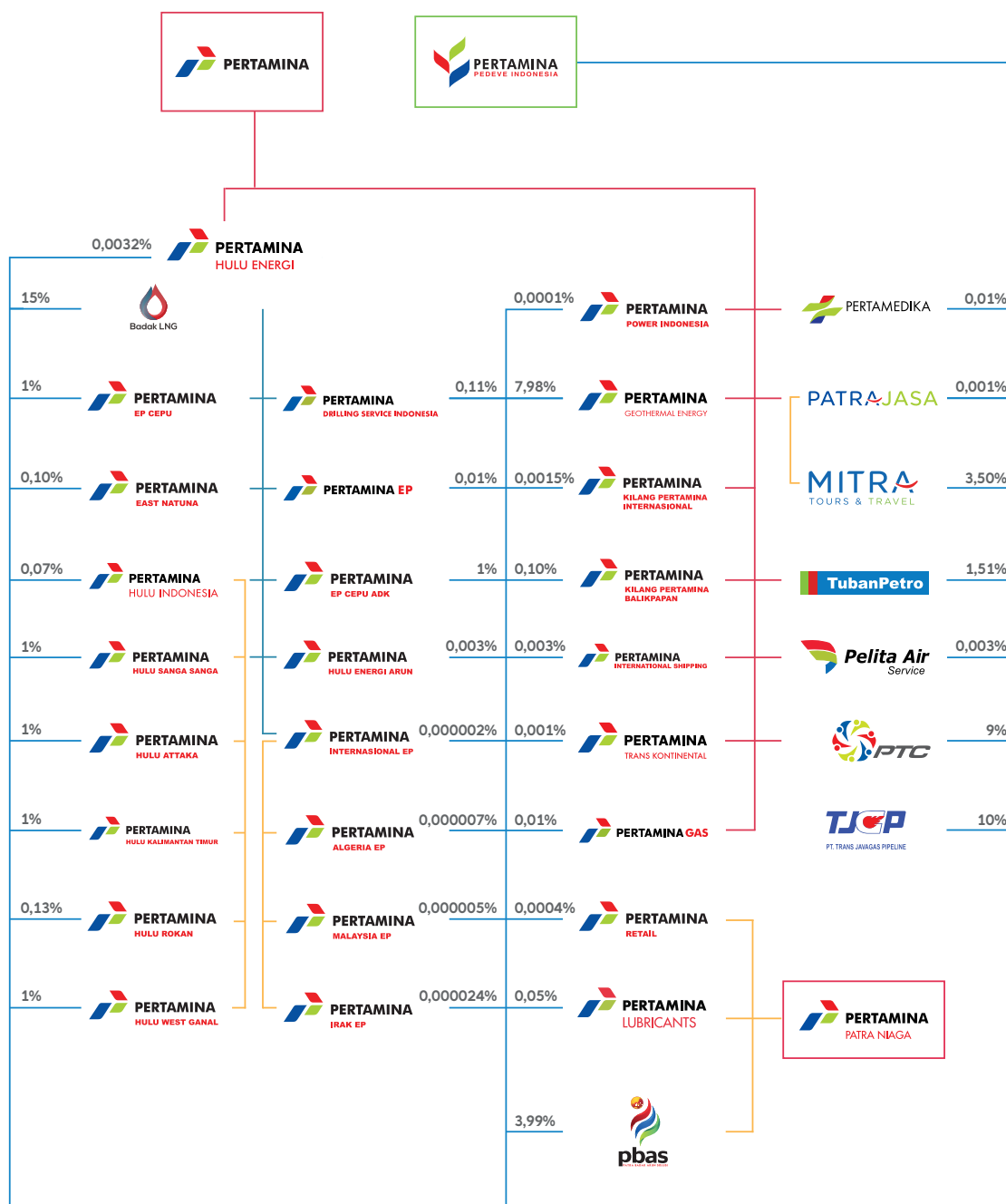


Modal dasar Perseroan sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 350.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari modal tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah saham senilai Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah) oleh Para Pemegang Saham.

PT Pertamina (Persero) masih tercatat sebagai pemegang saham utama dengan kepemilikan saham sebesar 99,93%, sedangkan PT Pertamina Patra Niaga memiliki 0,07% saham Perseroan.

PEMEGANG SAHAM	LEMBAR SAHAM	RUPIAH	%
MODAL DASAR	350.000	Rp350.000.000.000	100%
MODAL DISETOR:	175.000	Rp175.000.000.000	50%
PT Pertamina (Persero)	174.875	Rp174.875.000.000	99.93%
PT Pertamina Patra Niaga	125	Rp125.000.000	0.07%
JUMLAH	175.000	Rp175.000.000.000	50%
SAHAM DALAM PORTEPEL	175.000	Rp175.000.000.000	50%

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN



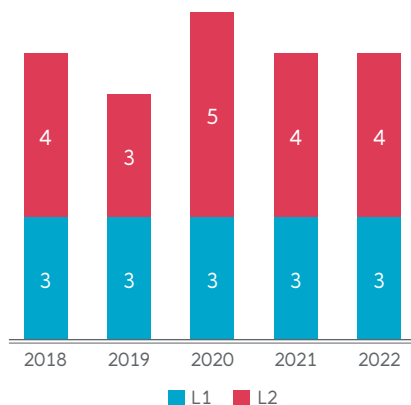
SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu elemen penting yang mendukung kelangsungan bisnis Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM di seluruh proses bisnis agar kinerja Perseroan dapat tercapai. Perseroan berupaya untuk menyelaraskan kebutuhan SDM dengan rencana strategis Perseroan.

Profil SDM

Fungsi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
L1	3	3	3	3	3
L2	4	4	5	4	4
L3	0	0	0	0	0
L4	0	0	0	0	0
Total	7	7	8	7	7

Level Organisasi

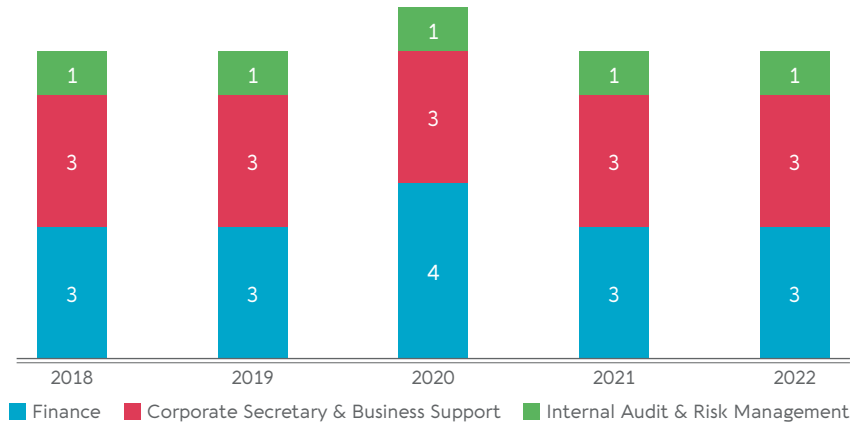


Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Fungsi Dalam 5 Tahun Terakhir

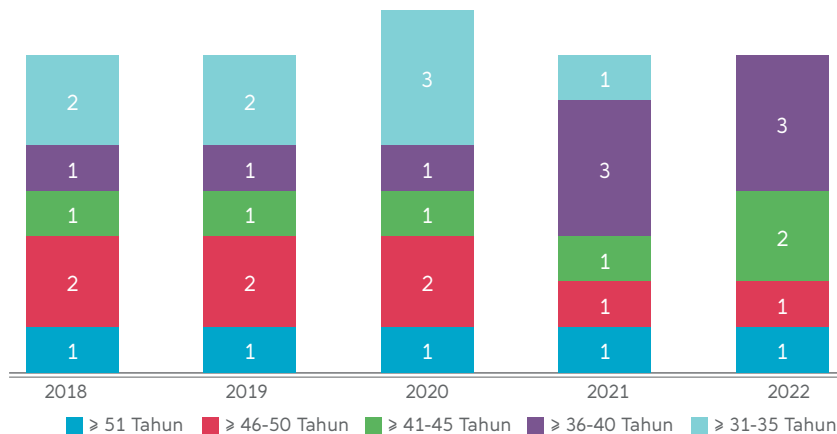
Fungsi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Finance	3	3	4	3	3
Corporate Secretary & Business Support	3	3	3	3	3
Internal Audit & Risk Management	1	1	1	1	1
Total	7	7	8	7	7

Dari total jumlah Pekerja Perseroan sebanyak 7 orang Pekerja tersebut terbagi ke dalam 3 Fungsi, yaitu Fungsi Finance, Fungsi Corporate Secretary & Business Support (CS&BS) dan Fungsi Internal Audit & Risk Management (IA&RM).

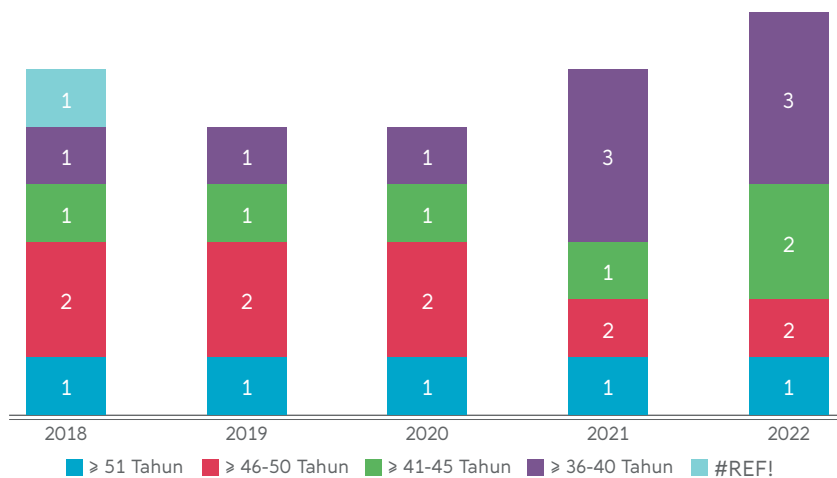
Fungsi



Grafik Jumlah Pekerja Berdasarkan Usia Dalam 5 Tahun Terakhir



Usia

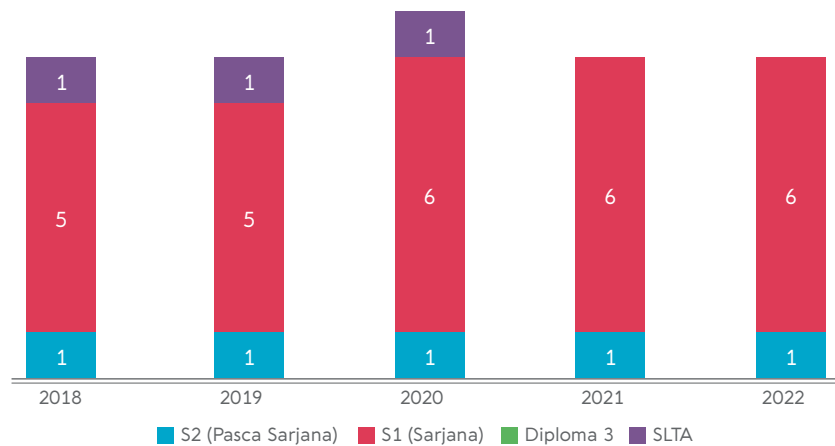


Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, maka Pekerja Perseroan terdiri dari 1 orang lulusan S2 (14%) dan 6 orang lulusan S1 (86%).

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dalam 5 Tahun Terakhir

Tingkat Pendidikan	Tahun									
	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
S2 (Pasca Sarjana)	1	14%	1	14%	1	13%	1	14%	1	14%
S1 (Sarjana)	5	71%	5	71%	6	75%	6	86%	6	86%
D3 (Diploma 3)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
SLTA	1	14%	1	14%	1	13%	0	0%	0	0%
Total	7	100%	7	100%	8	100%	7	100%	7	100%

Grafik Jumlah Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dalam 5 Tahun Terakhir

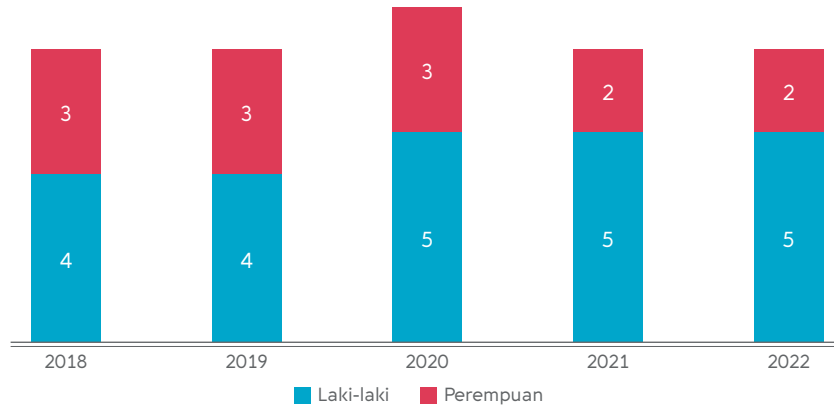


Komposisi jumlah Pekerja Perseroan saat ini terdiri dari Pekerja dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang (71%) dan Pekerja dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang (29%). Komposisi jumlah Pekerja berdasarkan jenis kelamin yang tidak terlalu jauh berbeda tersebut menunjukkan bahwa Perseroan memberikan kesetaraan dan kesempatan yang sama secara gender baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk dapat bekerja dan berkarya di Perseroan.

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin Dalam 5 Tahun Terakhir

Gender	Tahun									
	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Laki-laki	4	57%	4	57%	5	63%	5	71%	5	71%
Perempuan	3	43%	3	43%	3	38%	2	29%	2	29%
Total	7	100%	7	100%	8	100%	7	100%	7	100%

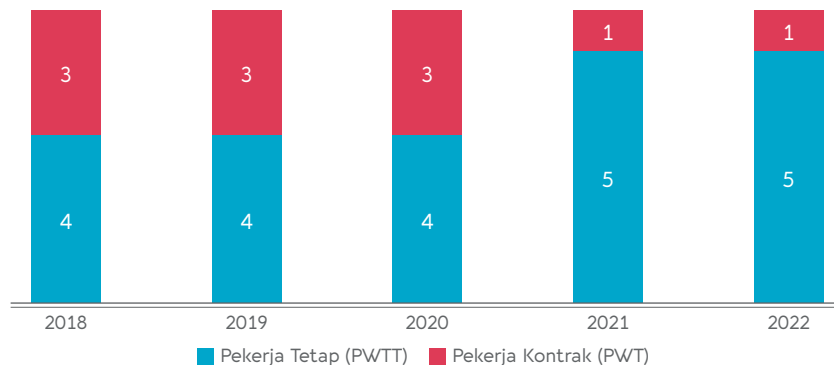
Jenis kelamin



Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian Dalam 5 Tahun Terakhir

Status Kepegawaian	Tahun									
	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Pekerja Tetap (PWTT)	4	57%	4	57%	4	57%	6	86%	6	86%
Pekerja Kontrak (PWT)	3	43%	3	43%	3	43%	1	14%	1	14%
Total	7	100%	7	100%	7	100%	7	100%	7	100%

Grafik Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian Dalam 5 Tahun Terakhir



Selain dari jumlah Pekerja tersebut, Perseroan juga didukung oleh 3 orang Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) yang disediakan oleh Perusahaan Jasa Penunjang (PJP) yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas operasional Perseroan, khususnya untuk penyediaan tenaga Pengemudi, *Cleaning Service* dan *General Service* yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.

Pengembangan Kompetensi SDM

Untuk memastikan keandalan Sumber Daya Manusia serta meningkatkan *internal confidence*, manajemen berkomitmen meningkatkan kapabilitas SDM. Perseroan melaksanakan berbagai program pengembangan kompetensi pekerja dan sertifikasi sebagai sarana pengayaan dan penguatan kesiapan sumber daya manusia dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan pengembangan bisnis Perseroan. Program pengembangan yang dilakukan di antaranya melalui penyelenggaraan program pelatihan dan sertifikasi bagi pekerja. Tujuan penyelenggaraan program pelatihan adalah untuk memenuhi kompetensi yang disyaratkan oleh tiap jabatan

untuk bisa melakukan fungsinya secara lebih efektif dalam mendukung tercapainya tujuan Perusahaan. Secara teknis, pelaksanaan program pengembangan mengacu pada upaya pemenuhan kompetensi bagi para pekerja sesuai bidang kerja masing-masing dan berpedoman pada program pengelolaan SDM Perusahaan.

Strategi Pengembangan Karir dilaksanakan berdasarkan prinsip *fair opportunity*, yaitu terdapat kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja yang berkinerja baik untuk tumbuh dan berkembang dengan tetap memperhatikan kompetensi dan *performance level*.

Sepanjang tahun 2022, Perseroan telah mengikutsertakan Pekerja dalam beberapa kegiatan pelatihan sesuai bidangnya antara lain sebagai berikut:

1. *Merger and Acquisition*
2. *Corporate Valuation*
3. *Qualififed Internal Auditor*
4. *Agile Auditing Lanjutan*
5. *Certified Internal Auditor Review*
6. *Excellent Public Speaking Skills*
7. *Finance for Non Finance*
8. *Training Anaplan Fase 1 (Financial Reporting & Consolidation)*
9. *Workshop SIIP dan Dashboard Monev*
10. *Workshop dan Sosialisasi Dashboard AR/AP*
11. *Workshop Internal Charging*
12. Brevet A & B Pajak

Guna mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, Perusahaan menyediakan anggaran yang nilainya mencapai sebesar Rp60.000.000,- dan sepanjang tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp30.260.000,-.

Dalam penyelenggaraannya, program-program pelatihan ini dilaksanakan sesuai rencana pelatihan yang telah disusun untuk masing-masing Pekerja dan diselenggarakan secara *in-house* oleh PT Pertamina (Persero) selaku induk Perusahaan, ataupun melalui keikutsertaan dalam program umum.

Upaya lain untuk meningkatkan kompetensi

pekerja dan menciptakan aset pengetahuan yang memberikan nilai tambah bagi Perseroan adalah dengan melaksanakan program *knowledge sharing*, dengan tujuan untuk mempertahankan best practices yang dimiliki. Program *knowledge sharing* dilakukan sejak tahun 2022 yang dilakukan secara rutin setiap minggu secara daring maupun tatap muka antara narasumber yaitu Pekerja yang telah mengikuti pelatihan dengan para pekerja Perseroan. Disamping itu guna meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, Perseroan memiliki program Pedeve English Club, dimana para Pekerja berkesempatan menyampaikan *knowledge sharing* dengan pengantar Bahasa Inggris.

Perseroan berkomitmen dalam menghargai keberagaman. Pekerja diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan dalam karir, termasuk dalam pemberian remunerasi maupun apresiasi yang dilakukan murni berdasarkan kemampuan serta kompetensi yang ditunjukkan serta berdasarkan hasil kinerja tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, golongan maupun ras.

Perusahaan memiliki standar pencapaian kinerja yang transparan, sehingga setiap individu dapat memahami apa yang harus dilakukan demi mencapai tujuan organisasi serta bisa mengukur penghargaan yang akan diterima oleh mereka jika kinerja tersebut terpenuhi. Dengan demikian, seluruh Pekerja dapat bekerja dalam lingkungan yang kondusif dan dapat memberikan kinerja terbaiknya demi mendukung tercapainya perusahaan berkinerja tinggi.

Hubungan Industrial

Perusahaan selalu berupaya untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis dengan para pekerjanya. Hubungan industrial di lingkungan Perseroan dilandasi semangat untuk memberikan yang terbaik di antara Perseroan dan Pekerja. Di satu sisi, pekerja menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewajibannya, disamping terus berupaya mengembangkan kompetensi yang dimiliki serta berkontribusi dalam memajukan Perseroan. Sedangkan di sisi lain, Perusahaan menciptakan hubungan kerja yang kondusif, menyediakan fasilitas dan lingkungan kerja yang nyaman serta memberikan hak-hak

pekerja secara terbuka, demokratis dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan dan amanat peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Perseroan dan pekerja melaksanakan perundingan Peraturan Perusahaan (PP) untuk menjamin terpenuhinya syarat kerja, hak, dan kewajiban Pekerja Perusahaan.

Pelaksanaan hubungan industrial yang baik di Perusahaan dinilai telah menghasilkan suasana kerja yang kondusif selama tahun 2022. Hal ini ditandai dengan tidak adanya pemogokan kerja dan insiden yang disebabkan oleh diskriminasi selama periode pelaporan.

Hak Asasi Manusia

Dalam upaya menegakkan hak asasi manusia bagi pekerjanya, Perseroan memperhatikan status kepegawaian, pengupahan yang layak, kesejahteraan pekerja, serta hal-hal lain terkait hak dasar pekerja dan hubungan industrial dalam Peraturan Perseroan. Perseroan berupaya menerapkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pekerja di luar kerja melalui

pengaturan jam kerja dan penghargaan kinerja yang layak.

Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan serta Layanan Medis

Perseroan menjamin perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan alat-alat keselamatan kerja maupun mengikuti pekerja dalam program perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku terkait keselamatan kerja.

Seluruh pekerja tetap Perseroan juga mendapatkan pelayanan kesehatan (*managed care*) dan pemeriksaan kesehatan berkala (*medical check-up/MCU*) setiap tahun untuk memonitor kesehatan pekerja.

Jaminan kesehatan *managed care* telah mencakup seluruh upaya pengelolaan kesehatan pekerja dan keluarga pekerja, yang meliputi peningkatan kesehatan (*promotif*), sosialisasi pencegahan (*preventif*), pengobatan (*kuratif*), pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) hingga perlindungan (*protektif*).

WILAYAH OPERASI PERUSAHAAN

KANTOR CABANG ATAU KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN

PT Pertamina Pedeve Indonesia tidak memiliki Cabang atau Kantor Perwakilan dimanapun. Dengan demikian tidak ada informasi yang disampaikan terkait Cabang atau Kantor Perwakilan perusahaan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal dan Kegiatan Usaha PT Pertamina Pedeve Indonesia adalah Perseroan Terbatas yang tidak mencatatkan saham maupun menerbitkan efek lainnya pada bursa efek. Dengan demikian Perusahaan tidak memiliki Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham Perseroan serta nama dan alamat Perusahaan pemeringkat efek. Namun demikian, Perseroan memiliki kerja sama dengan lembaga profesi yang menunjang kegiatan usaha Perusahaan.



NOTARIS

Marianne Vincentia Hamdani, SH
Jl. Boulevard Raya Blok K4 No.3,
Kelapa Gading Permai Jakarta
Utara 14240

Jasa diberikan:

- Pembuatan akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk pengurusan dokumen Perubahan pada Kemenhum & HAM RI.
- Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham (PKR) termasuk pengurusan dokumen pada Kemenhum & HAM RI.
- Pembuatan Akta Berita Acara RUPS Tahunan.
- Akta Jual Beli Saham.



AKUNTAN PUBLIK

Hertanto, Grace, Karunawan
(Member of TIAG)
Palma Tower, 18th Floor Lot F&G
Jl. RA Kartini II-S Kav. 06, TB
Simatupang
Jakarta Selatan 12310
T +62 21 75930341, 75930431
www.hgkfirm.com

Jasa diberikan

- Atestasi
- Advisory Services

KONSULTAN AKTUARIA

Steven & Mourits
Jl. Pakubowono VI No. 61 RT.11/RW.2
Gunung, Kec Kby. Baru
Kota Jakarta Selatan 12120
T +62 21 7279 8620
www.stevenmourits.id

Jasa diberikan

- Actuarial Valuation



KONSULTAN VALUASI

HM Consulting
Gd. Cityloft Sudirman, 28th Floor
Jl. KH. Mas Mansyur No.121
Jakarta Pusat 10220
T +62 21 2555 8734

Jasa diberikan

- Atestasi
- Advisory Services
- valuation

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Konsultan Hukum & Pajak

No.	Nama Kantor	Jasa Diberikan
1	Drawy & Droit Law Office Menara Rajawali Level 7-1, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950	• Legal Opinion • Penanganan Perkara
2	Heru Suyanto & Associates Jl. Raya Cinere No. 44M, Kota Depok Telp 021 7549104	• Legal Opinion • Penanganan Perkara
3	Yulwansyah, Balfast & Partners Office 8 Level 18-A, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan 12190	• Legal Opinion • Penanganan Perkara
4	Vaudy Starworld & Partners World Trade Centre – WTC 5, 6th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920	• Legal Opinion • Penanganan Perkara Perpajakan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

No.	Nama Kantor	Jasa Diberikan
1	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Akuntan Negara Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 Phone: 021 858 4867, Fax: 021 85906404	Audit Keuangan atas penerapan Perjanjian dengan Perusahaan Pasangan Usaha Perseroan

NAMA DAN ALAMAT ENTITAS AFILIASI

No.	NAMA	ALAMAT	BIDANG USAHA	KEPEMILIKAN SAHAM	STATUS OPERASI
1	PT Pertamina Geothermal Energy	Grha Pertamina, Gedung Pertamina, lantai 7 Jln. Medan Merdeka Timur No.11-13 Gambir, Jakarta Pusat	Panas bumi dari sisi hulu dan atau sisi hilir baik didalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang panas bumi tersebut	7,9806% 2.477.682.000 Lembar Saham	Beroperasi
2	PT Pertamina Hulu Energi	PHE Tower Jl. TB. Simatupang Kav. 99 Jakarta Selatan 12520	Minyak, Gas Bumi dan Energi baik didalam maupun diluar negeri, serta kegiatan usaha lain yang terkait dan atau menunjang kegiatan usaha dibidang Minyak, Gas Bumi dan energi lainnya.	0,0032% 12.800.000 Lembar Saham	Beroperasi
3	PT Pertamina EP Cepu	Patra Jasa Tower, Lantai 6 - 8 Jl. Gatot Subroto, Kav . 32-34 Jakarta Selatan 12950	Minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha lain yang terkait dan atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi di wilayah kerja Blok Cepu.	1% 25 Lembar Saham	Beroperasi
4.	PT Tuban Petro Industries	Mid Plaza Building II Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman No.10-11, Jakarta Pusat 10220	Petrochemical Industries serta kegiatan usaha lain yang terkait dan atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi	1,51% 7.500 Lembar Saham	Beroperasi
5	PT Pertamina Training & Consulting	Jl. Abdul Muis No. 52-56 A Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160	Jasa konsultasi bidang manajemen SDM dan tenaga kerja, administrasi engineering dan kesisteman, pengelolaan manajemen perusahaan jasa pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, bisnis serta kegiatan terkait.	9% 2.700 Lembar saham	Beroperasi
6	PT Trans Javagas Pipeline	Centennial Tower, lantai 20 Unit A. Jln. Gatot Subroto, Jakarta 12930	Pengangkutan gas alam, Bidang pembangunan dan Bidang Jasa	10% 9.220 Lembar Saham	Beroperasi
7	PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	Grha Elnusa, lantai 9 Jln. TB Simatupang Kav. 1B, Jakarta Selatan	Minyak, gas bumi dan energi untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi termasuk eksplorasi, eksploitasi, melakukan penyertaan saham dan participating interest di dalam negeri.	1% 15 Lembar saham	Beroperasi

No.	NAMA	ALAMAT	BIDANG USAHA	KEPEMILIKAN SAHAM	STATUS OPERASI
8	PT Pertamina Hulu Rokan	Gedung Kwarnas, lantai 5, Jln. Medan Merdeka Timur No.6 Jakarta Pusat	Pertambangan Minyak dan gas bumi, dengan kegiatan usaha pencarian kandungan, penambangan dan pengeboran minyak bumi mentah, kondensat.	0,13% 1.480 Lembar saham	Beroperasi
9	PT Pertamina Lubricants	Grha Pertamina, Gedung Pertamax lantai 15-17 Jln. Medan Merdeka Timur No.11-13 Gambir, Jakarta Pusat	Minyak dan gas bumi, dengan kegiatan usaha memproduksi, melaksanakan kegiatan perdagangan ekspor & impor, pengangkutan, penyimpanan, penyaluran, distribusi dan pemasaran, jasa produksi pengolahan pelumas, grease, specialties product dan baseoil serta bahan baku pelumas, grease, specialties product dan base oil.	0,05% 1.706 Lembar Saham	Beroperasi
10	PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Grha Elnusa, lantai 9 Jln. TB Simatupang Kav.1B Jakarta Selatan	Minyak dan Gas Bumi termasuk eksplorasi dan eksploitasi serta melakukan penyertaan saham dan kepemilikan participating interest dalam Negeri	1% 15 Lembar Saham	Beroperasi
11	PT Pertamina Hulu Indonesia	Grha Elnusa, lantai 9 Jln. TB Simatupang Kav.1B Jakarta Selatan	Hulu Minyak dan Gas Bumi	0,07% 1 Lembar Saham	Beroperasi
12	PT Pertamina EP Cepu ADK (Alas Dara & Kemuning)	Gedung Patra Jasa, Jln. Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta Selatan	Minyak dan Gas Bumi, serta kegiatan usaha lain yang terkait dan atau menunjang kegiatan usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja di lapangan Alas Dara dan Lapangan Kemuning.	1% 25 Lembar Saham	Beroperasi
13	PT Kilang Pertamina Internasional	Grha Pertamina, Gedung Fastron, lantai 9 Jln. Medan Merdeka Timur No.11-13 Jakarta Pusat	Minyak, gas bumi dan energi baru dan terbarukan di dalam negeri maupun diluar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait dan atau menunjang kegiatan di bidang minyak, gas bumi serta energi baru dan terbarukan lainnya.	0,0015% 1.960 Lembar Saham	Beroperasi
14	PT Pertamina Badak Arun Solusi (PBAS)	Graha PBAS Jl. Prof . Dr . Soepomo, SH No. 55 Tebet Barat Jakarta Selatan 12810	Penyedia jasa EPC & M (Engineering, Procurement, Contruction dan Operation Maintenance), Pelatihan dan atau Pendidikan pada Industri minyak dan gas bumi termasuk namun tidak terbatas pada LNG, Coal Bed Methane (CBM), Industri Energi, industri Petro Kimia dan industri yg sejenis lainnya, termasuk fasilitas-fasilitas pendukungnya	3,99% 1.860 Lembar Saham	Beroperasi

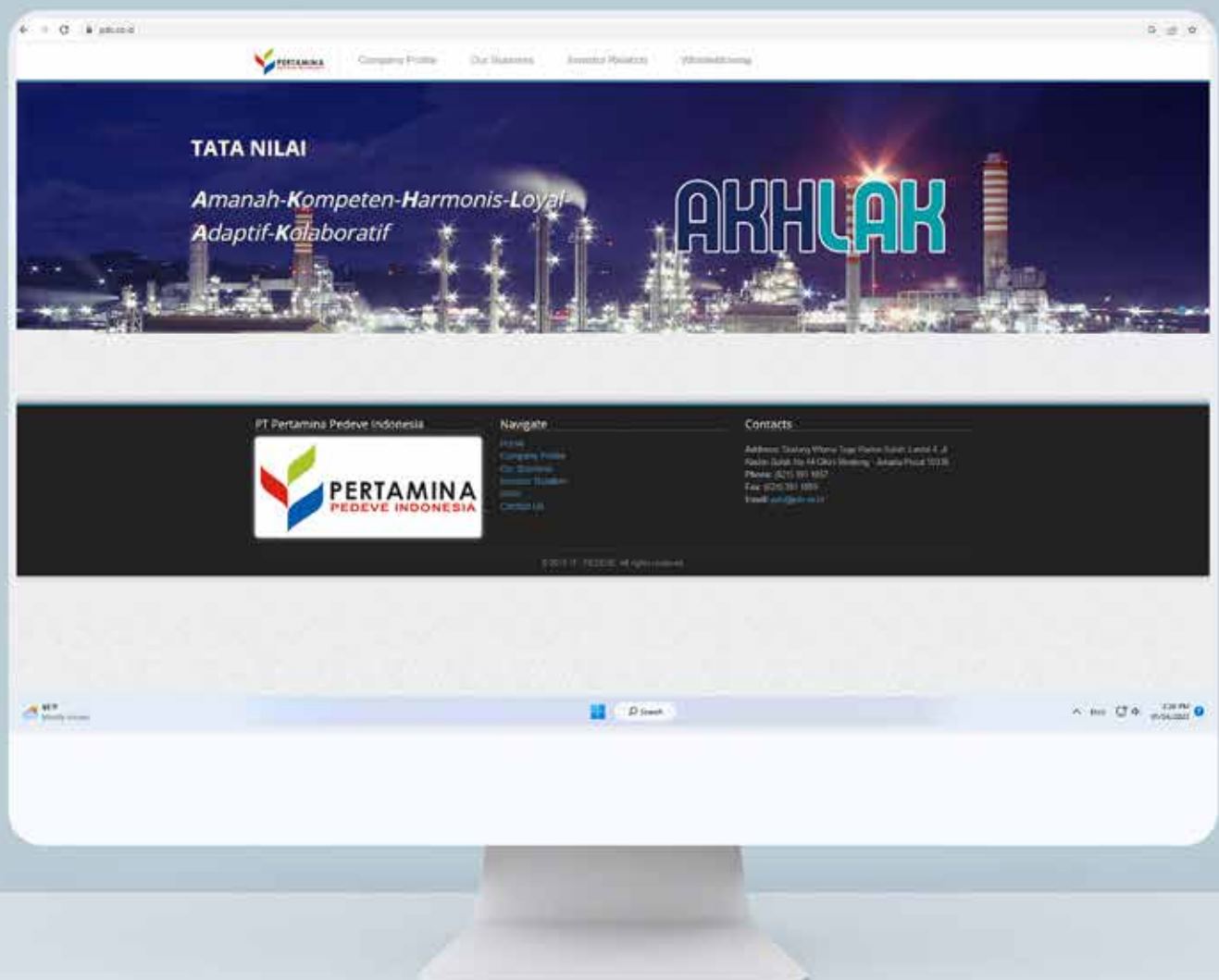
No.	NAMA	ALAMAT	BIDANG USAHA	KEPEMILIKAN SAHAM	STATUS OPERASI
15	PT Pertamina Drilling Service Indonesia	Graha PDSI Jl. Matraman Raya No. 87 Jakarta Timur 13140	Eksplorasi dan eksploitasi pengeboran minyak dan gas bumi serta panasbumi.	0,04% 438 Lembar Saham	Beroperasi
16	PT Pertamina International Shipping	Grha Pertamina, Gedung Pertamina Lantai 19 Jln. Medan Merdeka Timur No.11-13 Jakarta Pusat	Pelayaran Dalam Negeri, Kepemilikan Saham	0,003% 685 Lembar Saham	Beroperasi
17	PT Pertamina EP	Gedung Standard Chartered, lantai 21 - 29 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta 12950	Minyak, Gas Bumi di wilayah kerja bekas wilayah kuasa pertambangan PERTAMINA, sebagaimana dimaksud dalam kontrak minyak dan gas bumi Pertamina.	0,01% 25 Lembar Saham	Beroperasi
18	PT Mitra Tours & Travel	Gedung Patra Jasa, lantai 3A Jln. Gatot Subroto Kav.32-34 Jakarta 12950	Pariwisata dengan melakukan kegiatan usaha menyusun, menjual dan menyelenggarakan pelayanan wisata, paket wisata, pemanduan wisata dalam dan luar negeri, pengurusan dokumen perjalanan serta ticketing.	3,50% 14.000 Lembar Saham	Beroperasi
19	PT Pertamina Gas	Grha Pertamina, Gedung Pertamina, lantai 20-23 Jln. Medan Merdeka Timur No.11-13 Jakarta Pusat	Sektor Midstream dan Downstream industri gas Indonesia meliputi transportasi gas, niaga gas, pemrosesan gas, regasifikasi LNG dan transportasi minyak.	0,01% 500 Lembar Saham	Beroperasi
20	PT Badak Natural Gas Liquefaction	Wisma Nusantara, Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 59 Jakarta 10350	Minyak, Gas Bumi dan Energi baik didalam maupun diluar negeri, serta kegiatan usaha lain yang terkait dan atau menunjang kegiatan usaha di bidang Minyak, Gas Bumi dan energi lainnya	15% 6.000 Lembar Saham	Beroperasi
21	PT Pelita Air Service	Jalan Abdul Muis No. 52-56 A Jakarta 10160	Penerbangan dan bidang-bidang lain yang berhubungan dengan penerbangan.	0,00314% 26 Lembar Saham	Beroperasi
22	PT Kilang Pertamina Balikpapan	Gedung Patra Jasa, lantai 2 Jln. Gatot Subroto Kav.32-34 Jakarta 12950	Menjalankan Investasi Kilang Minyak di bidang energi baru dan terbarukan	0,10% 11.800 Lembar Saham	Beroperasi
23	PT Pertamina Bina Medika IHC	Jln. Kiai Maja no. 43 Jakarta Selatan	Jasa layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat antara lain jasa mengusahakan, menjalankan,memelihara, mengelola atau menyelenggarakan rumah sakit, poliklinik, rumah bersalin dan lainnya.	0,01% 1.484 Lembar Saham	Beroperasi

No.	NAMA	ALAMAT	BIDANG USAHA	KEPEMILIKAN SAHAM	STATUS OPERASI
24	PT Pertamina Algeria Explorasi dan Produksi (PAEP)	Gedung Patra Jasa, lantai 12 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav . 32-34 Jakarta Selatan	Minyak, gas bumi, dan energi untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT PAEP dapat melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi termasuk eksplorasi, eksploitasi, melakukan penyertaan saham dan participating interest di luar negeri, serta kegiatan lain yang terkait.	0,000007% 1 Lembar Saham	Beroperasi
25	PT Pertamina Malaysia Exploration & Production (PMEP)	Gedung Patra Jasa, lantai 12 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav . 32-34 Jakarta Selatan	Minyak, gas bumi, dan energi untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT PMEP dapat melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi termasuk eksplorasi, eksploitasi, melakukan penyertaan saham dan participating interest di luar negeri.	0,000005% 1 Lembar Saham	Beroperasi
26	PT Patra Jasa	Patra Jasa Office Tower 3A Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav . 32-34 Jakarta 12520	Industri perhotelan, pengembangan properti dan kawasan.	0,001% 10 Lembar Saham	Beroperasi
27	PT Pertamina Hulu Attaka	Gedung Kwarnas, lantai 4 Jl. Medan Merdeka Timur No. 6, Gambir Jakarta Pusat	Minyak, gas bumi dan energi untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi termasuk eksplorasi, eksploitasi, melakukan penyertaan saham dan participating interest di dalam negeri.	1% 15 Lembar Saham	Beroperasi
28	PT Pertamina Retail	Grha Pertamina, Gedung Pertamax. Lantai 10-11 Jln. Medan Merdeka Timur No.11-13 Jakarta Pusat	Retail produk Pertamina.	0,0004% 2 Lembar Saham	Beroperasi
29	PT Pertamina Trans Kontinental	Gedung Pertamina Trans Kontinental Jl. Kramat Raya No.29 Jakarta 10450	Jasa pelayanan, jasa maritim dan jasa logistik baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha dibidang jasa pelayanan, jasa maritim dan jasa logistik tersebut	10 Lembar Saham Seri A	Beroperasi
30	PT Pertamina Hulu West Ganai	Grha Elnusa, lantai 9 Jln. TB Simatupang Kav.1B, Jakarta Selatan	Minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha lain yang terkait dan/atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi	1% 15 Lembar Saham	Beroperasi
31	PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP)	Gedung Patra Jasa Lantai 12 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav . 32-34 Jakarta Selatan	Minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha lain yang terkait dan/atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi.	0,000002% 1 Lembar Saham	Beroperasi

No.	NAMA	ALAMAT	BIDANG USAHA	KEPEMILIKAN SAHAM	STATUS OPERASI
32	PT Pertamina Power Indonesia	Grha Pertamina, Gedung Pertamina, lantai 12 Jln. Medan Merdeka Timur No.11-13 Jakarta Pusat	Ketenagalistrikan dan energi lainnya berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip Perusahaan Terbatas serta melaksanakan pengelolaan dan pengembangan fasilitas floating storage dan regasification terminal termasuk pembelian LNG dan pemasaran atas hasil pengelolaan fasilitas FSRT serta kegiatan bisnis lainnya yang bertujuan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi Pemegang Saham.	0,0001% 15 Lembar Saham	Beroperasi
33	PT Pertamina East Natuna	Gedung Kwarnas, lantai 11 Jl. Medan Merdeka Timur No. 6, Gambir Jakarta Pusat	Minyak dan gas bumi, untuk mencapai tujuan Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha hulu (minyak & gas bumi).	0,10% 1 Lembar Saham	Beroperasi
34	PT Pertamina Irak Eksplorasi Produksi (PIREP)	Gedung Patra Jasa, lantai 12 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav . 32-34 Jakarta Selatan	Minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha lain yang terkait dan atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi.	0,000024% 1 Lembar Saham	Beroperasi
35	PT Pertamina Hulu Energi Arun	PHE Tower Jl. TB. Simatupang Kav . 99 Jakarta Selatan 12520	Minyak, Gas Bumi dan Energi baik didalam maupun diluar negeri,serta kegiatan usaha lain yang terkait dan atau menunjang kegiatan usaha di bidang Minyak, Gas Bumi dan energi lainnya.	0,003% 500 Lembar Saham	Beroperasi

Website Perusahaan

Informasi pada Website Perusahaan PT Pertamina Pedeve Indonesia telah memiliki situs (*website*) yang dikelola Perseroan, yaitu www.pdv.co.id, yang dapat diakses oleh Pemangku Kepentingan untuk mendapatkan informasi tentang berbagai hal terkait Perseroan.





-10,5139 -16,3750 22,5439
-20,8944 22,5439 22,5439
-33,1167 72,2250

ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJAUAN UMUM

Tahun 2022 merupakan tahun recovery, perekonomian nasional terus menunjukkan resiliensi dan beranjak pulih lebih cepat. Didukung fundamental ekonomi nasional yang kuat, aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat meski kondisi global masih mengalami perkembangan yang pasang surut. Bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil Pemerintah, salah satunya melalui Program PC-PEN, berhasil menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2022 yang tumbuh solid sebesar 5,01% (yoy). Secara *full year*, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2022 juga mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,31% (ctc). Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan Pemerintah yakni sebesar 5,2% (ctc), dan kembali mencapai level 5% seperti sebelum pandemi.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya tidak serta merta berdampak positif terhadap pendapatan dividen Perseroan karena dividen yang diputuskan di tahun 2022 adalah pembagian laba tahun sebelumnya. Di samping itu, berbagai aksi korporasi yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas dari investee atau aksi korporasi yang dilakukan oleh investee berdampak terhadap penurunan persentase kepemilikan Perseroan pada investee. Hal tersebut berdampak terhadap pendapatan dividen Perseroan di tahun 2022. Adapun penerimaan dividen tahun 2022 sebagai berikut:

NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH DIVIDEN (Rp Ribu)
PT PERTAMINA EP CEPU	61.801.900
PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY	34.351.881
PT TRANS JAVAGAS PIPELINE	18.026.040
PT PERTAMINA HULU ROKAN	9.069.616
PT PERTAMINA HULU ENERGI	1.367.125
PT PERTAMINA TRAINING & CONSULTING	1.141.365
PT PERTAMINA LUBRICANTS	883.532
PT PERTAMINA EP	513.275
PT PERTAMINA HULU INDONESIA	224.674
PT PERTAMINA GAS	79.365
PT PERTAMINA BINA MEDIKA	31.154
PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	17.756
PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL	7.238
PT PERTAMINA RETAIL	320
PT PERTAMINA ALGERIA EP	180
PT PATRA JASA	66
TOTAL	127.515.487

PROSPEK PEREKONOMIAN

Perekonomian Global

Di tengah terpaan tantangan global dan pertumbuhan ekonomi negara-negara besar yang melambat, Indonesia dan ASEAN menjadi kawasan dengan pertumbuhan tertinggi dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan Indonesia disebut merupakan *the bright spot in the dark* di tengah ketidakpastian global. *International Monetary Fund* (IMF) sebagai lembaga internasional yang bergerak di bidang keuangan pada laporan Laporan World Economic Outlook (WEO) *International Monetary Fund* (IMF) edisi Januari 2023 memprediksi pertumbuhan global akan turun menjadi 2,9 persen pada tahun 2023 tetapi meningkat menjadi 3,1 persen pada tahun 2024. Perkiraan tahun 2023 adalah 0,2 poin persentase lebih tinggi dari perkiraan pada Outlook Ekonomi Dunia Oktober 2022 tetapi di bawah rata-rata historis sebesar 3,8 persen. Kenaikan suku bunga dan perang di Ukraina terus membebani aktivitas ekonomi. Pembukaan kembali China baru-baru ini telah membuka jalan bagi pemulihan yang lebih cepat dari perkiraan. Inflasi global diperkirakan akan turun menjadi 6,6 persen pada 2023 dan 4,3 persen pada 2024, masih di atas level sebelum pandemi.

Selain optimisme terhadap tahun 2023, terdapat beberapa analisa skeptis terkait perkembangan tahun 2023 Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul *"Is a Global Recession Imminent?"* memprediksi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global pada tahun 2023 mendatang. Prediksi tersebut, terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi. Ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 bukanlah tantangan yang mudah, terutama akibat ketegangan geopolitik yang berimbas pada disrupsi rantai pasok global berpotensi berimbas pada perekonomian domestik. Disamping tantangan geopolitik dan resesi ekonomi tersebut, dunia juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang akan sangat mempengaruhi keuangan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat.

Perekonomian Kawasan

ASEAN merupakan kawasan ekonomi terbesar kelima di dunia. Hal ini didukung dengan jumlah populasi yang mencapai lebih dari 650 juta jiwa. Kawasan ASEAN mempunyai modal cukup mumpuni untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan PDB mencapai USD3.36 triliun pada 2021. Pada *closing speech* pada acara DBS Asian Insights Forum 2023 yang diselenggarakan pada 15 Maret 2023, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan tingkat perdagangan ASEAN dengan negara-negara mitra juga bertumbuh signifikan, mencapai 34% dalam dekade terakhir. Sementara itu, nilai investasi asing yang masuk ke ASEAN pada 2021 mencapai USD179 miliar dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor keuangan dan asuransi yakni sebesar 32%. Dari sisi inflasi, mayoritas negara ASEAN juga berada di bawah level inflasi global pada tahun 2022.

Laporan IMF bahkan menunjukkan, dalam satu dekade terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan ASEAN mencapai 3,98 persen, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,6 persen. Lembaga dunia itu juga memproyeksikan pertumbuhan di kawasan ASEAN pada 2022 sebesar 5,1 persen. Potensi besar ekonomi negara yang tergabung di ASEAN ini tergambarkan dari data Seastats yang mengutip data IMF 2023. Di mana laporan itu menyebutkan, total *gross domestic product* (GDP) ASEAN sebesar USD3.909,93.

Perekonomian Indonesia

Strategi utama Indonesia untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan memperkuat daya saing dalam mewujudkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi antara lain dilakukan melalui transformasi digital dengan memperluas transaksi mata uang lokal dan QRIS serta percepatan perundingan *Digital Economic Framework Agreement* atau DEFA. Untuk mendorong peningkatan berbagai capaian tersebut, ASEAN perlu memanfaatkan berbagai kerja sama ekonomi di kawasan, baik dalam bentuk ASEAN + 1 FTA maupun Regional Comprehensive

Economic Partnership (RCEP). RCEP yang diinisiasi Indonesia pada 2011 telah menciptakan kekuatan ekonomi baru, dengan potensi menjadikan RCEP sebagai kawasan basis industri yang kompetitif di dunia.

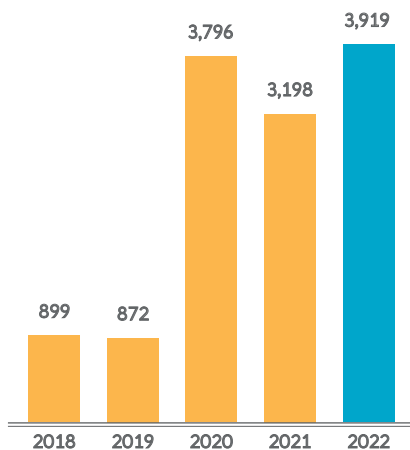
Dalam perspektif lain terdapat asumsi terjadinya resesi mengharuskan setiap negara menetapkan langkah strategis memitigasi kemungkinan keadaan tersebut. Resesi ekonomi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Selain karena meningkatnya harga-harga secara tajam sehingga menyebabkan ekonomi menjadi stagnan atau dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi, resesi ekonomi juga bisa terjadi karena turunnya harga-harga atau deflasi.

Kondisi perekonomian Indonesia dinilai masih kuat menghadapi gejolak ekonomi global yang mengarah pada resesi ekonomi. Potensi untuk bertahan menghadapi risiko terjadinya resesi ekonomi cukup besar karena ditopang oleh PDB yang masih positif serta tingkat inflasi yang relatif lebih rendah dibandingkan banyak negara lain. Ancaman akan terjadinya resesi ekonomi global ini disikapi oleh pemerintah dengan melakukan langkah antisipatif untuk terus mendorong kinerja perekonomian nasional. Walaupun kinerja perekonomian nasional saat ini cukup positif, namun jika resesi ekonomi global benar-benar terjadi maka Indonesia diyakini akan terkena dampaknya dan dapat menyeret Indonesia ke dalam “jurang” resesi ekonomi tersebut.

Dalam seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia, Bank Indonesia optimis bisa menekan laju inflasi di angka 3% plus minus 1% di tahun 2023. Namun, berbeda dari BI, Ekonom senior Indef Aviliani memperkirakan inflasi tahun depan masih di kisaran 6% di bawah 7%. Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran sasarannya. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2023 akan terus difokuskan untuk menjaga stabilitas atau *pro-stability*. Kebijakan Bank Indonesia lainnya sebagai bagian dari upaya bersama dalam akselerasi pemulihan ekonomi nasional atau *pro-growth*, diantaranya kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau.

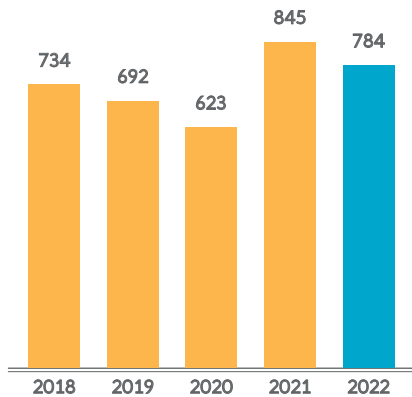
URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Usaha	Rp Juta	115.940	160.741	197.669	341.294	155.821
Beban Usaha	Rp Juta	-	-	-	-	-
Laba Kotor	Rp Juta	115.940	160.741	197.669	341.294	155.821
Beban Operasional	Rp Juta	(20.390)	(10.631)	(8.936)	(10.960)	(12.951)
Laba Usaha	Rp Juta	95.550	150.110	188.733	330.334	142.870
Pendapatan (Beban) Lain-lain	Rp Juta	(3.395)	(1.641)	4.623	(2.488)	5.253
Beban Penurunan Nilai Piutang	Rp Juta	(3.344)	(5.435)	(665)	-	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	Rp Juta	88.811	143.034	192.691	327.846	148.123
Beban Pajak Final	Rp Juta	(9.010)	(10.287)	(6.471)	(5.195)	(5.661)
Beban Pajak Penghasilan	Rp Juta	(1.710)	(11.504)	(74.620)	(27.499)	(481)
Laba Bersih	Rp Juta	78.091	121.243	111.600	295.152	141.981
Jumlah Aktiva	Rp Juta	899.248	871.801	3.796.529	3.198.174	3.919.284
Jumlah Kewajiban	Rp Juta	57.840	26.293	617.481	489.061	753.350
Jumlah Ekuitas	Rp Juta	841.408	845.508	3.179.048	2.709.113	3.165.934
Rasio Laba bersih terhadap Ekuitas (ROE)	%	10,23	15,38	14,58	37,70	18,13
Rasio Imbalan Investasi (ROI)	%	8,64	14,90	20,26	29,95	14,01
Rasio Kas	%	1.255	2.711,67	2.327,39	3.031,29	586,71
Rasio Lancar	%	1.343	2.720,36	2.330,05	3.156,54	660,49
Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset	%	93,56	96,98	96,85	84,71	80,78



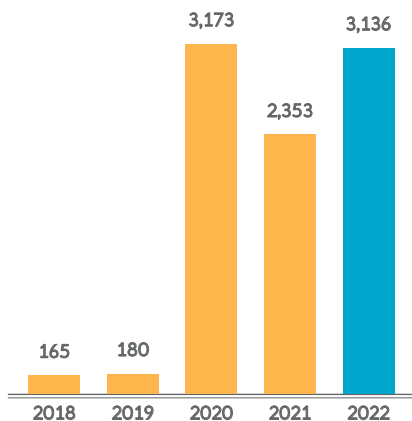
ASET

Jumlah Aset di akhir tahun 2022 sebesar Rp3.919 Miliar naik 22,5% atau Rp721 Miliar dari tahun 2021. Kenaikan terutama disebabkan oleh adanya kenaikan hasil valuasi nilai wajar penyertaan saham. Selisih nilai penyertaan saham akibat valuasi saham dicatat pada akun Komponen Ekuitas Lainnya dan Liabilitas Pajak Tangguhan. Selain itu, pertumbuhan aset Perseroan juga berasal dari hasil operasional tahun berjalan.



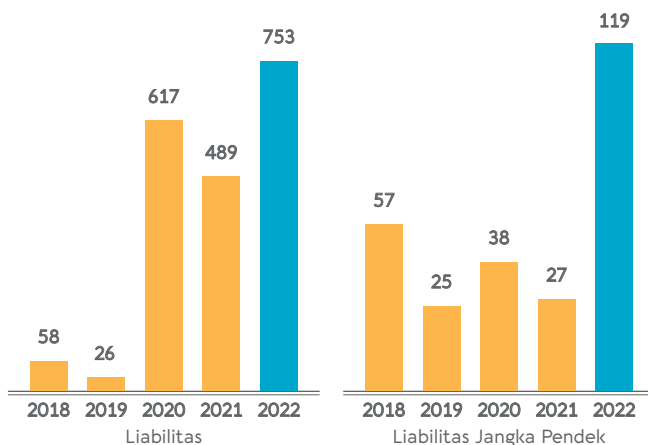
ASET LANCAR

Aset lancar di akhir tahun 2022 sebesar Rp784 Miliar turun sebesar Rp61 Miliar atau 7,2% dari tahun 2021. Penurunan terutama disebabkan oleh pembayaran dividen tahun buku 2021 yang jumlahnya lebih besar dari penerimaan operasional tahun 2022.



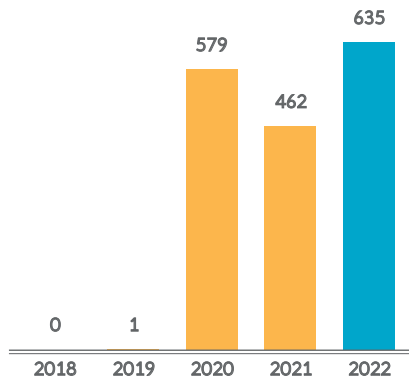
ASET TIDAK LANCAR

Aset Tidak Lancar di akhir tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp783 Miliar atau 33% dari tahun 2021. Kenaikan aset tidak lancar disebabkan karena adanya kenaikan atas valuasi nilai wajar saham sehubungan dengan PSAK 71.



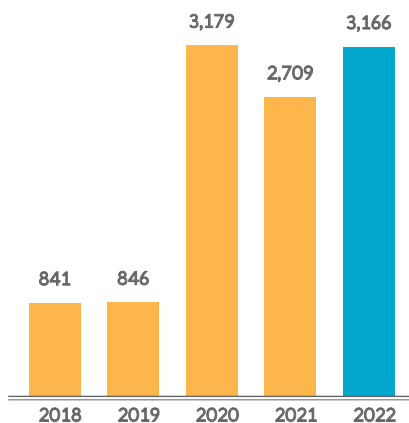
LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas Jangka Pendek di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp92 Miliar dari tahun 2021. Kenaikan terutama karena adanya penerimaan dividen interim dari PT Pertamina Geothermal Energy dan PT Pertamina EP Cepu sebesar Rp 110 Miliar walaupun di tahun 2022 juga terdapat pengurangan beban akrual dan hutang pajak tahun 2021 sebesar Rp 18 Milyar



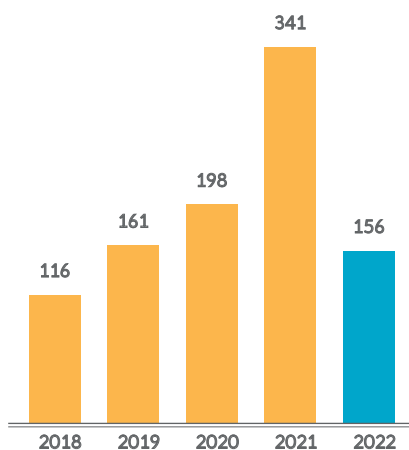
LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas Jangka Panjang meliputi liabilitas imbalan kerja, liabilitas sewa jangka panjang sesuai implementasi PSAK 73 dan liabilitas pajak tangguhan sehubungan penyesuaian nilai wajar saham. Kenaikan Liabilitas Jangka Panjang terutama karena kenaikan liabilitas pajak tangguhan seiring dengan kenaikan nilai wajar penyertaan saham.



EKUITAS

Ekuitas mengalami kenaikan net sebesar Rp457 Miliar dari tahun 2021 yang terutama disebabkan kenaikan nilai wajar penyertaan saham yang dicatat pada akun Komponen Ekuitas Lainnya dan penambahan dari laba bersih tahun berjalan sebesar Rp142 Miliar serta berkurang dengan adanya pembayaran dividen sebesar Rp295 Miliar



PENDAPATAN USAHA

Realisasi pendapatan usaha tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp185 miliar atau 54% dari tahun 2021. Hal ini terutama karena pendapatan dividen yang diterima tahun 2022 merupakan pembagian laba tahun 2021 sedangkan penerimaan dividen tahun 2021 berasal dari laba bersih tahun 2020 dan laba ditahan sebelum tahun 2020.

Beban Usaha

Realisasi beban usaha tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2 miliar atau naik 18% dari tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian upah pekerja, remunerasi direksi dan komisaris.

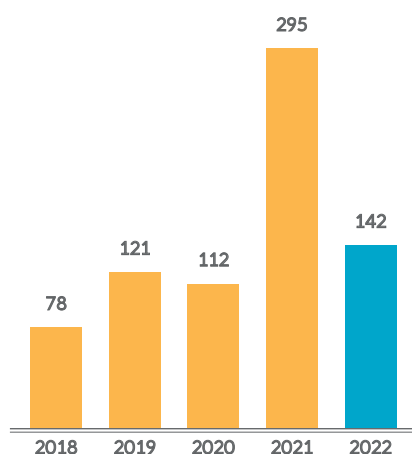
Keterangan	2021		2022	
	Jutaan Rupiah	Kontribusi %	Jutaan Rupiah	Kontribusi %
Biaya Kantor	3.884	35,44	4.406	34,02
Biaya Karyawan	6.446	58,81	7.726	59,66
Beban Penyusutan dan Amortisasi	630	5,75	819	6,32
Total	10.960	100,00	12.951	100,00

Pendapatan (Beban) Lain-lain

Realisasi pendapatan lain-lain tahun 2022 sebesar Rp5,3 miliar terutama karena adanya kelebihan pencadangan biaya dan hutang pajak yang dikoreksi sebagai pendapatan lain-lain sedangkan tahun 2021 mencatat adanya beban lain-lain berupa pencadangan beban pajak sesuai hasil pemeriksaan pajak badan tahun 2020.

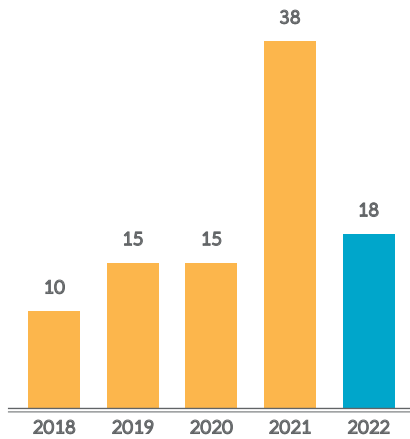
Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak final timbul atas pendapatan deposito dan giro. Realisasi beban pajak final tahun 2022 sebesar Rp5,6 Miliar sedangkan beban pajak final tahun 2021 sebesar Rp5 Miliar. Kenaikan pajak final seiring dengan kenaikan pendapatan deposito dan giro. Sehubungan dengan pemberlakuan PMK No 18 tahun 2021 bahwa pendapatan dividen bukan merupakan objek pajak penghasilan sehingga beban pajak penghasilan pajak atas pendapatan dividen adalah nihil.



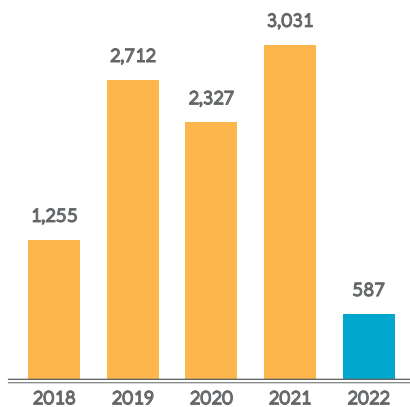
LABA BERSIH

Realisasi total laba bersih tahun 2022 sebesar Rp142 miliar atau turun sebesar Rp153 miliar (52%) dari tahun 2021 sebesar Rp295 miliar yang terutama disebabkan menurunnya pendapatan dividen mengingat pada tahun 2021, pendapatan dividen selain diterima dari laba bersih tahun 2020 juga terdapat pembagian dividen atas saldo laba sebelum tahun 2020.



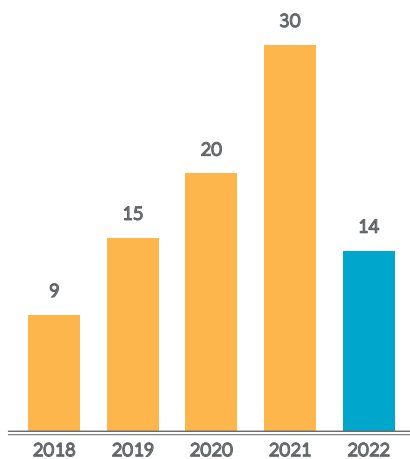
ROE (%)

Rasio ROE menggambarkan kemampuan ekuitas Perusahaan dalam menghasilkan laba, turun sebesar 52% dari 38% di tahun 2021 menjadi 18% di tahun 2022 seiring dengan turunnya laba bersih di tahun 2022.



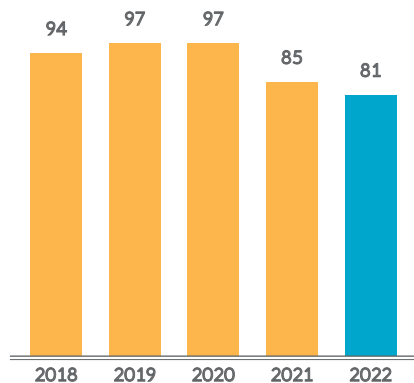
RASIO KAS (%)

Rasio kas menggambarkan kemampuan aset sangat lancar (*quick assets*) Perusahaan dalam melunasi liabilitas jangka pendeknya, mengalami penurunan dari 3.031% di tahun 2021 menjadi sebesar 587% atau turun sebesar 30% di tahun 2022. Penurunan rasio kas di tahun 2022 terutama karena berkurangnya saldo kas dan setara kas Perusahaan akibat pembayaran dividen tahun buku 2021 sedangkan liabilitas jangka pendeknya meningkat terutama karena penerimaan uang muka dividen.



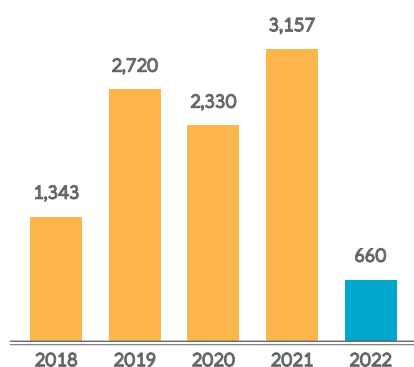
ROI (%)

Rasio ROI menggambarkan kemampuan aset yang dimiliki oleh Perusahaan dalam menghasilkan laba di tahun berjalan, mengalami penurunan dari 30% di tahun 2021 menjadi 14% di tahun 2022 seiring dengan turunnya laba bersih di tahun 2022.



RASIO TOTAL MODAL SENDIRI TERHADAP ASET (%)

Rasio TMS/TA menggambarkan kemampuan Perusahaan dalam pertumbuhan aktiva dengan menggunakan modal sendiri turun dari 85% di tahun 2021 menjadi 81% di tahun 2022.



RASIO LANCAR (%)

Rasio lancar menggambarkan kemampuan aset lancar Perusahaan dalam melunasi liabilitas jangka pendeknya, mengalami penurunan dari 3.157% di tahun 2021 menjadi 660% di tahun 2022.

SINERGI PERTAMINA GROUP

Sinergi Pertamina Group dilakukan dengan keselarasan antara *operational excellence*, peningkatan profit maupun *cost effectiveness* guna mendukung seluruh elemen Pertamina Group. Selama tahun 2022, realisasi sinergi dengan Anak Perusahaan Pertamina Group sebesar Rp 1.564 Juta atau meningkat 14% dibandingkan realisasi tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

No	PARTNER SINERGI	JENIS TRANSAKSI	2021	2022	PENCAPAIAN
1	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia	Sewa Kantor dan Kendaraan	1,322.70	1,386.73	105%
2	PT Pertamina Bina Medika IHC	Jasa Layanan Kesehatan	29.41	30.83	105%
3	PT Pertamina Training & Consulting	Pendidikan dan Pelatihan Pekerja	24.00	64.50	269%
4	PT Patra Jasa	Tiketing	-	82.47	-
Jumlah			1,376.11	1,564.52	114%

KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG

Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dapat dilihat melalui nilai rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Nilai rasio likuiditas menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek, yang diukur melalui rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan cara membandingkan kas yang dimiliki dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

RASIO LIKUIDITAS

Nilai Rasio Likuiditas pada tahun 2022 memperlihatkan penurunan dibandingkan dengan nilai pada tahun 2021. Nilai Rasio Kas pada tahun 2022 adalah 587% dan nilai Rasio Lancar sebesar 660%. Berdasarkan nilai tersebut dapat diketahui walaupun nilai rasio kas dan rasio mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 tapi kemampuan Perusahaan dalam membayar utang dalam kurun waktu periode pelaporan masih sangat baik.

Tabel Rasio Likuiditas (%)

Uraian	2021	2022	Perubahan	
			Nominal	%
Rasio Kas	3.031	587	(2.445)	81
Rasio Lancar	3.157	660	(2.496)	79

RASIO SOLVABILITAS

Rasio Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya, dan diukur melalui:

- Rasio liabilitas terhadap ekuitas yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas.
- Rasio liabilitas terhadap aset yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset.

Nilai Solvabilitas Perusahaan pada tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan, dan dipengaruhi oleh penurunan liabilitas. Secara umum kemampuan Perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh Rasio Solvabilitas rendah yang menunjukkan kondisi perusahaan semakin baik karena porsi utang terhadap modal semakin kecil.

Tabel Rasio Solvabilitas (%)

Uraian	2021	2022	Perubahan	
			Nominal	%
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	18	24	6	33%
Rasio Liabilitas Terhadap Aset	15	19	4	27%

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Dalam mengukur Tingkat Kolektibilitas Piutang, Perusahaan menggunakan indikator *Collection Period*. Indikator ini digunakan untuk mengukur rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang (dalam satuan hari). Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan jumlah piutang dalam setiap jangka waktu tertentu. Kolektibilitas piutang usaha dan piutang lain-lain ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih dilakukan penurunan nilai dengan membentuk akun cadangan penurunan nilai yang mengurangi nilai neto piutang. Pada tahun 2022, *Collection Period* mengalami kenaikan yaitu selama 0 hari apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya selama 35,7 hari.

STRUKTUR MODAL

Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 18 Juni 2002 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No 12 tanggal 18 Juni 2002 dibuat dihadapan Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta, komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- PT Pertamina (Persero) sebesar Rp174.875.000.000 (99,93%) atau sebanyak 174.875 lembar saham.
- PT Pertamina Bina Medika sebesar Rp125.000.000 (0,07%) atau sebanyak 125 lembar saham.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 09 tanggal 23 Mei 2008 dibuat dihadapan Yulkhaizar Panuh, S.H., Notaris di Jakarta, komposisi pemegang saham Perseroan berubah di mana PT Pertamina Bina Medika telah menjual seluruh kepemilikan sahamnya (0,07%) atau sebanyak 125 lembar saham kepada PT Pertamina Patra Niaga, sehingga komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- PT Pertamina (Persero) sebesar Rp174.875.000.000 (99,93%) atau sebanyak 174.875 lembar saham.
- PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp125.000.000 (0,07%) atau sebanyak 125 lembar saham.

Tabel Struktur Modal Perseroan

(dalam Ribu Rupiah)

Uraian	2022		2021		Perubahan	
	Nominal (A)	Kontribusi	Nominal (B)	Kontribusi	Nominal (C)=(A)-(B)	% (D)=(A)/(B)
ASET						
Aset Lancar	783.549.187	19,99%	844.823.406	26,42%	(61.274.219)	92,75%
Aset Tidak Lancar	3.135.734.506	80,01%	2.353.351.051	73,58%	782.383.455	133,25%
Aset	3.919.283.693	100,00%	3.198.174.457	100,00%	721.109.236	122,55%
LIABILITAS					-	
Jangka Pendek	118.631.061	3,03%	26.764.264	0,84%	91.866.797	443,24%
Jangka Panjang	634.718.645	16,19%	462.296.960	14,46%	172.421.685	137,30%
Liabilitas	753.349.706	19,22%	489.061.224	15,29%	264.288.482	154,04%
Ekuitas					-	
Modal Saham	175.000.000	4,47%	175.000.000	5,47%	-	100,00%
Tambahan Modal Disetor	8.307.977	0,21%	8.307.977	0,26%	-	100,00%
Saldo Laba yang telah ditentukan penggunaannya	43.807.046	1,12%	43.807.046	1,37%	-	100,00%
Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya	683.039.800	17,43%	836.210.564	26,15%	(153.170.764)	81,68%
Komponen Ekuitas Lainnya	2.255.779.164	57,56%	1.645.787.646	51,46%	609.991.518	137,06%
Ekuitas	3.165.933.987	80,78%	2.709.113.233	84,71%	456.820.754	116,86%
LIABILITAS & EKUITAS	3.919.283.693	100,00%	3.198.174.457	100,00%	721.109.236	122,55%

INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU

Sepanjang tahun buku 2022 Perseroan melakukan pembelian Barang Modal berupa mesin fotocopy dan printer sesuai yang dianggarkan dalam RKAP 2022.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Keuangan Audited tanggal 23 Februari 2023, tidak terdapat peristiwa penting setelah tanggal Neraca yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Pada tahun 2021 terjadi restrukturisasi di Pertamina Group. PT Pertamina (Persero) sebagai holding membentuk beberapa subholding yang berakibat kepada perubahan komposisi pemegang saham di anak dan cucu perusahaan PT Pertamina (Persero). Perubahan komposisi pemegang saham tersebut berdampak pada terdilusinya kepemilikan saham Perseroan pada investee yang terdampak. Dilusi kepemilikan saham Perseroan di perusahaan-perusahaan tersebut berdampak pada pendapatan dividen tahun 2022 dan seterusnya.

Untuk mengatasi dampak tersebut terhadap pencapaian target yang telah disusun, Perseroan merencanakan serangkaian strategi sebagai berikut:

1. Melakukan penyertaan saham pada perusahaan di Pertamina Group yang akan dibentuk dan melakukan penambahan penyertaan saham pada investee yang memerlukan peningkatan modal dan memiliki historis kinerja yang baik.
2. Melaksanakan *cash management* yang optimal sehingga diperoleh jaminan atas pemenuhan kebutuhan dana yang tepat waktu dan tepat jumlah untuk kelancaran realisasi rencana-rencana investasi Perseroan dan operasional rutin Perseroan.
3. Mendukung pemenuhan kebutuhan pendanaan pada anak perusahaan/afiliasi Pertamina baik melalui *notional pooling* ataupun mekanisme lainnya.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET/ PROYEKSI DENGAN REALISASI

Perbandingan antara pencapaian dengan target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Pertamina Pedeve Indonesia tahun 2022 mencakup hal-hal sebagai berikut :

ASPEK FINANSIAL

Perbandingan realisasi dengan nilai target RKAP 2022 disajikan sebagai berikut:

URAIAN	2022		PENCAPAIAN (%)
	TARGET (RpJuta)	REALISASI (RpJuta)	
Laporan Laba (Rugi) Komprehensif			
Pendapatan	158.717	155.821	98,18
Beban Pokok Pendapaatan	-	-	-
Laba Kotor	158.717	155.821	98,18
Beban Operasional	(13.591)	(12.951)	95,29
Laba Usaha	145.126	142.870	98,45
Pendapatan (Beban) Lain-lain	-	5.253	-
Beban Penurunan Nilai Piutang	-	-	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	145.126	148.123	102,07
Beban Pajak Final	(5.544)	(5.661)	102,11
Beban Pajak Penghasilan	(31.928)	(481)	1,51
Laba Setelah Pajak	107.655	141.981	131,89
Laporan Posisi Keuangan			
Aset Lancar	415.090	783.549	188,77
Penyertaan Saham	3.146.604	3.134.209	99,61
Aset Tetap	1.069	1.381	129,19
Aset Lain-Lain	144	144	100,00
Jumlah Aset	3.962.908	3.919.284	98,90
Liabilitas Jangka Pendek	34.852	118.631	340,39
Liabilitas Jangka Panjang	580.008	634.719	109,43
Ekuitas	3.348.047	3.165.934	94,56
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	3.962.908	3.919.284	98,90
Laporan Arus Kas			
Aktivitas Operasi			
Kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi	152.239	207.094	136,03
Kas yang digunakan dari aktivitas operasi	(87.410)	(26.577)	30,40
Jumlah Kas Bersih yang dihasilkan dari/(digunakan) untuk aktivitas operasi	64.828	180.518	278,46
Aktivitas Investasi			
Kas yang dihasilkan dari aktivitas Investasi	-	30	-
Kas yang digunakan dari aktivitas Investasi	(1.200)	(208)	17,33
Jumlah Kas Bersih yang dihasilkan dari/(digunakan) untuk aktivitas investasi	(1.200)	(178)	14,83
Aktivitas Pendanaan			
Jumlah Kas Bersih yang dihasilkan dari/(digunakan) untuk aktivitas pendanaan	(289.280)	(295.623)	102,19
Perubahan jumlah total arus kas	(225.652)	(115.283)	51,09
Saldo Awal Kas	640.146	811.302	126,74
Saldo Akhir Kas	414.494	696.019	167,92

INDIKATOR UTAMA KINERJA PERUSAHAAN

Indikator kinerja perusahaan yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari aspek keuangan, aspek pertumbuhan, aspek operasional, dan aspek administrasi dengan Perusahaan Kategori Sehat "AA" dengan skor 85,76. Perbandingan antara Target Kinerja Perusahaan dalam RKAP tahun 2022 dengan realisasinya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

TINGKAT KINERJA KEUANGAN

Pada tahun 2022, Perusahaan menargetkan Tingkat Kinerja Keuangan dalam kategori "Sehat" dengan target Nilai Kinerja Keuangan (NKK) sebesar 58,00. Dengan strategi dan upaya yang telah dilakukan selama periode 2022, Nilai Kinerja Keuangan yang diperoleh adalah sebesar 65 dengan Tingkat Kinerja Keuangan "Sehat", memenuhi dari yang ditargetkan pada RKAP 2022.

Perbandingan target indikator Tingkat Kinerja Keuangan dengan realisasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NILAI KINERJA KEUANGAN	SATUAN	2021		2022		2022	
		REALISASI		RKAP		REALISASI	
		Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot
ROE	%	37,70	20,00	11,53	14,00	18,13	20,00
ROI	%	29,95	15,00	13,46	15,00	14,01	15,00
Operating Profit Margin (OPM)	%	96,79	3,00	91,44	3,00	91,69	3,00
Net Profit Margin (NPM)	%	86,48	3,00	67,83	3,00	91,12	3,00
Rasio Kas (dengan Deposito)	%	3.031,29	5,00	1.189,29	5,00	586,71	5,00
Rasio Lancar	%	3.156,54	5,00	1.191,00	5,00	660,49	5,00
Perputaran Piutang	Hari	35,72	3,00	-	3,00	-	3,00
Perputaran Total Aset	%	30,90	3,00	14,72	3,00	15,21	3,00
Total Modal Sendiri Terhadap Aset	%	84,71	2,00	84,48	2,00	80,78	2,00
Jumlah NKK yang diproporsionalkan			65,00		58,00		65,00
Kondisi Kinerja Keuangan			Sehat		Sehat		Sehat

TINGKAT KINERJA PERTUMBUHAN

Pertumbuhan Perusahaan pada tahun 2022 mencapai Tingkat Kinerja Pertumbuhan dalam kategori "Kurang Tumbuh" dengan meraih Nilai Kinerja Pertumbuhan (NKP) sebesar 2. Angka ini diatas target Nilai Kinerja Pertumbuhan (NKP) RKAP 2022 sebesar 0,5.

Rincian Indikator Kinerja Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

NILAI KINERJA PERTUMBUHAN	SATUAN	2021		2022		2022	
		REALISASI		RKAP		REALISASI	
		Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot
Asset Productivity Growth(ASPG)	%	44,81	2,00	(55,52)	-	(54,22)	-
Sales Growth (SALG)	%	72,66	2,00	(53,53)	-	(54,34)	-
Net Profit Margin Growth (NPMG)	%	53,18	2,00	0,25	0,50	5,36	2,00
Sales to Total Asset Growth (STAG)	%	42,34	2,00	(53,25)	-	(62,74)	-
Net Profit Growth(NPG)	%	162,91	2,00	(53,42)	-	(51,90)	-
Jumlah NKP yang diproporsionalkan		10,00		0,50		2,00	
Kondisi Kinerja Keuangan		Tumbuh Sedang		Kurang Tumbuh		Kurang Tumbuh	

TINGKAT KINERJA OPERASIONAL

Pada tahun 2022, Perusahaan berhasil memperoleh Tingkat Kinerja Operasional dalam kategori “Sangat Baik” dengan pencapaian Nilai Kinerja Operasional (NKO) sebesar 8,76.

NILAI KINERJA OPERASIONAL	SATUAN	2020		2021		2022	
		REALISASI		RKAP		REALISASI	
		Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot
Service Level Agreement RUPS Sirkuler	Hari	2	1,88	2	1,88	2	1,88
Pengalihan saham di Pertamina Group	Hari	2	1,88	2	1,88	2	1,88
Ketepatan waktu dan akurasi data operasi keuangan	%	99	1,88	100	2,50	100	2,50
HSSE Excellence (Health & Safety Participation)	Jumlah	12	2,50	12	2,50	12	2,50
Jumlah NKA		8,14 (Sangat Baik)		8,76 (Sangat Baik)		8,76 (Sangat Baik)	

TINGKAT KINERJA ADMINISTRATIF

Pada tahun 2022, Perusahaan berhasil memperoleh Tingkat Kinerja Administratif dalam kategori “Tertib” dengan pencapaian Nilai Kinerja Administrasi (NKA) sebesar 10,00 Angka ini sesuai dengan target Nilai Kinerja Administrasi (NKA) sebesar 10,00.

NILAI KINERJA ADMINISTRASI	SATUAN	2021		2022		2022	
		REALISASI		RKAP		REALISASI	
		Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot
Laporan Keuangan Bulanan	Hari	≤ 7 Hr	2,00	≤ 7 Hr	2,00	≤ 7 Hr	2,00
Laporan Manajemen Bulanan	Hari	≤ 15 Hr	2,00	≤ 12 Hr	2,00	≤ 12 Hr	2,00
Laporan Keuangan Audited	Bulan	Februari	3,00	Februari	3,00	Februari	3,00
Rancangan RKAP	Bulan	Juli	3,00	Juli	3,00	Juli	3,00
Jumlah NKA		10,00 (Tertib)		10,00 (Tertib)		10,00 (Tertib)	

Dengan perolehan nilai Tingkat Kinerja Perusahaan di atas, maka Rekapitulasi Aspek Kinerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

NILAI KINERJA	2021		2022	
	REALISASI		RKAP	
			REALISASI	
Nilai Kinerja Keuangan	65,00		58,00	
Nilai Kinerja Pertumbuhan	10,00		0,50	
Nilai Kinerja Operasional	8,76		8,76	
Nilai Kinerja Administrasi	10,00		10,00	
Total Nilai Kinerja	93,76 (Sehat AA)		77,26 (Sehat AA)	

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2022
tidak terdapat Transaksi
Material yang mengandung
benturan kepentingan
terhadap management
Perseroan maupun Pekerja
Perseroan



PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2022, secara prinsip terdapat peraturan perundang-undangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap operasional Perseroan, khususnya terkait dengan perpajakan dan ketenagakerjaan, yaitu:

Peraturan Perundangan	Penjabaran
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja	• Mengubah: i. UU 26 th 2007 ttg Penataan Ruang (Pasal 17: H. 13); ii. UU 27 th 2007 ttg Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-pulau Kecil (Pasal 18: H. 39); UU 32 th 2014 ttg Kelautan (Pasal 19: H. 58); UU 4 th 2011 ttg Informasi Geospasial; • Mengubah: i. UU 39 th 2014 ttg Perkebunan; ii. UU 29 th 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; iii. UU 22 th 2019 ttg Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan; iv. UU 19 th 2013 ttg Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; v. UU 13 th 2010 ttg Hortikultura; vi. UU 18 th 2009 ttg Peternakan dan Kesehatan Hewan; • Mengubah: a. UU 4 th 2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara; b. UU 22 th 2001 ttg Minyak dan Gas Bumi; c. UU 21 th 2014 ttg Panas Bumi; d. UU 30 th 2009 ttg Ketenagalistrikan; • Mengubah: a. UU 7 th 2004 ttg Perdagangan; b. UU 2 th 1981 ttg Metrologi Legal; c. UU 33 th 2014 ttg Jaminan Produk Halal; • Mengubah: a. UU 1 th 2011 ttg Perumahan dan Kawasan Pemukiman; b. UU 20 th 2011 ttg Rumah Susun; c. UU 2 th 2017 ttg Jasa Konstruksi; d. UU 17 th 2019 ttg Sumber Daya Air; • Mengubah: a. UU 22 th 2009 ttg lalulintas dan Angkutan Jalan; b. UU 23 th 2007 ttg Perkeretaapian; c. UU 17 th 2008 ttg Pelayaran; d. UU 1 th 2009 ttg Penerbangan; • Mengubah: a. UU 36 th 2009 ttg Kesehatan; b. UU 44 th 2009 ttg Rumah Sakit; c. UU 5 th 1997 ttg Psikotropika; d. UU 35 th 2009 ttg Narkotika; e. UU 18 th 2012 ttg Pangan; • Mengubah: a. UU 38 th 2009 ttg Pos; b. UU 36 th 1999 ttg Telekomunikasi; c. UU 32 th 2002 ttg Penyiaran; • Mengubah: a. UU 16 th 2012 ttg Industri Pertahanan; b. UU 2 th 2002 ttg Kepolisian Negara Republik Indonesia; • Mengubah: a. UU 25 th 2007 ttg Penanaman Modal; b. UU 7 th 1992 diubah UU 10 th 1998 ttg Perbankan; c. UU 21 th 2008 ttg Perbankan Syariah; • Mengubah: a. UU 13 th 2003 ttg Ketenagakerjaan; b. UU 40 th 2004 ttg Sistem Jaminan Sosial Nasional; c. UU 24 th 2011 ttg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; d. UU 18 th 2017 ttg Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; • Mengubah: a. UU 25 th 1992 ttg Perkoperasian; b. UU 20 th 2008 ttg Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; c. UU 38 th 2004 ttg Jalan; • Mengubah: a. UU 6 th 2011 ttg Keimigrasian; b. UU 13 th 2016 ttg Paten; c. UU 20 th 2016 ttg Merek; d. UU 40 th 2007 ttg Perseroan Terbatas; e. Staatsblad th 1926 No. 226 juncto Staatblad 1940 No. 450 ttg UU Gangguan (Hinderordonnantie); f. uu 7 th 1983 ttg Pajak Penghasilan terakhir diubah UU 7 th 2021 ttg Harmonisasi Peraturan Perpajakan; g. UU 8 th 1983 ttg Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terakhir diubah UU 7 tahun 2021 ttg harmonisasi Peraturan Perpajakan; h. UU 6 th 1983 ttg Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan, terakhir diubah UU 7 tahun 2021 ttg harmonisasi Peraturan Perpajakan;

PERUBAHAN PERATURAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Standar dan interpretasi baru/revisi yang relevan terhadap kegiatan operasi Perusahaan dan berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 namun tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amendemen PSAK 57 mengatur biaya-biaya untuk memenuhi kontrak merugi terdiri dari biaya yang terkait langsung dengan kontrak, dimana terdiri dari:
- Penyesuaian Tahunan atas PSAK 71: "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian Tahunan atas PSAK 73: "Sewa"

Standar dan interpretasi baru/revisi yang relevan terhadap kegiatan operasi Perusahaan dan berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 seperti yang diungkapkan di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang efektif 1 Januari 2023, dan penerapan lebih awal diizinkan
- Amendemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- Amendemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal.

TEKNOLOGI INFORMASI

Perkembangan teknologi informasi (TI) yang begitu cepat di era digital 4.0 ini, mengharuskan Perusahaan senantiasa beradaptasi dengan perubahan yang berlangsung. Perusahaan menjalankan inisiatif penerapan Teknologi Informasi dalam rangka memberikan kecepatan, ketepatan, kenyamanan dan keamanan bagi seluruh stakeholder. Perusahaan tetap fokus pada pengembangan TI yang efektif dan efisien yang disesuaikan dengan kebutuhan serta memberikan nilai lebih bagi Perusahaan. Dengan pengembangan TI yang tepat diharapkan akan mampu menjalankan pengelolaan proses bisnis yang efektif dan efisien dengan memperhatikan keselarasan dengan tujuan Perusahaan.

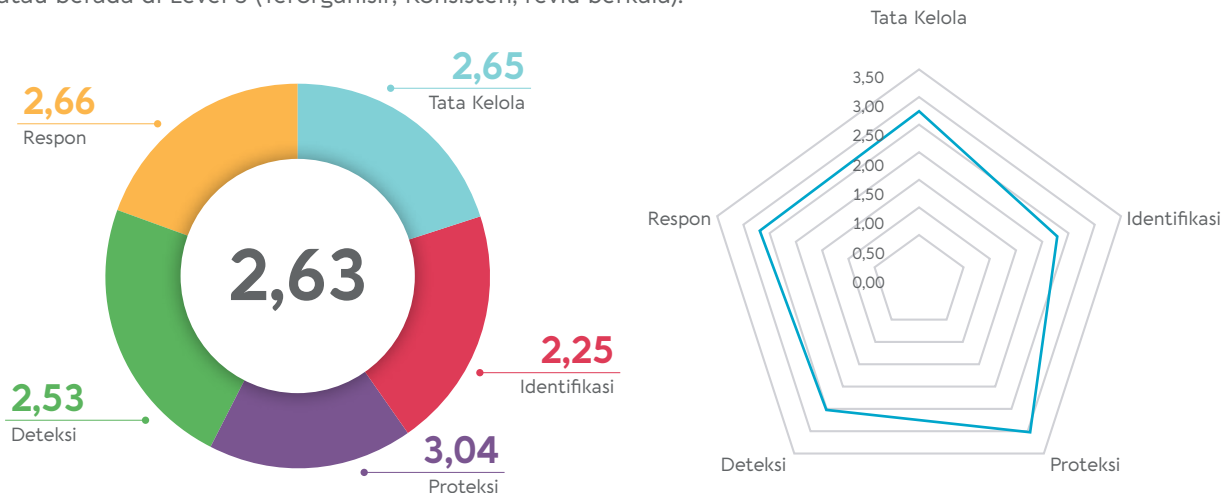
Program Kerja Teknologi Informasi

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan telah melakukan pengembangan TI yang antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Investee
Sistem ini berfungsi untuk melakukan monitoring kinerja Anak Perusahaan Pertamina.
2. Penggunaan Email Domain Pertamina
Pemindahan email Pekerja dari domain pdv.co.id menjadi pertamina.com
3. Pengadaan barang Jasa Printer Server
Pengadaan dan Instalasi printer server untuk menggantikan printer server lama yang sudah habis masa pakainya.
4. Microsoft Enterprise Agreement Renewal
Melakukan perpanjangan Enterprise Agreement atas lisensi semua aplikasi yang digunakan oleh Perusahaan.

Penanggulangan Ancaman Kejahatan Siber

Di tahun 2022, Perusahaan melakukan penilaian *Cyber Security Maturity* (CSM) dengan menggunakan tools CSM untuk mengukur tingkat maturitas *cyber security* di Perusahaan. Berdasarkan hasil pengukuran dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diperoleh score Level Maturitas sebesar 2,63 atau berada di Level 3 (Terorganisir, Konsisten, revid berkala).



Perusahaan senantiasa memberikan kemudahan bagi *stakeholders* untuk mengakses informasi mengenai perusahaan, publikasi, produk dan aksi korporasi, serta terbuka menerima informasi dari *stakeholders* berupa keluhan, saran, kritik membangun melalui *Care Center* Perusahaan sebagai berikut:



<http://www.pdv.co.id>



pdv@pdv.co.id



(021) 3911857



(021) 3911859



TATA KELOLA PERUSAHAAN

KEBIJAKAN DAN PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Perusahaan merupakan komitmen, aturan main serta praktek penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika. Hal ini dapat terwujud sebagai pola pikir dan pola kerja di seluruh fungsi perusahaan agar dapat menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya perusahaan serta meningkatkan tanggung jawab manajemen pada Pemegang Saham dan *stakeholder* lainnya. Bagi Perusahaan, GCG merupakan proses meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai bagi Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya dan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika bisnis.

Selain berpedoman kepada Pedoman Tata Kelola Perusahaan, perusahaan juga mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang khusus mengatur mengenai penerapan GCG, yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 *Juncto* Peraturan Menteri Negara BUMN nomor 09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini ditinjau dan diperbaharui secara berkala sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta melakukan monitoring pembaharuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus mengatur mengenai penerapan GCG di Indonesia.

“Direksi berkomitmen memberikan perlakuan yang setara terhadap hak-hak pemangku kepentingan yang ditandai dengan menjalankan penerapan GCG secara baik dengan mengacu kepada Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Pedoman ini telah disosialisasikan kepada organ Perusahaan dan *stakeholders* lainnya. Sebagai bentuk sosialisasi dan upaya transparansi, Pedoman ini telah diunggah ke website Perusahaan dan dapat diunduh melalui tautan:

<http://www.pdv.co.id/home/pedoman>.

”

Sejalan dengan Direksi Perusahaan, Manajemen Perusahaan *pun* menyadari bahwa perlindungan kepentingan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dan terlaksananya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dapat menjadikan Perseroan tumbuh dan berkembang, sehingga Perseroan wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yang meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*)

Tujuan Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai Perseroan atau bagi pemangku kepentingan termasuk debitur, kreditur, pemberi dana;
2. Meningkatkan pengelolaan Perseroan secara profesional, efektif, dan efisien;
3. Meningkatkan kepatuhan Organ Perseroan dan jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perseroan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
4. Mewujudkan Perseroan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip-prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat.

Penerapan GCG di PT Pertamina Pedeve Indonesia mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang khusus mengatur

mengenai penerapan GCG, yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 Juncto. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor 09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara.

Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*)

Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku No. A-001/D0000/2019 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kpts-011/A0000/2019 tentang Pedoman *Conflict of Interest* (Col) tertanggal 21 November 2019 merupakan perwujudan upaya Perusahaan dalam mengimplementasikan GCG dalam setiap aktivitas operasional Perusahaan. Seluruh Insan Perusahaan wajib mengetahui dan memahami Kode Etik Perusahaan sebagai dasar penerapan perilaku yang mengatur hubungan antara pekerja dengan Perusahaan, sesama pekerja, pemasok, pemegang saham, pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat. Sebagai bentuk sosialisasi dan upaya transparansi, Pedoman ini telah diunggah ke website Perusahaan dan dapat diunduh melalui tautan: <http://www.pdv.co.id/home/pedoman>

Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) No. A-003/D0000/2019 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kpts-012/A0000/2019 tentang Pedoman *Conflict of Interest* (Col) tertanggal 25 November 2019. Pedoman Col memberikan arahan dan acuan bagi seluruh insan Perusahaan berkenaan dengan potensi benturan kepentingan yang mungkin terjadi di lingkungan Perusahaan. Pedoman ini bertujuan agar potensi benturan kepentingan tersebut ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sehingga tetap menjunjung tinggi etika dan praktik bisnis yang sehat dan mencegah terjadinya kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya. Sebagai bentuk sosialisasi dan upaya transparansi, Pedoman ini telah diunggah ke website Perusahaan dan dapat diunduh melalui tautan: <http://www.pdv.co.id/home/pedoman>

Whistle Blowing System (WBS)

WBS diberlakukan di Perusahaan berdasarkan Tata Kerja Organisasi (Prosedur) yang dibentuk sebagai suatu sistem untuk penanganan pengaduan yang lebih tanggap, transparan, aman dan bertanggung jawab. Setiap laporan yang masuk melalui mekanisme WBS ditangani sesuai dengan Prosedur Whistle Blowing System (WBS) No. B-003/D0000/2019 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No Kpts-011/A0000/2019 tentang Prosedur *Whistle Blowing System* tertanggal 25 November 2019. Melalui WBS, Pelapor dapat menyampaikan laporan dalam bentuk surat dengan disertai dokumen pendukung yang diperlukan. Laporan tersebut disampaikan melalui salah satu di antara cara berikut:

Email: pdv@pdv.co.id,

Web: <http://www.pdv.co.id/home/wbs>

Telepon +6221 391 1857, Facs +6221 391 1859

Setiap laporan yang masuk akan diproses dengan mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tak bersalah dan profesionalisme. Jika laporan memenuhi indikasi awal, maka akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim yang bertugas melaksanakan investigasi. Hasil investigasi tim akan menentukan proses selanjutnya serta tindakan yang akan diberikan kepada terlapor.

Untuk mengetahui dan memastikan bahwa pengaduannya diterima dan ditindaklanjuti, Pelapor setiap saat dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan melalui sarana yang telah Pelapor gunakan sebelumnya.

GCG Compliance Online System

Terkait implementasi GCGC Compliance online system sesuai arahan dari PT Pertamina (Persero) selaku holding mengharapkan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh holding dan mengingat sepanjang tahun 2022 belum bergabung dalam aplikasi Compliance online system holding maka dilakukan secara manual yang terdiri dari pelaporan Penerimaan, Permintaan, dan Pemberian terkait Gratifikasi dilakukan secara manual dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan. Seluruh Insan Perusahaan wajib mengisi laporan sebagai berikut:

- a. Gratifikasi
- b. Pernyataan Potensi Konflik Kepentingan (CoI)
- c. Pernyataan Etika Usaha dan Tata Perilaku (CoC)
- d. Sosialisasi GCG

Selain laporan tersebut di atas, untuk pejabat manajer/setara dan Direksi diwajibkan mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) setiap awal tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berjalan.

ASESSMENT PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERUSAHAAN

Assessment Tahun Buku 2022

Pada periode tahun buku 2022, Pedeve melakukan kegiatan *Self Assessment* atas penerapan GCG dilingkungan perusahaan. Kegiatan *Self Assessment* penerapan GCG pada Tahun 2022 yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengukur tingkat atau capaian penerapan praktik-praktik terbaik dari masing-masing organ Perseroan sesuai dengan struktur dan proses terbaik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 ("Permeneg 1/2011") *jo.* Petunjuk Teknis Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 Tanggal 6 Juni 2012. Dasar hukum kegiatan penilaian penerapan GCG pada tahun buku 2022 secara *self-assessment* sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Permeneg 1/2011.

Self Assessment penerapan GCG Tahun 2022 memberikan rekomendasi perbaikan terhadap area-area yang memerlukan perbaikan/ penyempurnaan atau *Area of Improvement* sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Akhir *Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* tahun 2021 yang dilakukan oleh DPS Consulting.

Pelaksanaan *self assessment* penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ini merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di Pedeve, sehingga hasil penilaian ini mampu menunjukkan kemajuan pelaksanaan GCG selama ini.

Berdasarkan hasil *Self Assessment*, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada tahun 2021 Perseroan mencapai predikat "Baik", dengan skor 77,80 Berikut perbandingan hasil *Assessment* penerapan GCG oleh DPS Consulting di Pedeve untuk Tahun Buku 2021 dibandingkan dengan hasil *Self Assessment* Tahun Buku 2022, dapat diikhtisarkan dalam tabel berikut:

No	Aspek Pengujian	Nilai Maksimal	Skor Pencapaian 2022		Predikat	Skor Pencapaian 2021		Predikat
			Aktual	%		Aktual	%	
1	Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan	7	5,97	85,23	Sangat Baik	5,94	84,79	Baik
2	Peegang saham dan RUPS/ Pemilik modal	9	7,14	79,36	Baik	6,92	76,93	Baik
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35	29,7	84,76	Baik	28,71	82,02	Baik
4	Direksi	35	28,9	82,67	Baik	28,19	80,53	Baik
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9	6,10	67,73	Cukup Baik	6,07	67,49	Cukup Baik
6	Aspek lainnya	5	0	0	-	0	0	-
Total		100	77,80	77,80	Baik	75,83	75,83	Baik

Berdasarkan perbandingan hasil *Assessment* GCG tersebut diatas, terjadi peningkatan pada skor keseluruhan hasil *Assessment* dari Tahun buku sebelumnya yakni kenaikan sebesar 2,54%. Secara agregat seluruh aspek mengalami kenaikan dengan kontribusi terbesar peningkatan berasal dari aspek Dewan Komisaris, skoringnya mengalami kenaikan sebanyak 3,23%, hal tersebut mencerminkan peningkatan fungsi pengawasan Dewan Komisaris diantaranya terkait teknis pengawasan Dewan Komisaris yang lebih baik. Kemudian aspek Direksi, mengalami kenaikan sebanyak 2,57%, hal tersebut mencerminkan peningkatan proses pengurusan perusahaan oleh Direksi antara lain penyusunan rencana kerja, pencapaian kinerja yang baik dan penyesuaian sistem tata kerja kerja.

Kenaikan Aspek Pengujian yang mengalami kenaikan berdasarkan kontribusi dari hal-hal yang bersifat administratif yakni Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal mengalami kenaikan sebesar 3,08%, Aspek pengungkapan informasi dan transparansi sebesar 0,36% serta aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan mengalami kenaikan sebesar 0,51%.

Secara umum indikator-indikator yang berpeluang untuk dapat lebih ditingkatkan yang pencapaiannya masih dibawah 75% (skor minimal dengan predikat “baik”), adapun indikator tersebut yaitu Aspek kelima (Pengungkapan informasi dan transparansi), terkait indikator: Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang tata Kelola perusahaan yang baik dan bidang-bidang lainnya, kedepan dengan mengikuti beberapa event terkait pengakuan pihak external diharapkan aspek ini setidaknya dapat terkategori dengan predikat “baik”.

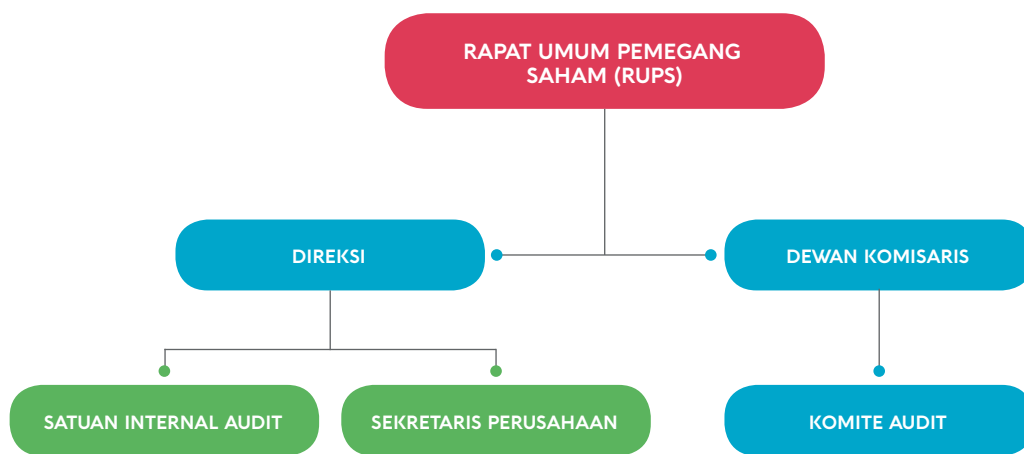
Pedevе berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang mendorong peningkatan capaian implementasi GCG di lingkungan perusahaan melalui kegiatan – kegiatan korporat maupun program terencana lainnya melalui:

- Pemeliharaan secara terus menerus terhadap kekinian dan penerapan secara konsisten prinsip-prinsip GCG, Pedoman Investasi, Pedoman Manajemen Risiko dan ketentuan internal lainnya yang berlaku di Perseroan, termasuk penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi dan Internalisasi bagi seluruh pekerja dilingkungan perusahaan.
- Optimalisasi peran Komite audit selaku organ pendukung Dewan Komisaris antara lain melalui rapat-rapat gabungan yang diselenggarakan Perusahaan.
- Peningkatan kemampuan SDM dan kualitas manajemen pengelolaan SDM.
- Pemeliharaan organisasi yang dinamis dan senantiasa sesuai dengan kondisi terkini Perusahaan.
- Pemeliharaan kehandalan serta perluasan dan peningkatan layanan Teknologi Informasi.
- Melengkapi informasi dan muatan materi yang disajikan dalam website Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMN termasuk keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana Perusahaan yang dapat berpengaruh secara signifikan kepada Pekerja perusahaan.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pedeve telah memiliki struktur *Governance* yang terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung Perusahaan. Organ Utama Perusahaan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun Organ Pendukung Perusahaan antara lain adalah Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit.

Dewan Komisaris dan Komite Audit akan dimintakan pertimbangan dalam membuat keputusan terkait dengan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial oleh Direksi dalam rapat gabungan antara BOC dan BOD.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perseroan adalah PT Pertamina (Persero) yang memiliki 99,97% saham Perseroan. PT Pertamina (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perseroan yang menjadi wadah Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan saham yang dimiliki dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dengan batasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Wewenang tersebut antara lain membuat keputusan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan Dewan Komisaris dan laporan keuangan Perusahaan;
2. Penggunaan laba bersih Perusahaan;
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Penggabungan, peleburan atau pemisahan Perusahaan;
5. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan;
6. Rencana Perusahaan melakukan transaksi yang melebihi nilai tertentu dan Memutuskan hal lain yang telah diajukan sebagaimana dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perusahaan Terbatas.

Dengan wewenang tersebut, menunjukkan bahwa RUPS merupakan forum tertinggi dalam tata kelola Perusahaan, meskipun secara teknis yang menjalankan fungsi koordinator pelaksana adalah Corporate Secretary & Business Support sebagai *Chief Compliance Officer*. Penyampaian permasalahan penting kepada badan tata kelola tertinggi diatur dalam *Board Manual*. Penyampaian permasalahan

penting dilakukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dilakukan melalui penyampaian laporan bulanan rutin.

Komunikasi antar Direksi dengan Pemegang Saham khususnya terkait penyampaian kendala dan evaluasi dapat disampaikan pada Forum *Performance Dialog* yang dilaksanakan setiap Triwulan untuk mengevaluasi kinerja Direksi.

Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2022 dilaksanakan pada tanggal 20 April 2022, keputusan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 telah diaktakan oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH., melalui Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 PT Pertamina Pedeve Indonesia No. 10 tanggal 20 April 2022, dimana Pemegang Saham memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surya sebagaimana termuat dalam Laporan No. 00318/2.1032/AU.1/05/11751/1/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".

Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sepanjang:

- a. Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Keuangan) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021;
- b. Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan melawan hukum

2. Menetapkan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2022 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler yang diaktakan oleh Notaris Marianne V. Hamdani SH., dengan Akta No. 25 tanggal 22 Juli 2022 tentang Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021, Pemegang Saham memutuskan sebagai berikut:

- a. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp 295.151.992.000,- sebagai berikut:
 1. Sebesar 100% dari laba bersih tersebut atau sebesar Rp 295.151.992.000,- sebagai dividen kepada Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan porsi kepemilikan saham pada Perseroan.
 2. Sebesar Rp 0,- sebagai cadangan wajib dan cadangan (tidak terdapat alokasi untuk cadangan wajib dan cadangan).
- b. Perseroan wajib membayarkan dividen sebagaimana tersebut pada keputusan butir 1.a di atas kepada Pemegang Saham Perseroan secara tunai/cash selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler ditandatangani.
3. Memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 berikut besaran nilai jasanya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa KAP yang ditunjuk Perseroan dikonsultasikan/dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PT. Pertamina (Persero).

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler yang diaktakan oleh Notaris Marianne V. Hamdani SH., dengan Akta No. 2 tanggal 03 Oktober 2022 tentang Penetapan kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2022, 2023 dan 2024, Pemegang Saham memutuskan mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 khusus terkait Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2022.

Pemegang Saham kemudian memutuskan Penunjukan (KAP) bagi Perseroan untuk Tahun Buku 2022, 2023 dan 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan KAP dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, 2023 dan 2024 berikut besaran nilai jasanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Dewan Komisaris Perseroan agar melakukan evaluasi setiap tahun atas kinerja KAP dan mengusulkan kembali kepada RUPS Perseroan untuk penetapan KAP untuk periode Tahun Buku 2023.
- c. Proses Pengadaan serta Penunjukan KAP untuk tahun buku 2022, 2023 dan 2024 agar dikonsultasikan dengan PT Pertamina (Persero).
4. Penghargaan Atas Kinerja (Tantiem) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler.
5. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler.

DEWAN KOMISARIS

Uraian Dewan Komisaris

Sebagai penjabaran dalam pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, semua Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia diwajibkan mempunyai Dewan Komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dewan Komisaris tidak memiliki Saham di Perseroan maupun Perseroan lainnya. Begitu juga tidak ada perikatan dengan pihak ketiga.

Uraian Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:

- a. Harus mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- b. Harus beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab kepada Perseroan dalam hal ini diwakili oleh RUPS dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- c. Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan

Perseroan selain honorarium dan fasilitas yang ditentukan oleh RUPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk:

- a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
- b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
- c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
- d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- f. Mengangkat sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
- g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- h. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
- i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
- j. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
- k. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
- l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi;

2. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
3. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
4. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
5. Membentuk komite audit;
6. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS; dan
7. Mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di induk perusahaan Perseroan dan dinyatakan berlaku bagi Perseroan dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dan disetujui oleh RUPS.

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Namun, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan tersebut apabila dapat membuktikan:

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Susunan Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2022 adalah satu orang, yaitu Ibu Gusnida selaku Komisaris Perseroan.

Tabel Susunan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2022

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Pengangkatan	Tanggal Akhir Masa Jabatan
Gusnida	Komisaris	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 13 Tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH.	5 Januari 2022	4 Januari 2025

Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris salah satunya yang paling utama berpedoman pada *Board Manual* PT Pertamina Pedeve Indonesia.

Board Manual

Board Manual merupakan petunjuk tata laksana kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga menjadi acuan hubungan kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing dalam upaya pencapaian visi dan misi Perusahaan yang optimal.

Board Manual adalah pedoman yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan tata kerja Direksi dan Dewan Komisaris serta proses hubungan fungsi antara Direksi, Dewan Komisaris dan antara kedua organ Perusahaan tersebut. *Board Manual* disusun berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,

Anggaran Dasar, prinsip-prinsip hukum korporasi, arahan Pemegang Saham serta *best practices Good Corporate Governance* (GCG). Meskipun demikian, berbagai ketentuan rinci yang terdapat dalam Anggaran Dasar, arahan Pemegang Saham yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam *Board Manual* tersebut.

Board Manual yang berisi pedoman praktis bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah wujud dari implementasi komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi atas penerapan GCG di Perusahaan. *Board Manual* Perusahaan yang berlaku saat ini adalah *Board manual* yang ditetapkan pemberlakuannya melalui Surat Keputusan No Kpts-008/A0000/2020 tanggal 12 November 2020 dan telah disepakati bersama dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Naskah Kesepakatan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 12 November 2020.

Board Manual yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Direksi dan Komisaris yang penetapannya bertujuan untuk:

1. Menjadi rujukan atau pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing organ;
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ;
3. Menerapkan asas-asas GCG yakni, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness* (kewajaran).

Dengan diberlakukannya *Board Manual* ini dalam hubungan kerja antar 2 (dua) organ Perusahaan, diharapkan kegiatan usaha Perusahaan dapat dilaksanakan secara harmonis dengan asas-asas *Good Corporate Governance* dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi perusahaan yang telah ditetapkan.

Aspek-aspek yang diatur dalam *Board Manual* meliputi:

- a. Fungsi Dewan Komisaris
- b. Persyaratan, Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

- c. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
- d. Etika Jabatan Dewan Komisaris
- e. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
- f. Wewenang Dewan Komisaris
- g. Hak Dewan Komisaris
- h. Rapat Dewan Komisaris
- i. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
- j. Organ Pendukung Dewan Komisaris
- k. Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris Dengan Direksi

Kriteria Penentuan Dewan Komisaris dan Independensi Dewan Komisaris

Saat ini Perusahaan tidak memiliki Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan juga tidak pernah dinyatakan pailit dan atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan juga tidak pernah melakukan tindakan tercela dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak mendapat intervensi dari Pemegang Saham ataupun pihak lain. Dewan Komisaris dalam memandang dan menyelesaikan masalah selalu menjauhkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan.

Sesuai ketentuan Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan PT Pertamina (Persero) No A-001/H00200/2011-S0 Revisi 1 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No Kpts-16/C00000/2013-S0 tanggal 25 Februari 2013, persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari: Syarat Formal, Syarat Materiil, dan Syarat Lainnya.

- a. Syarat Formal
Calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. Dinyatakan pailit;
 2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan (BUMN ataupun swasta) dinyatakan pailit;
 3. Dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, atau perusahaan swasta lainnya dan/atau tindakan pidana yang berkaitan dengan sector keuangan.
- b. Syarat Materiil
- Calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
1. Integritas dan moral, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
 - a. Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
 - b. Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - c. Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik);
 2. Dedikasi;
 3. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;
 5. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 6. Memiliki kemauan yang kuat (antusiasme) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.
- c. Syarat Lainnya

Calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah orang perseorangan yang memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
2. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
3. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris;
4. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris;
5. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
6. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit resmi dan diakui.

Selain itu, salah satu persyaratan Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam *Board Manual* Perusahaan adalah memiliki kriteria independensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini berlaku khusus untuk Komisaris Independen yaitu:

1. Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan terafiliasi.
2. Tidak bekerja di Perusahaan atau afliasinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
3. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan atau Perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan dan afliasinya.

4. Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan.

Penilaian Terhadap Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara *self assessment* dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Profesionalisme dan Pengetahuan.
- b. Independensi dan Obyektivitas.
- c. Kemampuan Dalam Berkomunikasi.
- d. Kemampuan Menganalisa dan Memutuskan.
- e. Orientasi Pada Bisnis.
- f. Komitmen Terhadap Pengawasan.
- g. Komitmen Terhadap Rencana Kerja yang Telah Disepakati.
- h. Komitmen Pengawasan Terhadap Prinsip GCG.
- i. Kontribusi Pemikiran dan Gagasan Dalam Setiap Rapat.
- j. Pemahaman Terhadap Berbagai Dinamika dan Kondisi Mutakhir Perusahaan

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2022

Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundangundangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan Perusahaan ini diatur dalam *Board Manual* dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Proses pengawasan ini dapat dilakukan

melalui rapat-rapat bersama antara Dewan Komisaris dengan Direksi, serta pada evaluasi laporan-laporan yang terkait.

Pada tahun 2022, Perusahaan telah memiliki rencana kerja Dewan Komisaris yang membahas kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan serta telaah atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis perusahaan (regulasi sektoral), dan peraturan perundang-undangan lainnya serta perjanjian dengan pihak ketiga.

Dalam menjalankan aktivitasnya dalam pengambilan keputusan, Perusahaan telah memiliki peraturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris. Ada beberapa mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris yang dilaksanakan secara formal yang diatur dalam *Board Manual* dan Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris, yaitu:

1. Pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Komisaris
2. Pengambilan keputusan di luar rapat Dewan Komisaris (melalui sirkuler dan lain-lain)

Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris dan dapat dihadiri oleh pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris telah diagendakan sebelum tahun berjalan seperti tercantum dalam Program Kerja Dewan Komisaris tahun 2022. Dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, diatur bahwa mengingat Perseroan hanya memiliki seorang Komisaris, maka semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris.

Rekapitulasi Rapat Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2022

Nama Komisaris	Rapat Gabungan Dengan Direksi		%
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	
Gusnida	13	13	100%

Dalam melaksanakan rapat, Perusahaan akan mengirimkan undangan rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak-pihak lain yang diundang. Bahan-bahan rapat seyogyanya disediakan dan disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum diadakan rapat.

Berdasarkan aturan dalam *Board Manual*, waktu pengambilan keputusan paling lambat 3 minggu setelah rapat Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris sudah dilakukan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan sejak usulan tindakan disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris - Direksi atau secara tertulis untuk keputusan sirkuler, dimana tingkat kesegeraan berkisar 3 hari.

Untuk memenuhi tata administrasi yang baik, dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/ *dissenting opinion* anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Risalah rapat tersebut selanjutnya akan dibagikan dalam bentuk salinan kepada setiap Anggota Dewan, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.

Berikut agenda rapat dan pokok bahasan yang dalam Rapat Gabungan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit selama tahun 2022:

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN RAPAT	PESERTA RAPAT	AGENDA RAPAT
Rapat Gabungan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit			
	28 Januari 2022	Gusnida	1. Laporan Kinerja dan Realisasi Keuangan Bulan Desember 2022 2. Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Bulan Desember 2022
	25 Februari 2022	Gusnida	1. Laporan Kinerja dan Realisasi Keuangan Bulan Januari 2022 2. Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Bulan Januari 2022
	15 Maret 2022	Gusnida	1. Pembahasan Buku RKAP 2022 2. Penjataan Lebih (Greenshoe/ Overallotment) Guna Stabilisasi Harga Saham PT Pertamina Geothermal Energy
	31 Maret 2022	Gusnida	1. Laporan Kinerja dan Realisasi Keuangan Bulan Februari 2022 2. Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Bulan Februari 2022
	28 April 2022	Gusnida	1. Laporan Kinerja dan Realisasi Keuangan Bulan Maret 2022 2. Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Bulan Maret 2022
	17 Mei 2022	Gusnida	1. Laporan Kinerja dan Realisasi Keuangan Bulan April 2022 2. Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Bulan April 2022 3. Lain-lain: • Terkait Penjataan Lebih (Greenshoe/ Overallotment) Guna Stabilisasi Harga Saham PT Pertamina Geothermal Energy

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN RAPAT	PESERTA RAPAT	AGENDA RAPAT
Rapat Gabungan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit			
	28 Juni 2022	Gusnida	1. Laporan Kinerja dan Realisasi Keuangan Bulan Mei 2022 2. Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Bulan Mei 2022
	29 Juli 2022	Gusnida	1. Laporan Kinerja dan Realisasi Keuangan Bulan Juni 2022 2. Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Bulan Juni 2022
	25 Agustus 2022	Gusnida	1. Laporan Kinerja dan Realisasi Keuangan Bulan Juli 2022 2. Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Bulan Juli 2022
	19 September 2022	Gusnida	1. Laporan Kinerja dan Realisasi Keuangan Bulan Agustus 2022. 2. Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Bulan Agustus 2022
	20 Oktober 2022	Gusnida	1. Laporan Kinerja dan Realisasi Keuangan Bulan September 2022 2. Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Bulan September 2022
	18 November 2022	Gusnida	1. Laporan Kinerja dan Realisasi Keuangan Bulan Oktober 2022 2. Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Bulan Oktober 2022
	28 Desember 2022	Gusnida	1. Laporan Kinerja dan Realisasi Keuangan Bulan November 2022 2. Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Bulan November 2022

Pelatihan Komisaris

Pada tahun 2022 Implementasi rencana program pelatihan, seminar atau workshop yang diikuti oleh Anggota Komisaris mengarah pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas guna menunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap Perseroan.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris terdapat dalam *Board Manual*, yang pada pokoknya mengatur bahwa penilaian kinerja Dewan Komisaris didasarkan pada rencana kerja dan pencapaiannya, tingkat kehadiran dalam rapat, kontribusi dalam proses pengawasan perusahaan, komitmen dalam memajukan perusahaan, dll. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Dalam menilai kinerja Dewan Komisaris, Perusahaan menggunakan asesmen atas kinerja Dewan Komisaris melalui Pelaksanaan RUPS. Asesmen penilaian kinerja Dewan Komisaris ini dilaksanakan oleh Pemegang Saham.

Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris sebagaimana yang tercantum dalam *Board Manual* Pedeve adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Key Performance Indicator (KPI) pada awal tahun dan evaluasi pencapaiannya.
2. Tingkat kehadirannya dalam rapat Dewan Komisaris, rapat koordinasi, maupun rapat dengan komite-komite yang ada.
3. Kontribusinya dalam proses pengawasan Perusahaan.
4. Keterlibatannya dalam penugasan tertentu.
5. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan.
6. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, ketentuan RUPS, dan kebijakan Perusahaan.

Hasil dari penilaian kinerja tersebut adalah diterimanya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dalam RUPS Tahunan tahun buku 2021.

Benturan Kepentingan Anggota Dewan Komisaris

Perusahaan telah memiliki kebijakan Dewan Komisaris mengenai (potensi) benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Aturan ini dijelaskan dalam kebijakan COCG tentang Benturan Kepentingan dan *Board Manual*.

Untuk menunjukkan komitmennya, Dewan Komisaris menandatangani pernyataan dalam Pakta Integritas bahwa tidak memiliki benturan kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS/Pemilik Modal.

Dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan, disampaikan pula pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali satu sama lainnya, sebagaimana yang disampaikan pada tabel berikut:

Nama	Hubungan Dengan						Hubungan keluarga Dengan					
	Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Gusnida	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Sekretaris Dewan Komisaris

Dalam rangka membantu kelancaran tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Sekretaris Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya. Tugas dan kewajiban Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Dewan Komisaris melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam membantu Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.
3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan:

- a. Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris
- b. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan.
4. Memberikan dukungan administrasi yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian masukan terhadap kebijakan serta tindakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan, meliputi namun tidak terbatas pada aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Sistem Pengendalian Intern
 - b. Manajemen Risiko Perusahaan
 - c. Sistem Teknologi Informasi
 - d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - e. Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
 - f. Mutu dan Pelayanan
 - g. Kepatuhan pada Peraturan Perusahaan
5. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Pada saat ini, Perusahaan belum menetapkan jabatan definitif Sekretaris Dewan Komisaris. Namun fungsi dari Sekretaris Dewan Komisaris sudah dijalankan oleh Sekretaris Perusahaan yang oleh Perusahaan disebutkan sebagai jabatan Corporate Secretary & Business Support (CSBS). Selama tahun 2022, CSBS telah melaksanakan tugas mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris, dan dokumen lainnya dengan tertib.

Selain itu, realisasi pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai *leason officer* menjembatani komunikasi antara Komisaris dengan Direksi Perusahaan dan Komite Audit.
2. Mempersiapkan dan mengurus administrasi (surat-menyurat) keluar dan masuk untuk Dewan Komisaris serta Komite Audit.
3. Menyimpan dan mengatur dokumen (administrasi) Dewan Komisaris, termasuk undangan dan setiap notulen rapat.
4. Memberikan/menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk rapat atau saat memberikan data pendukung untuk pengambilan keputusan dalam memberi saran/arahan kepada Direksi.
5. Mengurus administrasi & persiapan perjalanan Dinas Dewan Komisaris dan Komite Audit.

DIREKSI

Uraian Direksi

Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi tidak memiliki Saham di Perusahaan dan Perusahaan lainnya.

Uraian Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, berdasarkan Anggaran Dasar, Direksi berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan dalam memimpin pengelolaan Perusahaan;
2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk pembinaan pegawai, penetapan upah dan penghasilan lain, pesangon dan/atau penghargaan atas pengabdian serta manfaat pensiun bagi para pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS;
3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada pihak lain;
5. Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan berdasarkan aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan

6. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengelolaan maupun mengenai pemilikan kekayaan Perusahaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berkewajiban untuk:

1. Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan;
2. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
3. Menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang merupakan penjabaran tahunan dari RJPP dan selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
4. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
5. Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup, menyampaikan laporan tahunan yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
6. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengelolaan, dan pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
7. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan jalannya Perusahaan berupa laporan kegiatan Perusahaan termasuk laporan keuangan baik dalam bentuk laporan berkala menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini serta setiap kali diminta oleh RUPS;
8. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya;

9. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan atau diminta anggota Dewan Komisaris;
10. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
11. Mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh RUPS; dan
12. Melakukan penempatan investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan oleh RUPS.

Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi juga bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan, kecuali apabila Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Direksi

Mengingat sepanjang tahun 2022 hanya ada satu orang Direksi dan telah disahkan Struktur Organisasi Perusahaan hanya memiliki Direktur, untuk itu ruang lingkup Pekerja dan Tanggung jawab Direksi meliputi:

- a. Terimplementasinya *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap area operasional dan area strategis Perusahaan.
 1. Menetapkan kebijakan, pedoman, sistem Perusahaan termasuk menetapkan program pengawasan internal yang efektif agar pengurusan Perusahaan berjalan sesuai dengan

prinsip-prinsip GCG.

2. Mewakili Perusahaan dalam urusan ke dalam dan ke luar yang bersifat kebijakan strategis.
3. Menetapkan keputusan-keputusan yang diperlukan dalam pengelolaan Perusahaan termasuk tentang ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS.
4. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan operasional serta strategis Perusahaan untuk memastikan seluruh kegiatan Perusahaan didasarkan pada prinsip GCG.
- b. Tersedianya *Key Performance Indicator* (KPI), RKAP serta RJPP Perusahaan yang disetujui oleh para Pemegang Saham, termasuk di dalamnya tercapainya upaya untuk meningkatkan nilai Perusahaan bagi para Pemangku Kepentingan.
 1. Mengarahkan penyusunan dan mempersiapkan perencanaan usaha Perusahaan, KPI, RKAP serta RJPP sesuai dengan misi dan tujuan Perusahaan serta melakukan evaluasi dan penyesuaian perencanaan berdasarkan perubahan lingkungan strategis untuk pencapaian visi Perusahaan secara efisien dan efektif.
 2. Menyusun KPI, RKAP serta RJPP Perusahaan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
- c. Terlaksananya persetujuan dan penetapan Mitra Bisnis serta semua bentuk kontrak-kontrak perjanjian dengan Mitra Bisnis dalam rangka penempatan investasi pada Mitra Bisnis maupun aktifitas kegiatan usaha.
 1. Mengarahkan, memutuskan dan mengendalikan pengelolaan serta penempatan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi yang telah ditetapkan untuk memastikan tercapainya tingkat bunga maksimal dari Bank-bank Persepsi Perusahaan dan optimalisasi kinerja investasi lainnya.
 2. Membina hubungan baik dengan Perusahaan-perusahaan Mitra Bisnis dalam rangka menjaga kelangsungan kerja sama usaha yang telah berjalan dan mengidentifikasi peluang potensi bisnis untuk pengembangan usaha.
 3. Melakukan penempatan investasi kepada

- Mitra Bisnis sesuai dengan ketentuan Pedoman Investasi dan mencari peluang-peluang investasi baru untuk menumbuh kembangkan Perusahaan.
4. Menyetujui dan menetapkan Mitra Bisnis termasuk penggunaan bank sebagai Bank Persepsi.
 5. Menandatangani semua bentuk kontrak-kontrak perjanjian dengan Mitra Bisnis.
- d. Tersedianya laporan periodik untuk Pemegang Saham Perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
1. Mengarahkan, mengendalikan dan memantau penyusunan laporan periodik dari kegiatan operasional Perusahaan untuk memastikan tersedianya laporan bagi pihak yang terkait secara akurat dan tepat waktu sebagai bahan pengambilan keputusan Pemegang Saham Perusahaan.
 2. Menyetujui penggunaan dan pengeluaran dana untuk kegiatan operasional Perusahaan.
- e. Tersedia KPI, RKAP serta RJPP Perusahaan yang disetujui oleh para Pemegang Saham, dan tersedianya laporan-laporan baik Laporan Keuangan maupun Laporan Manajemen Perusahaan secara periodik bagi para Pembuat Keputusan atau Pemangku Kepentingan.
1. Mengarahkan persiapan dan penyusunan RJPP, RKAP serta KPI sesuai dengan visi dan misi Perusahaan bersama-sama dengan Direktur Utama kemudian melakukan evaluasi dan penyesuaian bilamana diperlukan berdasarkan perubahan lingkungan strategis.
 2. Mengarahkan, mengendalikan dan mengevaluasi proses akuntansi dan anggaran Perusahaan agar dapat menghasilkan Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen yang akurat dan tepat waktu sehingga berguna sebagai alat pengendalian serta dasar pengambilan keputusan.
 3. Menyusun KPI, RKAP serta RJPP Perusahaan untuk disetujui oleh Komisaris dan Pemegang Saham.
- f. Tercapainya Tingkat Kesehatan Perusahaan dan Tingkat Profit bagi seluruh Pemegang Saham sesuai dengan yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya tercapainya hasil perolehan dan pengelolaan dana pada bank-bank persepsi Perusahaan, hasil yang maksimal atas investasi yang dilakukan oleh Perusahaan, dan terlaksananya pembayaran atas kewajiban Perusahaan sesuai prosedur dan dalam waktu yang cepat.
1. Mengarahkan, mengendalikan dan menentukan Portofolio Investasi sehingga diperoleh imbal hasil yang paling menguntungkan melalui analisa kajian, kalkulasi dan keputusan yang tepat.
 2. Mengarahkan, mengendalikan dan menentukan pengelolaan dana sehingga diperoleh imbal hasil yang menguntungkan serta aman melalui penempatan dalam bentuk Deposito, *Deposit On Call* (DOC) ataupun giro (*Cash Management*).
 3. Mengarahkan serta membina hubungan baik dengan perusahaan lainnya untuk menjaga keberlangsungan bisnis.
 4. Mengarahkan, mengendalikan proses arus dana agar kebutuhan Perusahaan dapat terpenuhi serta penempatan dana yang ada secara tepat sehingga aman dan mendapatkan hasil yang paling menguntungkan.
 5. Melakukan penempatan Investasi kepada Mitra Bisnis dengan batasan nilai tertentu untuk setiap proyek.
 6. Menyetujui dan menetapkan Mitra Bisnis termasuk penggunaan bank sebagai Bank Persepsi.
 7. Menandatangani semua bentuk kontrak-kontrak perjanjian dengan Mitra Bisnis.
- g. Terimplementasinya GCG dalam setiap area operasional dan area strategis Perusahaan.
1. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan operasional Perusahaan dalam rangka memastikan bahwa seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Prinsip GCG.
 2. Menetapkan kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur untuk seluruh kegiatan strategis serta operasional Perusahaan.

Susunan Direksi

Jumlah anggota Direksi Perusahaan per tanggal

31 Desember 2022 adalah sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Direktur sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, bahwa menetapkan bahwa Perusahaan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pertamina Pedeve Indonesia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur No 3 tanggal 03 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No AHU-AH.01.03-0434194 tanggal 05 Agustus 2021. Pemegang Saham memutuskan memberhentikan dengan hormat Khurinnihayah dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dengan alasan memasuki masa pensiun dan menindaklanjuti Surat Menteri BUMN, berlaku efektif mulai tanggal Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ditandatangani yaitu tanggal 26 Juli 2021, serta mengangkat Rahmi Amini sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung mulai tanggal Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ditandatangani yaitu tanggal 26 Juli 2021.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Pengangkatan	Tanggal Akhir Masa Jabatan
Rahmi Amini	Direktur	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 3 Tanggal 03 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Marianne Vincentia Hamdani,SH.	26 Juli 2021	25 Juli 2024

Rapat Direksi

Mengingat saat ini Direksi hanya satu orang, maka mekanisme pengambilan keputusan Direksi tidak dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat namun langsung ditetapkan oleh Direksi. Dokumen keputusan Direksi akan dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi, sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.

Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila:

- Dianggap perlu; atau
- Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
- Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Board Manual merupakan petunjuk tata laksana kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga menjadi acuan hubungan kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Perusahaan yang optimal.

Board Manual adalah pedoman yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan tata kerja Direksi dan Dewan Komisaris serta proses hubungan fungsi antara Direksi, Dewan Komisaris dan antara kedua organ Perusahaan tersebut. *Board Manual* disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, prinsip-prinsip hukum korporasi, arahan Pemegang Saham serta *best practices Good Corporate Governance*.

Meskipun demikian, berbagai ketentuan rinci yang terdapat dalam Anggaran Dasar, arahan Pemegang Saham yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam *Board Manual* tersebut. *Board Manual* yang berisi

pedoman praktis bagi Dewan Komisaris dan Direksi ini adalah wujud dari implementasi komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi atas penerapan GCG di Perusahaan.

Board Manual yang berisi pedoman praktis bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah wujud dari implementasi komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi atas penerapan GCG di Perusahaan. *Board Manual* Perusahaan yang berlaku saat ini adalah *Board manual* yang ditetapkan pemberlakuannya melalui Surat Keputusan No. Kpts-008/A0000/2020 tanggal 12 November 2020 dan telah disepakati bersama dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Naskah Kesepakatan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 12 November 2020.

Board Manual yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang penetapannya bertujuan untuk:

1. Menjadi rujukan atau pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing organ;
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ;
3. Menerapkan asas-asas GCG yakni, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness* (kewajaran).

Dengan diberlakukannya *Board Manual* dalam hubungan kerja antar 2 (dua) organ Perseroan, diharapkan kegiatan usaha Perseroan dapat dilaksanakan secara harmonis dengan asas-asas GCG dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan yang telah ditetapkan.

Aspek-aspek yang diatur dalam *Board Manual* meliputi:

- a. Kebijakan Umum
- b. Persyaratan dan Komposisi, Keanggotaan dan Masa Jabatan Direksi
- c. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
- d. Independensi (Kemandirian) Direksi
- e. Etika Jabatan Anggota Direksi
- f. Susunan, Tugas dan Wewenang Direksi
- g. Rapat Direksi

h. Evaluasi Kinerja Direksi

i. Fungsi Pendukung

j. Hubungan Perseroan Dengan Anak Perusahaan

Hubungan Afiliasi antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Diantara Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama atau Pengendali Perseroan tidak terdapat hubungan afiliasi, baik secara keluarga maupun keuangan. Sehingga, dengan tidak adanya hubungan afiliasi diantara Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama atau Pengendali Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak secara independen, diharapkan juga tidak terdapat adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan oleh seluruh organ Perseroan.

Pelatihan Direksi

Selama tahun 2022 terdapat beberapa program pelatihan, seminar atau *workshop* yang diikuti oleh anggota Direksi Perusahaan untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi Direksi yaitu:

1. Upskilling & Workshop Transfer Pricing (TP)
2. Investment Strategies and Portfolio Management
3. Board Ready: High Performance Boards

Keberagaman Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan saat ini tidak memiliki kebijakan yang secara khusus mengatur mengenai keberagaman komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin. Meskipun demikian, pada prakteknya komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada setiap periode menunjukkan adanya keberagaman. Seperti halnya, komposisi Direksi Perseroan saat ini yang terdiri dari 1 (satu) orang perempuan. Selain itu, komposisi Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris dengan pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan pada bidang Hukum.

Dalam hal ini, kebijakan Perseroan saat ini lebih banyak ditekankan pada batasan-batasan *normative*

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti halnya dalam penetapan komposisi jumlah anggota Direksi yang paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dan disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas dan rencana strategis Perseroan. Begitupula dengan jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan yang setidaknya terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih.

No	Hubungan Afiliasi	Jenis Hubungan Afiliasi	
		Keluarga	Keuangan
1	Antara Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Antara Anggota Direksi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), selaku Pemegang Saham Utama atau Pengendali	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Antara Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Antara Anggota Dewan Komisaris dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), selaku Pemegang Saham Utama atau Pengendali	Tidak Ada	Tidak Ada

Penilaian Direksi

Perusahaan telah memiliki sistem dan pedoman penilaian kinerja Direksi, sebagaimana yang diatur dalam *Board Manual*. Perusahaan merumuskan Kontrak Manajemen yang memuat target kinerja Direksi yang disahkan dan disetujui Pemegang Saham dalam RUPS. Mekanisme penilaian kinerja Direksi dapat dilihat melalui KPI Direksi. Dewan Komisaris telah melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi, serta telah menyampaikannya kepada RUPS. Selain melalui KPI, dalam menilai kinerja Direksi, Perusahaan menggunakan asesmen atas kinerja Direksi melalui *Forum Performance Dialog* di hadapan Pemegang Saham. Asesmen penilaian kinerja Direksi ini dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan RUPS Tahunan.

Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan asesmen atas kinerja Direksi sebagaimana tercantum dalam *Board Manual* mengenai Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi, adalah:

1. Penyusunan KPI pada awal tahun dan evaluasi pencapaiannya.
2. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Direksi maupun rapat dengan Dewan Komisaris.
3. Kontribusinya dalam aktivitas bisnis Perusahaan.
4. Keterlibatannya dalam penugasan tertentu.
5. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan.
6. Ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.
7. Pencapaian target Perusahaan yang tertuang dalam RKAP dan Kontrak Manajemen.

Hasil dari penilaian kinerja tersebut adalah diterimanya laporan tahunan dalam RUPS Tahunan.

Sebagai Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero), remunerasi Direksi ditentukan oleh Induk Perusahaan sebagai Pemegang Saham. Dewan Komisaris juga dapat mengusulkan remunerasi Direksi sesuai dengan tata aturan dan pertimbangan yang berlaku. Sedangkan pengusulan tantiem/insentif kinerja Direksi mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan Perusahaan. Dewan Komisaris menyampaikan usulan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas serta tantiem/insentif kinerja) Direksi kepada RUPS/Pemilik Modal. Lalu keputusan akhir remunerasi akan ditetapkan pada RUPS yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Struktur Remunerasi Direksi

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007 diatur bahwa besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Sedangkan berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007, diatur bahwa ketentuan mengenai besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Proses Pengusulan dan Persetujuan Pemberian Remunerasi bagi Direksi:

1. Direksi mengajukan usulan remunerasi bagi anggota Direksi (besaran dan bentuk remunerasi) kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan rekomendasi.
2. Apabila dipandang perlu, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi yang dipimpin salah satu anggota Komisaris untuk melakukan kajian remunerasi, namun dalam hal ini Perseroan tidak membentuk Komite Remunerasi dikarenakan kompleksitas dan lingkup kegiatan usaha Perseroan saat ini.
3. Setelah usulan remunerasi Direksi mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris, selanjutnya Direksi meneruskan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan.

Pemegang Saham melalui fungsi SDM PT Pertamina (Persero) kemudian melakukan kajian. Hasil kajian menjadi bahan pertimbangan dalam persetujuan dan pengesahan atas besaran, bentuk dan waktu berlakunya remunerasi Direksi dilakukan pada saat RUPS Tahunan atau Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler. Dengan demikian, Pemegang Saham menjadi satu-satunya pemangku kepentingan yang memiliki akses untuk ikut menentukan remunerasi Direksi.

Bentuk Tunjangan dan Fasilitas, serta komponen lain yang termasuk di dalam komponen penghasilan (selain gaji) mengacu pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada BUMN.

Penetapan penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, serta kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, serta tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan serta faktor-faktor lain yang relevan (*merit system*).

Sedangkan pengusulan tantiem/insentif kinerja Direksi mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan Perusahaan. Sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Pemegang Saham sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 5 & 6 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris menyampaikan usulan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas serta tantiem/insentif kinerja) Direksi kepada RUPS. Keputusan akhir remunerasi akan ditetapkan setiap tahunnya pada RUPS yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham.

Jumlah remunerasi yang diterima Direksi pada tahun 2022 sebagai berikut:

Jabatan	Remunerasi 2022		Total
	Gaji + Tunjangan	Tantiem	
Khurinnihayah	-	599.152.411	599.152.411
Rahmi Amini	1.377.901.848	462.452.589	1.840.354.437

* Penghargaan atas Kinerja Tahunan Anggota Direksi tahun 2021 dibayarkan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 36 tentang Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris Marianne V. Hamdani.

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perusahaan No. 20 tanggal 19 Juli 2022 dibuat dihadapan Marianne V. Hamdani S.H., Notaris di Jakarta tentang Penyesuaian Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2022. Sesuai ketentuan tersebut, remunerasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris terdiri atas:

1. Honorarium;
2. Tunjangan dan fasilitas;
3. Tantiem;
4. Imbalan atas kinerja;
5. Asuransi Purna Jabatan.

Dengan proporsi besaran honorarium sebagai berikut:

1. Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama.
2. Honorarium Anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama.

Tunjangan yang diberikan adalah meliputi Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Tunjangan Transportasi. Tantiem adalah penghargaan kepada Dewan Komisaris yang tidak dijabat oleh Direksi Pertamina, yang diberikan setiap tahun apabila Perusahaan memperoleh laba dan diputuskan dalam RUPS.

Alur penetapan penghasilan (remunerasi) berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:

1. Pendapatan.
2. Aktiva.
3. Kondisi dan kemampuan keuangan anak perusahaan/perusahaan patungan yang bersangkutan.
4. Faktor-faktor lain yang relevan.
5. Kepatuhan (*compliance*) yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan penghasilan berupa tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:

1. *Performance* perusahaan, termasuk EBITDA dan *Key Performance Indicator* (KPI).
2. Tingkat kesehatan.

3. Kondisi dan kemampuan anak perusahaan/perusahaan patungan yang bersangkutan.
4. Faktor-faktor yang relevan.

Berdasar proses dan alur di atas, Pemegang Saham menjadi satu-satunya pemangku kepentingan yang terlibat dalam penentuan remunerasi Dewan Komisaris.

Besaran Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2022

Jabatan	Remunerasi 2022		Total
	Gaji + Tunjangan	Tantiem	
Cornelius Simanjuntak	-	430.604.439	430.604.439
Gusnida	566.217.327	-	566.217.327

* Penghargaan atas Kinerja Tahunan Dewan Komisaris tahun 2021 dibayarkan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 36 tentang Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris Marianne V. Hamdani.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris perseroan dirangkap oleh Sekretaris Perseroan yang di dalam Perseroan sebutan jabatannya dikenal dengan Corporate Secretary & Business Support (CSBS), dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mengangkat seorang Sekretaris Dewan Komisaris guna membantu Dewan Komisaris di bidang kegiatan kesekretariatan antara lain:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris, serta membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Membuat Laporan Kegiatan Dewan Komisaris per Triwulan ke Pemegang Saham.
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik korespondensi, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris dan Rencana Kerja Komite Audit.
5. Membuat ulasan/reviu dokumen yang diajukan Direksi untuk minta persetujuan atau rekomendasi Dewan Komisaris.
6. Menyusun laporan-laporan Dewan Komisaris.
7. Memastikan bahwa dokumen penyelenggaraan kegiatan Dewan Komisaris tersimpan dengan baik di Perusahaan dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik.
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
9. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak-pihak terkait di lingkungan Perusahaan maupun pihak-pihak lain di luar lingkungan Perusahaan.
10. Menghadiri rapat Dewan Komisaris baik internal maupun eksternal (dengan Direksi) serta rapat Komite Penunjang Dewan Komisaris.
11. Melaksanakan tugas lain dan tugas khusus dari Dewan Komisaris; dan
12. Melakukan *self-assessment* terhadap efektivitas pelaksanaan tugasnya, dan memutakhirkan secara periodik pedoman kerjanya setiap akhir tahun.
13. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite-komite di lingkungan Komisariat yang berkaitan dengan:
 - a. *Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris;*
 - b. Dukungan administrasi serta monitoring

berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

14. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-Komite di lingkungan Komisariat untuk keperluan Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait.
3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di Lingkungan Komisaris yang berkaitan dengan:
 - c. *Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris*
 - d. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan.
4. Memberikan dukungan administrasi yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian masukan terhadap kebijakan serta tindakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan, meliputi namun tidak terbatas pada aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Sistem Pengendalian Intern
 - b. Manajemen Risiko Perusahaan
 - c. Sistem Teknologi Informasi
 - d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - e. Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
 - f. Mutu dan Pelayanan
 - g. Kepatuhan pada Peraturan Perusahaan
 - h. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
5. Memberikan dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan Direksi
6. Mengumpulkan data teknis yang berasal dari komite di lingkungan Dewan Komisaris dan Tenaga Ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris

KOMITE AUDIT

Perusahaan sebagai Anak Perusahaan BUMN juga memperhatikan peraturan dilingkungan kementerian BUMN, termasuk keberadaan Komite Audit Perusahaan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN tanggal 24 Agustus 2012. Pembentukan Komite Audit dimaksudkan untuk membantu dan memperkuat Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses penyusunan laporan keuangan, pemilihan auditor eksternal dan proses auditnya, termasuk melakukan evaluasi independensi dari auditor eksternal, proses audit oleh Internal Audit, *assessment control* dan risiko serta penerapan GCG.

Masa jabatan Ketua Komite Audit yang merangkap anggota Dewan Komisaris sama dengan masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh RUPS. Sedangkan masa jabatan Anggota Komite yang bukan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No Kpts-001/K0000/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Pengangkatan Komite Audit, Komisaris menetapkan mengangkat Muhammad Ikhsan sebagai Komite Audit. Komposisi Komite Audit Perusahaan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Ketua:

Gusnida*

b. Anggota

Muhammad Ikhsan

*secara *ex officio* Ibu Gusnida selaku Komisaris Perseroan menjadi Ketua Komite Audit sesuai Board manual

Piagam Komite Audit

Agar Komite Audit dapat berperan secara efisien dan efektif, maka disusun Pedoman Kerja (Charter) Komite

Audit. Charter tersebut mencakup komposisi anggota, struktur keanggotaan, persyaratan keanggotaan termasuk persyaratan kompetensi dan independensi, masa jabatan tugas, tanggung jawab dan wewenang, rapat, pelaporan dan anggaran

Independensi Komite Audit

Anggota Komite Audit merupakan pekerja yang berasal dari PT Pertamina (Persero) dengan latar belakang pendidikan Akuntansi. Komite Audit tidak memiliki hubungan langsung dengan aktivitas utama Perusahaan, sehingga Anggota Komite Audit adalah orang-orang yang memiliki pemahaman mengenai bisnis Perusahaan dan memiliki independensi terhadap Perusahaan

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2022

Selama tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja tahunan yang direncanakan sebagai berikut:

1. Membuat dan menjalankan kegiatan Rencana Kerja Komite Audit tahun 2022.
2. Melakukan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk membahas masalah-masalah kegiatan usaha yang memerlukan perhatian khusus dari Komite Audit.
3. telah melakukan review terhadap draft laporan auditor eksternal. Review dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang telah di audit telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
4. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha bulanan, triwulan, semester serta tahun buku 2021 dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.
5. Melakukan analisa, evaluasi dan review terhadap berbagai hal lainnya yang diminta oleh Direksi untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

SEKRETARIS PERSEROAN

Pembentukan Sekretaris Perusahaan pada PT Pertamina Pedeve Indonesia mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No KEP-117/MMBU/2002 Tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara. Sekretaris Perusahaan ditunjuk dan diangkat Direksi, serta bertanggung jawab kepada Direksi. Sekretaris Perusahaan di Perseroan dikenal dengan sebutan *Corporate Secretary & Business Support* (CSBS).

Sekretaris Perusahaan memiliki kedudukan strategis, yakni sebagai penghubung antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan juga menjadi sumber informasi dan berfungsi untuk meningkatkan hubungan komunikasi internal dan eksternal terkait dengan kegiatan usaha.

a. Tugas, Tanggung Jawab, Dan Wewenang Sekretaris Perusahaan

Fungsi pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Penghubung (*liaison officer*) antara Direksi dengan Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan *stakeholders*, serta mewakili Perusahaan dalam berkomunikasi dengan masyarakat, regulator, lembaga atau asosiasi lain yang berkaitan dengan Perusahaan.
2. Memberikan pelayanan kepada *stakeholders* atas setiap permintaan informasi yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan.
3. Menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (*compliance officer*).

b. Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri Rapat Direksi dan membuat Risalah Rapat Direksi.
2. Membuat dan memperbarui secara berkala Daftar Khusus.
3. Membuat dan memperbarui secara berkala Daftar Pemegang Saham.
4. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS.
5. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan/kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar.
6. Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang

diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan Perusahaan.

7. Melaksanakan penyelenggaraan rapat-rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin.
8. Menindaklanjuti setiap keputusan Direksi dengan jalan mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan beserta penanggung jawabnya dan memantau serta mengecek tahap kemajuan pelaksanaan hasil rapat.
9. Menyenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi dan Perusahaan serta pengadministrasiannya.
10. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.
11. Melaksanakan kegiatan untuk mendukung penerapan GCG.

c. Wewenang Direksi yang dapat dilimpahkan ke Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan dalam lingkungan Direksi dan Perusahaan.
2. Melihat catatan-catatan, risalah-risalah rapat Direksi, dokumen-dokumen Perusahaan maupun laporan-laporan dalam rangka kegiatan penyediaan informasi yang diperlukan oleh Direksi.
3. Meminta laporan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan Direksi yang dilaksanakan oleh *person in charge*.
4. Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan Direksi kepada pihak-pihak terkait di dalam maupun di luar Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Direksi.
5. Meningkatkan serta meminta penjelasan dari *person in charge* Perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam tahapan proses pelaksanaan keputusan Direksi.
6. Mengingatkan serta meminta penjelasan dari satuan-satuan kerja/pihak terkait atas keterlambatan penyediaan bahan-bahan/informasi/data yang dibutuhkan oleh Direksi.
7. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan dan atau di dalam Perusahaan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah

ditentukan Direksi.

8. Mengusulkan agenda rapat-rapat Direksi dengan pihak-pihak di dalam/luar Perusahaan.
9. Menghadiri rapat-rapat Direksi dengan pihak-pihak di dalam/luar Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
10. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

d. Kegiatan Terkait Sekretaris Perseroan

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR);
2. Survey Pelanggan;
3. *Sponsorship*; dan
4. Kegiatan-kegiatan Kesekretariatan.

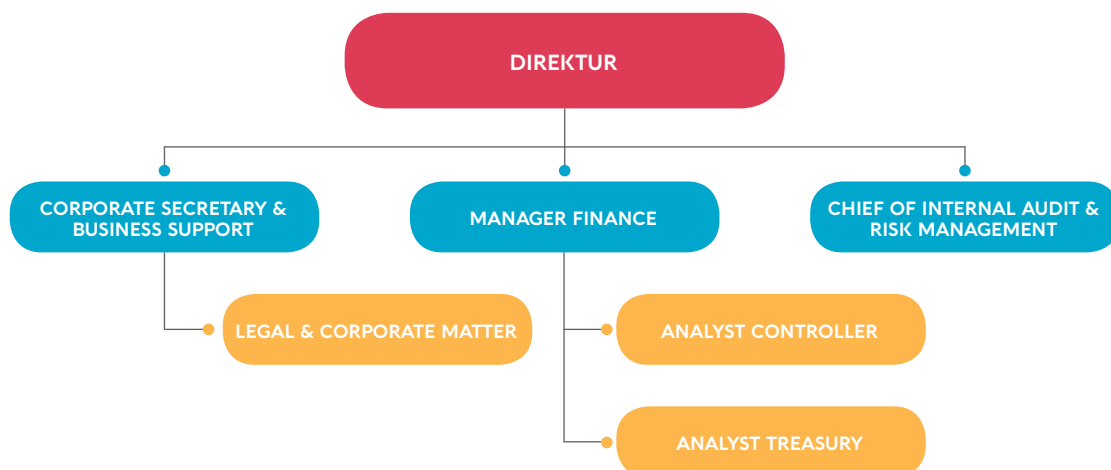
e. Profil Sekretaris Perusahaan

Sejak 01 Oktober 2018, posisi jabatan *Corporate*

Secretary & Business Support dijabat oleh Bapak Ali Syamsul Rohman, Lahir di Jakarta, 11 Oktober 1973, Lulus S-1 dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung. Bergabung di Pedeve sejak masih bernama PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) sebagai Tenaga Legal. Sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016 menjabat sebagai Manajer Legal & Compliance pada Fungsi Sekretaris Perseroan. Pada tanggal 01 September 2016 sampai dengan 31 Maret 2018 menduduki jabatan sebagai Manajer Fungsi Legal, Compliance & Risk Management.

f. Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Secara struktur organisasi tata kelola Perseroan, Sekretaris Perusahaan berkedudukan di bawah Direktur.



Ringkasan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2022

Sekretaris Perusahaan melalui fungsi-fungsi di bawahnya telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Mengatur pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris dan melakukan dokumentasi notulensi.
2. Mendampingi Direksi dan melaksanakan protokoler kegiatan yang memerlukan kehadiran Direksi, antara lain undangan/audiensi dengan pemangku kepentingan.
3. Menyiapkan bahan, informasi, dokumen lain yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas yang memerlukan kehadiran Direksi, antara

lain undangan/audiensi dengan pemangku kepentingan, instansi pemerintah, termasuk untuk kegiatan penandatanganan perjanjian dan komitmen lainnya.

4. Melakukan koordinasi dengan fungsi terkait di Pertamina grup untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Direksi.
5. Mengkoordinasikan, mengelola dan mengembangkan strategi dan program komunikasi perusahaan.
6. Mengelola formalitas korporasi, penyampaian informasi perusahaan dan dokumentasi perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

UNIT AUDIT INTERNAL

Pengendalian internal adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan anggota manajemen lainnya serta seluruh personil Perusahaan, yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Penerapan Sistem Pengendalian Internal efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.

Perusahaan melakukan dan melaksanakan sistem pengendalian internal oleh fungsi auditor internal yang melakukan audit terhadap kegiatan usaha Perusahaan dan laporan keuangan dilaksanakan secara berkala sesuai dengan rencana audit tahunan, hasil audit dilaporkan kepada Direktur dan dikomunikasikan juga dengan Komite Audit sebagai kepanjangan tangan Dewan Komisaris.

Audit dilakukan dengan ruang lingkup keseluruhan kegiatan Perusahaan yang difokuskan pada aspek dan unsur kegiatan yang memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap kepentingan Perusahaan. Internal Audit Perusahaan telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit dalam Rencana Audit dan Konsultasi Tahunan (RAT).

Fungsi Internal Audit dibentuk dengan tujuan membantu Direksi dan jajaran manajemen dalam upaya mengefektifkan pengendalian internal atas kegiatan operasi. Internal Audit berfungsi melakukan pengawasan/audit keuangan maupun pelaksanaan operasional.

Fungsi Internal Audit berperan dalam melakukan kegiatan *assurance* (meningkatkan kualitas) operasional Perusahaan dan *consulting* yang independen dan objektif dalam rangka untuk memberikan nilai tambah, membantu tercapainya tujuan Perusahaan, peningkatan operasional organisasi dan pengelolaan tata kelola perusahaan, pengendalian internal serta manajemen risiko melalui proses evaluasi dengan pendekatan yang sistematis dan teratur. Beberapa aktivitas *assurance* yang dapat dijalankan oleh fungsi internal audit antara lain audit operasional, audit compliance, audit kinerja, audit keuangan, serta audit investigasi dan *due diligence*. Sementara itu kegiatan *consulting* mencakup fasilitator, mediator dan advisory lainnya yang dibutuhkan oleh manajemen yang sifat dan cakupan penugasannya telah disepakati dengan manajemen tanpa mengambil alih kewenangan manajemen.

Pengangkatan Chief of Internal Audit

Penunjukan Chief of Internal Audit merupakan kewenangan Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Piagam Internal Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Fungsi Internal Audit berpedoman pada Piagam Internal Audit atau Internal Audit Charter. Piagam Internal Audit yang kini berlaku, disahkan dan ditandatangani Direktur dan Komisaris Perusahaan pada 24 Agustus 2021.

Visi

Menjadi internal audit yang profesional dan terpercaya dengan menerapkan standar internasional profesi Internal Audit.

Misi

Memberikan nilai tambah bagi Perusahaan melalui pemberian jasa *assurance*, *advice* dan *insight* yang berbasis risiko dan objektif.

Tujuan

1. Membantu Perusahaan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan cara melakukan evaluasi dan merekomendasikan perbaikan efektivitas tata kelola Perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian internal.
2. Membantu manajemen Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dengan memberikan advice, insight dan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Perusahaan.

Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Melaksanakan kegiatan pengawasan melalui kegiatan assurance dan consulting di seluruh unit kerja Perusahaan.
2. Memastikan aspek integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi diterapkan secara memadai.
3. Menyusun dan mengusulkan program kerja pengawasan tahunan/Annual Audit Plan (AAP) yang mencakup antara lain obyek penugasan, jadwal penugasan, anggaran dan resources yang dibutuhkan.
4. Melakukan review AAP yang sedang berjalan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan proses bisnis dan risiko perusahaan, serta lingkup dan tujuan penugasan.
5. Mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya pelaksanaan penugasan, perubahan AAP, dan perubahan arah kebijakan kepada Direktur dan Komisaris.
6. Memastikan setiap penugasan dilakukan dengan supervisi yang memadai, didukung dengan kertas kerja yang memadai, dan rekomendasi, advice, serta insight yang disampaikan dapat diaplikasikan oleh auditee.
7. Memastikan Fungsi Internal Audit secara kolektif memiliki/memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai.
8. Melaksanakan koordinasi pengelolaan kegiatan Internal Audit yang tidak terbatas pada kegiatan assurance dan consulting dengan Internal Audit PT Pertamina (Persero).
9. Menguji dan mengevaluasi efektivitas pengendalian dan manajemen risiko.
10. Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait.
11. Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan efisiensi operasional perusahaan.
12. Melaksanakan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Wewenang Internal Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit memiliki kewenangan untuk:

1. Memiliki akses tidak terbatas atas semua data, dokumen, fungsi, kegiatan, dan sumber daya perusahaan lainnya termasuk meminta keterangan atau penjelasan pada semua pejabat/ pekerja dalam rangka pelaksanaan tugas Internal Audit.
2. Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi dan pendekatan audit.
3. Melaksanakan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau Komite Audit.
4. Melaksanakan koordinasi dengan auditor eksternal dan institusi pengawasan lainnya.
5. Meminta atau mendapatkan bantuan dari pekerja internal perusahaan maupun dari pihak luar perusahaan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Sebagai bentuk awareness terhadap kompetensi pekerja pada tahun 2021, Perusahaan menyertakan *Chief of Internal Audit & Risk Management* dalam beberapa kegiatan pendidikan/pelatihan dalam upaya pengembangan kompetensi auditor dan pemenuhan terhadap Standard Profesi Internal Audit.

Ringkasan Kegiatan Internal Audit Tahun 2022

Sesuai dengan International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (IPPF), Chief of Internal Audit & Risk Management harus menyusun perencanaan berbasis risiko (*risk-based plan*) untuk menetapkan prioritas kegiatan aktivitas audit internal sesuai dengan tujuan organisasi. Chief Audit Executive harus mengkaji

dan menyesuaikan perencanaan penugasan untuk merespon perubahan dalam berbagai hal: proses bisnis, risiko, operasi, program, sistem, dan pengendalian organisasi. Sebagai bagian penyusunan *risk-based plan*, Fungsi Internal Audit mempersiapkan Audit Universe, yaitu pemetaan proses bisnis yang dapat menjadi objek audit. Kegiatan Internal Audit pada tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam *Annual Audit Plan*, difokuskan untuk melakukan konsultasi terkait *Governance, Risk, & Control* (GRC) di Lingkungan Perusahaan dengan tujuan:

1. Melakukan pendampingan secara independen dan objektif, terhadap objek konsultasi (aktivitas/proyek) agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.
2. Memberikan insight kepada manajemen terkait objek konsultasi (aktivitas/proyek) sehingga diharapkan dalam menjadi solusi atas permasalahan dan tidak menjadi issue berulang di kemudian hari.
3. Memberikan insight atas peluang optimalisasi biaya dan internal control pada proses terkait objek konsultasi (aktivitas/proyek).

Kegiatan konsultasi bertujuan untuk memberikan alternatif solusi permasalahan yang dihadapi manajemen, terkait peran Internal Audit sebagai internal konsultan perusahaan dari aspek pengelolaan risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan tanpa mengambil alih tugas dan tanggung jawab manajemen. Pelaksanaan konsultasi informal dilaksanakan sehari-hari melalui pemberian masukan dalam rapat sesuai permintaan Manajemen. Disamping itu Internal Audit melakukan kegiatan Counterparty – Audit Laporan Keuangan Perusahaan oleh Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2022

AKUNTAN PUBLIK

Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Guna memastikan integritas dan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan, maka Perusahaan menyertakan kantor akuntan publik (KAP) untuk melakukan audit umum. Untuk audit umum Laporan Keuangan 2022, dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan (afiliasi TIAG) sebagai auditor.

Biaya pelaksanaan (*fee*) audit laporan keuangan Perusahaan oleh KAP ditanggung Perusahaan, total biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan jasa di tahun 2022 adalah sebesar Rp 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta Rupiah) belum termasuk PPN.

Tahun Buku	Nama KAP	Partner	Registrasi Akuntan Publik	Pernyataan Pendapat KAP
2022	Hertanto, Grace, Karunawan	Grace Oktavia	No.AP.0151	Wajar Dalam Semua Hal Yang Material
2021	Ernst & Young - Purwantono, Sungkoro & Surja	Tjoa Tjek Nien	No.AP.1175	Wajar Dalam Semua Hal Yang Material
2022	PwC - Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Daniel Kohar	No.AP.1130	Wajar Dalam Semua Hal Yang Material
2019	PwC - Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Daniel Kohar	No.AP.1130	Wajar Dalam Semua Hal Yang Material
2018	Ernst & Young - Purwantono, Sungkoro & Surja	Yovita	No.AP.0702	Wajar Tanpa Pengecualian

Tugas Pokok Audit Eksternal

KAP mempunyai tugas pokok sebagai akuntan publik yang melaksanakan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Audit juga menilai laporan keuangan secara keseluruhan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditentukan. Selain melakukan audit terhadap Laporan Keuangan, Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan (afiliasi TIAG) tidak memberikan jasa konsultasi lain kepada Perusahaan.

Hasil Penilaian

Hasil audit keuangan oleh KAP Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan (afiliasi TIAG) menyatakan bahwa laporan keuangan PT Pertamina Pedeve Indonesia telah disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia melalui Laporan No. 00013/2.1000/AU.1/05/0151-1/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 dengan opini "Wajar dalam Semua Hal Yang Material".

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Enterprise Risk Management (ERM) Perusahaan

Sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero), Perusahaan menerapkan standar praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan dengan menjadikan budaya sadar risiko dalam setiap proses bisnis sebagai bagian dari budaya perusahaan. Implementasi ERM membantu perusahaan menghindari atau meminimalkan potensi kerugian (*potential loss*), mengoptimalkan peluang (*opportunity*) meningkatkan *share holder value* dan mengintegrasikan strategi korporat.

Perusahaan melakukan pendekatan Manajemen Risiko yang terintegrasi atas kegiatan usaha Perusahaan melalui kebijakan, strategi, serta sistem yang komprehensif untuk memelihara Manajemen Risiko yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri BUMN No 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Dalam mengelola risiko secara terkoordinasi dan terintegrasi, kebijakan Manajemen Risiko didasari pada:

1. Traktat Manajemen Risiko PT Pertamina Pedeve Indonesia;
2. Pedoman Manajemen Risiko PT Pertamina Pedeve Indonesia No 001/F0000/2021 Revisi ke-2 tanggal 12 November 2021;

Proses Manajemen Risiko dilingkungan perusahaan dilakukan secara proaktif, sistematis dan berdisiplin, melalui aktivitas *Communication & Consultation*, *Establishing The Context*, *Risk Identification*, *Risk Analysis*, *Risk Evaluation*, *Risk Treatment* dan *Monitoring & Review* yang di implementasikan dengan kegiatan Penyusunan dan Penetapan *Top Risk*, *Risk Attitude*, *Risk Appetite*, dan *Risk Tolerance* serta Pemantauan pelaksanaan pengelolaan risiko yang dilakukan secara berkala melalui kegiatan Pelaporan kepada Manajemen Perusahaan dan fungsi ERM PT Pertamina (Persero).

Keberhasilan program penerapan manajemen risiko perusahaan salah satunya ditentukan oleh peran aktif Direksi. Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan manajemen risiko yang meliputi antara lain penetapan manajemen risiko di seluruh aktifitas dan kepentingan Perusahaan; penetapan penggunaan metode pengukuran dan system informasi manajemen risiko; penetapan toleransi risiko; mitigation plan dan penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi yang terburuk; serta penerapan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Pedoman Manajemen Risiko .

Organisasi Pengelolaan Risiko

Pedoman Manajemen Risiko mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan proses dan system manajemen risiko yang efektif, dibentuk:

- a. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) yang dibentuk oleh Direksi yang beranggotakan para Manajer Fungsi atau setingkat Manajer dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dalam menerapkan manajemen risiko, baik level korporat maupun level proses yang diketuai oleh salah satu Manajer yang diangkat dan atau ditunjuk oleh Direksi.
- b. Manajemen Risiko Korporat (*Corporate Risk Management*) adalah Fungsi yang secara organisasi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk antara lain menyusun profil risiko perusahaan, memantau posisi risiko perusahaan, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Komite Manajemen Risiko berkaitan dengan penerapan manajemen risiko di tingkat Korporat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Fungsi *Internal Audit & Risk Management*.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko merupakan Komite yang dibentuk dalam rangka memenuhi komitmen Perusahaan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten serta menciptakan dan melindungi nilai Perusahaan, guna memastikan implementasi Manajemen Risiko yang efektif di seluruh aspek bisnis Perusahaan, dimana tugas dan tanggungjawabnya terutama dalam hal-hal yang terkait dengan:

1. Menetapkan strategi penerapan Manajemen Risiko dan membangun budaya sadar risiko secara berkala.
2. Bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan pengelolaan risiko yang diambil oleh Perusahaan secara keseluruhan yang meliputi antara lain mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Manajemen Risiko Korporat.
3. Mengevaluasi aktivitas yang memerlukan persetujuan Direksi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku apabila diperlukan.

Proses Penyusunan *Risk Register & Top Risk*

Risk Register disusun oleh setiap Fungsi yang berisi semua risiko (*all risk*) di Fungsi tersebut untuk selanjutnya diagregasikan menjadi Risk Register Korporat Perusahaan kemudian Risk Register yang telah disusun oleh setiap Fungsi tersebut dilaporkan kepada fungsi ERM Pertamina;

Sosialisasi Manajemen Risiko

Dalam rangka menciptakan kesadaran terhadap Manajemen Risiko, Perusahaan senantiasa melakukan sosialisasi kepada Pekerja. Perusahaan mengirimkan Pekerja untuk mengikuti pelatihan Manajemen Risiko dan mengirimkan perwakilan ke kegiatan Sinergi Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero) yang dikelola oleh Fungsi Enterprise Risk Management PT Pertamina (Persero). Pada tanggal 25 Agustus 2021 telah diadakan Sosialisasi dan Upskilling Manajemen Risiko mengenai Investment Risk Rating yang disampaikan oleh Fungsi Internal Audit & Risk Management, acara sosialisasi diadakan secara daring melalui media Microsoft MTeams.

Rencana Ke Depan

1. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan shareholders dan stakeholders Perusahaan, pengelolaan Manajemen Risiko dan *Good Corporate Governance* Perusahaan terus ditingkatkan sejalan dengan dan bagian dari pengembangan bisnis Perusahaan. Upaya pengembangan pengelolaan Manajemen Risiko Perusahaan dilakukan melalui upaya peningkatan kegiatan sosialisasi dan internalisasi budaya sadar risiko kepada seluruh pekerja Perusahaan termasuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia dalam bidang Manajemen Risiko, serta meningkatkan pengawasan terhadap proses-proses bisnis yang ada dan sedang berjalan serta melakukan penyusunan Sistem Tata Kerja Manajemen Risiko secara lengkap dan terstruktur sesuai panduan Fungsi Enterprise Risk Management PT Pertamina (Persero).
2. Selain hal tersebut, kepatuhan Perusahaan terhadap mekanisme pelaporan terhadap seluruh kewajiban yang timbul sehubungan dengan restrukturisasi Perusahaan berdampak pada penyesuaian risk register terkait dengan ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan sehingga perlu dipastikan bahwa aktivitas proses bisnis telah sejalan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan termasuk batas kewenangan pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan, Pedoman dan Prosedur yang berlaku di Perusahaan.

Pengelolaan Risiko Korporat

Perusahaan telah menetapkan Strategi penerapan manajemen risiko yang merupakan langkah-langkah implementasi dari manajemen risiko untuk mengendalikan risiko, agar profil risiko berada pada batas yang telah ditetapkan. Strategi manajemen risiko ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko. Strategi penerapan

manajemen risiko mencakup:

1. Penetapan *Top Risk*, *Risk Attitude*, *Risk Appetite*, dan *Risk Tolerance*;
2. Penetapan rencana penanganan risiko (*risk treatment*);
3. Penyusunan Profil Risiko sebelum dan setelah dilakukan penanganan risiko (*risk treatment*);
4. Pembuatan skala prioritas (prioritas risiko) dalam penanganan risiko;
5. Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kerangka manajemen risiko;
6. Pelaporan pelaksanaan pengelolaan risiko;
7. Strategi manajemen risiko dapat dievaluasi secara berkala apabila dianggap tidak sejalan atau bertentangan dengan kebijakan Perusahaan.

Perusahaan juga telah menetapkan Kategori Risiko dalam proses bisnis perusahaan sebagaimana diatur dalam Pedoman Manajemen Risiko, sebagai berikut:

1. *Legal, Governance dan Compliance Risk*
2. *Strategic Risk*
3. *Financial Management Risk*
4. *Operational Risk*
5. *Business Environment Risk*
6. *Corporate Image Risk*

Terkait dengan pemantauan penerapan risiko (*monitoring risk*), Perusahaan melakukan pelaporan realisasi mitigasi risiko *all risks* dan *top risks* dalam *Risk Register* Korporat yang telah disetujui oleh Direksi kepada Fungsi Direktorat SPPU (PIC Risk Management Direktorat SPPU), pelaporan dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan *Risk Register* Korporat, dokumen pelaporan ini menjadi bagian yang digunakan untuk mengukur parameter *Risk Treatment* dalam KPI *Shared Risk Management Implementation*.

Evaluasi Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

Perusahaan melakukan evaluasi terhadap Manajemen Risiko Perusahaan, antara lain melalui pemantauan Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memastikan rencana mitigasi risiko dijalankan oleh para risk owner dan mengurangi dampak yang merugikan bagi Perusahaan. Pada tahun 2022, Perusahaan telah mengidentifikasi 17 Risk Event. Tindak lanjut pengelolaan risiko tersebut adalah disusunnya rencana mitigasi risiko oleh para risk owner/fungsi masing-masing yang kemudian dipantau oleh Fungsi Internal Audit & Risk Management. Seluruh rencana mitigasi telah berhasil direalisasikan selama tahun 2022 dan tidak terjadi lost event, Pencapaian KPI Risk Management Implementation tahun 2022 adalah 100%. Perusahaan juga merealisasikan tindakan mitigasi lainnya yang perlu diambil untuk menurunkan kejadian risiko yang telah teridentifikasi.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan anggota manajemen lainnya serta seluruh personil Perusahaan, yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Penerapan Sistem Pengendalian Internal efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.

Kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak. Semua pihak yang terlibat dalam struktur organisasi perusahaan harus mencerminkan adanya pemisahan fungsi yang jelas sehingga dapat meminimalkan tingkat risiko penyimpangan.

Untuk meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal operasional Perusahaan agar dapat memberikan jaminan secara memadai pada tercapainya tujuan perusahaan, terpercayanya informasi, dan terjaganya aset-aset perusahaan. Proses implementasi sistem pengendalian internal operasional:

1. Menetapkan kebijakan terkait lingkungan pengendalian diantaranya struktur organisasi dan kebijakan operasional (RKAP dan RJPP).
2. Melakukan pengelolaan risiko melalui identifikasi risk register, penetapan top corporate risk, mitigasi risiko dan monitoring rencana mitigasinya.
3. Prosedur pengendalian internal dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai melalui penyusunan Sistem Tata Kerja (Pedoman, TKO, TKI, TKPA), personil yang kompeten dan pemisahan tanggung jawab serta pengendalian aset.
4. Informasi dan komunikasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur
5. pengendalian serta pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan, hukum dan peraturan yang diperlukan.
6. Dilakukan monitoring atas implementasi prosedur tersebut agar masih sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Penerapan pengendalian keuangan dan operasional dilakukan secara berjenjang meliputi seluruh elemen yang terdapat di dalam Perusahaan. Pengendalian Keuangan dan Operasional yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah dengan melakukan pengawasan dan pemberian nasehat terkait proses kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit. Sedangkan Direksi menerapkan sistem pengendalian internal melalui penerapan kebijakan dan prosedur Perusahaan secara konsisten dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, antara lain terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan dan manajemen risiko, rencana strategis, pembagian tugas, pendelegasian wewenang serta kebijakan akuntansi yang memadai.

KODE ETIK DAN PAKTA INTEGRITAS

Kode Etik Perusahaan

Perusahaan telah memiliki kebijakan mengenai potensi benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Kode etik Perusahaan diperbarui dan disempurnakan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Kode etik Perusahaan diterapkan untuk mengarahkan Perusahaan menjadi perusahaan yang dapat memberikan manfaat lebih kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham dan Pertamina Group pada umumnya.

Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku Perusahaan tertuang dalam Pedoman Nomor A-001/D0000/2020. Pedoman ini merupakan perwujudan upaya Perusahaan dalam mengimplementasikan GCG dalam setiap aktivitas operasional Perusahaan. Seluruh Insan Perusahaan wajib mengetahui dan memahami Kode Etik Perusahaan sebagai dasar penerapan perilaku yang mengatur hubungan antara pekerja dengan Perusahaan, sesama pekerja, pemasok, pemegang saham, pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat. Sebagai bentuk sosialisasi dan upaya transparansi, Pedoman ini telah diunggah ke website Perusahaan dan dapat diunduh melalui tautan: <http://www.pdv.co.id/home/pedoman>.

Isi Penting Kode Etik Perusahaan

Memuat prinsip-prinsip GCG yang dianut oleh Perusahaan.

A. Etika usaha terhadap hubungannya dengan *stakeholders*, yakni:

1. Pemegang Saham;
2. Pekerja;
3. Pelanggan;
4. Pesaing;
5. Penyedia Barang/Jasa;
6. Mitra Bisnis;
7. Kreditur;
8. Investor;
9. Pemerintah;
10. Masyarakat;
11. Media Massa;
12. Organisasi Profesi.

B. Standar etika usaha Perusahaan terhadap aspek

husus, yakni:

1. Kebijakan akuntansi dan keuangan;
2. Pemberian donasi;
3. Transaksi afiliasi.

C. Standar Tata Perilaku terkait Hubungan Kerja, yakni:

1. Lingkungan kerja bebas diskriminasi, pelecehan, perbuatan asusila, ancaman dan kekerasan;
2. Hubungan dan kerjasama antar pekerja;
3. Hubungan atasan dan bawahan.

D. Standar Tata Perilaku terkait Aspek Khusus yakni:

1. Integritas dan komitmen;
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Kerahasiaan data dan informasi;
4. Penggunaan komunikasi elektronik;
5. Benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan;
6. Hadiah/cenderamata, jamuan bisnis/hiburan dan lainnya (gratifikasi);
7. Penyuapan;
8. Aktivitas politik;
9. Aktivitas sosial;
10. Perlindungan dan penggunaan aset Perusahaan;
11. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindung Lingkungan (K3LL);
12. Pencatatan data, pelaporan dan dokumentasi;
13. Penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, minuman keras dan perjudian;
14. Citra perusahaan.

E. Pelaksanaan etika usaha dan tata perilaku, yakni:

1. Penerapan etika usaha dan tata perilaku;
2. Sosialisasi dan internalisasi;
3. Pelaporan, penanganan dan penegakan pelanggaran;
4. Pembaruan/revisi *Code of Conduct*.

Tujuan Penerapan Kode Etik Perusahaan

Tujuan dari Pedoman etika usaha dan Tata Perilaku adalah:

1. Mengembangkan standar perilaku terbaik bagi insan Pedeve yang berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG, sehingga mendorong terciptanya

budaya Perusahaan yang diharapkan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan nilai perusahaan.

2. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan serta meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan.
3. Menjabarkan nilai-nilai perusahaan sebagai landasan perilaku yang harus diikuti oleh seluruh insan Pedeve dalam menjalankan aktivitas kerjanya sehari-hari.
4. Mendorong perbaikan pengelolaan Perusahaan dan pengembangan nilai yang pada akhirnya akan meningkatkan citra Perusahaan.

Pedoman etika usaha dan tata perilaku selanjutnya menjadi acuan perilaku dalam mengelola Perusahaan dengan cakupan:

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas dipatuhinya etika usaha dan tata perilaku di lingkungan Perusahaan.
2. Direksi bertanggung jawab atas penerapan etika usaha dan tata perilaku di lingkungan Perusahaan dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan fungsi Internal Audit.
3. Chief of Internal Audit, Manajer dan setingkat Manajer bertanggung jawab atas penerapan etika usaha dan tata perilaku di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
4. Setiap insan Pedeve mengisi komitmen kepatuhan terhadap etika usaha dan tata perilaku secara *online* dengan menggunakan teknologi berbasis komputer. Dengan demikian, setiap insan Pedeve telah memahami dan setuju untuk mematuhi, untuk selanjutnya didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan sebagai *Chief Compliance Officer* (CCO).

Sosialisasi Pedoman Kode Etik

Kode Etik Perusahaan disebarkan kepada semua insan Pedeve melalui berbagai media. Media sosialisasi penyebaran kode etik antara lain melalui:

1. *online*
2. Buku saku
3. *Banner*

Untuk mewujudkan perilaku yang berlandaskan kode etik tersebut, terdapat sejumlah inisiatif strategis yang dilakukan Perusahaan, antara lain melalui:

1. Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi serta pekerja untuk menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik dalam setiap langkah Perusahaan, yang tertuang dalam Pakta Integritas yang diperbarui setiap awal tahun.
2. Keteladanan Pimpinan dengan memberi contoh sikap dan perilaku yang tidak bertentangan dengan kebijakan dan peraturan Perusahaan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh pekerja Perusahaan yang diperbarui setiap tahun.

Penandatanganan Komitmen Kode Etik Perusahaan

Untuk menunjukkan komitmennya, Dewan Komisaris menandatangani pernyataan dalam Pakta Integritas bahwa tidak memiliki benturan/konflik kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan/konflik kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS/Pemilik Modal. Dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan, disampaikan pula pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali satu sama lainnya, sebagaimana yang disampaikan pada tabel berikut:

Nama	Hubungan Dengan						Hubungan keluarga Dengan					
	Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Gusnida	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Mekanisme Sanksi

Perusahaan telah menyiapkan mekanisme penegakan atas tindakan yang tidak sesuai Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku, antara lain:

1. Setiap insan Pedeve dapat melaporkan melalui sarana *Whistleblowing System* (WBS) apabila ditemukan fakta terjadinya penyimpangan etika usaha dan Tata Perilaku. Tim yang ditunjuk Perusahaan akan menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.
2. Dewan Komisaris dan Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing. Bentuk sanksi yang diberikan akan diatur secara tersendiri.
3. Insan Pedeve yang melakukan penyimpangan etika usaha dan tata perilaku memiliki hak untuk didengar penjelasannya di hadapan atasan langsung, sebelum diberikan tindakan pembinaan atau hukuman disiplin.
4. Pelaksanaan tindakan pembinaan, hukuman disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan dilakukan oleh fungsi Corporate Secretary & Business Supports.

Dalam kurun waktu periode pelaporan, Perusahaan telah menerima nihil (0) laporan terkait dugaan pelanggaran pedoman etika usaha dan tata perilaku.

Konsistensi Penerapan GCG dan Kode Etik Perusahaan

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan praktik-praktik terbaik GCG dan secara konsisten melaksanakan kode etik Perusahaan pada setiap kegiatan Perusahaan. Hal tersebut diwujudkan antara lain melalui:

1. Membangun hubungan kerja sama dengan pihak eksternal dan menjadi narasumber/peserta pada berbagai aktivitas berskala nasional terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Selama tahun 2022, tercatat ada nihil (0) pejabat Perusahaan yang menjadi narasumber berbagai aktivitas berskala nasional terkait upaya pemberantasan korupsi.
2. Pelaksanaan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Gratifikasi.
3. Implementasi UU No. 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. PT Pertamina (Persero) telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor Kpts-70/C00000/2017-S0 tertanggal 30 Nopember 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat di Lingkungan Pertamina termasuk bagi pejabat perusahaan di lingkungan Perusahaan, yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero).

4. *Board Manual*.

Merupakan dokumen kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi mengenai pedoman dan mekanisme hubungan kerja antar kedua organ, tugas pokok dan tanggung jawab.

5. *Code of Corporate Governance*.

Merupakan struktur dan proses yang digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya.

Pakta Integritas dan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Perusahaan secara khusus mewajibkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses dan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk menandatangani Pakta Integritas. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan praktik kecurangan dan/atau ketidaksesuaian yang mungkin dapat terjadi.

Melalui mekanisme pakta integritas dan tata kelola pengadaan barang, tidak ada kegiatan pengadaan barang dan jasa yang terindikasi praktik kecurangan dan/atau ketidaksesuaian dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan.

Pencegahan Korupsi

Setiap insan Pedeve harus menjunjung integritas serta tidak diperbolehkan mentoleransi perbuatan suap. Perusahaan mendorong agar pekerja menyampaikan laporan jika mengetahui adanya tindakan korupsi atau tindakan yang berpotensi pada terjadinya korupsi. Perusahaan melindungi identitas pekerja yang memberikan laporan.

Perusahaan melarang pekerja untuk memberi atau menerima suap. Adapun pemberian sumbangan

atau donasi dan sejenisnya diperbolehkan selama hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan mengatur pencegahan korupsi melalui Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*).

Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) Nomor A-003/D0000/2020 mengatur hal-hal yang terkait dengan penolakan, penerimaan, pemberian dan permintaan hadiah/cenderamata dan hiburan (*entertainment*), serta batasan penerimaan, pemberian dan pemberian atas permintaan dari pihak ketiga.

Pedoman ini memberikan arah dan acuan bagi seluruh Insan Pedeve yang berkenaan dengan gratifikasi, penerimaan, pemberian, dan permintaan hadiah/ cenderamata dan hiburan (*entertainment*) di lingkungan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), sehingga dapat mendorong terlaksananya etika bisnis yang

tinggi dan mencegah timbulnya konflik kepentingan, kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya.

Insan Pedeve bilamana menemui kondisi Konflik Kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman *Conflict of Interest* wajib melaporkan kepada atasan langsung dan/atau Corporate Secretary & Business Support selaku pejabat yang ditunjuk oleh Direktur (Chief Compliance Officer) yang bertanggungjawab atas program kepatuhan perusahaan dan memastikan bahwa Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan pekerja mematuhi peraturan dan ketentuan baik pemerintah, Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku serta perilaku organisasi sesuai dengan Pedoman yang berlaku di perusahaan.

Rekapitulasi Laporan konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) Pribadi, Keluarga dan/atau golongan dengan posisi Jabatannya di Perusahaan periode Januari sampai dengan Desember 2022, sebagai berikut:

Laporan Konflik Kepentingan Tahun 2022											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
NIHIL											

Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan

Sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero), Pedeve juga memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Penerapan kebijakan ini mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor: Kpts - 70/C00000/2017-S0 tertanggal 30 Nopember 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat di lingkungan Pertamina Group. Surat keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pejabat Perusahaan yang berkewajiban menyampaikan LHKPN adalah:

- Direksi
- Manajer/setara
- Komisaris yang tidak sekaligus menjabat sebagai Direksi Pertamina dan bukan pejabat tugas perbantuan.

Evaluasi Pedoman Etika dan Tata Perilaku

Periode terakhir Perusahaan melakukan penyesuaian atas Pedoman etika dan tata perilaku yakni pada tahun 2021, kegiatan dilakukan untuk mengetahui dan mengukur bagaimana kesesuaian Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) dengan kebutuhan Perusahaan serta efektivitas dari program implementasi Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pengembangan terhadap Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) Perusahaan dan perbaikan dari program implementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan.

Dalam evaluasi atas Pedoman Etika dan Tata Perilaku, Perusahaan menerima berbagai masukan, kritik dan saran dari pemangku kepentingan terkait agar target penerapan implementasi Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) dalam aktivitas operasional Perusahaan sehari-hari dapat tercapai.

WISHLBLEWING SYSTEM

Whistleblowing System dibentuk sebagai suatu sistem untuk penanganan pengaduan yang lebih tanggap, transparan, aman dan bertanggung jawab. Setiap laporan yang masuk melalui mekanisme WBS ditangani sesuai dengan Tata Kerja Organisasi (TKO) *Whistleblowing System* (WBS) yang telah diperbaharui di tahun 2020 melalui TKO Nomor B-003/D0000/2020.

Pengaduan dan pelaporan yang dimaksud berasal dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan dan Anak/Afiliasi Perusahaannya terkait pelanggaran terhadap ketentuan hukum, ketentuan internal Perusahaan, maupun ketentuan etika dan *Code of Conduct* Perusahaan.

Perusahaan memiliki WBS sebagai sistem pelaporan yang berdiri sendiri dan dikelola secara independen serta terlepas dari sistem dan mekanisme WBS Perusahaan induk, yakni PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham Mayoritas.

WBS yang dibangun Perusahaan dibentuk sebagai suatu sistem untuk penanganan pengaduan yang lebih tanggap, transparan, aman dan bertanggung jawab. Setiap laporan yang masuk melalui mekanisme WBS ditangani sesuai dengan Prosedur *Whistleblowing System* (WBS) yang berlaku di lingkungan perusahaan.

Implementasi TKO *Whistleblowing System* Nomor B-003/D0000/2020 yang diberlakukan di Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor Kpts-011/A0000/2020 tanggal 25 Nopember 2020 tentang *Whistleblowing System*. Prosedur ini mendorong peran serta pejabat dan atau seluruh Insan PT Pertamina Pedeve Indonesia untuk mencegah dan turut serta dalam kegiatan pemerintah melakukan program pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang melalui pengelolaan pengaduan, pelaporan dan atau penyingkapan terhadap setiap tindakan/ perbuatan melawan hukum, perilaku tidak etis secara rahasia dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, TKO WBS ini dijalankan oleh fungsi Corporate Secretary & Business Support selaku Chief Compliance Officer yang ditunjuk oleh

Direksi. Secara teknis, Corporate Secretary & Business Support selaku Chief Compliance Officer menerima dan mencatat seluruh pengaduan, pelaporan atau penyingkapan yang masuk melalui sarana/media sebagai berikut:

Telephone : (021) 391 1857
Facs : (021) 391 1859
Website : pdv.co.id
Email : pdv@pdv.co.id

Seluruh pengaduan, pelaporan atau penyingkapan yang masuk melalui sarana-sarana tersebut diatas dilakukan verifikasi (Pengumpulan bahan dan Keterangan/ Pulbaket) dan kemudian dilakukan telaahan sebagai data awal bagi Corporate Secretary & Business Support selaku *Chief Compliance Officer* untuk memastikan apakah pengaduan, pelaporan atau penyingkapan yang masuk dapat ditindaklanjuti atau tidak. Seluruh pengaduan, pelaporan atau penyingkapan akan dituangkan ke dalam *format standard* laporan secara periodik minimal setiap 1 (satu) bulan yang memuat laporan antara lain meliputi 1) jumlah pengaduan/penyingkapan, 2) kategori pengaduan/penyingkapan dan 3) saluran yang digunakan oleh Pelapor serta menyampaikannya kepada Corporate Secretary & Business Support selaku Chief Compliance Officer.

Lingkup pengaduan/pelaporan WBS Perusahaan yang ditindaklanjuti hanya terkait dugaan pelanggaran hukum, ketentuan internal Perusahaan, serta ketentuan etika dan *code of conduct* yang diduga dilakukan oleh Insan Pedeve, khususnya untuk kasus:

1. Korupsi;
2. Suap;
3. Gratifikasi;
4. Konflik Kepentingan;
5. Pencurian;
6. Kecurangan/*Fraud*;
7. Pelanggaran etika dan *code of conduct* yang berlaku di Pedeve dan/atau Anak Perusahaan.

Laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti dalam WBS dan ditangani oleh fungsi terkait, jika terkait dengan lingkup kedinasan, antara lain:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum di bidang

- lingkungan hidup;
2. Perselisihan pribadi antar Insan Pedeve atau antara Insan Pedeve dengan pihak ketiga di luar lingkup kedinasan, permasalahan fasilitas SDM dan Perusahaan.

Rekapitulasi Laporan Bulan Whistleblowing System periode Januari sampai dengan Desember 2022 terhadap setiap pengaduan, pelaporan atau penyingkapan sebagaimana dimaksud dalam TKO Whistleblowing System dapat dilaporkan sebagai berikut:

No	Jumlah & Saluran Penerimaan Kontak					Kategori lingkup Pengaduan/ penyingkapan		Keterangan
	Telephone	Website	Email	Facs	SMS	Sesuai	Tidak Sesuai	
N I L A I								

a. Perlindungan Bagi Whistleblower

Perusahaan (Pedeve) menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan. Pedeve tidak akan melakukan upaya apapun untuk mencari identitas asli pelapor jika pengaduan bersifat anonim. Meskipun demikian, Pedeve dapat meminta informasi kepada pelapor mengenai tata cara untuk dapat menghubungi pelapor apabila diperlukan sehubungan dengan keperluan klarifikasi lebih lanjut atas aduan/laporan yang disampaikan.

Tindak lanjut atas setiap aduan/laporan pada WBS wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan asas-asas WBS Pedeve sebagaimana diatur di dalam Pedoman WBS Pedeve.

b. Penanganan Pelaporan/Pengaduan

Pihak yang mengelola pengaduan sistem WBS Pedeve adalah Fungsi Sekretaris Perusahaan dalam hal ini Corporate Secretary & Business Support selaku *Chief Compliance Officer* (CCO). Pelaporan/pengaduan yang masuk ke dalam sistem WBS Pedeve memiliki potensi untuk menimbulkan benturan kepentingan antara para pihak yang terkait dengan sistem WBS Pedeve. Berdasarkan hal tersebut, maka diatur mekanisme tindak lanjut khusus untuk kondisi-kondisi tertentu sebagai berikut:

- Aduan/laporan yang berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan Direksi dan/atau anggota Direksi akan diserahkan oleh Sekretaris Perusahaan kepada Dewan Komisaris.
- Aduan/laporan yang berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan Dewan Komisaris akan diserahkan oleh Direktur Utama kepada para pemegang saham Pedeve.
- Aduan/laporan yang berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota Fungsi Corporate Secretary & Business Support yang diserahkan oleh Direktur Utama kepada Internal Audit.

c. Sanksi/tindak Lanjut atas Pengaduan yang telah Selesai Diproses pada Tahun Buku 2022

Setiap pelaporan yang terbukti akan ditindaklanjuti dengan menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak terlapor, sesuai Aturan Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku. Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat pengaduan/pelaporan yang disampaikan melalui WBS Pedeve.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Pedevé berkomitmen untuk memberikan akses data dan informasi kepada para *stakeholders* sebagai bagian dari bentuk transparansi dan upaya peningkatan penerapan GCG yang telah dilakukan selama ini. Namun di sisi lain, Pedevé juga menerapkan manajemen data untuk menjaga informasi penting yang wajib dirahasiakan.

Dalam rangka mendukung komitmen penerapan keterbukaan informasi, maka seluruh akses untuk mendapatkan informasi Perseroan dibuka semaksimal mungkin. Seluruh informasi mengenai Perseroan, publikasi, produk, aksi korporasi ataupun berupa keluhan, saran dan kritik membangun dapat diakses melalui *Care Center* Perseroan:

- Website: <http://www.pdv.co.id>
- Email: pdv@pdv.co.id
- Telepon: (021) 391 1857
- Fax : (021) 391 1859

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Perseroan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa selalu mengacu kepada Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Surat Keputusan No Kpts-011/A0000/2021 tanggal 5 Oktober 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa. Pada prinsipnya Perseroan memberikan kesempatan yang sama bagi calon penyedia barang/jasa sesuai prinsip dasar pengadaan antara lain : efisien, kompetitif , transparan, adil, bertanggung jawab, kehati-hatian dan kemandirian.

1. Prinsip dasar dimaksud dilandasi dengan etika bisnis yang baik antara lain:
 - a. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan tidak sehat;
 - b. Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai wewenang;
 - c. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*);
 - d. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;
 - e. Tidak menyalahgunakan wewenang;
 - f. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak

berjanji akan memberikan hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

2. Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan metode:
 - a. Pelelangan; dilakukan untuk mengadakan barang/jasa dengan nilai di atas Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
 - b. Pemilihan Langsung; dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - c. Penunjukan langsung; dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), terdiri atas:
 - *Cash & Carry*, untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dasar Landasan Hukum

1. Surat Keputusan No Kpts-011/A0000/2021 tanggal 5 Oktober 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
 2. Pedoman No A-001/D0000/2021 tentang Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
 3. Tata Kerja Organisasi No B-001/D0000/2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung.
 4. Tata Kerja Organisasi No B-002/D0000/2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Metode Penunjukan Langsung.
 5. Tata Kerja Organisasi No B-003/D0000/2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Metode *Cash&Carry*.
 6. Tata Kerja Individu Instruksi Kerja No C-001/D0000/2021 Tentang Penyusunan OE/HPS (Harga Perhitungan Sendiri).
- Tata Kerja Individu Instruksi Kerja No C-002/D0000/2021 Tentang Tentang Negosiasi.

PERMASALAHAN HUKUM DAN LAINNYA

Permasalahan Hukum yang dihadapi Perseroan Tahun 2022

No	Perkara Hukum	Pengaruh Terhadap Perseroan	Status Terakhir	Sanksi Administrasi terhadap Perseroan
1.	Perseroan sebagai Tergugat III dalam Perkara: 536/PDT.G/2022/PN.JktSel Tgl 21 Juni 2022. Penggugat: Ir. Syamsul Bahri Hasibuan, SH., MH ex. Dekom PT PEPC ADK. Penggugat sebagai Dewan Komisaris menjalankan kewajiban Direksi yang vacan sesuai Pasal 11 ayat 2 & 18 AD PEPC ADK, mengajukan tuntutan: 1). Hak atas tantien/ insentif/ kompensasi kinerja tahun buku 2020 sbg Direksi, sejak 17 Juli 2020 s.d 24 Mei 2021 sebesar ± Rp226jt; 2). Biaya Pengacara Rp 150jt; 3). Sita jaminan Fasilitas Produksi Kemuning; 4). Dwangsom Rp10jt/hari; dan 5). Tuntutan Imateril Rp20M	Adanya biaya yang harus ditanggung Perseroan	BELUM SELESAI. Pemeriksaan Perkara secara E-Court	Tidak Ada
2.	Perseroan sebagai Tergugat III dalam Perkara: 617/PDT.G/2022/PN.JktSel Tgl 12 Juli 2022. Penggugat: Ir. Syamsul Bahri Hasibuan, SH., MH ex. Dekom PT PEPC ADK. Penggugat sebagai Dewan Komisaris, mengajukan tuntutan: 1). Hak atas kinerja tahunan (tantien/ insentif/ kinerja/kompensasi atas Kinerja Dekom Tahun Buku 2019 sebesar Rp 36.399.452,-; 2). a. Gaji/Honorarium sbg Komut Bulan Feb – Desember 2020 Rp340.030.999,-; b. Tunjangan Transportasi Tahun 2019-2020 Rp86.553.348,-; 3). Hak atas tantien/ insentif/ kompensasi kinerja sbg Dekom Tahun Buku 2020 sebesar Rp 221.400.000,-; 4). Biaya Pengacara Rp 150juta; 5). Sita jaminan Fasilitas Produksi Kemuning; dan 6). Dwangsom Rp10.000.000,-/hari & 7). Imateril Rp20M	Adanya biaya yang harus ditanggung Perseroan	BELUM SELESAI. Pemeriksaan Perkara secara E-Court	Tidak Ada

No	Perkara Hukum	Pengaruh Terhadap Perseroan	Status Terakhir	Sanksi Administrasi terhadap Perseroan
3.	Perseroan sebagai Termohon Banding dalam Perkara asal No.: 636/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL yang sebelumnya diajukan oleh 127 orang Peserta Tabungan Pegawai Pertamina yang terdaftar dalam individual account per 15 Juli 2002	- Putusan Pengadilan Tingkat I memenangkan Perseroan. Putusan akan memberikan kepastian atas status Tabungan Pegawai Pertamina; - Adanya biaya yang harus ditanggung Perseroan.	BELUM SELESAI Monitoring Banding - Sampai dengan laporan ini dibuat belum ada putusan dari Pengadilan Tinggi DKI terkait hal tersebut; - Berkas Kontra Memori Banding Perseroan telah dikirim dan diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 03 Desember 2020. - Kontra Memori Banding telah didaftarkan Perseroan di PN Jakarta Selatan tgl 23 November 2020. - Penggugat menyatakan Banding atas putusan dimaksud.	Tidak Ada

Permasalahan Lainnya merupakan permasalahan yang dihadapi Perseroan terkait aktifitas usaha yang dilakukan sebelum Perseroan berubah bentuk menjadi PT Pertamina Pedeve Indonesia yang terdiri dari:

No	Permasalahan Lainnya	Pengaruh Terhadap Perseroan	Status Terakhir	Sanksi Administrasi terhadap Perseroan
1.	Permohonan Banding atas Gugatan wanprestasi Terhadap PT Duamitra Oil (DMO) dan Para Penanggung (<i>Personal Guarantee</i>) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Oktober 2017, dengan nomor 544/PDT.G/2017 .	- Perseroan menjadi terkendala untuk melakukan eksekusi personal guarantee; - Adanya biaya yang harus ditanggung Perseroan	BELUM SELESAI Menunggu PN Jakarta Pusat mengeluarkan Surat yang menyatakan Perkara telah <i>Inkraft</i>. - Putusan Pengadilan memenangkan Perseroan. Namun PN JakPus belum dapat mengeluarkan Surat yang menyatakan Perkara telah <i>Inkraft</i>, disebabkan Relass Delegasi pemberitahuan kepada Para Penanggung Jawab PT DMO dari PN Bontang & PN Samarinda belum kembali ke PN Jakarta Pusat. - Menghukum Para tergugat membayar utangnya kepada Perseroan sebesar Rp9.565.160.043,- secara tanggung renteng dengan kewajiban masing-masing sebesar Rp 2.391.290.010,75. - Perkara Banding diputuskan dan dimenangkan oleh Perseroan. Putusan PT DKI Jakarta No.415/PDT/2019/PT DKI menguatkan Putusan PN Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. - Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi di PT DMO telah diturunkan penuh nilainya (<i>full impairment</i>)	Tidak Ada

No	Permasalahan Lainnya	Pengaruh Terhadap Perseroan	Status Terakhir	Sanksi Administrasi terhadap Perseroan
2.	Penyelesaian piutang PT Sarjo Indah (PT SI) sebagai upaya potensi revenue melalui Optimalisasi Aset Tanah Samboja Kaltim sesuai putusan BANI nomor 722/VI/ARB-BANI/2015	- Putusan arbitrase memenangkan Perseroan - Menghukum PT SI membayar kerugian sebesar Rp 26.184.503.937 - Menghukum PT SI membayar biaya adm sebesar ½ bagian atau sebesar Rp 301.808.000	SELESAI & UPAYA RECOVERY A. Perseroan mengajukan permohonan Bantuan Hukum Penagihan Piutang Kewajiban PT Sarjo Indah pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara ("Jamdatun") Republik Indonesia dalam rangka Pemulihan (<i>recovery</i>) atas Piutang Pedeve: - Surat Perintah dan menunjuk Tim JPN untuk memberikan Bantuan Hukum kepada Pedeve melalui Surat Perintah Nomor PRIN-216/G/Gp.2/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 perihal Surat Perintah Untuk Membuat Telaahan ("SPrint"). - Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-02/G/Gp.2/05/2022 tanggal 13 Mei 2022 dari Jamdatun kepada Tim JPN yang ditunjuk berdasarkan Sprint diatas. - Surat Kuasa Khusus Nomor 006/A0000/2022 tanggal 20 April 2022 kepada Jamdatun. B. Monitoring pembayaran sisa uang sewa Tanah Samboja yang belum terbayar periode Maret 2018 s/d Maret 2020 sebesar Rp118 juta dan periode Maret 2020 s/d Maret 2023 sebesar Rp213juta secara bertahap selama 6 bulan (Pebruari s/d Juli 2023) dari Daton Mix kepada Pedeve sebagai pengurang kewajiban PT SI: - Pembayaran II Daton Mix Kepada Pedeve tgl 21 Maret 2023 sebesar Rp 40.000.000,- - Pembayaran I Daton Mix Kepada Pedeve tgl 20 Februari 2023 sebesar Rp 40.000.000,- C. Monitoring Rencana Penjualan Tanah Samboja: - Mencari Potential Buyer. - Berkordinasi dengan Balai Lelang Swasta (Pra Lelang). - Berkordinasi dengan KPKNL (<i>non Formal</i>) melalui Balai Lelang Swasta rekanan Pedeve. - Laporan Hasil Penilaian Aset Kantor Jasa Penilai Publik Wahyu Yasir Purnamasari & Rekan Nomor 00238/2.0098-01/PI/050315/1/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022. - Nilai Pasar Rp 6.870.500.000,- dan Nilai Likuidasi Rp4.809.400.000,- D. Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi di PT SI telah diturunkan penuh nilainya (<i>full impairment</i>).	Tidak Ada

No	Permasalahan Lainnya	Pengaruh Terhadap Perseroan	Status Terakhir	Sanksi Administrasi terhadap Perseroan
3.	Penyelesaian piutang PT Vialine Mandiri Agung Selaras (PT VMAS) dalam Pailit sebagai upaya potensi income melalui penjualan aset jaminan sesuai dengan Putusan BANI nomor 787/I/RB-BANI/2016	- Putusan arbitrase memenangkan Perseroan - Menghukum PT VMAS, Bindu VL. Simanungkalit, Basar Situmeang secara tanggung renteng membayar kewajibannya kepada PDV sebesar Rp 10.657.225.664 - Menghukum Para tergugat secara tanggung renteng mengembalikan ½ bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp 299.476.000 - Adanya biaya yang harus ditanggung Perseroan	SELESAI & UPAYA RECOVERY a. Perseroan mengajukan permohonan Bantuan Hukum Penagihan Piutang Kewajiban PT VMAS (dalam Pailit) pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara ("Jamdatun") Republik Indonesia dalam rangka Pemulihan (<i>recovery</i>) atas Piutang Pedeve di PT VMAS (dalam Pailit): 1. Surat Perintah dan menunjuk Tim JPN untuk memberikan Bantuan Hukum kepada Pedeve melalui Surat Perintah Nomor PRIN-599/G/Gp.2/03/2022 tanggal 04 Oktober 2022 perihal Surat Perintah Untuk Membuat Telaahan ("SPrint"). 2. Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-055/G/Gp.2/11/2022 tanggal 07 Nopember 2022 dari Jamdatun kepada Tim JPN yang ditunjuk berdasarkan Sprint diatas. 3. Surat Kuasa Khusus Nomor 017/A0000/2022 tanggal 15 September 2022 kepada Jamdatun. b. Upaya Hukum Eksekusi Putusan BANI secara damai dan sukarela. Upaya dimaksud sebagai berikut: 1. Telah memanggil sebanyak 2 kali kepada Kurator PT VMAS dalam Pailit, namun pihaknya tidak hadir. 2. Telah melangsungkan 2 kali Pertemuan dengan para Penanggung Jawab/Penjamin PT VMAS dalam Pailit. Hasil kedua pertemuan dimaksud adalah para Penanggung Jawab/ Penjamin hanya mau membayar 2/3 dari seluruh kewajiban PT VMAS dalam Pailit kepada Pedeve, sisanya dilimpahkan kepada PT VMAS dalam Pailit/Kurator. 3. Upaya Hukum Eksekusi Putusan BANI secara damai dan sukarela mengalami jalan buntu, Langkah selanjutnya adalah Permohonan Eksekusi Paksa melalui Pengadilan Negeri. c. Upaya Hukum Permohonan Eksekusi atas Putusan Arbitrase BANI Nomor 787/I/ARB-BANI/2016 tanggal 22 Februari 2017 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur: 1. Tim JPN telah mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan BANI <i>a quo</i> melalui suratnya tertanggal 7 Maret 2023 yang diterima PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 Maret 2023. 2. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menginformasikan akan melakukan telaahan atas Permohonan Eksekusi Putusan BANI <i>a quo</i> oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hasil telaahan akan diinfokan kepada Tim JPN selaku Pemohon Eksekusi Putusan BANI <i>a quo</i>, proses dan mekanisme permohonan eksekusi selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri. d. Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi di PT VMAS telah diturunkan penuh nilainya (<i>full impairment</i>).	Tidak Ada

No	Permasalahan Lainnya	Pengaruh Terhadap Perseroan	Status Terakhir	Sanksi Administrasi terhadap Perseroan
4.	PT Gatramas Internusa (GTR) oleh salah satu kreditur, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.06/Pdt.Sus-Pem. Perdata/2017/PN.NIAGA. JKT.PST tanggal 07 November 2017 PT GTR dinyatakan pailit	Adanya biaya yang harus ditanggung Perseroan	SELESAI & UPAYA RECOVERY Piutang Perseroan kepada PT GTR diakui oleh Pengadilan sebesar Rp37.805.506.042,-. Saat ini dalam Proses likuidasi aset PT GTR dalam Pailit oleh Kurator - Pelelangan Aset Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi di PT GTR telah diturunkan penuh nilainya (<i>full impairment</i>)	Tidak Ada
5.	Gugatan wanprestasi Terhadap PT Inpar Saka (IS) dan Para Penanggung (Personal Guarantee) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 2017 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 570/PDT.G/2017.	- Putusan Pengadilan memenangkan Perseroan - Menghukum tergugat membayar seluruh hutang kepada PT Pedeve sebesar Rp, 35,5 Milyar secara tanggung menanggung - Adanya biaya yang harus ditanggung Perseroan.	SELESAI & UPAYA RECOVERY - Perkara dimenangkan oleh Perusahaan (sudah berkekuatan hukum tetap / <i>inkracht</i>). - Para Tergugat tidak mengajukan banding, dan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap. - Perseroan terkendala melakukan eksekusi PT IS dan Para Penanggung (Personal Guarantee) dikarenakan aset Jaminan yang tidak executable serta tidak diketahui aset-aset milik Para Penanggung (Personal Guarantee). - Terkait Permasalahan PT IS, Perseroan merencanakan meminta bantuan kepada JAMDATUN RI agar dapat mengajukan Eksekusi Putusan PN Jakarta Pusat, namun diselesaikan secara bertahap terkait permasalahan lainnya - Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi di PT IS telah diturunkan penuh nilainya (<i>full impairment</i>).	Tidak Ada
6.	Permohonan arbitrase atas PT Tata Wirutama (TWU) ke BANI dengan nomor pendaftaran Arbitrase di Sekretariat BANI No.732/VII/ARB-BANI/2015 tanggal 14 Juli 2015	- Putusan arbitrase memenangkan Perseroan - Menghukum PT TWU membayar kerugian sebesar Rp 11.635.550.122 - Menghukum PT TWU membayar biaya adm sebesar ½ bagian atau sebesar Rp 213.683.500,- kepada PDV.	SELESAI & UPAYA RECOVERY - Perkara dimenangkan oleh Perusahaan (berkekuatan hukum tetap / <i>inkracht</i>) - Perseroan telah mengajukan permohonan eksekusi Putusan BANI, dan Aanmaning telah dilakukan PN Jakarta Selatan, namun para tergugat/termohon tidak hadir dan aset milik Para Penanggungjawab PT TWU tidak diketahui. - Perseroan telah berkoordinasi dengan Jaksa Pengacara Negara (melalui Kasi Datun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan), Tim JPN telah melakukan upaya menghubungi penaqngung jawab PT TWU diketahui PT TWU tidak lagi beroperasi. - Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi di PT TWU telah diturunkan penuh nilainya (<i>full impairment</i>).	Tidak Ada

No	Permasalahan Lainnya	Pengaruh Terhadap Perseroan	Status Terakhir	Sanksi Administrasi terhadap Perseroan
7.	Permohonan arbitrase atas PT Indobuana Jaya Perkasa (IJP) ke BANI dengan nomor pendaftaran Arbitrase di Sekretariat BANI 723/VI/ARB-BANI/2015 tanggal 26 Juni 2015	- Putusan arbitrase memenangkan Perseroan - Menghukum PT IJP membayar kerugian sebesar USD 89,931.75,- - Menghukum PT IJP untuk menyerahkan sisa aset jaminan yang belum diserahkan dan menyatakan sah penguasaan aset untuk selanjutnya Perseroan dapat menjual sendiri aset jaminan tersebut. - Menghukum PT IJP membayar biaya adm sebesar ½ bagian atau sebesar Rp 47.183.000,- kepada Perseroan.	SELESAI & UPAYA RECOVERY - Perkara dimenangkan oleh Perusahaan (berkekuatan hukum tetap / <i>incracht</i>). - Perseroan telah berkoordinasi dengan Jaksa Pengacara Negara (melalui Kasi Datun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan), JPN telah memperoleh identitas Direktur PT IJP, hasil penelusuran identitas melalui dukcapil, alamat terdaftar di dukcapil berbeda dengan di copy KTP namun setelah dilakukan pemanggilan kealamat tsb tetap ybs tidak dikenal oleh RT setempat. - Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi di PT IJP telah diturunkan penuh nilainya (<i>full impairment</i>).	Tidak Ada
8.	Obligasi subordinasi – Bank Global Pada tanggal 31 Desember 2004, Perusahaan melakukan penyisihan terhadap obligasi subordinasi I sebesar Rp70.000.000 disebabkan oleh status pembekuan PT Bank Global International Tbk yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada bulan Desember 2004. Pada bulan September 2005, Perusahaan mendapatkan penjelasan dari Wali Amanat obligasi subordinasi I, PT Bank CIMB Niaga Tbk, bahwa obligasi subordinasi I tidak termasuk dalam investasi yang dijamin oleh Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah – UP3.	- sejak tahun 2005, Perusahaan telah melakukan penyisihan penuh terhadap investasinya di PT Bank Global - Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi tersebut telah diturunkan penuh nilainya	UPAYA RECOVERY - Perseroan melakukan upaya penagihan kepada wali amanat obligasi Bank Global yaitu Bank CIMB Niaga. - Berdasarkan informasi wali amanat bahwa Tim Likuidasi telah berakhir masa tugasnya, terkait persoalan Obligasi Bank Global perlu dikonfirmasi kepada Direktorat Jendral Kekayaan Negara - Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi di Bank Global telah diturunkan penuh nilainya (<i>full impairment</i>).	Tidak Ada

No	Permasalahan Lainnya	Pengaruh Terhadap Perseroan	Status Terakhir	Sanksi Administrasi terhadap Perseroan
9.	Deposito Ex. Bank Dagang Bali (BDB) Perseroan memiliki Deposito di bank Dagang Bali sebesar Rp6,6 Milyar.	Tim Likuidasi BDB sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp2.023.718.039,31, sehingga tersisa saldo sebesar Rp4.576.281.960,69.	UPAYA RECOVERY - Perseroan melakukan monitoring melalui Tim Likuidasi BDB, namun saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaan Tim Likuidasi BDB. - Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi di BDB telah diturunkan penuh nilainya (<i>full impairment</i>)	Tidak Ada
10.	MTN PT Goro Batara Sakti (GBS) Pada tanggal 26 Juli 2006, PT GBS dinyatakan pailit dan piutang MTN PT Goro Batara Sakti diakui oleh Kurator dan Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, masing-masing sebesar Rp26.800.000. Pembayaran piutang akan dilakukan secara proporsional dari hasil penjualan aset Pada tanggal 12 Juli 2005, Perusahaan, pemegang saham lama BPI dan manajemen BPI menandatangani kesepakatan bersama yang disahkan oleh Akta Notaris dari Tetty Herawaty No.33 dan 34 ("Akta 33 dan 34") yang merupakan bundling penyelesaian MTN HOLI PHARMA GRUP, MTN PT GBS dan Deposito BPI. Bahwa selain MTN GBS, Perseroan juga memiliki tagihan kepada GBS, Ex. Cessie Bank IFI. Mengingat GBS telah dinyatakan pailit maka Pedeve mendaftarkan piutangnya kepada Kurator GBS dengan melakukan penagihan piutang dan tagihan yang diakui oleh Kurator adalah sebesar Rp97.590.117.443,-	Karena Para pihak dalam Akta 33 & 34 tidak memenuhi kewajiban, maka Perusahaan melakukan upaya gugatan ke Pengadilan. No. Perkara: 204/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst No. Perkara: 50/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst Atas tagihan ex. Cessie Bank IFI, Perseroan telah memperoleh pembayaran dari pengurusan harta pailit GBS oleh Kurator sebesar Rp11.080.412.564,-	SELESAI & UPAYA RECOVERY Putusan Perkara:204/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst, MA memutus menolak permohonan kasasi dari Para Tergugat, dan menghukum Para Tergugat membayar investasi Perusahaan sebesar Rp81,7 Milyar. Putusan Perkara: 50/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst, PN Jakarta Pusat memutus secara verstek Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Rp 48,63 Milyar Terkait Permasalahan tersebut, Perseroan merencanakan meminta bantuan kepada JAMDATUN RI agar dapat mengajukan Eksekusi Putusan PN Jakarta Pusat, namun diselesaikan secara bertahap terkait permasalahan lainnya Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi ex. MTN Holi Pharma Grup, MTN GBS, Cessie GBS ex. Bank IFI dan Deposito BPI telah diturunkan penuh nilainya (<i>full impairment</i>).	Tidak Ada

No	Permasalahan Lainnya	Pengaruh Terhadap Perseroan	Status Terakhir	Sanksi Administrasi terhadap Perseroan
11.	HOLI PHARMA GRUP: MTN PT Holi Pharma (HP), PT Indah Raya Corporindo (IRC), PT Buana Garmindo Sakti (BGS) Pada tanggal 14 Maret 2003, Perusahaan melakukan penempatan Hutang Menengah Berjangka (MTN) yang diterbitkan oleh PT HP, PT IRC, dan PT BGS, masing-masing sebesar Rp10.000.000. MTN tersebut jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2005 dengan tingkat bunga masing-masing sebesar 17,60% per tahun. Pada tahun 2004. Pada tanggal 12 Juli 2005, Perusahaan, pemegang saham lama BPI dan manajemen BPI menandatangani kesepakatan bersama yang disahkan oleh Akta Notaris dari Tetty Herawaty No.33 dan 34 ("Akta 33 dan 34") yang merupakan bundling penyelesaian MTN HOLI PHARMA GRUP, MTN PT GBS dan Deposito BPI.	Karena Para pihak dalam Akta 33 & 34 tidak memenuhi kewajiban, maka Perusahaan melakukan upaya gugatan ke Pengadilan. No. Perkara: 204/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst No. Perkara: 50/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst	SELESAI & UPAYA RECOVERY Putusan Perkara:204/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst, MA memutus menolak permohonan kasasi dari Para Tergugat, dan menghukum Para Tergugat membayar investasi Perusahaan sebesar Rp81,7 Milyar. Putusan Perkara: 50/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst, PN Jakarta Pusat memutus secara verstek Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Rp 48,63 Milyar Terkait Permasalahan tersebut, Perseroan merencanakan meminta bantuan kepada JAMDATUN RI agar dapat mengajukan Eksekusi Putusan PN Jakarta Pusat, namun diselesaikan secara bertahap terkait permasalahan lainnya Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi ex. MTN Holi pharma Grup, MTN GBS dan Deposito BPI telah diturunkan penuh nilainya (<i>full impairment</i>).	Tidak Ada

No	Permasalahan Lainnya	Pengaruh Terhadap Perseroan	Status Terakhir	Sanksi Administrasi terhadap Perseroan
12.	Deposito Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) Pada tanggal 12 Juli 2005, Perusahaan, pemegang saham lama BPI dan manajemen BPI menandatangani kesepakatan bersama yang disahkan oleh Akta Notaris dari Tetty Herawaty No.33 dan 34 ("Akta 33 dan 34") yang merupakan bundling penyelesaian MTN HOLI PHARMA GRUP, MTN PT GBS dan Deposito BPI. Akta 33 menyebutkan bahwa pemegang saham lama BPI akan memberikan penerimaan dividen dari saham saham di BPI dan manajemen BPI setuju untuk memberikan 35% tagihan kredit bermasalahnya kepada semua pihak yang terkait.	Karena Para pihak dalam Akta 33 & 34 tidak memenuhi kewajiban, maka Perusahaan melakukan upaya gugatan ke Pengadilan. No. Perkara: 204/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst No. Perkara: 50/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst	SELESAI & UPAYA RECOVERY Putusan Perkara:204/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst, MA memutus menolak permohonan kasasi dari Para Tergugat, dan menghukum Para Tergugat membayar investasi Perusahaan sebesar Rp81,7 Milyar. Putusan Perkara: 50/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst, PN Jakarta Pusat memutus secara verstek Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Rp 48,63 Milyar Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi ex. MTN Holi pharma Grup, MTN GBS dan Deposito BPI telah diturunkan penuh nilainya (<i>full impairment</i>).	Tidak Ada

No	Permasalahan Lainnya	Pengaruh Terhadap Perseroan	Status Terakhir	Sanksi Administrasi terhadap Perseroan
13.	Cessie PT Goro Batara Sakti (GBS) Pada tanggal 15 Juli 2004, Perusahaan membeli hak tanggungan atas aset-aset yang dijaminakan oleh PT Goro Batara Sakti dari Development Capital Investment Limited, perusahaan yang berdomisili di British Virgin Island, sebesar Rp20.000.000. Sejak tanggal 26 Juli 2006, PT Goro Batara Sakti dinyatakan pailit dan piutang cessie PT Goro Batara Sakti diakui oleh Kurator dan Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebesar Rp43.990.117 dengan piutang preferen sebesar Rp9.000.000. Pembayaran piutang non preferen akan dilakukan secara proporsional (prorata) dari hasil penjualan aset.	e. Pada bulan Mei 2010 untuk piutang preferen, Perusahaan memperoleh hasil penjualan tanah Margonda sebesar Rp9.000.000, sedangkan untuk piutang non preferen Perusahaan telah menerima pembayaran dari kurator atas cessie PT GBS (dalam pailit) sebesar Rp2.080.413 yang dibayarkan tanggal 13 April 2016 dari hasil likuidasi aset PT GBS.	SELESAI & UPAYA RECOVERY Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi atas Cessie PT GBS telah diturunkan penuh nilainya (<i>full impairment</i>).	Tidak Ada
14.	Perusahaan menuntut Sdr. Khairudin Nur (selaku <i>Personal Guarantee</i>) dari Cessie PT GBS No. Perkara: 629/Pdt.G/2008/PN.Jkt Sel	Karena PT GBS pailit, maka Perusahaan selalu memegang Cessie PT GBS menuntut pemberi jaminan Pribadi (<i>Personal Guarantee</i>) Sdr. Khairudin Nur untuk membayar kewajiban PT GBS	SELESAI & UPAYA RECOVERY Khairudin Nur mengajukan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung telah memutuskan dan menyatakan permohonan peninjauan kembali Khairudin Nur tidak dapat diterima, sehingga menguatkan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi yang memenangkan PT PDV dengan menghukum Khairudin Nur untuk membayar sebagian jumlah hutang (pokok, bunga, denda) kredit sebesar 1/3 dari Rp20.000.000 yaitu sebesar Rp 6.666.667. Terkait Permasalahan tersebut, Perseroan merencanakan meminta bantuan kepada JAMDATUN RI agar dapat mengajukan Eksekusi Putusan PN Jakarta Pusat, namun diselesaikan secara bertahap terkait permasalahan lainnya	Tidak ada



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/ "CSR")

(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / "CSR")

Komitmen dan Kebijakan Umum

Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat (1), yang menyebutkan bahwa "*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*", dan mengingat kegiatan usaha Perseroan tidak terkait dengan sumber daya alam, maka tidak ada kewajiban bagi Perseroan untuk melaksanakan Tanggung jawab sosial. Namun demikian, Perseroan sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero), tetap berkomitmen untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara berkesinambungan. Perseroan bahkan telah mencanangkan pelaksanaan CSR sebagai salah satu program Perseroan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pelaksanaan CSR dapat menciptakan ruang untuk diperolehnya manfaat timbal balik (*mutual benefit*) bagi Perseroan dan masyarakat.

Agar aktivitas CSR dapat memberikan manfaat seperti yang diharapkan, maka pelaksanaannya harus dikelola sedemikian rupa agar aktivitas CSR yang telah dicanangkan dalam RJPP dan RKAP dapat direalisasikan secara terprogram dan berkelanjutan sehingga hasil dari pelaksanaan aktifitas CSR tersebut dapat dimonitor dari waktu ke waktu dan ukuran keberhasilan serta akuntabilitas dari pelaksanaan program tersebut dapat dinilai secara transparan dan obyektif. Oleh karena itu, Perseroan telah menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tersebut di atas yang mengatur mengenai penetapan ruang lingkup program CSR, penetapan kriteria penerima bantuan dan donasi, prosedur pemberian bantuan dan donasi, serta mekanisme pertanggungjawaban dan ukuran keberhasilan pelaksanaannya.

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perseroan pada pelaksanaannya mencakup:

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap

Lingkungan.

2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan.
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Kebijakan

Sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2022, Perseroan diarahkan untuk melakukan kegiatan CSR berkesinambungan. Dalam hal ini salah satu program yang direncanakan pelaksanaannya secara berkesinambungan adalah program peduli lingkungan.

Lokasi kantor Perseroan sendiri saat ini berada di Gedung Wisma Tugu Lantai 4 yang beralamatkan di Jalan Raden Saleh Raya No 44, Cikini, Jakarta Pusat, yang merupakan gedung bertingkat yang tidak memiliki area hijau di dalamnya. Kegiatan operasional Perseroan pun sebenarnya juga tidak melibatkan proses pengolahan bahan material maupun proses fisik lain yang memberi dampak langsung terhadap lingkungan sekitar. Meskipun demikian, Perseroan tetap berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, baik secara aktif maupun pasif.

Kegiatan

Beberapa kegiatan dalam program peduli lingkungan yang telah dilaksanakan oleh Perseroan sepanjang tahun 2022 masih melaksanakan program-program di lingkungan internal pada keberlangsungan kegiatan operasional yang lebih efektif dan efisien, seperti melalui penghematan penggunaan energi listrik, air dan alat tulis kantor, pendayagunaan kertas bekas dalam pencetakan dokumen-dokumen internal dan non formal, serta *penerapan e-filing* dan *paperless system* dalam proses administrasi, yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi kertas dengan dukungan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, antara lain meliputi aplikasi New PIIS (*Pedev Integrated*

Information System).

Sertifikasi di Bidang Lingkungan

Mengingat jenis kegiatan usaha dan karakteristik lingkungan Perseroan saat ini, hingga kini Perseroan belum memiliki sertifikasi di bidang lingkungan.

Dampak Keuangan

Total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan selama tahun 2022 telah menjadi bagian dari anggaran biaya kantor Perseroan tahun 2022.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan Misi Perseroan untuk melaksanakan kegiatan usaha Perseroan secara transparan, prudent dan berlandaskan GCG, Perseroan telah menetapkan berbagai Pedoman, Prosedur dan ketentuan lainnya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pekerjaan secara baik dan profesional. Dalam pelaksanaannya, Perseroan sangat memperhatikan aspek-aspek ketenagakerjaan kesehatan dan keselamatan kerja yang erat kaitannya dengan keberlangsungan pelaksanaan pekerjaan.

Perseroan pada prinsipnya menetapkan kebijakan-kebijakan pada bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Namun untuk memastikan terpenuhinya dengan baik harapan-harapan pekerja pada bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, Perseroan tidak jarang menetapkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan terkait aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan

keselamatan kerja, maka sepanjang tahun 2022 Perseroan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan yang relevan bagi Pekerja dalam rangka meningkatkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan Pekerja maupun Perseroan.
- Perseroan secara konsisten memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh Pekerja untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan selain tentunya agar Perseroan dapat memastikan Pekerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan jabatan dan bisnis yang semakin kompleks.
- Pelaksanaan sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran pekerja akan aspek kesehatan dan keselamatan kerja, antara lain melalui kegiatan *HSSE Meeting*, *Safety Briefing*, dan latihan-latihan untuk menghadapi situasi bencana dan kebakaran di lingkungan kantor.
- Terjaganya tingkat kecelakaan kerja sebesar 0% (*zero accident*) selama 5 tahun terakhir, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagai bentuk keberhasilan atas upaya penerapan praktek kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang baik di lingkungan kerja Perseroan.
- Pemberian Bingkisan Hari Raya kepada Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan, Petugas Parkir, Teknisi Gedung dan Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) serta panti asuhan di lingkungan sekitar kantor Perseroan.

Dampak Keuangan

Total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja selama tahun 2022 telah menjadi bagian dari anggaran biaya operasional Perseroan tahun 2022.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Sesuai dengan rencana strategis CSR Perseroan yang dituangkan dalam RJPP dan RKAP, Perseroan

berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan CSR yang terprogram dan berkesinambungan. Telah ditetapkan ruang lingkup dan kriteria penerima manfaat program CSR Perseroan berupa bantuan atau donasi, yang antara lain ditujukan untuk keperluan :

- a. Bencana Alam Nasional
Khususnya untuk Bencana Alam Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. Kegiatan Sosial
Antara lain ditujukan untuk kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial dan pembangunan tempat ibadah.
- c. Hari Besar Keagamaan
Merupakan pemberian bantuan hari besar keagamaan kepada masyarakat di lingkungan operasi perusahaan, antara lain kepada petugas kebersihan, taman dan juru parkir .
- d. Donasi Pendidikan - Beasiswa
Dalam bentuk beasiswa bagi siswa-siswi berprestasi, khususnya bagi orang tua/wali yang kurang mampu secara ekonomi.
- e. Donasi Pendidikan Berkelanjutan
Merupakan donasi pendidikan yang diberikan secara berkelanjutan bagi anak-anak dari kalangan tidak mampu dan anak jalanan.

Kegiatan

Kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Perseroan pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. Pemberian Bantuan bagi Pekerja TKJP dan Masyarakat sekitar terdampak Covid 19, termasuk pemberian bantuan fasilitas pencegah penyebaran Covid 19 dalam bentuk Wash Tafel Portable, di Lingkungan Wisma Tugu Raden Saleh tempat dimana Perusahaan berkantor;
2. Pemberian Bantuan kepada Rumah Sakit Rujukan Covid 19 (RSPP) melalui PT Pertamina Bina Medika IHC berupa 10 Tempat & Kantung Sampah Medis;
3. Pembagian Paket Sembako Idul Fitri untuk dibagikan di Lingkungan Wisma Tugu Raden Saleh tempat dimana Perusahaan berkantor;
4. Pemberian Santunan Anak Yatim & Piatu serta Kaum Dhuafa di Lingkungan Wisma Tugu Raden Saleh tempat dimana Perusahaan berkantor serta dalam Rangka Syukuran HUT PT Pertamina

(Persero).

Dampak Keuangan

Total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan selama tahun 2022 telah menjadi bagian dari anggaran biaya kantor Perseroan tahun 2022.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen

Perseroan tidak melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen pada tahun 2022 mengingat Perusahaan adalah *Special Purpose Vehicle*, maka Perusahaan tidak memiliki konsumen definitive yang menggunakan produk Perusahaan.

Anggaran dan Sumber Pendanaan

Kegiatan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) PT Pertamina Pedeve Indonesia adalah sebagai tanda kepedulian terhadap tanggung jawab sosial di lingkungan Perusahaan. Dalam pendanaan program CSR-nya, Pedeve mengalokasikan pendanaannya dalam RKAP 2022 kedalam Biaya Pemasaran (termasuk CSR) yakni sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Realisasi CSR

Secara umum, pada tahun 2022 total realisasi penyaluran dana untuk pemasaran dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan meningkat menjadi Rp91.104.500,- (sembilan puluh satu juta seratus empat ribu lima ratus Rupiah). Penurunan realisasi CSR tahun 2022 ini disebabkan karena pemegang saham melakukan pengendalian anggaran dan meminta Perusahaan melakukan penyesuaian rencana biaya kantor yang cukup signifikan dan salah satu yang terdampak adalah anggaran biaya CSR .

No.	Kegiatan CSR	Jumlah (Rp)
1	Bantuan Uang Tunai untuk 35 Orang TKJP Terdampak Covid 19 di Lingkungan Wisma Tugu Raden Saleh tempat dimana Perusahaan berkantor	3.500.000,-
2	Pembagian Paket Sembako Idul Fitri untuk dibagikan di Lingkungan Wisma Tugu Raden Saleh tempat dimana Perusahaan berkantor	5.428.500,-
3	Pembagian Paket Sembako bagi Masyarakat terdampak Covid 19 lingkungan Perusahaan berdomisili melalui Kelurahan Cikini Bulan Mei 2022	16.302.000,-
4	Pembelian Wash Tafel Portable sebagai CSR Perusahaan untuk ditempatkan di akses masuk Gedung Wisma Tugu Raden Saleh tempat dimana perusahaan berkantor	4.725.000,-
5	Santunan Yatim & Piatu kepada Yayasan Panti Asuhan Aisiyyah, Menteng, Jakarta Pusat	10.000.000,-
6	Pemberian Bantuan kepada Rumah Sakit Rujukan Covid 19 (RSPP) melalui PT Pertamina Bina Medika IHC berupa 10 Tempat & Kantung Sampah Medis	8.545.000,-
7	Pembagian Paket Sembako bagi Masyarakat terdampak Covid 19 lingkungan Perusahaan berdomisili melalui Kelurahan Cikini Bulan Juni 2022	16.302.000,-
8	Pembagian Paket Sembako bagi Masyarakat terdampak Covid 19 lingkungan Perusahaan berdomisili melalui Kelurahan Cikini Bulan Juli 2022	16.302.000,-
9	Santunan Anak Yatim & Dhuafa dalam Rangka Syukuran HUT PT Pertamina (Persero)	10.000.000,-
Total		91.104.500,-

Realisasi HSSE

Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan juga memberikan perhatian terhadap masalah Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan (HSSE). Sebagai Special Purpose Vehicle, aktifitas Perseroan terkait dengan HSSE dilakukan dalam bentuk pemaparan materi-materi terkait dengan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan. Pemaparan materi dilakukan dalam Rapat yang mengagendakan pembahasan materi HSSE tertentu. Adapun pemaparan materi HSSE sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Tema
1	Januari 2022	Mengetahui Mutasi Omicron
2	Januari 2022	Tindakan Yang Harus di Lakukan Saat Terjadi Gempa Bumi
3	Maret 2022	Bahaya dehidrasi bagi pekerja
4	Mei 2022	Berjalan di Jalan Raya dengan aman
5	Juli 2022	Reminder Kewaspadaan Terhadap Covid 19
6	Agustus 2022	Kategori Hasil MCU dan Kelaikan Kerja
7	Agustus 2022	Melihat Manfaat Sinar Matahari yang Mengandung Vit.D
8	Agustus 2022	Illness Fatality
9	Agustus 2022	Vaksinasi Booster untuk Covid 19
10	September 2022	Mencegah Email Phising & Security Awareness
11	Nopember 2022	HSSE Golden Rules
12	Desember 2022	Corporate Life Saving Rules



AKHLAK

PERTAMINA

LAPORAN KEUANGAN

-10,5139

-16,3750

-22,5439

-20,8444

-26,7155

-32,5866

-31,9444

-37,8155

-43,6866

-32,1972

-38,0683

-43,9494

-33,1167

-39,0000

-44,9999

-72,2250

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA

**LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

***FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***

Gedung Wisma Tugu Raden Saleh, Lt. 4
Jl. Raden Saleh No. 44
Cikini, Menteng
Jakarta Pusat 10330
T. 62 21 391 1857
F. 62 21 391 1859

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA**

**DIRECTORS' STATEMENT
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Rahmi Amini	:	Name
Alamat kantor	:	Gedung Wisma Tugu Raden Saleh, Lantai 4 4 Jl. Raden Saleh No. 44 Cikini Menteng Jakarta Pusat 10330	:	Office address
Alamat domisili sesuai KTP	:	The Wisteria Blok Cassia 2 No. 20 RT.008/RW.008, Cakung, Jakarta Timur	:	Domicile as stated in ID Card
Nomor telepon	:	021-3911857	:	Phone Number
Jabatan	:	Direktur/Director	:	Position

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|--|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Pertamina Pedeve Indonesia (Perusahaan); | 1. We are responsible for the preparation and presentation of PT Pertamina Pedeve Indonesia (the Company) financial statements; |
| 2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah diungkapkan secara lengkap dan benar; | 3. a. All information contained in the Company's financial statements is complete and correct; |
| b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The Company's financial statements do not contain misleading material information or facts, nor do omit material information and facts; |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan. | 4. We are responsible for the Company's internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 23 Februari 2023/February 23, 2023
PT Pertamina Pedeve Indonesia



Rahmi Amini
Direktur/Director

Daftar Isi	Halaman/ <u>Pages</u>	<i>Table of Contents</i>
Surat Pernyataan Direksi		<i>Director's Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	<i>Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	5	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	6 - 60	<i>Notes to the Financial Statement</i>

No : 00013/2.1000/AU.1/05/0151-1/1/II/2023

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditors' Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Stockholders, Board of Commissioners, and Directors

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Pertamina Pedeve Indonesia ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Pertamina Pedeve Indonesia (the "Company"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2022, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31, 2022, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Palma Tower, 18th Floor Lot F&G

Jl. RA Kartini II-S Kav. 06 TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310

Phone : +6221-75930431, 75930432, 75930433 Fax : +6221-75930434

Email : info@hgkfirm.com Web : www.hgkfirm.com www.TIAGnet.com

NIUKAP : KEP-929/KM.1/2014 - S-30/MK.1/2015

Hal Lain

Laporan keuangan PT Pertamina Pedeve Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 25 Maret 2022 menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan Perusahaan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakonsistenan material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan Perusahaan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Other Matter

The financial statements of PT Pertamina Pedeve Indonesia as at December 31, 2021 and for the year then ended were audited by other independent auditor whose report dated March 25, 2022 expressed an unmodified opinion on such financial statements.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Company's annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above, when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materiality inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Company's annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesai prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN



Grace Oktavia, SE., Ak., CPA., CA.

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0151 / Public Accountant Registration No. AP.0151

23 Februari 2023/February 23, 2023

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
(Jumlah disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2022
(Amount expressed in Thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
	2.c, 2.d, 2.e,			
Kas dan Setara Kas	2.h, 4, 20, 23	696.018.719	811.302.086	Cash and Cash Equivalents
Piutang Lain-lain -	2.c, 2.d, 2.e,			Other Receivables -
Pihak Berelasi	2.i, 5, 20, 23	87.103.938	33.403.527	Related Parties
Uang Muka		96.320	52.446	Advances Payment
Pendapatan Bunga yang				
Masih Akan Diterima	2.c, 2.e, 20, 23	330.210	65.347	Accrued Interest Income
Jumlah Aset Lancar		783.549.187	844.823.406	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON CURRENT ASSETS
Aset Tetap - Bersih	2.j, 7	289.298	121.031	Fixed Assets - Net
Aset Hak Guna - Bersih	2.l, 8.a	1.091.584	1.096.294	Right-of-use Asset - Net
Penyertaan Saham	2.c, 2.e, 6, 20, 23	3.134.209.357	2.351.989.459	Investment in Shares
Aset Tidak Lancar Lainnya		144.267	144.267	Other Non-Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		3.135.734.506	2.353.351.051	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		3.919.283.693	3.198.174.457	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Lain-lain				Other Payables
- Pihak Ketiga	2.c, 2.e, 9, 20,	161.637	2.205.767	Third Parties -
- Pihak Berelasi	23	36.785	110.980	Related Parties -
Beban Akrua	2.e, 11, 23	6.743.648	11.456.797	Accrued Expenses
Utang Pajak	2.p, 12.b	851.466	12.872.603	Taxes Payable
Bagian Lancar atas Liabilitas				Current Portion of
Sewa Jangka Panjang	2.l, 8.b	345.587	118.117	Long-Term Lease Liabilities
Uang Muka Dividen				Dividend Advances
- Pihak Berelasi	2.c, 10, 20	110.491.938	--	Related Parties -
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		118.631.061	26.764.264	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Sewa Jangka Panjang -				Long-Term Lease Liabilities
Setelah Dikurangi Bagian				- Net of Current Portion
Lancar	2.l, 8.b	802.578	673.290	
Liabilitas Pajak Tangguhan	2.p, 12.d	632.273.773	460.185.396	Deferred Tax Liabilities
Liabilitas Imbalan Kerja	2.m, 13	1.642.294	1.438.274	Employee Benefits Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		634.718.645	462.296.960	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		753.349.706	489.061.224	TOTAL LIABILITIES

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement taken as a whole

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
(Jumlah disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2022
(Amount expressed in Thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham - Saham biasa dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Modal Dasar - 350.000 saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 175.000 saham	14	175.000.000	175.000.000	Capital Stock - Ordinary shares at Par Value of Rp1,000,000 per Share Authorized Capital - 350.000 shares Issued and Fully Paid Capital - 175.000 shares
Tambahan Modal Disetor		8.307.977	8.307.977	Additional Paid-In Capital
Saldo Laba				Retained Earnings
Telah Ditentukan Penggunaannya	15	43.807.046	43.807.046	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya	15	683.039.800	836.210.564	Unappropriated
Komponen Ekuitas Lainnya	6, 13	2.255.779.164	1.645.787.646	Other Equity Components
JUMLAH EKUITAS		3.165.933.987	2.709.113.233	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		3.919.283.693	3.198.174.457	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan secara
keseluruhan

*The accompanying notes form an integral part of
these financial statement
taken as a whole*

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022

(Jumlah disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022

(Amount expressed in Thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
PENDAPATAN				REVENUE
Pendapatan Dividen dari Penyertaan Saham	2.c, 2.o, 16, 20	127.515.487	315.316.418	Dividend Income from Investments in Shares
Pendapatan Bunga	2.c, 2.o, 17, 20	28.305.697	25.977.241	Interest Income
Jumlah Pendapatan		155.821.184	341.293.659	Total Revenue
BEBAN				EXPENSES
Beban Usaha	2.o, 18	(10.505.855)	(8.826.591)	Operating Expenses
Beban Jasa Profesional	2.o	(2.444.834)	(2.133.463)	Professional Fee Expenses
Beban Keuangan	2.o	(53.192)	(58.467)	Finance Costs
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih	2.o, 19	5.306.068	(2.429.025)	Other Income (Expenses) - Net
Beban Pajak Final	2.p	(5.661.139)	(5.195.448)	Final Tax Expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		142.462.232	322.650.665	INCOME BEFORE INCOME TAX
Beban Pajak Penghasilan Kini	2.p, 12.c	(481.004)	(117.144)	Income Tax Expense Current
Penyesuaian Tahun Lalu	2.p, 12.c	--	(27.381.529)	Adjustment in Respect of Prior Year
Beban Pajak Penghasilan		(481.004)	(27.498.673)	Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN		141.981.228	295.151.992	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - SETELAH PAJAK PENGHASILAN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME - NET OF INCOME TAX
Pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: Perubahan Nilai Wajar dari Investasi Ekuitas yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak	6	610.131.521	(675.926.935)	Item that will be Reclassified to Profit or Loss Changes in the Fair Value of Equity Investment at Fair Value Through Other Comprehensive Income - Net of Tax
Pos yang tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pascakerja - Setelah Pajak	13	(140.003)	120.091	Item that will not be Reclassified to Profit or Loss: Re-measurement of Post-Employment Benefit Obligation - Net of Tax
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		751.972.746	(380.654.852)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement taken as a whole

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2022

(Jumlah disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR THEN ENDED
DECEMBER 31, 2022

(Amount expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid of Capital Stock	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid In Capital	Saldo Laba / Retained Earnings		Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Equity Component	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	Balance as of December 31, 2020
			Telah Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated			
Saldo per 31 Desember 2020	175.000.000	8.307.977	43.807.046	630.338.647	2.321.594.489	3.179.048.159	
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	295.151.992	--	295.151.992	Income for the Year
Rugi Komprehensif	--	--	--	--	(675.806.843)	(675.806.843)	Other Comprehensive
Lain - Bersih	--	--	--	--	--	--	Loss - Net
Dividen	--	--	--	(89.280.075)	--	(89.280.075)	Dividends
Saldo per 31 Desember 2021	175.000.000	8.307.977	43.807.046	836.210.564	1.645.787.646	2.709.113.233	Balance as of December 31, 2021
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	141.981.228	--	141.981.228	Income for the Year
Penghasilan Komprehensif	--	--	--	--	609.991.518	609.991.518	Other Comprehensive
Lain - Bersih	--	--	--	--	--	--	Income - Net
Dividen	--	--	--	(295.151.992)	--	(295.151.992)	Dividend
Saldo per 31 Desember 2022	175.000.000	8.307.977	43.807.046	683.039.800	2.255.779.164	3.165.933.987	Balance as of December 31, 2022

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement taken as a whole

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022

(Jumlah disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022

(Amount expressed in Thousands Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Pendapatan Dividen		184.307.014	276.223.290	Receipts of Dividend Income
Penerimaan Pendapatan Bunga		22.787.869	21.349.845	Receipts of Interest Income
Pembayaran Kepada Karyawan dan Beban untuk Operasional		(12.517.550)	(7.028.326)	Payments to Employee and for operating expense
Pembayaran Pajak Penghasilan	12.c	(14.059.662)	(11.536.073)	Payments for Income Taxes
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		180.517.670	279.008.736	Net Cash Flows Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Hasil Penjualan Aset Tetap	7	30.000	--	Proceed from Sale of Fixed Assets
Perolehan Aset Tetap	7	(207.600)	(99.770)	Acquisition of Fixed Assets
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(177.600)	(99.770)	Net Cash Flows Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran Liabilitas Sewa	8	(471.445)	(887.781)	Additional Share Capital
Pembayaran Dividen	15	(295.151.992)	(89.280.075)	Dividend Payment
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(295.623.437)	(90.167.856)	Net Cash Flows Used in Financing Activities
(PENURUNAN)/ KENAIKAN BERSIH KAS SETARA KAS		(115.283.367)	188.741.110	NET (DECREASE)/ INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		811.302.086	622.560.976	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		696.018.719	811.302.086	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR
Kas dan Setara Kas terdiri dari:				Cash and Cash Equivalents consist of:
Kas	4	16.214	3.116	Cash on Hand
Bank	4	494.952.505	756.298.970	Bank
Deposito Berjangka	4	201.050.000	55.000.000	Time Deposit
Jumlah		696.018.719	811.302.086	Total

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement taken as a whole

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Pertamina Pedeve Indonesia ("Perusahaan"), didirikan sebagai yayasan bernama Yayasan Tabungan Pegawai Pertamina pada tahun 1975 di Jakarta. Berdasarkan Akta Notaris Ny. Sulami Mustafa, S.H., No. 12, tanggal 18 Juni 2002, Perusahaan berubah dari bentuk Yayasan ke bentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT Pertamina Saving and Investment dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No.C.13857HT.01.01.TH.2002 tanggal 25 Juli 2002.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, di antaranya sebagai berikut:

- Berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 30 Desember 2004 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor dengan Keputusan No.C03142.HT.01.04.TH.2005 tanggal 4 Februari 2005, Perusahaan berganti nama menjadi PT Pertamina Dana Ventura.
- Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 5 tanggal 8 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU- 0003443.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018, dimana Pemegang Saham Perusahaan memutuskan mengubah nama Perusahaan menjadi "PT Pertamina Pedeve Indonesia" dan mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan menjadi tidak lagi bergerak di bidang modal ventura.
- Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 1 tanggal 3 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH., dimana Pemegang Saham Perusahaan mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan serta menyetujui pemberlakuan Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Pertamina Pedeve Indonesia ("the Company") was established as a foundation named Yayasan Tabungan Pegawai Pertamina in 1975, in Jakarta. Based on Notarial Deed No. 12 of Mrs. Sulami Mustafa, S.H., dated June 18, 2002, the Company changed its form from a foundation to a limited liability company named PT Pertamina Saving and Investment, and this was approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. C.13857HT.01.01.TH.2002 dated July 25, 2002.

The Company's Articles of Association have been amended several times, including the following:

- Based on Notarial Deed No. 9 dated December 30, 2004 which has been approved by the Ministry of Law and Human Rights through decision letter No.C.03142.HT.01.04.TH.2005 dated February 4, 2005, the Company changed its name to PT Pertamina Dana Ventura.
- Based on Notarial Deed No. 5 dated January 8, 2018 of Marianne Vincentia Hamdani, SH, was acknowledged by the Ministry of Law and Human Right of the Republic of Indonesia through its Letter No. AHU- 0003443.AH.01.02. Tahun 2018 dated February 13, 2018, where the Company's shareholders decided to change the Company's name to "PT Pertamina Pedeve Indonesia" and purposes and objectives of the Company which no longer engaged in venture capital.
- Based on Notarial Deed No. 1 dated April 3, 2020 of Marianne Vincentia Hamdani, SH, where the Company's shareholders decided to change purposes and objectives of the Company and approved the implementation of the Good Corporate Governance.

1. UMUM (LANJUTAN)

1. GENERAL (CONTINUED)

a. Pendirian dan Informasi Umum (Continued)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 3 April 2020, maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah:

1. Menjalankan usaha yang bergerak di bidang perdagangan besar khusus lainnya yang berkaitan dengan energi dan industri baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk menjalankan usaha kerjasama dengan perseroan-perseroan lain.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha yang berkaitan dengan perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas, dan produk yang berhubungan dengan itu. Sub golongan ini mencakup perdagangan besar bahan bakar, grease (minyak semir), minyak pelumas dan minyak. Sub golongan ini mencakup perdagangan besar arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta; perdagangan besar minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin; perdagangan besar LPG, gas butana dan propana; perdagangan besar minyak semir dan pelumas, produk minyak bumi yang telah dimurnikan.

b. Melaksanakan kegiatan perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.

a. Establishment and General Information (Lanjutan)

In accordance with Article 3 of the Article of Shareholders Decision Statement No 1 dated April 3, 2020 purposes and objectives of the Company are as follows:

1. Running businesses that are engaged in other specialised wholesale trading related to energy and industry, either directly or indirectly, including running joint ventures with other companies.

2. To achieve its purposes and objectives, the Company may carry out business activities as follows:

a. Carrying out the wholesale trading activities of solid fuels, liquid and gas and related products. This subgroup includes wholesale trade of fuel, grease (polish oil), lubricants and oil. This sub-category includes wholesale trade in charcoal, coal, slag of charcoal, wood fuel, naphtha; wholesale trade of crude petroleum, crude oil, diesel fuel, gasoline, fuel oil, kerosene; wholesale trade of LPG, butane and propane gas; wholesale trade of polishes and lubricants, refined petroleum products.

b. Carrying out wholesale trading activities of solid fuels, liquid and gas and related products. This group includes wholesale trade of gas, liquid and solid fuels and similar products, such as crude petroleum, crude oil, diesel fuel, gasoline, fuel oil, kerosene, premium, diesel, kerosene, coal, charcoal, coal, charcoal, wood fuel, naphtha and other fuels including natural gas, such as LPG, butane gas and propane and polishes, lubricants and refined petroleum products.

1. UMUM (LANJUTAN)

1. GENERAL (CONTINUED)

a. Pendirian dan Informasi Umum (Continued)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 3 April 2020, maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah: (Lanjutan)

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (Lanjutan)

c. Melaksanakan kegiatan perdagangan besar produk lainnya, termasuk barang sisa dan potongan yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain. Subgolongan ini mencakup perdagangan besar kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain; perdagangan besar pupuk dan produk kimia pertanian; perdagangan besar bahan plastik dalam bentuk dasar; perdagangan besar karet; perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain; perdagangan besar kertas dalam jumlah besar (borongan); perdagangan besar barang dari kertas dan karton; perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain); perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa dan potongan logam dan non-logam bahan untuk daur ulang, termasuk pengumpulan, pengurutan, pemisahan, pelepasan barang yang masih berguna misalnya mobil agar mendapatkan bagian yang masih bisa digunakan, pengepakan dan pengepakan kembali, penyimpanan dan pengiriman, tapi tanpa proses perubahan yang nyata. Apalagi, pembelian dan penjualan barang sisaan masih mempunyai nilai. Subgolongan ini juga mencakup pembongkaran mobil, komputer, televisi dan peralatan lainnya untuk mendapatkan dan menjual kembali bagian yang masih dapat dipakai. Sub golongan ini tidak mencakup pengumpulan sampah rumah tangga dan sisa industri; pengelolaan barang sisa, bukan untuk penggunaan lebih lanjut dalam proses industri pabrik, tapi dengan tujuan untuk pembuangan; pengolahan barang sisa dan potongan serta barang lainnya menjadi barang baku sekunder, hasilnya siap untuk digunakan langsung dalam proses industri pabrik, tapi bukan sebagai barang akhir; pembongkaran mobil, komputer, televisi dan peralatan lainnya untuk daur ulang; pembongkaran mobil melalui proses mekanik; pembongkaran kapal; dan perdagangan eceran dari barang-barang bekas.

a. Establishment and General Information (Lanjutan)

In accordance with Article 3 of the Article of Shareholders Decision Statement No 1 dated April 3, 2020 purposes and objectives of the Company are as follows: (Continued)

2. To achieve its purposes and objectives, the Company may carry out business activities as follows: (Continued)

c. Carrying out the wholesale trading of other products including waste and unclassified pieces. This subcategory includes industrial chemical wholesale trade, such as printer inks, essential oils, industrial gases, chemical adhesives, dyes, artificial resins, methanol, paraffins, flavorings and fragrances, soda, industrial salts, acids and sulfur and others; wholesale trade in fertilizers and agrochemical products; wholesale trade in plastic materials in basic forms; wholesale rubber trade; wholesale trade of fiber or textile fiber and others; paper trade in bulk (wholesale); paper and cardboard goods trading; wholesaler of laboratory, pharmaceutical and medical equipment; wholesale trade in precious stones (diamonds, sapphires and others); wholesale trade of used goods and scraps and scrap metal and non-metallic materials for recycling, including collection, sorting, segregation, disposing of useful items such as cars to get usable parts, packing and repacking, storage and shipping, but without a real change process. Moreover, the buying and selling of valuable leftovers. This subcategory also includes the dismantling of cars, computers, televisions and other equipment to obtain and resell usable parts. This subcategory does not cover collection of household waste and industrial waste; waste management, not for further use in industrial manufacturing processes, but for disposal purposes; processing of waste and scraps as well as other goods into secondary raw materials, the result is ready to be used directly in the industrial factory process, but not as final goods; disassembly of cars, computers, televisions and other equipment for recycling; disassembly of the car through a mechanical process; ship dismantling; and retail trade of used goods.

1. UMUM (LANJUTAN)

1. GENERAL (CONTINUED)

a. Pendirian dan Informasi Umum (Continued)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 3 April 2020, maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah: (Lanjutan)

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (Lanjutan)

d. Melaksanakan kegiatan perdagangan besar produk lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar yang sudah disebutkan sebelumnya. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, dan perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).

Pada tanggal 14 Maret 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor KEP-20/D.05/2018 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Pertamina Dana Ventura terhitung efektif sejak tanggal 13 Februari 2018.

Menindaklanjuti Keputusan Pemegang Saham dan persetujuan pencabutan izin usaha modal ventura dari OJK tersebut, Perusahaan mengajukan permohonan izin usaha baru dan kemudian telah memperoleh izin usaha perdagangan dengan Nomor Induk Berusaha ("NIB") 8120117152389 yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("OSS") pada tanggal 28 November 2018 dan perubahan NIB ke-3 tanggal 16 Juli 2020.

Perusahaan berlokasi di Wisma Tugu Raden Saleh, Lantai 4, Jl. Raden Saleh No. 44, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 167/27.1BU/31.71.06.1003/- 071.562/e/2018 tanggal 7 November 2018.

a. Establishment and General Information (Lanjutan)

In accordance with Article 3 of the Article of Shareholders Decision Statement No 1 dated April 3, 2020 purposes and objectives of the Company are as follows: (Continued)

2. To achieve its purposes and objectives, the Company may carry out business activities as follows: (Continued)

d. Carrying out other product wholesale trading, this group includes other wholesale trading businesses that have not been included in one of wholesale trading groups as listed above. Includes wholesale trade in fiber or textile fibers and others and wholesale trade in precious stones (diamonds, diamonds, sapphires, etc.).

On March 14, 2018, from Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") through the Board of Commissioner Decision ("KDK") No. KEP-20/D.05/2018 regarding the Revocation of the Venture Capital Business License of PT Pertamina Dana Ventura, effective from February 13, 2018.

As a follow-up to Shareholders' decision and the Revocation of Venture Capital Business License from OJK, the Company had submitted a proposal for new business license and obtained business license for trading Nomor Induk Berusaha ("NIB") 8120117152389 issued by Government of Indonesia c.q. Online Single Submission ("OSS") Management and Organising Agency on November 28, 2018 and changes to the 3rd NIB dated July 16, 2020.

The Company's office is located at Wisma Tugu Raden Saleh, 4th Floor, Jl. Raden Saleh No. 44, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, as stated in Letter of Business Domicile No. 167/27.1BU/31.71.06.1003/-071.562/e/2018 dated November 7, 2018.

1. UMUM (LANJUTAN)

1. GENERAL (CONTINUED)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pertamina Pedeve Indonesia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur No.3 tanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0434194 tanggal 5 Agustus 2021. Pemegang Saham memutuskan memberhentikan dengan hormat Khurin Nihayah dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dengan alasan memasuki masa pensiun dan menindaklanjuti Surat Menteri BUMN, berlaku efektif mulai tanggal Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ditandatangani yaitu tanggal 26 Juli 2021, serta mengangkat Rahmi Amini sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung mulai tanggal Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ditandatangani yaitu tanggal 26 Juli 2021.

Sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pertamina Pedeve Indonesia tentang Pergantian Komisaris No. 29 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0281437 tanggal 28 Desember 2018, dimana Pemegang Saham memutuskan pengangkatan Cornelius Simanjuntak sebagai Komisaris Perseoan untuk jangka waktu 1 periode sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar yaitu 3 tahun terhitung mulai tanggal 27 November 2018, maka masa jabatan beliau sebagai Komisaris Perseroan berakhir pada tanggal 26 November 2021.

Setelah tanggal berakhirnya masa jabatan Cornelius Simanjuntak yaitu 26 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, Pemegang Saham belum memutuskan kembali pengangkatan Komisaris pengganti, sehingga posisi Komisaris Perusahaan per tanggal 31 Desember 2021 belum ada.

b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees

Based on the Deed of Decision of the Shareholders of PT Pertamina Pedeve Indonesia regarding the Dismissal and Appointment of Directors No. 3 dated August 3, 2021, drawn up by Notary Marianne Vincentia Hamdani, SH and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through decision letter No. AHU-AH.01.03-0434194 dated August 5, 2021. The Shareholders have decided to honorably dismiss Khurinnihayah from her position as Director of the Company on the grounds of entering retirement and following up on the Letter of the Minister of SOEs, effective as of the date the Circular Shareholders' Decree was signed, which is on July 26, 2021, and appointed Rahmi Amini as Director of the Company effective as of the date the Circular Shareholders' Decision was signed, which is effective starting from July 26, 2021.

In accordance with the Shareholders' Decision in the Deed of Decision of the Shareholders of PT Pertamina Pedeve Indonesia regarding the Change of Commissioner No. 29 dated December 17, 2018 made by Notary Marianne Vincentia Hamdani, SH and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through decision letter No. AHU-AH.01.03-0281437 dated December 28, 2018, where the Shareholders decided to appoint Cornelius Simanjuntak as Commissioner of the Company for a period of 1 period as referred to in the Articles of Association, which is 3 years starting on November 27, 2018, then his term of office as Commissioner of the Company ends on November 26, 2021.

After the end date of Cornelius Simanjuntak's term of office, which is November 26, 2021 until December 31, 2021, the Shareholders have not yet decided on the appointment of a replacement Commissioner, so the position of Commissioner of the Company as at December 31, 2021 is vacant.

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS AT DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (LANJUTAN)

1. GENERAL (CONTINUED)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pertamina Pedeve Indonesia tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris No. 13 tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0085974 tanggal 9 Februari 2022, Pemegang Saham memutuskan mengangkat Gusnida sebagai Komisaris Perseoran, terhitung mulai tanggal Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler ditandatangani yaitu pada tanggal 5 Januari 2022 untuk jangka waktu 1 periode sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan atau sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan memutuskan lain.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Desember 31, 2022

Direksi	
Direktur	Rahmi Amini
Dewan Komisaris	
Komisaris	Gusnida

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor Kpts- 001/K0000/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pengangkatan Komite Audit, Komisaris mengangkat Muhammad Ikhsan sebagai Anggota Komite Audit Perseroan efektif terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 dengan susunan keanggotaan Komite Audit per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Desember 31, 2022

Komite Audit	
Anggota	Muhammad Ikhsan

Jumlah karyawan tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing berjumlah 6 orang (tidak diaudit).

b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees (Continued)

Based on the Deed of Decision of the Shareholders of PT Pertamina Pedeve Indonesia regarding the Appointment of Members of the Board of Commissioners No. 13 dated January 27, 2022 drawn up by Notary Marianne Vincentia Hamdani, SH and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through decision letter No. AHU-AH.01.03-0085974 dated February 9, 2022, the Shareholders decided to appoint Gusnida as the Company's Commissioner, starting from the date the Circular Shareholders' Decision was signed, which is effective starting from January 5, 2022 for 1 period as referred to in the Company's Articles of Association or until the General Meeting of Shareholders of the Company decides otherwise.

The Company's Board of Commissioner and Board of Director as at Desember 31, 2022 and 2021 are as follows:

December 31, 2021

	Board of Director
Rahmi Amini	Director
	Board of Commissioner
--	Commissioner

In accordance with the Decree of the Board of Commissioners of the Company Number Kpts-001/K0000/2021 dated February 1, 2021 regarding the Appointment of the Audit Committee, the Commissioner appointed Muhammad Ikhsan as a Member of the Audit Committee of the Company which is effective starting from February 1, 2021 with the composition of the Audit Committee membership as at December 31, 2022 and 2021 as follows:

December 31, 2021

	Audit Committee
Muhammad Ikhsan	Member

The Company had 6 permanent employees as at December 31, 2022 and 2021, respectively (unaudited).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
--	--

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah disusun berdasarkan dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan telah disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Perusahaan beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah karena sifat dan jumlahnya yang signifikan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks, atau area di mana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

b. Perubahan pada PSAK dan ISAK

Standar dan interpretasi baru/revisi yang relevan terhadap kegiatan operasi Perusahaan dan berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 namun tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual

Amendemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISFAS") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants.

The financial statements have been prepared under the historical cost convention, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts, and using the accrual basis except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows is prepared the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

In order to provide further understanding of the financial performance of the Company, several items of income or expense have been shown separately, due to the significance of their nature or amount.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

b. Changes to SFAS and IFAS

New and amended standards and interpretations relevant to the Company's operation that are effective for the financial year beginning on or after 1 January 2022 however did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current prior financial years are as follows:

- *Amendments to SFAS 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks*

The amendments to SFAS 22 Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks clarify the interactions between SFAS 22, SFAS 57, SFAS 30 and the Conceptual Framework of Financial Reporting.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
b. Perubahan pada PSAK dan ISAK (Lanjutan)	b. Changes to SFAS and IFAS (Continued)
Standar dan interpretasi baru/revisi yang relevan terhadap kegiatan operasi Perusahaan dan berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 namun tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya adalah sebagai berikut: (Lanjutan) - Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual (Lanjutan) Secara umum Amendemen PSAK 22 ini: - Menambahkan deskripsi terkait "liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30" yang dinyatakan dalam paragraf 21A-21C. - Mengubah paragraf 23 dengan mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang diakui pada tanggal akuisisi. - Menambahkan paragraf 23A terkait definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya. - Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Mengganggu - Biaya Pemenuhan Kontrak Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya untuk menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan. Amendemen PSAK 57 mengatur biaya-biaya untuk memenuhi kontrak merugi terdiri dari biaya yang terkait langsung dengan kontrak, dimana terdiri dari: 1. biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan 2. alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak. - Penyesuaian Tahunan atas PSAK 71: "Instrumen Keuangan" Penyesuaian Tahunan atas PSAK ini mengklarifikasi imbalan yang diakui oleh peminjam terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan dimana dalam menentukan imbalan yang dibayarkan setelah dikurangi imbalan yang diterima, peminjam hanya memasukkan imbalan yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk imbalan yang dibayar atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.	<i>New and amended standards and interpretations relevant to the Company's operation that are effective for the financial year beginning on or after 1 January 2022 however did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current prior financial years are as follows: (Continued)</i> - <i>Amendments to SFAS 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks (Continued)</i> <i>In general, the amendments to SFAS 22:</i> - <i>Add a description regarding "liabilities and contingent liabilities within the scope of SFAS 57 or IFAS 30" stated in paragraphs 21A-21C.</i> - <i>Amend paragraph 23 by clarifying the contingent liabilities recognized at the acquisition date.</i> - <i>Adds paragraph 23A regarding the definition of a contingent asset and its accounting treatment.</i> - <i>Amendments to SFAS 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts - Contract Fulfillment Costs</i> <i>This amendment clarifies the cost of fulfilling a contract in relation to determining whether a contract is a burdensome contract.</i> <i>These amendments provide that costs to fulfill an onerous contract consist of costs that are directly related to the contract, which consist of:</i> 1. <i>incremental costs to fulfill the contract, and</i> 2. <i>allocation of other costs that are directly related to fulfilling the contract.</i> - <i>Annual Adjustment on SFAS 71: "Financial Instruments"</i> <i>The Annual Adjustment of this SFAS clarifies the fee recognized by the borrower in relation to the derecognition of a financial liability where in determining the fee which paid after deducting the fee which received, the borrower only includes the fee which paid or received between the borrower and the lender, including the fee which paid or received by borrower or lender on behalf of other party.</i>

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
b. Perubahan pada PSAK dan ISAK (Lanjutan) Standar dan interpretasi baru/revisi yang relevan terhadap kegiatan operasi Perusahaan dan berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 namun tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya adalah sebagai berikut: (Lanjutan) - Penyesuaian Tahunan atas PSAK 73: "Sewa" Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi. Standar dan interpretasi baru/revisi yang relevan terhadap kegiatan operasi Perusahaan dan berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 seperti yang diungkapkan di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif. - Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang efektif 1 Januari 2023, dan penerapan lebih awal diizinkan Amandemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar. Amendemen tersebut menjelaskan: - Apa yang dimaksud dengan hak untuk menunda penyelesaian; - Bahwa hak untuk menunda harus ada pada akhir periode pelaporan; - Klasifikasi tersebut tidak terpengaruh oleh kemungkinan bahwa entitas akan menggunakan hak penangguhannya; dan - Bahwa hanya jika derivatif melekat dalam liabilitas konversi itu sendiri merupakan instrumen ekuitas, ketentuan liabilitas tidak akan memengaruhi klasifikasinya.	b. Changes to SFAS and IFAS (Continued) <i>New and amended standards and interpretations relevant to the Company's operation that are effective for the financial year beginning on or after 1 January 2022 however did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current prior financial years are as follows: (Continued)</i> - <i>Annual Adjustment on SFAS 73: "Lease"</i> <i>The amendments prohibit entities to deduct from the cost of an item of fixed assets, any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognizes the proceeds from selling such items, and the costs of producing those items, in the profit or loss.</i> <i>New and amended standards and interpretations relevant to the Company's operation that are effective for the financial year beginning on or after 1 January 2023 are disclosed below. The Company intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.</i> - <i>Amendments to SFAS 1: Presentation of Financial Statements about Classification of Liabilities as Current or Non-current, effective January 1, 2023, and earlier application is permitted</i> <i>The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current. The amendments clarify:</i> - <i>What is meant by a right to defer settlement;</i> - <i>That a right to defer must exist at the end of the reporting period;</i> - <i>That classification is unaffected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right; and</i> - <i>That only if an embedded derivative in a convertible liability is itself an equity instrument would the terms of a liability not impact its classification.</i>

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
--	---

b. Perubahan pada PSAK dan ISAK (Lanjutan)

Standar dan interpretasi baru/revisi yang relevan terhadap kegiatan operasi Perusahaan dan berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 seperti yang diungkapkan di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif. (Lanjutan)

- Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amandemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas dengan persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amandemen ini berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan. Perusahaan saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pengungkapan kebijakan akuntansi Perusahaan.

- Amandemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi.

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan diterapkan secara retrospektif untuk aset tetap yang tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal dari periode sajian paling awal dimana entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

b. Changes to SFAS and IFAS (Continued)

New and amended standards and interpretations relevant to the Company's operation that are effective for the financial year beginning on or after 1 January 2023 are disclosed below. The Company intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective. (Continued)

- *Amendment of SFAS 1: Presentation of financial statement - Disclosure of accounting policies*

This amendments provides guidance and examples to help entities apply materiality judgements to accounting policy disclosures. The amendment aim to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

The amendments are effective on or after January 1, 2023 with earlier application permitted. The Company is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Company's accounting policy disclosures.

- *Amendments to SFAS 16: Fixed Assets - Proceeds before Intended Use*

The amendments prohibit entities to deduct from the cost of an item of fixed assets, any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognizes the proceeds from selling such items, and the costs of producing those items, in the profit or loss.

The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 and shall be applied retrospectively to items of property, plant and equipment made available for use on or after the beginning of the earliest period presented when the entity first applies the amendment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
b. Perubahan pada PSAK dan ISAK (Lanjutan)	b. Changes to SFAS and IFAS (Continued)
Standar dan interpretasi baru/revisi yang relevan terhadap kegiatan operasi Perusahaan dan berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 seperti yang diungkapkan di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif. (Lanjutan)	<i>New and amended standards and interpretations relevant to the Company's operation that are effective for the financial year beginning on or after 1 January 2023 are disclosed below. The Company intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective. (Continued)</i>
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan (Lanjutan)	- <i>Amendments to SFAS 16: Fixed Assets - Proceeds before Intended Use (Continued)</i>
Amandemen tersebut diperkirakan tidak akan berdampak material terhadap pelaporan keuangan Perusahaan.	<i>The amendments are not expected to have a material impact on the financial reporting of the Company.</i>
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi	- <i>Amendment of SFAS 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors – Definition of Accounting Estimates</i>
Amandemen tersebut memperkenalkan definisi 'estimasi akuntansi' dan mengklarifikasi perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen tersebut juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.	<i>The amendments introduces a definition of 'accounting estimates' and clarify the distinction between changes in accounting estimates and changes in accounting policies and the correction of errors. Also, they clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.</i>
Amandemen tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dan berlaku untuk perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi yang terjadi pada atau setelah awal periode tersebut. Penerapan dini diperkenankan. Perusahaan saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Perusahaan.	<i>The amendments are effective on or after January 1, 2023 and apply to changes in accounting policies and changes in accounting estimates that occur on or after the start of that period. Earlier application is permitted. The Company is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Company's financial reporting.</i>
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal	- <i>Amendment of SFAS 46: Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction</i>
Amandemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya sebagai contoh dari transaksi sewa, untuk mengeliminasi perbedaan praktik saat ini atas transaksi tersebut dan transaksi lain yang serupa.	<i>This amendment proposes that entities recognize deferred tax assets and liabilities at the time of initial recognition, for example from a lease transaction, to eliminate differences in current practice for such transactions and similar transactions.</i>

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
b. Perubahan pada PSAK dan ISAK (Lanjutan)	b. Changes to SFAS and IFAS (Continued)
Standar dan interpretasi baru/revisi yang relevan terhadap kegiatan operasi Perusahaan dan berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 seperti yang diungkapkan di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif. (Lanjutan) - Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal (Lanjutan) Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan. Perusahaan saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Perusahaan. Standar dan interpretasi baru/revisi yang relevan terhadap kegiatan operasi Perusahaan dan berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 seperti yang diungkapkan di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif. - Amandemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan Amandemen ini mengklarifikasi bahwa hanya kovenan yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan yang akan memengaruhi klasifikasi liabilitas sebagai lancar atau tidak lancar. Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 dengan penerapan dini diperkenankan.	<i>New and amended standards and interpretations relevant to the Company's operation that are effective for the financial year beginning on or after 1 January 2023 are disclosed below. The Company intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective. (Continued)</i> - <i>Amendment of SFAS 46: Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction (Continued)</i> <i>The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 with early adoption permitted. The Company is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Company's financial reporting.</i> <i>New and amended standards and interpretations relevant to the Company's operation that are effective for the financial year beginning on or after 1 January 2024 are disclosed below. The Company intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.</i> - <i>Amendment of PSAK 1: Non-current Liabilities with Covenants</i> <i>This amendment clarifies that only covenants with which entities must comply on or before the reporting date will affect a liability's classification as current or non current.</i> <i>The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024 with early adoption permitted.</i>

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
b. Perubahan pada PSAK dan ISAK (Lanjutan)	b. Changes to SFAS and IFAS (Continued)
Standar dan interpretasi baru/revisi yang relevan terhadap kegiatan operasi Perusahaan dan berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 seperti yang diungkapkan di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif. (Lanjutan)	<i>New and amended standards and interpretations relevant to the Company's operation that are effective for the financial year beginning on or after 1 January 2024 are disclosed below. The Company intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective. (Continued)</i>
- Amandemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan (Lanjutan) Entitas menerapkan amandemen PSAK 1 (Oktober 2020) tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25. Jika entitas menerapkan amandemen PSAK 1 (Oktober 2020) pada periode yang lebih awal setelah terbitnya amandemen PSAK 1 (Desember 2022) tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan, maka entitas juga menerapkan amandemen PSAK 1 (Desember 2022) pada periode tersebut. Jika entitas menerapkan amandemen PSAK 1 (Oktober 2020) untuk periode sebelumnya, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.	- <i>Amendment of PSAK 1: Non-current Liabilities with Covenants (Continued)</i> <i>Entities apply retrospectively amendments to PSAK 1 (October 2020) regarding the classification of a liability as current or non-current for financial reporting starting on or after January 1, 2024 in accordance with PSAK 25. If entities apply the amendments to PSAK 1 (October 2020) in a period that earlier after the issuance of the amendment to PSAK 1 (December 2022) regarding non-current liabilities with covenants, entities also apply the amendment to PSAK 1 (December 2022) in that period. If entities apply the amendments to PSAK 1 (October 2020) for the previous period, the entity shall disclose this fact.</i>
- Amandemen PSAK 73: Sewa terkait Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-Balik Amandemen PSAK 73 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan. Amandemen berlaku secara retrospektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan.	- <i>Amendment of PSAK 73: The Lease Liability in a Sale and Leaseback Transaction</i> <i>The amendment to PSAK 73 Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.</i> <i>The amendment applies retrospectively to annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024. Earlier application is permitted.</i>

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
---	--

b. Perubahan pada PSAK dan ISAK (Lanjutan)

Standar dan interpretasi baru/revisi yang relevan terhadap kegiatan operasi Perusahaan dan berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 seperti yang diungkapkan di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif. (Lanjutan)

- PSAK 74: Kontrak Asuransi

Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 74 akan menggantikan PSAK 62: Kontrak Asuransi. PSAK 74 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 74 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

PSAK 74 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, dengan mensyaratkan angka komparatif. Penerapan dini diperkenankan bila entitas juga menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72 pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 74. Standar ini tidak diharapkan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Perusahaan pada saat diadopsi untuk pertama kali.

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

b. Changes to SFAS and IFAS (Continued)

New and amended standards and interpretations relevant to the Company's operation that are effective for the financial year beginning on or after 1 January 2024 are disclosed below. The Company intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective. (Continued)

- PSAK 74: Insurance Contracts

A comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure, upon its effective date, PSAK 74 will replace PSAK 62: Insurance Contracts. PSAK 74 applies to all types of insurance contracts, life, non-life, direct insurance and re-insurance, regardless of the entities issuing them, as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features, while a few scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 74 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers.

PSAK 74 is effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2025, with comparative figures required. Early application is permitted, provided the entity also applies PSAK 71 and PSAK 72 on or before the date of initial application of PSAK 74. This standard is not expected to have any impact to the financial reporting of the Company upon first-time adoption.

The Company is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on its financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
---	--

c. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor yang meliputi:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

d. Penjabaran Mata Uang Asing

(i) Mata Uang Fungsional dan Penyajian

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

c. Transaction and Balances with Related Parties

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity which includes:

- a) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - i. *has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b) *An entity related to the reporting entity if it meets one of the following:*
 - i. *The entity, and the reporting entity are members of the same Company (which mean that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the other entity is a member).*
 - iii. *Both entity is a joint ventures of the same third party.*
 - iv. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.*
 - v. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.*
 - vi. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).*
 - vii. *A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).*

d. Foreign Currency Transactions

(i) Functional and Presentation Currency

Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the functional currency). The financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional and presentation currency.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
---	--

d. Penjabaran Mata Uang Asing (Lanjutan)

d. Foreign Currency Transactions (Continued)

(ii) Transaksi dan Saldo

(ii) Transaction and Balances

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laporan laba rugi.

Foreign currency transactions are translated into functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into functional currency using the closing exchange rate. The exchange rate used as a benchmark is the rate that is issued by the Bank of Indonesia. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan, adalah sebagai berikut: (nilai penuh)

As at the statement of financial position dates, the exchange rates used, were as follows: (full amount)

	<u>Desember 31, 2022</u>
1 Dollar Amerika Serikat ("Dolar AS")	15,592

	<u>December 31, 2021</u>
1 United States Dollar ("US Dollar")	14,278

e. Instrumen Keuangan

e. Financial Instruments

Instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan bagi suatu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas yang lain.

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset for one entity and a financial liability or equity instrument for another entity.

Aset Keuangan

Financial Assets

Klasifikasi

Classification

Secara umum, aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

In general, financial assets are classified in the following two categories:

1. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
2. Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

1. *Financial assets at amortised cost; and*
2. *Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL") or other comprehensive income ("FVOCI").*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
---	--

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal.

Pada tanggal pelaporan keuangan, Perusahaan hanya memiliki aset keuangan dengan kategori sebagai biaya diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan dengan kategori biaya diamortisasi terdiri dari kas dan setara kas, piutang lain-lain dan pendapatan bunga yang masih akan diterima. Aset keuangan dengan kategori nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain terdiri dari penyertaan saham.

Perusahaan melakukan reklasifikasi instrumen utang jika dan hanya jika terdapat perubahan model bisnis atas aset keuangan tersebut.

Pengakuan dan Pengukuran

Pembelian dan penjualan aset keuangan diakui pada saat tanggal perdagangan dimana, Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset keuangan. Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut telah kedaluwarsa atau dialihkan dan Perusahaan telah mengalihkan secara substansial risiko dan manfaat atas kepemilikan.

Saat pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah dengan, dalam hal aset keuangan diukur dengan nilai wajar tidak melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada akuisisi aset keuangan. Biaya transaksi atas aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

e. Financial Instruments (Continued)

Financial Assets (Continued)

The Company determines the classification of its financial assets which are categorised as amortised cost and fair value through other comprehensive income.

As at the reporting date, the Company only has financial assets which are categorised as amortised cost and fair value through other comprehensive income. The Company's amortised cost comprise cash and cash equivalents, other receivables and accrued interest income. The Company's fair value through other comprehensive income comprise investment in shares.

The Company reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

Recognition and Measurement

Regular way purchases and sales of financial assets are recognised on trade date, being the date on which the group commits to purchase or sell the asset. Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the financial assets have expired or have been transferred and the Company has transferred substantially all the risks and rewards of ownership.

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets. Transaction costs of financial assets carried at FVTPL are expensed in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)	e. Financial Instruments (Continued)
Aset Keuangan (Lanjutan)	Financial Assets (Continued)
Pengakuan dan Pengukuran (Lanjutan)	Recognition and Measurement (Continued)
<u>Instrumen Utang</u>	<u>Debt Instruments</u>
Pengukuran selanjutnya atas instrumen utang bergantung kepada model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset dan karakteristik dari arus kas. Terdapat tiga kategori pengukuran dalam mengklasifikasi instrumen utang:	<i>Subsequent measurement of debt instruments business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories in classifying debt instruments:</i>
- Biaya Perolehan Diamortisasi	- <i>Amortised Cost</i>
Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual, dimana arus kas tersebut merupakan pembayaran pokok dan bunga, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Penghasilan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan disajikan dalam keuntungan/(kerugian) lainnya bersama dengan keuntungan dan kerugian selisih kurs. Penurunan nilai aset keuangan disajikan terpisah dalam laporan laba rugi.	<i>Assets that are held for collection of contractual cash flows, where those cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at amortised cost. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Any gain or loss arising on derecognition is recognised directly in profit or loss and presented in other gains/(losses) together with foreign exchange gains and losses. Impairment losses are presented as a separate line item in profit or loss.</i>
- Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	- <i>Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVOCI")</i>
Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual dan untuk penjualan keuangan aset, dimana arus kas aset merupakan pembayaran pokok dan bunga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Mutasi dalam jumlah tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs, yang diakui dalam laporan laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi pada pendapatan/(beban) lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan pada pendapatan/(beban) lain-lain, dan penurunan nilai disajikan pada bagian terpisah dalam laporan laba rugi.	<i>Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where payments of principal and interest, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through OCI, except for the recognition of impairment gains or losses, interest income and foreign exchange gains and losses, which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income/(expenses). Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other income/(expenses), and impairment charge is presented as a separate line item in profit or loss.</i>

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)	e. Financial Instruments (Continued)
Aset Keuangan (Lanjutan)	Financial Assets (Continued)
Pengakuan dan Pengukuran (Lanjutan)	Recognition and Measurement (Continued)
<u>Instrumen Utang (Lanjutan)</u>	<u>Debt Instruments (Continued)</u>
- Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	- Fair Value Through Profit or Loss ("FVPL")
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.	Financial assets at fair value through profit or loss are subsequently carried in the statement of financial position at fair value, with changes in fair value recognised in profit or loss.
<u>Instrumen Ekuitas</u>	<u>Equity Instruments</u>
Perusahaan selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Dimana manajemen Perusahaan telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari investasi ekuitas pada penghasilan komprehensif lain. Tidak ada reklasifikasi selanjutnya atas keuntungan dan kerugian dari nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi. Dividen dari investasi tersebut terus diakui dalam laporan laba rugi ketika hak Perusahaan untuk menerima pembayaran ditetapkan. Investasi pada instrumen ekuitas tidak diuji penurunan nilai.	The Company subsequently measures all equity investments at fair value. Where the Company's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in OCI, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss when the Company's right to receive payments is established. Equity investments are not tested for impairment.
Liabilitas Keuangan	Financial Liabilities
<u>Pengakuan dan Pengukuran Awal Liabilitas</u>	<u>Initial Recognition and Measurement</u>
Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman, dan hutang atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.	Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, payables or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.
Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar dan untuk pinjaman sebesar pinjaman yang diterima setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.	All financial liabilities are recognized initially at fair value and as for loan, the amount of loans received after being net off directly to attributable transaction costs.
Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi terdiri dari utang lain-lain, beban akrual dan liabilitas sewa.	The Company classifies its financial liabilities as financial liabilities measured at amortized cost comprise other payables, accrued expense and lease liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
--	---

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode SBE. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi metode SBE. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode SBE. Amortisasi metode SBE diakui sebagai biaya pendanaan pada laporan laba rugi.

f. Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan di dalam laporan posisi keuangan jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajiban secara bersamaan.

g. Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Perusahaan mengakui provisi atas kerugian penurunan nilai untuk kerugian kredit ekspektasian (KKE) atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Provisi atas kerugian penurunan nilai piutang lain-lain tanpa komponen pendanaan yang signifikan diukur dengan jumlah yang sama dengan KKE sepanjang umurnya. KKE sepanjang umurnya adalah KKE yang dihasilkan dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur yang diharapkan dari suatu instrumen keuangan.

Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan. Ketika menentukan apakah risiko kredit dari suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan ketika memperkirakan KKE, Perusahaan mempertimbangkan informasi relevan yang wajar dan dapat dibuktikan dan tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Perusahaan dan penilaian kredit dan termasuk informasi masa depan.

e. Financial Instruments (Continued)

Financial Liabilities (Continued)

Subsequent Measurement

After initial recognition, interest-bearing loans and other borrowings are subsequently measured at amortized cost using the EIR method. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included as finance costs in the statement of profit or loss.

f. Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amounts are reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

g. Impairment of Financial Assets

The Company recognises impairment loss provision for expected credit losses (ECLs) on financial assets measured at amortised cost. Impairment loss provision for other receivables without a significant financing component are measured at an amount equal to lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument.

The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk. When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECLs, the Perusahaan considers reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Company's historical experience and credit estimates and includes forward looking information.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
---	--

g. Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (Lanjutan)

KKE adalah perkiraan probabilitas-tertimbang dari kerugian kredit. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan penerimaan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang dari suatu entitas berdasarkan kontrak dan arus kas yang Perusahaan harapkan untuk diterima). KKE didiskontokan pada tingkat bunga efektif dari aset keuangan tersebut.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menentukan apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi mengalami penurunan nilai kredit. Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan pada perkiraan arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti bahwa suatu aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit termasuk data yang dapat diobservasi sebagai berikut:

- kesulitan keuangan yang signifikan dari pelanggan;
- pelanggaran kontrak seperti gagal bayar; atau
- ada kemungkinan bahwa pelanggan akan mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan lainnya.

h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, bank dan semua deposito berjangka yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

i. Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain adalah jumlah tagihan dari pihak ketiga atau pihak yang berelasi di luar kegiatan usaha.

Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

Lihat Catatan 2.g untuk kebijakan penentuan jumlah provisi penurunan nilai atas piutang lain-lain.

g. Impairment of Financial Assets (Continued)

ECLs are probability-weighted estimates of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows that the Company expects to receive). ECLs are discounted at the effective interest rate of the financial asset.

At each reporting date, the Company assesses whether financial assets carried at amortised cost are credit-impaired. A financial asset is 'credit-impaired' when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data:

- significant financial difficulty of the customer;*
- breach of contract such as default; or*
- it is probable that the customer will enter bankruptcy or other financial reorganisation.*

h. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted.

i. Other Receivables

Other receivables are amounts due from third parties or related parties for transactions outside of the ordinary course of business.

If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, less any provision for impairment.

See Note 2.g for the policy on determining the amount of provision for impairment of other receivables.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
---	--

i. Piutang Lain-lain (Lanjutan)

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan disajikan sebagai "beban lain-lain, bersih" untuk piutang lain-lain. Ketika piutang lain-lain, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukkan dengan mengurangi akun provisi. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukkan, dikreditkan terhadap "beban lain-lain, bersih" pada laporan laba rugi.

j. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Perlengkapan dan Peralatan Kantor	<u>Tahun / Years</u>	
	5	

Masa manfaat, nilai sisa dan metode penyusutan aset dikaji dan disesuaikan, jika diperlukan, setidaknya setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset terpisah, sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan dalam laba rugi dalam tahun buku terjadinya biaya-biaya tersebut.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya penggantian komponen suatu aset dan biaya inspeksi yang signifikan diakui dalam jumlah tercatat aset jika memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian dari aset.

i. Other Receivables (Continued)

The amount of the impairment loss is recognised in profit or loss within "other expenses, net" for other receivables. When a other receivable for which an impairment provision had been recognised becomes uncollectible in a subsequent period, it is written off against the provision account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against "other expenses, net" in profit or loss.

j. Fixed Assets

Fixed assets, except land, are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment loss. Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

	<u>Tahun / Years</u>	
	5	

Assets' useful lives, residual values and depreciation methods are reviewed and adjusted if appropriate, at least at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss, when the changes arise.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amounts of replaced parts are derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial year in which they are incurred.

The cost of maintenance and repairs is charged to operations as incurred; significant costs of replacing part of assets and major inspection cost are recognised in the carrying amount of the assets if the recognition criteria are met.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
j. Aset Tetap (Lanjutan) Nilai tercatat aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat pelepasan aset tetap tersebut diakui dalam laba rugi. Nilai tercatat aset segera diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah terpulihnya.	j. Fixed Assets (Continued) <i>For assets which are no longer utilised or sold, the carrying amounts are eliminated from the financial statements and the resulting gains or losses on disposals of property, plant and equipment are recognised in profit or loss.</i> <i>An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.</i>
k. Utang Lain-lain Utang lain-lain berkaitan dengan transaksi pihak ketiga atau pihak berelasi di luar kegiatan usaha normal. Utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang. Utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar (dikurangi biaya transaksi) dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.	k. Other Payables <i>Other payables are amounts due to third or related parties for transactions outside the ordinary course of business. Other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.</i> <i>Other payables are recognised initially at fair value (net of transaction cost) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.</i>
l. Sewa Perusahaan menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak adalah, atau berisi, sewa. Artinya, jika kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset teridentifikasi untuk suatu periode waktu sebagai imbalan untuk imbalan. Perusahaan Sebagai Penyewa Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.	l. Leases <i>The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.</i> The Company as Lessee <i>At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.</i>

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
---	--

I. Sewa (Lanjutan)

Perusahaan Sebagai Penyewa (Lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan aset yang diidentifikasi - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit, dan harus berbeda secara fisik atau secara substansial mewakili seluruh kapasitas aset. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tidak teridentifikasi;
- Perusahaan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan telah ditentukan sebelumnya:
 1. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
 2. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inisiasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana bertindak sebagai penyewa, Perusahaan memutuskan untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

I. Leases (Continued)

The Company as Lessee (Continued)

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company shall assesses whether:

- *The contract involves the use of an identified asset - this can be explicitly specified or implicitly, and must physically distinct or represents substantially all of the total capacity. If the supplier has substantive substitution rights, then there is no identified asset;*
- *The Company has the right to obtain substantially all economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Company has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to change how and for what purpose the asset is used are predetermined:*
 - 1. The Company has the right to operate the asset; and*
 - 2. The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purposes it will be used throughout the period of use.*

At the inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone prices of the non-lease component. However, for the leases of improvements in which the Company is a lessee, the Company has elected not to separate non-lease components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
I. Sewa (Lanjutan)	I. Leases (Continued)
Perusahaan Sebagai Penyewa (Lanjutan)	The Company as Lessee (Continued)
Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.	<i>The Company recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.</i>
Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.	<i>The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.</i>
Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.	<i>Lease liabilities are measured at the present value of any unpaid lease payments at the inception date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that interest rate cannot be determined, then using the incremental borrowing rate. Generally, the Company uses borrowing rate as the interest rate.</i>
Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:	<i>Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:</i>
- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa; - pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan; - jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual; - harga eksekusi opsi beli jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan - penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.	- <i>fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;</i> - <i>variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;</i> - <i>amounts expected to be payable under a residual value guarantee;</i> - <i>the exercise price under a purchase option that the Company is reasonably certain to exercise; and</i> - <i>penalties for early termination of a lease unless the Company is reasonably certain not to terminate early.</i>

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
I. Sewa (Lanjutan)	I. Leases (Continued)
Perusahaan Sebagai Penyewa (Lanjutan)	The Company as Lessee (Continued)
Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.	<i>Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.</i>
Perusahaan menyajikan aset hak-guna dan liabilitas sewa sebagai akun terpisah di dalam laporan posisi keuangan.	<i>The Company presents right-of-use assets and lease liabilities as separate line items in the statement of financial position.</i>
<u>Sewa jangka pendek dan yang aset dasarnya bernilai rendah</u>	<u>Short-term leases and leases of low-value assets</u>
Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.	<i>The Company has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Company recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.</i>
<u>Modifikasi Sewa</u>	<u>Lease Modifications</u>
Perusahaan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:	<i>The Company account for a lease modifications as a separate lease if both:</i>
- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan - imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.	- <i>modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and</i> - <i>the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.</i>
Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perusahaan:	<i>For a lease modification that is not accounted for as separate leases, at the effective date of the lease modification, the Company:</i>
- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian; - menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;	- <i>remeasure and allocate the consideration in the modified contract;</i> - <i>determine the lease term of the modified lease;</i>

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
---	--

I. Sewa (Lanjutan)

Perusahaan Sebagai Penyewa (Lanjutan)

Modifikasi Sewa (Lanjutan)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perusahaan: (Lanjutan)

- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Perusahaan mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

m. Imbalan Kerja

Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pascakerja yang akan diterima seorang karyawan pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja dan kompensasi.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun dikurangi nilai wajar aset program, serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Besarnya kewajiban imbalan pasti ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan secara tahunan menggunakan metode *projected unit credit*.

I. Leases (Continued)

The Company as Lessee (Continued)

Lease Modifications (Continued)

For a lease modification that is not accounted for as separate leases, at the effective date of the lease modification, the Company: (Continued)

- *remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Company's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
- *decrease the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Company recognises in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *make a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

m. Employee Benefits

A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The liability recognised in the statement of financial position in relation to the defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the year less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognised actuarial gains or losses and past service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
---	--

m. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan. Di negara-negara yang tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan tingkat suku bunga obligasi pemerintah.

Perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian terdiri dari perubahan yang terjadi dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti. Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke laba komprehensif lainnya yang merupakan bagian dari cadangan lainnya pada tahun dimana terjadinya perubahan tersebut.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

n. Dividen

Pembayaran dividen kepada pemegang saham pada Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan Perusahaan dalam periode dimana pembagian dividen diumumkan.

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan utama Perusahaan berupa pendapatan bunga dari deposito dan dividen. Pendapatan dividen dicatat berdasarkan keputusan Pemegang Saham pada saat RUPS. Pendapatan bunga deposito diakui berdasarkan metode akrual yang didasarkan pada jangka waktu, nilai nominal dan suku bunga yang berlaku kecuali apabila kolektibilitasnya diragukan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

m. Employee Benefits (Continued)

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. In countries where there is no deep market for such bonds, the market rates on government bonds are used.

The Company recognised gains or losses on curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gains or loss on a curtailment or settlement comprises change in the present value of the defined benefit obligation. Past service costs are recognised immediately in profit or loss.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other comprehensive income and presented as part of other reserves in the year in which they arise.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

n. Dividend

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognised as a liability in the Company's financial statements in the period in which the dividends are declared.

o. Revenue and Expense Recognition

The main revenue of the Company consists of interest income from time deposits and dividends. Dividend income is recorded based as on the decision of the Shareholders at the GSM. Interest income from deposits is recognised using the accrual method, based on the term period, at the nominal value and the applicable interest rate, unless the collectibility is in doubt.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
---	--

p. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu berkaitan dengan kejadian atau transaksi yang diakui pada pendapatan komprehensif lainnya atau secara langsung dicatat ke ekuitas. Pada kasus tersebut, masing-masing beban pajak juga diakui pada pendapatan komprehensif lainnya atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan di negara dimana Perusahaan beroperasi dan menghasilkan penghasilan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan terkait dengan situasi dimana diperlukan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan sebagai bagian dari beban umum dan administrasi pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode balance sheet liability untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif (atau peraturan) pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan untuk diterapkan jika aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui sepanjang kemungkinan besar penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset dan liabilitas pajak tangguhan yang terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk menyelesaikan saldo-saldo tersebut secara neto.

p. Taxation

The tax expense for the year comprises current and deferred tax. Tax expense is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted as at the reporting date in the countries where the Company operates and generates taxable income. Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns in situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. Where appropriate, it establishes a provision on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

For income which is subject to final tax, income tax expense is recognised proportionally with the accounting revenue recognised and presented as part of general and administrative expenses in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.

Deferred income tax is recognised using the balance sheet liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates (or laws) that have been enacted or substantially enacted as at the reporting date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or on different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dimana prinsip tersebut mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjen pada tanggal laporan keuangan, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Estimasi, asumsi dan penilaian tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan akan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa di masa mendatang.

Perusahaan telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting berikut dimana dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan yang dilaporkan dalam periode mendatang.

a. Ketidakpastian Eksposur Perpajakan

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat pada akun taksiran tagihan pajak dapat dipulihkan dan direstitusi oleh Kantor Pajak. Lebih lanjut, manajemen mempertimbangkan liabilitas yang mungkin timbul dari hasil pemeriksaan pajak yang masih diajukan keberatannya.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan maupun pajak lainnya atas transaksi tertentu. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Perusahaan membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk pajak yang belum diakui harus diakui.

b. Nilai Wajar atas Investasi Ekuitas

Nilai wajar atas investasi ekuitas ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Perusahaan menggunakan pertimbangan dalam menentukan berbagai metode dan asumsi yang terutama berdasarkan pada kondisi pasar yang ada pada akhir tiap periode pelaporan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENT, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the financial statements is in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, which requires management to provide estimates and assumptions that impact the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and also the amounts of revenue and expenses during the reporting period. Estimations, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations to the occurrence of future events.

The Company has identified the following critical accounting policies under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect financial results or the financial position reported in future periods.

a. Uncertain Tax Exposures

Based on the tax regulations currently enacted, management assessed whether the amounts recorded under estimated claims for tax refund are recoverable and refundable by the Tax Office. Further, the management also assessed the possible liabilities that may arise from the tax assessments under objection.

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax and other taxes on certain transactions. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. The Company makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognised tax should be recognised.

b. Fair Value of Equity Investments

Fair value of equity investments is determined by using valuation techniques. The Company uses its judgement to select a variety of methods and make assumptions that are mainly based on market conditions existing at the end of each reporting period.

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS AT DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Kas - Rupiah	16.214	3.116	Cash on Hand - Rupiah
Kas pada Bank -			Cash in Banks -
Pihak Berelasi (Catatan 20)			Related Parties (Note 20)
Rupiah	494.785.330	756.159.081	Rupiah
Dolar AS	167.175	139.889	US Dollar
Sub Jumlah	<u>494.952.505</u>	<u>756.298.970</u>	Sub Total
Deposito berjangka -			Time Deposits -
Pihak Berelasi (Catatan 20)			Related Parties (Note 20)
Rupiah	<u>201.050.000</u>	<u>55.000.000</u>	Rupiah
Sub Jumlah	<u>201.050.000</u>	<u>55.000.000</u>	Sub Total
Jumlah	<u>696.018.719</u>	<u>811.302.086</u>	Total
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Tingkat Bunga per Tahun			Annual Interest Rates on
Deposito Berjangka			Time Deposits
Rupiah	4,50% - 5,67%	2,96% - 6,00%	Rupiah

5. PIUTANG LAIN-LAIN

5. OTHER RECEIVABLES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pihak Berelasi: (Catatan 20)			Related Parties: (Note 20)
PT Pertamina Geothermal Energy	87.103.938	--	PT Pertamina Geothermal Energy
PT Mitra Tours & Travel	8.590.374	8.701.355	PT Mitra Tours & Travel
PT Pertamina EP Cepu	--	26.706.157	PT Pertamina EP Cepu
PT Pertamina Hulu Energi	--	6.697.370	PT Pertamina Hulu Energi
Subjumlah	95.694.312	42.104.882	Subtotal
Dikurangi:			Deducted By:
Penyisihan Kerugian Penurunan			Provision for Impairment
Nilai	<u>(8.590.374)</u>	<u>(8.701.355)</u>	Losses
Pihak Berelasi - Bersih	<u>87.103.938</u>	<u>33.403.527</u>	Related Parties - Net
Pihak Ketiga:	51.037	51.037	Third Parties:
Dikurangi:			Deducted By:
Penyisihan Kerugian Penurunan			Provision for Impairment
Nilai	<u>(51.037)</u>	<u>(51.037)</u>	Losses
Pihak Ketiga - Bersih	<u>--</u>	<u>--</u>	Third Parties - Net
Jumlah	<u>87.103.938</u>	<u>33.403.527</u>	Total

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS AT DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG LAIN-LAIN (LANJUTAN)

Mutasi saldo penyisihan atas penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	2022
Saldo Awal	8.752.392
Penurunan	(110.981)
Jumlah	8.641.411

5. OTHER RECEIVABLES (CONTINUED)

The movements in the provision for impairment of other receivables are as follows:

	2021	
	8.813.662	<i>Beginning Balance</i>
	(61.270)	<i>Deduction</i>
	8.752.392	Total

6. PENYERTAAN SAHAM

Penyertaan saham di Perusahaan dikategorikan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain karena merupakan sekuritas ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan dan dimana Perusahaan telah melakukan pemilihan yang tidak dapat dibatalkan pada pengakuan awal untuk mengakui perubahan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain daripada laba atau rugi dikarenakan ini adalah investasi strategis dan Perusahaan menganggap ini lebih relevan.

Perusahaan mengangkat HM Consulting dan KPMG Siddharta Advisory untuk melakukan valuasi penyertaan saham yang dimiliki Perusahaan masing-masing untuk saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Penyertaan saham merupakan porsi kepemilikan saham minoritas pada entitas berelasi di dalam Grup Pertamina. Mutasi saldo penyertaan saham adalah sebagai berikut:

	2022
Saldo Awal	2.351.989.459
Perubahan Nilai Wajar	782.219.898
Saldo Akhir	3.134.209.357

Lihat pada Catatan 16 dan 20 atas pendapatan dividen yang diterima Perusahaan selama tahun 2022 dan 2021.

6. INVESTMENT IN SHARES

Investment in shares in the Company are categorised as financial assets at fair value through other comprehensive income because it is equity securities which are not held for trading and for which the Company has made an irrevocable election at initial recognition to recognise changes in fair value through other comprehensive income rather than profit or loss as these are strategic investments and the Company considered this to be more relevant.

The Company hired HM Consulting and KPMG Siddharta Advisory to do valuation over investment in shares the Company held for balance as at December 31, 2022 and 2021, respectively.

Investments in shares represent minority portions of the shares in related entities within the Pertamina Group. The movements in the investments in shares are as

	2021	
	3.144.604.333	<i>Beginning Balance</i>
	(792.614.874)	<i>Fair Value Changes</i>
	2.351.989.459	Ending Balance

Refer to Notes 16 and 20 for dividend income received by the Company during 2022 and 2021.

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS AT DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PENYERTAAN SAHAM (LANJUTAN)

6. INVESTMENT IN SHARES (CONTINUED)

Jumlah penyertaan saham per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The amounts invested in shares as at December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	Tanggal Mulai Penyertaan/ Date of Investment	Persentase Kepemilikan/ Percentage Ownership 2022	Persentase Kepemilikan/ Percentage Ownership 2021	Nilai Wajar 31 Desember/ at fair value December 31, 2022	Nilai Wajar 31 Desember/ at fair value December 31, 2021	
Pihak Berelasi (Catatan 20)						Related Parties (Note 20)
PT Pertamina Geothermal Energy	06/08/2010	7,98%	7,98%	2.031.699.240	1.393.105.505	PT Pertamina Geothermal Energy
PT Pertamina EP Cepu	12/02/2013	1,00%	1,00%	546.468.573	475.877.915	PT Pertamina EP Cepu
PT Tuban Petrochemical Industries	31/03/2020	1,51%	2,01%	143.696.317	132.846.270	PT Tuban Petrochemical Industries
PT Pertamina Hulu SangaSanga	27/07/2017	1,00%	1,00%	93.340.869	88.500.560	PT Pertamina Hulu SangaSanga
PT Pertamina Training and Consulting	02/08/2010	9,00%	9,00%	60.851.835	53.304.628	PT Pertamina Training and Consulting
PT Pertamina Hulu Rokan	21/12/2018	0,13%	0,13%	58.742.590	47.940.516	PT Pertamina Hulu Rokan
PT Kilang Pertamina Balikpapan	26/12/2019	0,10%	0,10%	41.215.801	23.837.169	PT Kilang Pertamina Balikpapan
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	12/07/2018	1,00%	1,00%	38.001.091	28.445.485	PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur
PT Pertamina Lubricants	03/02/2013	0,05%	0,05%	17.919.583	13.055.210	PT Pertamina Lubricants
PT Pertamina Hulu Indonesia	13/12/2017	0,07%	0,07%	13.793.192	12.966.667	PT Pertamina Hulu Indonesia
PT Badak Natural Gas Liquefaction	15/03/2019	15,00%	15,00%	10.299.015	4.287.927	PT Badak Natural Gas Liquefaction
PT Pertamina Hulu Energi	22/01/2008	0,00%	0,00%	10.184.587	12.164.380	PT Pertamina Hulu Energi
PT Pertamina EP	12/02/2013	0,01%	0,01%	6.219.539	6.196.386	PT Pertamina EP
PT Patra Badak Arun Solusi	31/10/2010	3,99%	3,99%	6.066.973	9.622.123	PT Patra Badak Arun Solusi
PT Pertamina Gas	13/12/2017	0,01%	0,01%	3.211.849	4.064.840	PT Pertamina Gas
PT Mitra Tours & Travel	08/08/2011	3,50%	3,50%	2.850.494	3.093.949	PT Mitra Tours & Travel
PT Pertamina Drilling Services Indonesia	31/12/2017	0,04%	0,04%	1.704.074	2.318.688	PT Pertamina Drilling Services Indonesia
PT Pertamina Bina Medika	02/03/1998	0,01%	0,01%	1.111.266	1.631.916	PT Pertamina Bina Medika
PT Pertamina International Shipping	13/12/2017	0,00%	0,00%	1.080.703	1.405.086	PT Pertamina International Shipping
PT Kilang Pertamina International	13/11/2017	0,00%	0,00%	835.580	2.210.210	PT Kilang Pertamina International
PT Pertamina Hulu Attaka	27/07/2017	1,00%	1,00%	437.395	397.620	PT Pertamina Hulu Attaka
PT Pelita Air Service	13/12/2017	0,00%	0,00%	124.160	95.789	PT Pelita Air Service
PT Pertamina Trans Kontinental	13/12/2017	0,00%	0,00%	32.517	31.031	PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertamina Hulu West Ganai	19/09/2019	1,00%	1,00%	16.772	149.291	PT Pertamina Hulu West Ganai
PT Patra Jasa	13/12/2017	0,00%	0,00%	12.575	56.604	PT Patra Jasa
PT Pertamina Power Indonesia	13/12/2017	0,00%	0,00%	12.541	17.937	PT Pertamina Power Indonesia
PT Pertamina Retail	13/12/2017	0,00%	0,00%	9.344	8.355	PT Pertamina Retail
PT Pertamina Irak Eksplorasi Produksi	30/12/2013	0,00%	0,00%	1.592	1.132	PT Pertamina Irak Eksplorasi Produksi
PT Pertamina East Natuna	16/03/2012	0,10%	0,10%	1.250	1.250	PT Pertamina East Natuna
PT Pertamina International Eksplorasi dan Produksi	30/12/2013	0,00%	0,00%	1.226	1.017	PT Pertamina International Eksplorasi dan Produksi
PT Pertamina Malaysia EP	25/09/2014	0,00%	0,00%	777	722	PT Pertamina Malaysia EP
PT Pertamina Algeria EP	03/09/2014	0,00%	0,00%	561	592	PT Pertamina Algeria EP
PT Pertamina Hulu Energi Arun	19/12/2017	0,00%	0,00%	2	2	PT Pertamina Hulu Energi Arun
PT Pertamina EP Cepu Alas Dara Kemuning	17/01/2014	1,00%	1,00%	--	--	PT Pertamina EP Cepu Alas Dara Kemuning
Subjumlah				<u>3.089.943.883</u>	<u>2.317.636.772</u>	Subtotal
Pihak Ketiga						
PT Trans Javagas Pipeline	16/08/1994	10,00%	10,00%	<u>44.265.474</u>	<u>34.352.687</u>	PT Trans Javagas Pipeline
Jumlah				<u>3.134.209.357</u>	<u>2.351.989.459</u>	Total

7. ASET TETAP

7. FIXED ASSETS

Saldo dan mutasi aset tetap untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The balance and movement fixed asset for year 2022 are as follows:

	<u>2021</u>	<u>Penambahan / Additions</u>	<u>Pengurangan / Deductions</u>	<u>2022</u>	
Harga Perolehan:					Carrying Value:
Peralatan Kantor	<u>277.570</u>	<u>207.600</u>	<u>(132.800)</u>	<u>352.370</u>	Office Equipments
Jumlah	<u>277.570</u>	<u>207.600</u>	<u>(132.800)</u>	<u>352.370</u>	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Peralatan Kantor	<u>156.539</u>	<u>39.333</u>	<u>(132.800)</u>	<u>63.072</u>	Office Equipments
Jumlah	<u>156.539</u>	<u>39.333</u>	<u>(132.800)</u>	<u>63.072</u>	Total
Nilai Buku	<u>121.031</u>			<u>289.298</u>	Book Value

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS AT DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (LANJUTAN)

7. FIXED ASSETS (CONTINUED)

Saldo dan mutasi aset tetap untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The balance and movement fixed asset for year 2021 are as follows:

	<u>2020</u>	<u>Penambahan / Additions</u>	<u>Pengurangan / Deductions</u>	<u>2021</u>	
Harga Perolehan:					Carrying Value:
Peralatan Kantor	177.800	99.770	--	277.570	Office Equipments
Jumlah	177.800	99.770	--	277.570	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Peralatan Kantor	142.550	13.989	--	156.539	Office Equipments
Jumlah	142.550	13.989	--	156.539	Total
Nilai Buku	35.250			121.031	Book Value

Pengurangan aset tetap pada tahun 2022 merupakan pengurangan yang berasal dari penjualan aset tetap dengan nilai buku bersih sebesar nihil.

The deduction in fixed assets in 2022 is deduction originating from the sale of fixed assets with a net book value of nil.

Rincian penjualan aset tetap pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Details of sales of fixed assets during 2022 are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Harga Jual	30.000	--	Sale Price
Nilai Buku	--	--	Book Value
Keuntungan Penjualan Aset Tetap (Catatan 19)	30.000	--	Gain on Sale of Fixed Asset (Note 19)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, beban penyusutan dibebankan pada beban usaha masing-masing sebesar Rp39.333 dan Rp13.989 (Catatan 18).

As at December 31, 2022 and 2021, depreciation expenses charged to operating expenses amounting to Rp39,333 and Rp13,989 respectively (Note 18).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 tidak ada aset tetap yang dijaminkan dan diasuransikan.

As at December 31, 2022 and 2021 there are no fixed assets that are pledged as collateral and insured.

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS AT DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET HAK GUNA

8. RIGHT-OF-USE ASSET

a. Aset Hak Guna

Saldo dan mutasi aset hak guna untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>Penambahan / Additions</u>	<u>Pengurangan / Deductions</u>	<u>2022</u>	
Harga Perolehan:					Carrying Value:
Bangunan	1.576.993	775.010	(949.667)	1.402.336	Building
Kendaraan	658.547	--	--	658.547	Vehicle
Jumlah	<u>2.235.540</u>	<u>775.010</u>	<u>(949.667)</u>	<u>2.060.883</u>	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	764.680	576.876	(949.667)	391.889	Building
Kendaraan	374.566	202.844	--	577.410	Vehicle
Jumlah	<u>1.139.246</u>	<u>779.720</u>	<u>(949.667)</u>	<u>969.299</u>	Total
Nilai Buku	<u>1.096.294</u>			<u>1.091.584</u>	Book Value

Saldo dan mutasi aset hak guna untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The balance and movement right-of-use asset for year 2021 are as follows:

	<u>2020</u>	<u>Penambahan / Additions</u>	<u>Pengurangan / Deductions</u>	<u>2021</u>	
Harga Perolehan:					Carrying Value:
Bangunan	949.667	627.326	--	1.576.993	Building
Kendaraan	658.547	--	--	658.547	Vehicle
Jumlah	<u>1.608.214</u>	<u>627.326</u>	<u>--</u>	<u>2.235.540</u>	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	345.795	418.885	--	764.680	Building
Kendaraan	171.722	202.844	--	374.566	Vehicle
Jumlah	<u>517.517</u>	<u>621.729</u>	<u>--</u>	<u>1.139.246</u>	Total
Nilai Buku	<u>1.090.697</u>			<u>1.096.294</u>	Book Value

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, beban penyusutan dibebankan pada beban usaha masing-masing sebesar Rp779.720 dan Rp621.729 (Catatan 18).

As at December 31, 2022 and 2021, depreciation expenses charged to operating expenses amounting to Rp779,720 and Rp621,729 respectively (Note 18).

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS AT DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET HAK GUNA (LANJUTAN)

8. RIGHT-OF-USE ASSET (CONTINUED)

b. Liabilitas Sewa

b. Lease Liabilities

	2022	2021	
Saldo Awal	791.408	1.051.864	<i>Beginning Balance</i>
Penambahan	775.010	568.858	<i>Additions</i>
Beban Bunga	53.192	58.466	<i>Interest Expense</i>
Pembayaran	(471.445)	(887.781)	<i>Payments</i>
Saldo Akhir	<u>1.148.165</u>	<u>791.407</u>	<i>Ending Balance</i>
Bagian Lancar	345.587	118.117	Current Portion
Bagian Tidak Lancar	802.578	673.290	Non-Current Portion

9. UTANG LAIN-LAIN

9. OTHER PAYABLES

	2022	2021	
Pihak Ketiga	161.637	2.205.767	<i>Third Parties</i>
Pihak Berelasi (Catatan 20)	36.785	110.980	<i>Related Parties (Note 20)</i>
Jumlah	198.422	2.316.747	Total

10. UANG MUKA DIVIDEN

10. ADVANCES DIVIDEND

	2022	2021	
Uang Muka Dividen (Catatan 20)	110.491.938	--	<i>Dividend Advances (Note 20)</i>
Jumlah	110.491.938	--	Total

Uang muka merupakan penerimaan di muka untuk pembagian dividen dari PT Pertamina EP Cepu dan PT Pertamina Geothermal Energy di masa mendatang masing-masing sebesar Rp23.388.000 dan Rp87.103.938. Jumlah dividen akan diputuskan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT Pertamina EP Cepu dan PT Pertamina Geothermal Energy di tahun 2023.

Advance represents advance receipt for future dividend distributions from PT Pertamina EP Cepu and PT Pertamina Geothermal Energy on the future Rp23,388,000 and Rp87,103,938, respectively. The dividends amount will be decided based on the Annual General Shareholders Meeting of PT Pertamina EP Cepu and PT Pertamina Geothermal Energy in 2023.

11. BEBAN AKRUAL

11. ACCRUED EXPENSES

	2022	2021	
Beban Karyawan dan Manajemen Kunci	4.798.533	3.799.622	<i>Employee and Key Management Expense</i>
Beban Kantor	1.945.115	4.887.970	<i>Office Expense</i>
Lain-lain	--	2.769.205	<i>Others</i>
Jumlah	6.743.648	11.456.797	Total

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS AT DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN

12. TAXATION

a. Taksiran Tagihan Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan memiliki saldo kotor tagihan taksiran pajak per Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun fiskal 2016-2019 sebesar Rp66.646.494 dimana telah diturunkan nilai seluruhnya pada tahun 2021.

a. Claims for Tax Refund

As at December 31, 2022 and 2021, the company has gross amount of claim for tax refund per Annual Tax Return for fiscal year 2016-2019 amounted to Rp66,646,494 which has been fully impaired in 2021.

b. Utang Pajak

	2022
Pajak Penghasilan:	
Pasal 29;	
Tahun Berjalan	481.004
Tahun 2021	--
Tahun 2020	--
Pasal 21	362.596
Pasal 23	7.866
Pasal 4 (2)	--
Jumlah	851.466

b. Taxes Payable

	2021	
		<i>Income Tax:</i>
		<i>Article 29;</i>
		<i>Current Year</i>
	--	<i>Year 2021</i>
	117.144	<i>Year 2020</i>
	12.221.793	<i>Article 21</i>
	471.546	<i>Article 23</i>
	9.250	<i>Article 4 (2)</i>
	52.870	
Jumlah	12.872.603	Total

c. Pajak Penghasilan Badan

	2022
Beban Pajak Kini	481.004
Penyesuaian Tahun Lalu	--
Jumlah	481.004

c. Income Tax Expenses

	2021	
	117.114	<i>Current Income Tax Expense</i>
	27.381.529	<i>Adjustment in Respect of Prior Year</i>
Jumlah	27.498.643	Total

Perhitungan beban pajak kini Perusahaan adalah sebagai berikut:

The calculation of the current corporate income tax expense is as follows:

	2022	2021	
Laba Sebelum Pajak			
Penghasilan	142.462.232	322.650.665	<i>Income Before Income Tax</i>
Koreksi:			<i>Correction:</i>
Penghasilan Tidak Dikenakan			<i>Non-Taxable</i>
Pajak Penghasilan	(127.515.487)	(315.316.418)	<i>Income</i>
Penghasilan yang Dikenai			<i>Income Subject to</i>
Pajak Penghasilan Final	(28.305.697)	(25.977.241)	<i>Final Tax</i>
Pajak Penghasilan Final			<i>Final Income Tax on</i>
atas Pendapatan Bunga			<i>Interest Income from Current</i>
Deposito dan Giro	5.661.139	5.195.448	<i>Account and Time Deposits</i>
Beban yang Tidak Dapat			
Dikurangkan untuk			<i>Expense not Deductible</i>
Tujuan Pajak	9.884.193	13.980.018	<i>for Tax Purposes</i>
Penghasilan Kena Pajak	2.186.380	532.472	<i>Taxable Income</i>
Beban Pajak Penghasilan Kini	481.004	117.144	<i>Current Income Tax Expense</i>
Pajak Penghasilan Badan			<i>Underpayment of</i>
Kurang Bayar	481.004	117.144	<i>Corporate Income Tax</i>

12. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

12. TAXATION (CONTINUED)

c. Pajak Penghasilan Badan (Lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tanggal 17 Februari 2021 pasal 37 (1b) menyatakan bahwa dividen yang berasal dari wajib pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 17 Februari 2021.

Rekonsiliasi antara beban pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	142.462.232	322.650.664
Beban Pajak dengan Tarif Pajak yang Berlaku	31.341.691	70.983.146
Pengaruh Pajak atas Beda Tetap	(30.860.687)	(70.866.002)
Subjumlah	481.004	117.144
Penyesuaian Tahun Lalu	--	27.381.529
Beban Pajak Penghasilan	481.004	27.498.673

Penyesuaian tahun lalu di tahun 2021 sebesar Rp27.381.529 dilakukan untuk mencadangkan perhitungan pajak penghasilan tahun 2016-2018 berdasarkan perkembangan dan hasil audit dan pengadilan pajak.

c. Income Tax Expenses (Continued)

Based on Minister of Finance Regulation (PMK) No. 18/PMK.03/2021 regarding Implementation of Law Number 11 Year 2020 on Cipta Kerja for Income Tax, Value Added Tax and Sales Tax of Luxury Goods, and also General Provision and Tax Procedures dated February 17, 2021 article 37 (1b) stated that dividend coming from domestic corporate taxpayer are excluded from income tax object. This regulation is effective from February 17, 2021.

The reconciliation between income tax expense calculated using the prevailing tax rate from the profit before income tax reported in profit or loss is as follows:

	2022	2021	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	142.462.232	322.650.664	Income Before Income Taxes
Beban Pajak dengan Tarif Pajak yang Berlaku	31.341.691	70.983.146	Tax Expense Calculated Using the Prevailing Tax Rate
Pengaruh Pajak atas Beda Tetap	(30.860.687)	(70.866.002)	Tax Effect of Permanent Difference
Subjumlah	481.004	117.144	Subtotal
Penyesuaian Tahun Lalu	--	27.381.529	Adjustment in Respect of Prior Year
Beban Pajak Penghasilan	481.004	27.498.673	Income Tax Expense

Adjustment in respect of prior years in 2021 of Rp27,381,529 is a provision for 2016-2018 income tax calculations based on the development in tax audits and tax courts of the Company.

d. Liabilitas Pajak Tangguhan

d. Deferred tax Liabilities

	2022				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penyesuaian Terkait Perubahan Tarif Pajak/ Adjustment Related to Changes in Tax Rate	Dibebankan ke Ekuitas/ Charged to Equity	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Nilai Wajar Penyertaan Saham	460.185.396	--	172.088.377	632.273.773	Fair Value of Investment in Shares
Jumlah	460.185.396	--	172.088.377	632.273.773	Total

12. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

12. TAXATION (CONTINUED)

d. Liabilitas Pajak Tangguhan (Lanjutan)

d. Deferred tax Liabilities (Continued)

2021				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penyesuaian Terkait Perubahan Tarif Pajak/ Adjustment Related to Changes in Tax Rate	Dibebankan ke Ekuitas/ Charged to Equity	Saldo Akhir/ Ending Balance
Nilai Wajar Penyertaan Saham	576.873.335	57.687.333	(174.375.272)	460.185.396
				<i>Fair Value of Investment in Shares</i>
Jumlah	576.873.335	57.687.333	(174.375.272)	460.185.396
				Total

e. Pemeriksaan Pajak

e. Tax Assessments

Pada tanggal 8 Agustus 2017, Perusahaan mendapatkan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) terkait dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Badan tahun 2016 yang menyatakan bahwa Perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar Rp357.522.316 dan lebih bayar pajak sebesar Rp30.331.137.

On August 8, 2017, the Company received a notification letter for a tax audit from the Directorate General of Taxes (DGT) related to the submission of the corporate income tax return in 2016, which stated that the Company has incurred tax losses of Rp357,522,316 and tax overpayment of Rp30,331,137.

Pada tanggal 27 April 2018, Perusahaan memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pemeriksaan pajak tahun 2016 yang menyatakan Perusahaan kurang bayar sebesar Rp7.342.364. Atas kurang bayar pajak tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Perusahaan pada tanggal 13 Agustus 2018 dan dibebankan sebagai beban di tahun 2018. Perusahaan mengajukan Surat Permohonan Pembatalan SKPKB kepada DJP pada tanggal 22 Oktober 2018 dan ditolak oleh DJP pada tanggal 10 Juli 2019. Perusahaan kemudian mengajukan surat gugatan atas hasil keputusan DJP pada tanggal 17 Januari 2020 ke Pengadilan Pajak. Proses persidangan terkait perkara pajak tahun 2016 telah diselesaikan dan saat ini menunggu keputusan Pengadilan Pajak sampai laporan keuangan ini diterbitkan.

On April 27, 2018 the Company received a Tax Underpayment Assessment ("SKPKB") Letter which assessed underpayment of corporate income tax for 2016 amounting to Rp7,342,364. The Company paid the tax underpayment on August 13, 2018 and charged the amount as an expense in 2018. The Company submitted a cancellation request letter on the SKPKB to the DGT on October 22, 2018 but it was rejected by the DGT on July 10, 2019. Subsequently, on January 17, 2020, the Company filed a tax lawsuit to the Tax Court on the DGT's decision. The trial process related to the 2016 tax case has been completed and is currently awaiting the Tax Court's decision until the issuance of this report.

Pada tanggal 4 April 2019, Perusahaan memperoleh SKPKB atas pemeriksaan pajak tahun 2017 yang menyatakan Perusahaan kurang bayar sebesar Rp296.394. Atas kurang bayar pajak tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Perusahaan pada tanggal 21 November 2019 dan dibebankan sebagai beban di tahun 2019. Pada 14 September 2020 Perusahaan mengajukan Surat Permohonan Banding pada Pengadilan Pajak. Proses persidangan terkait perkara pajak tahun 2017 telah diselesaikan dan saat ini menunggu keputusan Pengadilan Pajak sampai laporan keuangan ini diterbitkan.

On April 4 2019, the Company received a SKPKB which assessed underpayment of corporate income tax for 2017 amounting to Rp296,394. The Company paid the tax underpayment on November 21, 2019 and charged the amount as an expense in 2019. On September 14, 2020, the Company submitted a Letter of Appeal to the Tax Court. The trial process related to the 2017 tax case has been completed and is currently awaiting the Tax Court's decision until the issuance of this report.

12. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

e. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

Pada tanggal 8 Oktober 2019, Perusahaan memperoleh SKPKB atas pemeriksaan pajak tahun 2018 yang menyatakan Perusahaan kurang bayar sebesar Rp6.816.050. Atas kurang bayar pajak tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Perusahaan pada tanggal 6 November 2019 dan dibebankan sebagai beban di tahun 2019. Perusahaan telah mengajukan Surat Permohonan keberatan SKPKB kepada Kantor Pajak pada tanggal 17 Desember 2019. Pada 17 November 2020 Kantor Pajak menolak permohonan keberatan Perusahaan.

Pada tanggal 17 Desember 2020, Perusahaan memperoleh SKPKB atas pemeriksaan pajak tahun 2019 yang menyatakan Perusahaan kurang bayar sebesar Rp11.536.073. Atas kurang bayar pajak tersebut telah dilakukan pembayaran di tahun 2021 dan dibebankan sebagai beban di tahun 2020. Perusahaan kemudian mengajukan surat permohonan keberatan pada tanggal 10 Maret 2021. Terhadap permohonan keberatan tersebut Kantor Pajak pada 10 Desember 2021 menolak keberatan Perusahaan. Pada 7 Maret 2022 Perusahaan kemudian mengajukan surat permohonan banding di Pengadilan Pajak. Proses persidangan terkait perkara pajak tahun 2019 telah diselesaikan dan saat ini menunggu keputusan Pengadilan Pajak sampai laporan keuangan ini diterbitkan.

Pada tanggal 29 Maret 2022, Perusahaan memperoleh SKPKB atas pemeriksaan pajak tahun 2020 yang menyatakan Perusahaan kurang bayar sebesar Rp13.942.518. Atas kurang bayar pajak tersebut telah dilakukan pembayaran di tahun 2022 dan dibebankan sebagai beban di tahun 2020. Perusahaan kemudian mengajukan surat permohonan keberatan pada tanggal 16 Juni 2022 dan sampai laporan keuangan ini diterbitkan masih menunggu tanggapan dari DJP.

f. Tarif Pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah setelah disetujui oleh DPR menerbitkan UU No. 7 tahun 2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana pada bab pajak penghasilan merubah ketentuan pasal 17 (1b) UU Pajak Penghasilan yang di antara lain, menyatakan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya.

12. TAXATION (CONTINUED)

e. Tax Assessment (Continued)

On October 8, 2019, the Company received a SKPKB which assessed underpayment of corporate income tax for 2018 amounting to Rp6,816,050. The Company paid the tax underpayment on November 6, 2019 and charged the amount as an expense in 2019. The Company has submitted an application for objection letter for SKPKB to the Tax Office on December 17, 2019. On November 17, 2020 the Tax Office rejected the Company's objection request.

On December 17, 2020, the Company obtained SKPKB for the 2019 tax audit which stated that the Company was underpaid amounting to Rp11,536,073. For the tax underpayment, payment has been made in 2021 and charged as an expense in 2020. The Company then submitted an objection letter on March 10, 2021. The Tax Office on December 10, 2021 rejected the Company's objection. On March 7, 2022, the Company then submitted an appeal letter to the Tax Court. The trial process related to the 2019 tax case has been completed and is currently awaiting the Tax Court's decision until the issuance of this report.

On March 29, 2022, the Company obtained SKPKB for the 2020 tax audit which stated that the Company was underpaid amounting to Rp13,942,518. For the tax underpayment, payment has been made in 2022 and charged as an expense in 2020. The Company then submitted an objection letter on June 16, 2022 and until the issuance of this report is still awaiting response from the DGT.

f. Tax Rates

On October 29, 2021, the Government after being approved by DPR issued Law No. 7 year 2021, relating to Harmonization of Tax Regulations, which in chapter income tax stating the corporate income tax rate at 22% for fiscal years 2020-2021 and 20% for fiscal year 2022 onwards.

13. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Liabilitas imbalan kerja karyawan dihitung untuk seluruh karyawan permanen yang direkrut secara langsung oleh Perusahaan ("Direct Hire").

Imbalan Kerja

Imbalan kerja karyawan yang dihitung dalam laporan aktuarial meliputi:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) berupa Manfaat Pensiun bulanan, yang dikelola oleh Dana Pensiun Pertamina (atau DPP), dengan kepesertaan mencakup karyawan aktif permanen, pensiunan/pihak yang berhak menerima dan pensiunan ditunda.
2. Penghargaan Atas Pengabdian (atau PAP) berupa tabel pesangon (atau tabel perkalian upah) yang diatur melalui Peraturan Perusahaan, yang diberikan kepada semua karyawan aktif permanen.
3. Ulang Tahun Dinas (atau UTD). Imbalan ini berupa kelipatan tertentu dari upah setiap kelipatan 5 tahun masa kerja.

Jenis Pendanaan

Program Pensiun Manfaat Pasti didanai melalui pendirian Dana Pensiun Pertamina. Imbalan lainnya tidak didanai (tidak ada dana atau uang yang secara khusus disisihkan ke dana pensiun atau institusi keuangan tertentu untuk membiayai imbalan-imbalan tersebut)

Provisi Imbalan Kerja Karyawan

Tabel berikut ini merangkum komponen-komponen atas beban imbalan kerja neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan jumlah yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas imbalan kerja berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mouritz sesuai dengan laporan tanggal 20 Januari 2023 untuk tahun 2022 dan Kantor Konsultan Aktuaria Riana & Rekan dengan laporan tanggal 22 Maret 2022 untuk tahun 2021, menggunakan metode *projected unit credit*.

	2022	2021
<u>Karyawan PT Pertamina</u>		
<u>Pedev Indonesia</u>		
Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya:		
- PPMP	1.148.518	960.800
- PAP	475.322	466.849
- UTD	18.454	10.625
Liabilitas Imbalan Kerja	1.642.294	1.438.274

13. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Employee benefits liabilities have calculated for all permanent employees who are directly hired by the Company ("the Direct Hire").

Employee Benefits

The employee benefits covered in actuarial report are as follows:

1. Defined Benefit Pension Program (PPMP) in the form of Monthly Pension Benefits, which is managed by Dana Pensiun Pertamina (or DPP), with membership including permanent active workers, retirees/those entitled to receive and deferred retirees.
2. Penghargaan Atas Pengabdian (or PAP) in the form of a severance table/wages multiplication table regulated through a Company Regulation, which is given to all permanently active employees.
3. Ulang Tahun Dinas (or UTD). This benefit eligible for all permanent employees in term of multiple of salary for every multiple 5 year of services.

Funding Type

Defined Benefit Pension Program is funded and managed through the Dana Pensiun Pertamina. Other benefits are not funded (there are no funds or money specifically set aside for pension funds or certain financial institutions to finance these benefits)

Provision for Employee Benefits

The following tables summarize the components of employee benefits expense recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income and amounts recognized in the statement of financial position as employee benefits liability as determined by an independent firm of actuaries Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mouritz in its reports dated January 20, 2023 for 2022 and Kantor Konsultan Aktuaria Riana & Rekan in its reports dated March 22, 2022 for 2021, using the projected unit credit method.

PT Pertamina Pedev Indonesia **Direct Hire -**

Pension and Other Post Employment Benefits:
PPMP -
PAP -
UTD -

Employee Benefits Liabilities

13. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (LANJUTAN)

13. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (CONTINUED)

Provisi Imbalan Kerja Karyawan (Lanjutan)

Provision for Employee Benefits (Continued)

Asumsi-asumsi penting yang digunakan oleh aktuaris dalam laporannya adalah sebagai berikut:

The significant assumptions used by the actuary in its reports are as follows:

	2022	2021	
Tingkat Diskonto	6.90% - 7.15%	6.50% - 7.00%	Discount Rate
Tingkat Kenaikan Gaji	5%	5%	Salary Increase Rate
Tingkat Kematian	TMI 4 (2019)	TMI 4 (2019)	Mortality Table
Tingkat Kecelakaan	5% x TMI 4 (2019)	5% x TMI 4 (2019)	Disability Rate
Tingkat Pensiun	56	56	Retirement Rate

Jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in the statement of financial position are as follows:

	2022	2021	
Nilai kini liabilitas	5.495.434	5.275.879	Present value of obligation
Nilai wajar aset program	(3.853.140)	(3.837.605)	Fair value of plan asset
Liabilitas Imbalan Kerja Neto	1.642.294	1.438.274	Employee Benefit Liabilities Net

Mutasi nilai kini kewajiban adalah sebagai berikut:

The movements in present value of obligation are as follows:

	2022	2021	
Saldo awal	1.438.274	1.566.809	Beginning balance
Iuran program Perusahaan	(153.896)	(189.244)	Company's contribution
Diakui pada laba rugi	217.913	180.800	Recognized in profit or loss
Diakui pada laba komprehensif lain	140.003	(120.091)	Recognized in other comprehensive income
Saldo akhir	1.642.294	1.438.274	Ending balance

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The movements in fair value of plan assets are as follows:

	2022	2021	
Saldo awal	3.837.605	3.802.584	Beginning balance
Iuran perusahaan	153.896	189.244	Company contribution
Perubahan imbalan kerja	(310.517)	(310.772)	Benefit changes
Pendapatan bunga	263.151	240.037	Interest income
Imbal hasil	(90.995)	(83.488)	Return on plan assets
Saldo akhir	3.853.140	3.837.605	Ending balance

13. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (LANJUTAN)

13. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (CONTINUED)

Provisi Imbalan Kerja Karyawan (Lanjutan)

Provision for Employee Benefits (Continued)

Jumlah yang diakui dalam beban usaha adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in operating expenses are as follows:

	2022	2021	
Biaya jasa kini	120.942	158.300	Current service cost
Biaya jasa lalu	--	(72.328)	Past service cost
Biaya bunga	94.705	94.828	Interest cost
Pengukuran kembali atas liabilitas yang diakui sebagai imbalan kerja jangka panjang lainnya	2.266	--	Reamasurement on obligation recognized as other long-term employee benefit
Jumlah	217.913	180.800	Total

Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in other comprehensive income are as follows:

	2022	2021	
(Keuntungan)/kerugian atas perubahan asumsi keuangan	78.998	235.296	(Gain)/loss from changes in financial assumptions
(Keuntungan)/kerugian atas penyesuaian pengalaman	(128.006)	(31.717)	(Gain)/loss from changes in from experience adjustments
Imbal hasil atas aset program	(90.995)	(83.488)	Return on plan assets
Jumlah	(140.003)	120.091	Total

Dampak sensitivitas atas nilai kini liabilitas akibat dari setiap satu persen (1%) perubahan dari asumsi tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The sensitivity impact on present value of obligation at one percentage (1%) point change in the assumed discount rate and salary increase rate as at December 31, 2022 and 2021, would have the following effects:

	2022		2021		
	Kenaikan/ Increase of 1%	Penurunan/ Decrease of 1%	Kenaikan/ Increase of 1%	Penurunan/ Decrease of 1%	
Tingkat diskonto	4.728.285	5.360.413	4.858.738	5.766.670	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5.020.952	5.019.331	5.316.664	5.240.151	Salary increase rate

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS AT DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

14. SHARE CAPITAL

As at December 31, 2022 and 2021, the Company's shareholders are as follows:

	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage Ownership	Modal Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and of Paid up Capital	
PT Pertamina (Persero)	174.875	99,93%	174.875.000	PT Pertamina (Persero)
PT Patra Niaga	125	0,07%	125.000	PT Patra Niaga
Jumlah	175.000	100%	175.000.000	Total

15. PENCADANGAN SALDO LABA DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Tentang Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021 No. 25 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris Marianne V. Hamdani, SH, pemegang saham memutuskan penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2021 sebesar 100% sebagai dividen sebesar Rp295.151.992 dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Dividen telah dibayarkan pada 2022.

15. APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS AND DISTRIBUTION OF NET INCOME

Based on the Deed of Decision of the Company's Shareholders regarding the Use of Net Profit for the Financial Year 2021 No.25 dated July 22, 2022 made by Notary Marianne V. Hamdani, SH, the shareholders decided to use the net profit of the Company for the fiscal year 2021 at 100% as a dividend of Rp295,151,992 of the unappropriated retained earnings. Dividend has been paid in 2022.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Tentang Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020 No. 10 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris Marianne V. Hamdani, SH, pemegang saham memutuskan penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2020 sebesar 80% sebagai dividen sebesar Rp89.280.075 dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Dividen telah dibayarkan pada 2021.

Based on the Deed of Decision of the Company's Shareholders regarding the Use of Net Profit for the Financial Year 2020 No.10 dated July 23, 2021 made by Notary Marianne V. Hamdani, SH, the shareholders decided to use the net profit of the Company for the fiscal year 2020 at 80% as a dividend of Rp89,280,075 of the unappropriated retained earnings. Dividend has been paid in 2021.

16. PENDAPATAN DIVIDEN DARI PENYERTAAN SAHAM

	2022
Pihak Berelasi (Catatan 20)	127.515.487
Jumlah	127.515.487

16. DIVIDEND INCOME FROM INVESTMENT IN SHARES

	2021	
	315.316.418	Related Parties (Note 20)
Jumlah	315.316.418	Total

17. PENDAPATAN BUNGA

	2022
Pihak Berelasi (Catatan 20)	28.305.697
Jumlah	28.305.697

17. INTEREST INCOME

	2021	
	25.977.241	Related Parties (Note 20)
Jumlah	25.977.241	Total

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS AT DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. BEBAN USAHA

18. OPERATING EXPENSE

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Beban Karyawan dan Manajemen Kunci	7.726.046	6.446.336	Employee and Key Management Expenses
Beban Kantor	1.960.756	1.750.942	Office Expenses
Beban Penyusutan	819.053	629.313	Depreciation Expenses
Jumlah	<u>10.505.855</u>	<u>8.826.591</u>	Total

19. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO

19. OTHER INCOME (EXPENSE) - NET

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Beban Lain-lain	(154.183)	(2.838.244)	Other Expenses
Pendapatan Lain-lain	5.460.251	409.219	Other Income
Jumlah	<u>5.306.068</u>	<u>(2.429.025)</u>	Total

20. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

20. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi berdasarkan ketentuan dan kondisi yang disepakati oleh kedua belah pihak.

In conducting its business, the Company has made several transactions with related parties, based on terms and conditions agreed by both parties.

Saldo-saldo dan transaksi-transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The significant balances and transactions with the related parties as at December 31, 2022 and 2021 are as follows:

a. Kas dan Setara Kas (Catatan 4)

a. Cash and Cash Equivalents (Note 4)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Bank			Cash in Banks
Rupiah			Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	467.667.839	739.389.360	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	25.031.278	15.924.541	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.583.481	49.411	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	262.547	311.105	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	240.185	484.664	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Subjumlah	<u>494.785.330</u>	<u>756.159.081</u>	Subtotal
Dollar AS			US Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	133.949	109.048	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	33.226	30.841	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Subjumlah	<u>167.175</u>	<u>139.889</u>	Subtotal
Jumlah Kas pada Bank	<u>494.952.505</u>	<u>756.298.970</u>	Total Cash in Bank

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS AT DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (LANJUTAN) **20. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (CONTINUED)**

a. Kas dan Setara Kas (Catatan 4) (Lanjutan)

	2022
Deposito Berjangka	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	174.800.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	26.250.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	--
Jumlah Deposito Berjangka	201.050.000
Jumlah Kas dan Setara Kas	696.002.505
Presentase dari Jumlah Aset	17,76%

a. Cash and Cash Equivalents (Note 4) (Continued)

	2021	
		Time Deposit
	--	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
	3.950.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
	51.050.000	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Jumlah Deposito Berjangka	55.000.000	Total Time Deposits
Jumlah Kas dan Setara Kas	811.298.970	Total Cash and Cash Equivalents
Presentase dari Jumlah Aset	25,37%	Percentage from Total Assets

b. Piutang Lain-lain (Catatan 5)

	2022
PT Pertamina Geothermal Energy	87.103.938
PT Mitra Tours & Travel	8.590.374
PT Pertamina EP Cepu	--
PT Pertamina Hulu Energi	--
Subtotal	95.694.312
Dikurangi:	
Cadangan Kerugian	
Penurunan Nilai	(8.590.374)
Jumlah - Bersih	87.103.938
Presentase dari Jumlah Aset	2,22%

b. Other Receivables (Note 5)

	2021	
	--	PT Pertamina Geothermal Energy
	8.701.355	PT Mitra Tours & Travel
	26.706.157	PT Pertamina EP Cepu
	6.697.370	PT Pertamina Hulu Energi
Subtotal	42.104.882	Subtotal
Dikurangi:		Less:
Cadangan Kerugian		
Penurunan Nilai	(8.701.355)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah - Bersih	33.403.527	Total - Net
Presentase dari Jumlah Aset	1,04%	Percentage from Total Assets

Piutang lain-lain pihak berelasi pada 31 Desember 2022 dan 2021 merupakan piutang terkait uang muka dividen yang akan diterima oleh Perusahaan sesuai dengan porsi investasi yang dimiliki oleh Perusahaan pada pihak berelasi tersebut. Perusahaan telah menerima pembayaran piutang lain-lain dari PT Pertamina Geothermal Energy pada bulan Januari 2023, dan dari PT Pertamina EP Cepu dan PT Pertamina Hulu Energi masing-masing pada bulan Januari dan Maret 2022.

Other receivables from related parties as at December 31, 2022 and 2021 are receivables related to the advances dividends to be received by the Company in accordance with the portion of investment owned by the Company in these related parties. The Company has received other receivables payments from PT Pertamina Geothermal Energy in January 2023, and from PT Pertamina EP Cepu and PT Pertamina Hulu Energi in January and March 2022, respectively.

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS AT DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (LANJUTAN)	20. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (CONTINUED)		
c. Penyertaan Saham (Catatan 6)	c. Investment in Shares (Note 6)		
	2022	2021	
PT Pertamina Geothermal Energy	2.031.699.240	1.393.105.505	PT Pertamina Geothermal Energy
PT Pertamina EP Cepu	546.468.573	475.877.915	PT Pertamina EP Cepu
PT Tuban Petrochemical Industries	143.696.317	132.846.270	PT Tuban Petrochemical Industries
PT Pertamina Hulu SangaSanga	93.340.869	88.500.560	PT Pertamina Hulu SangaSanga
PT Pertamina Training and Consulting	60.851.835	53.304.628	PT Pertamina Training and Consulting
PT Pertamina Hulu Rokan	58.742.590	47.940.516	PT Pertamina Hulu Rokan
PT Kilang Pertamina Balikpapan	41.215.801	23.837.169	PT Kilang Pertamina Balikpapan
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	38.001.091	28.445.485	PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur
PT Pertamina Lubricants	17.919.583	13.055.210	PT Pertamina Lubricants
PT Pertamina Hulu Indonesia	13.793.192	12.966.667	PT Pertamina Hulu Indonesia
PT Badak Natural Gas Liquefaction	10.299.015	4.287.927	PT Badak Natural Gas Liquefaction
PT Pertamina Hulu Energi	10.184.587	12.164.380	PT Pertamina Hulu Energi
PT Pertamina EP	6.219.539	6.196.386	PT Pertamina EP
PT Patra Badak Arun Solusi	6.066.973	9.622.123	PT Patra Badak Arun Solusi
PT Pertamina Gas	3.211.849	4.064.840	PT Pertamina Gas
PT Mitra Tours & Travel	2.850.494	3.093.949	PT Mitra Tours & Travel
PT Pertamina Drilling Services Indonesia	1.704.074	2.318.688	PT Pertamina Drilling Services Indonesia
PT Pertamina Bina Medika	1.111.266	1.631.916	PT Pertamina Bina Medika
PT Pertamina International Shipping	1.080.703	1.405.086	PT Pertamina International Shipping
PT Kilang Pertamina International	835.580	2.210.210	PT Kilang Pertamina International
PT Pertamina Hulu Attaka	437.395	397.620	PT Pertamina Hulu Attaka
PT Pelita Air Service	124.160	95.789	PT Pelita Air Service
PT Pertamina Trans Kontinental	32.517	31.031	PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertamina Hulu West Ganai	16.772	149.291	PT Pertamina Hulu West Ganai
PT Patra Jasa	12.575	56.604	PT Patra Jasa
PT Pertamina Power Indonesia	12.541	17.937	PT Pertamina Power Indonesia
PT Pertamina Retail	9.344	8.355	PT Pertamina Retail
PT Pertamina Irak Eksplorasi Produksi	1.592	1.132	PT Pertamina Irak Eksplorasi Produksi
PT Pertamina East Natuna	1.250	1.250	PT Pertamina East Natuna
PT Pertamina International Eksplorasi dan Produksi	1.226	1.017	PT Pertamina International Eksplorasi dan Produksi
PT Pertamina Malaysia EP	777	722	PT Pertamina Malaysia EP
PT Pertamina Algeria EP	561	592	PT Pertamina Algeria EP
PT Pertamina Hulu Energi Arun	2	2	PT Pertamina Hulu Energi Arun
PT Pertamina EP Cepu Alas Dara Kemuning	--	--	PT Pertamina EP Cepu Alas Dara Kemuning
Jumlah	3.089.943.883	2.317.636.772	Total
Presentase dari Jumlah Aset	78,84%	72,47%	Percentage from Total Assets

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS AT DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (LANJUTAN)		20. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (CONTINUED)	
d. Pendapatan Bunga yang Masih akan Diterima		d. Accrued Interest Income	
	2022	2021	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	292.813	--	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	37.397	7.316	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	--	58.031	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Jumlah	330.210	65.347	Total
Presentase dari Jumlah Aset	0,01%	0,00%	Percentage from Total Assets
e. Uang Muka Dividen (Catatan 10)		e. Advances Dividend (Note 10)	
	2022	2021	
PT Pertamina Geothermal Energy	23.388.000	--	PT Pertamina Geothermal Energy
PT Pertamina EP Cepu	87.103.938	--	PT Pertamina EP Cepu
Jumlah	110.491.938	--	Total
Presentase dari Jumlah Aset	2,82%	0,00%	Percentage from Total Assets
f. Utang Lain-lain (Catatan 9)		f. Other Payables (Note 9)	
	2022	2021	
PT Pratama Mitra Sejati	27.380	--	PT Pratama Mitra Sejati
PT Pertamina Bina Medika	9.405	--	PT Pertamina Bina Medika
PT Mitra Tours & Travel	--	110.980	PT Mitra Tours & Travel
Jumlah	36.785	110.980	Total
Presentase dari Jumlah Liabilitas	0,00%	0,02%	Percentage from Total Liabilities
Saldo utang lain-lain dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 merupakan utang terkait beban operasional dan beban karyawan.		Balances of other payables with related parties on December 31, 2022 and 2021 are debts related to operating expenses and employee expenses.	

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS AT DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (LANJUTAN)		20. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (CONTINUED)	
g. Pendapatan Dividen dari Penyertaan Saham (Catatan 16)		g. Dividend Income from Investments in Shares (Note 16)	
	2022	2021	
PT Pertamina EP Cepu	61.801.900	83.435.275	PT Pertamina EP Cepu
PT Pertamina Geothermal Energy	34.351.881	--	PT Pertamina Geothermal Energy
PT Trans Javagas Pipeline	18.026.040	16.368.991	PT Trans Javagas Pipeline
PT Pertamina Hulu Rokan	9.069.616	--	PT Pertamina Hulu Rokan
PT Pertamina Hulu Energi	1.367.125	206.668.509	PT Pertamina Hulu Energi
PT Pertamina Training & Consulting	1.141.365	441.000	PT Pertamina Training & Consulting
PT Pertamina Lubricants	883.532	1.015.711	PT Pertamina Lubricants
PT Pertamina EP	513.275	2.058.987	PT Pertamina EP
PT Pertamina Hulu Indonesia	224.674	5.050.985	PT Pertamina Hulu Indonesia
PT Pertamina Gas	79.365	67.630	PT Pertamina Gas
PT Pertamina Bina Medika	31.154	2.372	PT Pertamina Bina Medika
PT Pertamina International Shipping	17.756	203.709	PT Pertamina International Shipping
PT Pertamina Trans Kontinental	7.238	--	PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertamina Retail	320	3.249	PT Pertamina Retail
PT Pertamina Algeria EP	180	--	PT Pertamina Algeria EP
PT Patra Jasa	66	--	PT Patra Jasa
Jumlah	127.515.487	315.316.418	Total
Presentase dari Jumlah Pendapatan Usaha	81,83%	92,39%	Percentage from Total Revenue
h. Pendapatan Bunga (Catatan 17)		h. Interest Income (Note 17)	
	2022	2021	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	24.160.895	5.711.325	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.058.577	4.255.772	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.704.096	924.639	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	382.129	73.397	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	--	15.012.108	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Jumlah	28.305.697	25.977.241	Total
Presentase dari Jumlah Pendapatan Usaha	18,17%	7,61%	Percentage from Total Revenue
i. Remunerasi Karyawan Kunci		i. Key Personnel Remuneration	
	2022	2021	
Gaji, Tunjangan dan Tantiem Direksi	2.439.507	2.295.672	Directors Salaries, Allowance and Tantiem
Honor Komisaris	1.081.662	839.422	Commissioner Honorarium
Jumlah	3.521.169	3.135.094	Total

20. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (LANJUTAN) 20. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (CONTINUED)

j. Hubungan dengan Pihak Berelasi

Sifat dari hubungan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

j. Relationships with Related Parties

The nature of relationships with related parties are as follows:

Pihak-pihak yang Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship
PT Pertamina (Persero)	Pemegang Saham/ Shareholder
PT Pertamina Patra Niaga	Pemegang Saham/ Shareholder
PT Patra Badak Arun Solusi	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pelita Air Service	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina Bina Medika	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina East Natuna	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina EP Cepu Alas Dara Kemuning	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina EP	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina EP Cepu	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina Geothermal Energy	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina Hulu Energi	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina Lubricants	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina Shipping	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Kilang Pertamina International	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Patra Jasa	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina Trans Kontinental	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina Drilling Service Indonesia	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina Hulu Rokan	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina Gas	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina Power Indonesia	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina Retail	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina Training & Consulting	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina Hulu Indonesia	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina Malaysia EP	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina Hulu Energi Arun	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina Irak EP	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina Algeria EP	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina Hulu Attaka	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Mitra Tours & Travel	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Trans Javagas Pipeline	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Kilang Pertamina Balikpapan	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pertamina International Shipping	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Badak NGL	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Tuban Petrochemical Industries	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Pratama Mitra Sejati	Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entity
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entity
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entity
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entity
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entity

21. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Gugatan Mantan Pekerja Pertamina

Pada tanggal 23 Agustus 2018, Perusahaan digugat oleh 127 orang Peserta Tabungan Pegawai Pertamina yang terdaftar dalam individual account per tanggal 15 Juli 2002 dengan register Perkara Nomor 636/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL.

Pada tanggal 20 Februari 2020, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan para mantan pekerja tersebut tidak dapat diterima sehingga Perusahaan dimenangkan dalam perkara tersebut, namun demikian para mantan pekerja tersebut masih melakukan upaya hukum atas putusan pengadilan, melalui banding.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, status perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan banding, dan Perusahaan akan melakukan pengawasan atas pemeriksaan banding melalui kuasa hukum Perusahaan.

21. COMMITMENTS AND CONTINGENCY

Lawsuit of Former Pertamina Employees

On August 23, 2018, the Company was sued by 127 Pertamina Employee Savings Participants registered in an individual account as of 15 July 2002 with case register Number 636 /Pdt.G/2018/ PN JKT.SEL.

On February 20, 2020, the Judges decided that the claims of the former employees could not be accepted so that the case resulted in favour of the Company, however, the former employees are still making legal actions against the court's decision, through appeal to the court.

As at the date of these financial statements, the status of the case is in the process of an appeal examination, and the Company will monitor the appeal examination through the Company's attorney.

22. INFORMASI LAINNYA

- Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan memiliki saldo piutang pembiayaan modal ventura umum masing-masing sebesar Rp127.384.994 dan Rp127.386.494 yang telah diturunkan nilai seluruhnya;
- Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 Perusahaan memiliki saldo investasi surat berharga sebesar Rp212.425.442 yang telah diturunkan nilai seluruhnya;

22. OTHER INFORMATION

- *As at December 31, 2022 and 2021, the Company has general venture capital financing receivable amounted to Rp127,384,994 and Rp127,386,494, respectively, that has been fully impaired.*
- *As at December 31, 2022 and 2021 the Company has investment in securities balance amounted to Rp212,425,442 that has been fully impaired.*

23. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Perusahaan terekspos terhadap berbagai risiko keuangan, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga). Tujuan dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengelola risiko dasar dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Perusahaan.

23. RISK MANAGEMENT POLICY

The Company's activities expose it to a variety of financial risks, which are credit risk, liquidity risk and market risk (including the effects of foreign currency exchange rates risk, and interest rates risk). The objectives of the Company's risk management are to identify, measure, monitor and manage basic risks in order to safeguard the Company's long-term business continuity and to minimise potential adverse effects on the financial performance of the Company.

23. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (LANJUTAN)

23. RISK MANAGEMENT POLICY (CONTINUED)

a. Risiko Pasar

a. Market Risk

(i) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

(i) Foreign Exchange Risk

Perusahaan menanggung risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi dan saldo yang didenominasi dalam mata uang selain Rupiah. Mata uang yang menimbulkan risiko ini terutama adalah Dolar AS. Risiko nilai tukar mata uang asing dikelola sebaik mungkin dengan lindung nilai alami yaitu menyeimbangkan nilai kekayaan dan kewajiban masing-masing mata uang.

The Company incurs foreign currency risk on transactions and balances that are denominated in currencies other than Indonesian Rupiah. The currency giving rise to this risk is primarily the US Dollar. Exposure to foreign currency risks is managed as far as possible by natural hedges of matching assets and liabilities denominated in foreign currencies.

Sejauh ini, Perusahaan tidak memiliki liabilitas mata uang Dolar AS dan belum menganggap perlu untuk melakukan upaya lindung nilai mata uang Dolar AS terhadap Rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai aset dan liabilitas moneter Perusahaan dalam denominasi Dolar AS adalah sebagai berikut:

So far, the Company does not have its liabilities denominated in US Dollar, and it still has not considered hedging US Dollar to Rupiah. At December 31, 2022 and 2021, the value of the Company's monetary assets denominated in US Dollar are as follows:

	2022	2021	
Aset			Assets
Kas dan Setara Kas	167.175	139.889	Cash and Cash Equivalents
Piutang Lain-lain	87.103.938	--	Other Receivables
Jumlah Aset Moneter	87.271.113	139.889	Total Monetary Assets
Ekuivalen dengan Mata Uang Asing	5.597,17	9,80	Equivalents in Foreign Currencies

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba Perusahaan atas perubahan nilai mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

The table below summarises the sensitivity of the Company's profit to changes in foreign exchange rates as at December 31, 2022 and 2021:

	2022		
	Peningkatan/ Increased by 100bps	Penurunan/ Decreased by 100bps	
Pengaruh terhadap Laba Bersih Setelah Pajak	872.711	(872.711)	Impact Net Income After Tax

23. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (LANJUTAN)

23. RISK MANAGEMENT POLICY (CONTINUED)

a. Risiko Pasar (Lanjutan)

a. Market Risk (Continued)

(i) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing (Lanjutan)

(i) Foreign Exchange Risk (Continued)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba Perusahaan atas perubahan nilai mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021: (Lanjutan)

The table below summarises the sensitivity of the Company's profit to changes in foreign exchange rates as at December 31, 2022 and 2021: (Continued)

	2021		
	Peningkatan/ Increased by 100bps	Penurunan/ Decreased by 100bps	
Pengaruh terhadap Laba Bersih Setelah Pajak	1.398	(1.398)	Impact Net Income After Tax

(ii) Risiko Tingkat Suku Bunga

(ii) Interest Rate Risk

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Perusahaan tidak mempunyai liabilitas kepada pihak ketiga yang terekspos dengan fluktuasi tingkat suku bunga pinjaman.

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company does not have an obligation to third parties with interest rate fluctuation exposures.

b. Risiko Kredit

b. Credit Risk

Risiko kredit terutama berasal dari kas pada bank, piutang lain-lain dan pendapatan bunga yang masih akan diterima. Untuk transaksi kas dan bank, Perusahaan telah menempatkan dananya pada bank yang memiliki kualitas kredit yang baik.

Credit risk arises from cash in banks, other receivables and accrued interest income. For cash in bank, the Company has placed its bank balances and restricted cash in banks which have good credit quality.

Manajemen berkeyakinan akan kemampuannya untuk terus mengontrol dan mempertahankan eksposur risiko kredit pada tingkat yang dapat diterima.

Management believes in its ability to keep control and maintain credit risk exposure at an acceptable level.

c. Risiko Likuiditas

c. Liquidity Risk

Pada saat ini Perusahaan dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Perusahaan berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup. Selain itu, Perusahaan memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

At present the Company expects to pay all liabilities at their contractual maturity. In order to meet such cash commitments, the Company expects its operating activities to generate sufficient cash inflows. In addition, the Company holds liquid financial assets that are available to meet liquidity needs.

Risiko likuiditas muncul pada saat terjadi gangguan terhadap arus kas Perusahaan yang disebabkan oleh risiko likuiditas aset maupun risiko likuiditas pendanaan. Perusahaan setiap saat selalu menjaga agar dana yang tersedia di deposito dalam jumlah yang masih aman untuk memenuhi liabilitas Perusahaan yang jatuh tempo. Sampai dengan saat ini Perusahaan selalu dapat melaksanakan pembayaran liabilitas secara tepat waktu.

Liquidity risk occurs when cash flow problems arise in the Company, which are caused by asset liquidity risks or funding liquidity risks. Therefore, the Company always maintains its funds in deposit for an amount that is sufficient to meet the maturing liabilities of the Company. Until now, the Company has always settled its obligations in a timely manner.

23. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (LANJUTAN)

23. RISK MANAGEMENT POLICY (CONTINUED)

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

c. Liquidity Risk (Continued)

Tabel di bawah ini menerangkan profil jatuh tempo kewajiban keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

The table below summarise the maturity profile of the company's financial liabilities based on undiscounted contractual payments:

2022					
	Kurang dari Satu Tahun/ Less than One Year	Lebih dari Satu Tahun dan Kurang dari Lima Tahun/ More than One Year and Not Later than Five Years	Lebih dari Lima Tahun/ More than Five Years	Jumlah/ Total	
Utang Lain-lain	198.422	--	--	198.422	Other Payables
Liabilitas Sewa	345.587	802.578	--	1.148.165	Lease Liabilities
Beban Akrua	6.743.648	--	--	6.743.648	Accrued Expenses
Jumlah	7.287.657	802.578	--	8.090.235	Total
2021					
	Kurang dari Satu Tahun/ Less than One Year	Lebih dari Satu Tahun dan Kurang dari Lima Tahun/ More than One Year and Not Later than Five Years	Lebih dari Lima Tahun/ More than Five Years	Jumlah/ Total	
Utang Lain-lain	2.316.747	--	--	2.316.747	Other Payables
Liabilitas Sewa	118.117	673.290	--	791.407	Lease Liabilities
Beban Akrua	11.456.797	--	--	11.456.797	Accrued Expenses
Jumlah	13.891.661	673.290	--	14.564.951	Total

d. Estimasi Nilai Wajar

d. Fair Value Estimation

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

Aset dan liabilitas keuangan lancar Perusahaan diharapkan akan dapat direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu dekat, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar. Oleh karena itu, nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya.

The Company's current financial assets and liabilities are expected to be realised or settled in the near term, except for financial assets which are measured at fair value. Therefore, their carrying amounts approximate their fair value.

23. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (LANJUTAN)

d. Estimasi Nilai Wajar (Lanjutan)

Perusahaan menganalisis aset keuangan yang diukur pada nilai wajar. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset dan liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Hirarki nilai wajar Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

23. RISK MANAGEMENT POLICY (CONTINUED)

d. Fair Value Estimation (Continued)

The Company analyses its financial assets which are measured at fair value. The different levels of valuation methods have been defined as follows:

- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);
- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and
- Inputs for the assets or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable input) (Level 3).

The Company's fair value hierarchy as at December 31, 2022 and 2021 is as follows:

2022					
	Jumlah/ Total	Harga Pasar yang Dikuotasi untuk Aset dan Liabilitas yang Sama (Tingkat 1)/ Quoted Prices in Active Markets for Identical Assets or Liabilities (Level 1)	Input yang Signifikan dan Dapat Diobservasi Secara Langsung (Tingkat 2)/ Significant and Observable Inputs, Direct or Indirectly (Level 2)	Input yang Signifikan tetapi Tidak dapat Diobservasi (Tingkat 3)/ Significant Unobservable Inputs (Level 3)	
Penyertaan Saham	3.134.209.357	--	--	3.134.209.357	Investments in Shares
Jumlah	3.134.209.357	--	--	3.134.209.357	Total
2021					
	Jumlah/ Total	Harga Pasar yang Dikuotasi untuk Aset dan Liabilitas yang Sama (Tingkat 1)/ Quoted Prices in Active Markets for Identical Assets or Liabilities (Level 1)	Input yang Signifikan dan Dapat Diobservasi Secara Langsung (Tingkat 2)/ Significant and Observable Inputs, Direct or Indirectly (Level 2)	Input yang Signifikan tetapi Tidak dapat Diobservasi (Tingkat 3)/ Significant Unobservable Inputs (Level 3)	
Penyertaan Saham	2.351.989.459	--	--	2.351.989.459	Investments in Shares
Jumlah	2.351.989.459	--	--	2.351.989.459	Total

24. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 23 Februari 2023.

24. MANAGEMENT RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the financial statements which were authorized for issuance on February 23, 2023.



PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA

Kantor Pusat

Gedung Wisma Tugu Raden Saleh
Lantai 4. Jl. Raden Saleh No.44
Cikini Menteng - Jakarta Pusat 10330

Telepon & Fax

(021) 391 1857
(021) 391 1859

Email

pdv@pdv.co.id

Website

<https://pdv.co.id>

